



LAPORAN PENELITIAN

**CITRA
PENDIDIKAN
NASIONAL**

Oleh:
Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd.
Sutopo, MT.
Apri Nuryanto, MT.

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2014



LAPORAN PENELITIAN
CITRA PENDIDIKAN NASIONAL

Oleh:
Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd.
Sutopo, MT.
Apri Nuryanto, MT.

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2014

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang citra pendidikan nasional yang dinilai dari aspek-aspek: (a) ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk masyarakat, (b) keterjangkauan pelayanan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK, (c) kualitas pelayanan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK, (d) kesetaraan pelayanan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK, (e) keterjaminan pelayanan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Teknik pengumpulan data dengan mengedarkan kuesioner langsung dan FGD ke responden. Penelitian dilakukan di 10 provinsi dengan responden terdiri atas dosen, guru, komite sekolah, mahasiswa, tokoh masyarakat, pengurus organisasi masyarakat, pengusaha, dan PNS, dengan jumlah total responden sebanyak 335 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) secara umum citra pendidikan bila dilihat dari ketersediaan pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dinilai tinggi, kecuali untuk pendidikan keluarga dan pendidikan anak cerdas. Sebanyak 93% responden menyatakan bahwa ketersediaan SD untuk masyarakat tinggi, 90% responden menyatakan ketersediaan PAUD tinggi, 87% responden menyatakan ketersediaan SMP tinggi, 82% responden menyatakan ketersediaan SMA tinggi, 72% responden menyatakan ketersediaan SMK tinggi, 74% responden menyatakan ketersediaan Pendidikan Agama Islam tinggi, 61% responden menyatakan ketersediaan Pendidikan Tinggi Teknik tinggi, responden menyatakan ketersediaan Pendidikan Tinggi IPA tinggi, responden menyatakan ketersediaan Pendidikan Tinggi Teknik tinggi, 59% responden menyatakan ketersediaan Pendidikan Nonformal tinggi, 43% responden menyatakan ketersediaan Pendidikan untuk Anak Cacat tinggi, 24% responden menyatakan ketersediaan pendidikan untuk keluarga tinggi, dan 23% responden menyatakan ketersediaan pendidikan untuk anak cerdas untuk keluarga tinggi; (b) Citra pendidikan bila dilihat dari keterjangkauan masyarakat dalam memperoleh pendidikan juga dinilai tinggi. Sebanyak 75% responden menyatakan bahwa masyarakat dapat menjangkau untuk memperoleh pendidikan di PAUD, sebanyak 90% terjangkau untuk sekolah di SD, sebanyak 84% terjangkau untuk sekolah di SMP, sebanyak 76% terjangkau untuk sekolah di SMA, sebanyak 68% terjangkau untuk sekolah di SMK. Bila dilihat dari lokasi sekolah, 84% responden menyatakan terjangkau untuk mencapai lokasi SD; (c) Citra pendidikan bila dilihat dari kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat juga mendapat penilaian tinggi. Sebanyak 85% responden menyatakan pelayanan pendidikan di PAUD tinggi, 85% responden menyatakan pelayanan di SD tinggi, 87% responden menyatakan pelayanan di SMP tinggi, 86% responden menyatakan pelayanan di SMA tinggi, dan 82% responden menyatakan pelayanan di SMK tinggi; (d). Selanjutnya bila citra pendidikan nasional dilihat dari keterjaminan masyarakat untuk memperoleh pendidikan juga dinilai tinggi. Sebanyak 93% responden menyatakan bahwa, masyarakat terjamin memperoleh pendidikan di PAUD, 94% responden menyatakan terjamin untuk memperoleh pendidikan di SD, 91% responden menyatakan terjamin untuk memperoleh pendidikan di SMP, 87% responden menyatakan terjamin untuk memperoleh pendidikan di SMA, 99% responden menyatakan terjamin untuk memperoleh pendidikan di SMK.

Kata Kunci: citra pendidikan, ketersediaan, kualitas, kesetaraan, keterjaminan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II	6
KAJIAN TEORI	6
A. Deskripsi Teori	6
1. Kebijakan.....	6
2. Pendidikan	8
3. Kualitas Pendidikan	10
4. Pendidikan sebagai Pelayanan Jasa	12
5. Karakteristik Jasa	14
6. Citra Pendidikan.....	14
7. Proses Pembentukan Citra	17
BAB III	18
METODE PENELITIAN	18
A. Metode Penelitian.....	18
B. Populasi dan sampel.....	18
C. Teknik pengumpulandata.....	19
D. Instrumen Penelitian	19
E. Analisis Data	20
BAB IV	21
HASIL PENELITIAN	21
A. SAMPEL PENELITIAN	21

B. DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	25
1. Ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk masyarakat secara nasional	25
2. Keterjangkauan masyarakat memperoleh pelayanan pendidikan	47
3. Kualitas Pelayanan Pendidikan	57
4. Kesetaraan pelayanan pendidikan.....	168
5. Keterjaminan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	224
BAB V	232
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	232
A. KESIMPULAN	232
B. REKOMENDASI	233
DAFTAR PUSTAKA.....	235

A. Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia dalam membangun pendidikan di Indonesia berpegang pada salah tujuan bangsa Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia ke empat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan tujuan yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dalam batang tubuh konstitusi itu diantaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31 dan Pasal 32, juga mengamanatkan, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional yang terbaru ini diwujudkan dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Dalam undang-undang no 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut dinyatakan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat difahami bahwa pendidikan itu harus disadari arti pentingnya, dan direncanakan secara sistematis, agar suasana belajar dan proses pembelajaran berjalan secara optimal. Dengan terbentuknya suasana dan proses pembelajaran tersebut, peserta didik akan aktif mengembangkan potensi sesuai dengan bakat dan minatnya. Melalui berkembangnya potensi peserta didik, mereka akan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Selanjutnya pada pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa, “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan melalui jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Terdapat tiga jalur pendidikan yaitu, jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Selanjutnya jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan dan suatu satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Jenis pendidikan meliputi, pendidikan umum, kejuruan, vokasi, professional, akademik, keagamaan dan khusus.

Upaya mencapai setiap tujuan pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis dilakukan secara terarah, bertahap dan berkesinambungan. Terarah berarti setiap program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan, diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Bertahap, berarti pencapaian tujuan dan pelaksanaan program-program pendidikan dilakukan secara bertahap dalam rentang waktu lima tahunan. Berkesinambungan berarti terdapat keterkaitan yang bersifat maju berkelanjutan antara satu tahap dengan tahap berikutnya.

Dalam rangka memberikan peta jalan dalam pengelolaan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun rencana pembangunan jangka panjang, sampai dengan tahun 2025, dengan Visi “menghasilkan insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (insan kamil/Insan paripurna)”. Insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual dan cerdas kinestetis.

Usaha mencapai visi 2025 tersebut dibagi menjadi empat tahapan pembangunan pendidikan nasional dengan tema yang berbeda tetapi berkesinambungan pada tiap tahapnya. Tema pembangunan pendidikan pada tahun 2005-2009 adalah Peningkatan Kapasitas & Modernisasi, tahun 2010-2014 adalah Penguatan Pelayanan, tahun 2015-2019 Penguatan Daya Saing Regional

dan tahun 2020-2025 adalah Penguatan DayaSaing Internasional. Dengan demikian pada saat ini kemendiknas telah memasuki pembangunan pendidikan jangka menengah tahun kedua, yaitu tahun 2010-2014 dengan tema Penguatan Pelayanan.

Berdasarkan visi tersebut, maka sistem, organisasi dan berbagai sumber daya, baik sumber daya manusiamaupun sumber daya yang lain perlu dikelola secara optimal, agar dapat berfungsi secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Pelayanan yang berkualitas adalah apabila dapat memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan dari konsumen atas pelayanan tersebut atau *“good service quality as meeting or exceeding what customers expect from the service”*. Dengan pelayanan yang berkualitas dalam berbagai komponen pendidikan, diharapkan akan terbangun image atau citra pendidikan nasional yang lebih baik.

Berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan telah ditetapkan dan diimplementasikan, dengan harapan kualitas pendidikan dapat berangsur-angsur meningkat pada gradasi yang tinggi. *The Education for All Development Index* (EDI) atau Indeks Pendidikan untuk Semua menunjukkan Indonesia menempati peringkat 64 dari 120 negara tahun 2012. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan yang baik dari peringkat 69 dari 127 negara pada tahun 2011. Guna lebih meningkatkan indeks tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui berbagai upaya. Di antaranya adalah terus melanjutkan sosialisasi program kegiatan melalui koordinasi nasional: penyempurnaan Forum Koordinasi Nasional (Forkonas) PUS; penyusunan, penerbitan, dan penyebarluasan naskah best practice dan naskah success story PUS; penyusunan laporan PUS dan laporan EDI tingkat provinsi dan nasional; mengikuti pertemuan PUS tingkat regional dan internasional; dan kegiatan lainnya yang relevan.

Dengan meningkatnya indeks pendidikan untuk semua (*The Education for All Development Index* (EDI) diharapkan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pendidikan akan meningkat, dengan demikian citra pendidikan nasional di mata masyarakat juga akan meningkat. Namun sampai saat ini citra pendidikan nasional di mata masyarakat belum diketahui secara pasti, oleh karena itu pada kesempatan ini akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana citra pendidikan nasional di mata masyarakat.

B. Batasan Masalah

Lingkup pendidikan di Indonesia sangat luas, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Citra pendidikan nasional dibatasi untuk jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar (SD, SMP), dan menengah (SMA, SMK).
2. Citra pendidikan diukur berdasarkan ketersediaan pelayanan pendidikan, keterjangkauan pelayanan pendidikan, kualitas pelayanan pendidikan, kesetaraan pelayanan pendidikan, dan keterjaminan masyarakat memperoleh pelayanan pendidikan.

C. Rumusan Masalah

Secara umum permasalahan penelitian ini adalah “Bagaimanakah citra pendidikan nasional di mata masyarakat”? Rumusan masalah ini dapat dirinci sebagai berikut.

1. Bagaimanakah citra pendidikan yang dinilai dari ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk masyarakat?
2. Bagaimanakah citra pendidikan yang dinilai dari keterjangkauan pelayanan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK?
3. Bagaimanakah citra pendidikan yang dinilai dari kualitas pelayanan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK?
4. Bagaimanakah citra pendidikan yang dinilai dari kesetaraan pelayanan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK?
5. Bagaimanakah citra pendidikan yang dinilai dari keterjaminan pelayanan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui citra/image masyarakat terhadap pendidikan nasional. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang:

1. Citra pendidikan yang dinilai dari ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk masyarakat.
2. Citra pendidikan yang dinilai dari keterjangkauan pelayanan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK.
3. Citra pendidikan yang dinilai dari kualitas pelayanan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK.

4. Citra pendidikan yang dinilai dari kesetaraan pelayanan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK.
5. Citra pendidikan yang dinilai dari keterjaminan pelayanan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam membuat kebijakan tentang peningkatan kualitas pelayanan sehingga citra pendidikan di mata masyarakat dapat meningkat.
2. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota, bermanfaat untuk mengkoordinasi dan memberikan prioritas menentukan program untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan citra pendidikan di daerah.
3. Bagi sekolah bermanfaat untuk menentukan strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan citra sekolah.

A. Deskripsi Teori

Berikut ini dideskripsikan kajian teori yang terkait dengan fokus penelitian. Karena penelitian citra pendidikan nasional merupakan penelitian kebijakan, maka teori yang dideskripsikan meliputi teori kebijakan, pendidikan, pelayanan dan citra pendidikan.

1. Kebijakan

Setiap aktivitas manajemen baik manajemen organisasi pada umumnya dan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya, akan selalu membuat kebijakan (*policy*) dan perencanaan (*planning*). Webster (1997) menyatakan bahwa *policy* adalah: “*wisdom in the management affairs, also definite course or method of action selected to guide and determine present and future decisions*” Kebijakan adalah metode bertindak yang dipilih sedemikian rupa, sehingga memberi arahan dalam membuat keputusan-keputusan baik untuk keperluan sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

Selanjutnya Rue & Byars (2000) menyatakan bahwa *policy* adalah: *general guide to action that direct the attainment of objectives. Policy does not tell organizational members exactly what to do, but they do establish the boundaries within which they must operate*”. Kebijaksanaan adalah merupakan arahan untuk bertindak dalam rangka pencapaian tujuan. *Policy* tidak menunjukkan secara pasti anggota organisasi untuk bertindak, tetapi hanya memberikan batas-batas (ruang lingkup) untuk bertindak. Sementara itu Coulter & Robbins (1999) menyatakan bahwa “*policy is a guide that establish parameters for making decisions*”. Kebijakan adalah merupakan panduan yang berupa parameter-parameter yang dapat digunakan untuk membuat keputusan.

George C Edward III (1978) memberikan definisi kebijaksanaan negara adalah “*Policy is government say and do, or do not do. It is the goals or purposes of government program.*” Kebijaksanaan adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijaksanaan negara itu berupa sasaran atau tujuan dari program-program pemerintah.

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, mengatasi masalah tertentu, melakukan tujuan

tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara (Mustapadidjaja, 2002: 5).

Dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (1991) dinyatakan bahwa, kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan dapat dibedakan ke dalam kebijaksanaan internal, yaitu kebijaksanaan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat aparatur pemerintah, dan kebijaksanaan eksternal, yaitu yang mengikat masyarakat. Kebijaksanaan dapat berbentuk lisan maupun tertulis. Namun untuk kepastian pelaksanaan, suatu kebijaksanaan sebaiknya ditetapkan secara tertulis.

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang kebijaksanaan tersebut maka di sini dapat dikemukakan bahwa, kebijaksanaan adalah pernyataan seseorang atau kelompok yang berkuasa secara lisan maupun tertulis, tentang arah dan tujuan organisasi serta tindakan yang ditetapkan untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dalam mencapai tujuan.

Nigro and Nigro dalam Irfan Islamy (1992) tidak membedakan antara pembuatan kebijakan (policy making) dan pengambilan keputusan (decision making). "No absolute distinction can be made between policy making and decision making, because every policy determination is decision. Policies, however, establish course of action that guide the numerous decision, in implementing the objective chosen". Tidak ada perbedaan yang mutlak yang dapat dibuat antara pembuatan kebijakan dengan pembuatan keputusan, karena setiap penentuan kebijaksanaan adalah merupakan suatu keputusan. Tetapi kebijaksanaan-kebijaksanaan membentuk serangkaian tindakan-tindakan yang mengarahkan banyak bermacam-macam keputusan yang dibuat dalam rangka melaksanakan tujuan-tujuan yang dipilih.

Kebijaksanaan yang baik mempunyai indikator tertentu. Dengan indikator berikut setiap pimpinan unit kerja dalam membuat kebijakan dapat berpedoman dan mengarah pada indikator tersebut. Salah satu indikator kebijaksanaan yang baik adalah, bahwa dalam membuat kebijaksanaan harus didasarkan pada data yang lengkap, valid, reliabel, obyektif dan up to date. Data dengan kriteria tersebut, hanya dapat diperoleh melalui penelitian. Butir-butir indikator kebijaksanaan yang baik adalah sebagai berikut.

- a. Proses pembuatan kebijaksanaan menggunakan prosedur/aturan yang

telah disepakati,

- b. Proses pembuatan kebijaksanaan dilakukan secara transparan, dan demokratis dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat yang akan melaksanakan dan dikenai kebijaksanaan tersebut,
- c. Proses pembuatan kebijaksanaan berpedoman pada kebijaksanaan di atasnya, dan tidak bertentangan dengan kebijaksanaan yang setingkat,
- d. Proses pembuatan kebijaksanaan didasarkan pada data yang lengkap, valid, reliabel, obyektif dan *up to date*,
- e. Kebijaksanaan yang telah dirumuskan memiliki nilai *multiply effect* yang berkelanjutan,
- f. Kebijaksanaan yang dirumuskan berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,
- g. Rumusan kebijaksanaan jelas, mudah diimplementasikan dan mudah dikontrol,
- h. Kebijaksanaan yang dirumuskan feasible (memperhatikan dengan sumber daya yang tersedia),
- i. Kebijaksanaan yang dirumuskan bersifat adil, tidak memihak pada kepentingan kelompok tertentu.

2. Pendidikan

Seperti telah dikemukakan dalam undang-undang no 20 tentang sistem pendidikan Nasional bahwa, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikemukakan di sini bahwa, penyelenggaraan pendidikan itu perlu disadari arti pentingnya, sehingga diperlukan perencanaan yang komprehensif dan sistematis, agar proses belajar dan pembelajaran dapat berlangsung optimal, sehingga peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Dengan berkembangnya potensi, maka peserta didik akan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mampu mengendalikan diri dalam kehidupan di masyarakat, memiliki kepribadian tangguh, memiliki kecerdasan yang tinggi, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara

Pendidikan bukan sekedar persoalan teknik pengolahan informasi, bahkan bukan sekedar penerapan “teori belajar” di kelas, tetapi menurut Jerome Bruner

dalam (Sayful Sagala, 2008), pendidikan merupakan usaha yang kompleks untuk menyesuaikan kebudayaan dengan kebutuhan anggotanya, dan menyesuaikan anggotanya dengan cara mereka mengetahui kebutuhan kebudayaan. Selanjutnya dinyatakan bahwa pendidikan memiliki peran ganda dan seimbang dalam masyarakat industri, yakni memberi pengetahuan dasar dan kecakapan baru yang sangat diperlukan oleh dunia kerja serta melindungi kemajuan dan kebebasan melalui kebebasan akademik dan pendidikan individu dalam masyarakat demokratis.

Dilihat dari fungsi dan tujuannya, maka pendidikan dapat digolongkan sebagai kehidupan karena memiliki sifat untuk berubah, baik masukannya (input), prosesnya maupun outputnya. Masukan adalah segala hal (riil dan abstrak) yang diperlukan untuk berlangsungnya proses, misalnya yang riil adalah peserta didik, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana dan dana, sedangkan yang abstrak misalnya, legalisasi dan regulasi pendidikan, kurikulum, organisasi, administrasi dan kultur sekolah. Tertentu.

Menurut Makmun (2003) pendidikan dapat mencakup seluruh proses hidup dan segenap bentuk interaksi individu dengan lingkungannya, baik secara formal, nonformal dan informal dalam rangka mewujudkan dirinya sesuai dengan tahapan tugas perkembangannya secara optimal, sehingga ia dapat mencapai suatu kedewasaan. Pendidikan itu normative yang bersumber pada tugas-tugas perkembangan dan kriteria kedewasaan dan selanjutnya menemukan potensi tersebut yang berkaitan dengan suatu bakat dan minatnya

Dalam arti yang terbatas, pendidikan dapat merupakan salah satu proses interaksi belajar mengajar dalam bentuk formal yang dikenal sebagai pengajaran (instructional) yang diperankan oleh guru dan peserta didik. Proses pendidikan ini akan menemukan orang berbakat dan member kesempatan memperluas dan mengembangkan dan bakatnya.

Seperti telah dikemukakan bahwa Indonesia diselenggarakan melalui jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Terdapat tiga jalur pendidikan yaitu, jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Selanjutnya jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan dan suatu satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Jenis pendidikan meliputi, pendidikan umum, kejuruan, vokasi, profesional, akademik, keagamaan dan khusus.

Dalam jalur pendidikan formal terdapat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

3. Kualitas Pendidikan

Dewasa ini mutu bukan hanya menjadi masalah dan kepedulian dalam bidang bisnis, melainkan juga di bidang-bidang lainnya. Seperti pemerintahan, pelayanan sosial, pendidikan bahkan bidang keamanan dan ketertiban (Nan Syaodih, dkk 2008).

Banyak masalah mutu dihadapi dalam dunia pendidikan, seperti mutu lulusan, mutu pengajaran, bimbingan dan latihan dari guru, serta mutu profesionalisme dan kinerja guru. Mutu-mutu tersebut terkait dengan para pimpinan pendidikan, dana, sarana dan prasarana, iklim sekolah, lingkungan

sekolah serta dukungan dari pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan. Semua kelemahan mutu tersebut berdampak pada mutu lulusan.

Mutu lulusan yang rendah dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti lulusan tidak dapat melanjutkan studi, tidak dapat menyelesaikan pada pendidikan yang lebih tinggi, tidak dapat bekerja karena tidak diterima di dunia kerja, atau diterima bekerja tetapi tidak berprestasi, dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan tidak produktif. Lulusan yang tidak produktif akan menjadi beban masyarakat, menambah biaya kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta memungkinkan menjadi warga terisih dari masyarakat

Goetsch and Davis (2006) memberikan definisi tentang kualitas adalah sebagai berikut. *“Quality is dynamic state associate with product, service, people, process, and environments that metts or exceeds expectations”*. Kualitas merupakan pernyataan yang dinamis yang terkait dengan produk, pelayanan, orang, proses dan lingkungan yang dapat memenuhi atau melebihi yang diharapkan.

Selanjutnya Ishikawa (2006) mendefinisikan kualitas sebagai berikut. (a) *quality and customer satisfaction are the same things and (b) quality is a broad concept that goes beyond just product quality to also include the quality of people, processes, and every other aspect of the organization*. Artinya kualitas memiliki dua dimensi yaitu: (a) kualitas dan kepuasan pelanggan merupakan hal yang sama, karena bila pelanggan mendapatkan kualitas barang atau jasa, maka akan memperoleh kepuasan. (b) Kualitas merupakan konsep yang luas yang bukan hanya kualitas produk, tetapi juga kualitas orang, proses kerja, dan setiap aspek dari organisasi.

Kotler (2003: 64) menyatakan bahwa kualitas adalah sebagai berikut. *“Quality is the totality of features and characteristic of product service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs”*. Kualitas adalah keseluruhan gambaran dan karakteristik barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi kepuasan dan kebutuhan. Sementara itu Depdiknas (2000: 12) menyatakan bahwa *“Secara umum, mutu (kualitas) adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat”*

Dalam hal kualitas pelayanan (Service Quality) Parasuraman dan L Berry(1990 : 18) menyatakan bahwa *“good service quality as meeting or exceeding what customers expect from the service”*. Pelayanan yang baik adalah apabila

dapat memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan dari konsumen atas pelayanan tersebut.

Goetsch D.L dan Davis D.L (2002:3) mendefinisikan mutu sebagai keadaan dinamik yang diasosiasikan dengan produk, jasa, orang, proses, dan lingkungan yang mencapai atau melebihi harapan. Dijelaskan “keadaan dinamik” merujuk pada kenyataan bahwa apa yang dianggap bermutu dapat dan sering berubah sejalan dengan berlakunya waktu dan pergantian keadaan lingkungan. Unsur “produk, jasa, orang, proses, dan lingkungan”, menunjukkan mutu tidak hanya berlaku untuk produk dan jasa yang disediakan, melainkan juga orang dan proses yang menyediakan produk dan jasa itu serta lingkungan di mana produk dan jasa tersebut disediakan. Karena sifatnya yang dinamis Dawood (2007:125) menjelaskan *“Quality is elusive concept difficult to define; neither consultants nor business professionals agree on a universal definition. Part of the difficulty appears in expressing the philosophy and vision of quality in meaningful words and concepts.* Oleh karena itu mutu telah didefinisikan para ahli secara beragam.

4. Pendidikan sebagai Pelayanan Jasa

William J. Stanton (1982 : 529) memberikan definisi jasa adalah sebagai berikut.

“Service are those separately identifiable, essentially intangible activities that provide want-satisfaction, and that are not necessarily tied to that sale of a product or another service. To produce of service may or may no require the use of tangible goods. How ever, when such use is required, there is not transfer of the title (permanent ownership) to these tangible.

Jasa adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi secara terpisah tidak berwujud, ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan. Jasa dapat dihasilkan dengan menggunakan benda-benda berwujud atau tidak. Selanjutnya Philip Kotler (2000: 428) mendefinisikan jasa adalah sebagai berikut; *“a service is any act or performance that one party can offer to another that is essentially intangible and does nor result in the ownership of anything. It production may or may not be tied to a physical product”.* Hal ini berarti bahwa jasa itu tidak berwujud dan tidak memberikan kepemilikan sesuatu apapun kepada pembelinya. Sedangkan proses produksinya bisa bergantung atau tidak bergantung sama sekali kepada fisis produk.

Kemudian Christopher Lovelock (2002 : 6) memberikan definisi jasa adalah sebagai berikut. “ A service is an act or performance offered by one party to another. Although the process may be tied to a physical product, the performance is essentially intangible”. Jasa adalah merupakan tindakan atau performan yang dilakukan oleh suatu kelompok usaha dengan yang lain. Walaupun prosesnya dapat berupa produk fisik, namun tindakannya tidak berwujud. Selanjutnya dinyatakan bahwa “service are economic activities that create value and provide benefit for customer at specific times and place”. Jasa merupakan aktivitas ekonomis yang berupa nilai yang memiliki keuntungan bagi pelanggan dalam waktu dan tempat tertentu.

Buchari Alma (2003 : 3) mengemukakan bahwa “ bisnis jasa sekarang ini mengalami kemajuan luar biasa, di negara maju mengalami 77% dari GDP. Contoh Amerika, pangsa pasar dari berbagai macam kegiatan ekonomi adalah : jasa keuangan, asuransi 20%; perdagangan grosir dan eceran 17%; transportasi, komunikasi 8%; jasa kesehatan 5%; jasa bisnis 5%, jasa pemerintah 12% dan jasa lainnya 10%. Total 77%.

Selanjutnya harus dibedakan antara service dan customer service. Pengertian service seperti yang telah dikemukakan, sedangkan customer service adalah jasa atau layanan yang diberikan kepada konsumen dalam hubungannya dengan produk tertentu. Misalnya layanan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan konsumen seperti : mencari pesanan, mengatasi keluhan-keluhan, perbaikan-perbaikan reparasi dan lain-lain. Biasanya tak ada pembayaran yang dibebankan pada konsumen untuk customer service ini.

Menurut Buchari Alma (2003 : 4), dalam membentuk citra hubungan yang baik dengan para pelanggan ada perbedaan prinsip antara jasa dengan barang yaitu :

- a. Barang berwujud, jasa tidak berwujud. Jasa tidak dapat disimpan/digudangkan, tidak bisa dipatenkan, dipajangkan dan diperlihatkan
- b. Barang ada standar, jasa bersifat heterogen. Kepuasan terhadap jasa, sangat tergantung pada orang-orang yang melayani, kualitas banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor uncontrollable, tak ada jaminan jasa yang diberikan persis cocok dengan jasa yang direncanakan sebelumnya
- c. Produksi barang terpisah dengan waktu konsumsi, sedangkan jasa bersamaan dengan waktu produksi dan konsumsi. Konsumsi ikut berpartisipasi dalam transaksi, jasa sulit diproduksi massal

- d. Barang bersifat Non Perishable, jasa bersifat Perishable adalah sulit mensinkronkan antara penawaran dan permintaan jasa. Jasa tak bisa dijual kemudian dan jasa tak bisa diretur.

5. Karakteristik Jasa

Edward W. Wheatley dalam Buchari Alma (2003 : 5) mengemukakan perbedaan antara jasa dan barang adalah sebagai berikut.

- a. Pembelian jasa, sangat dipengaruhi oleh motif yang didorong oleh emosi
- b. Jasa bersifat tidak berwujud, berbeda dengan barang yang berwujud, dapat dilihat, dirasa, dicium, memiliki berat, ukuran dan sebagainya
- c. Barang dapat disimpan, sedangkan jasa tidak dapat disimpan
- d. Ramalan permintaan dalam marketing jasa. Untuk menghadapi masa-masa puncak, dapat dilatih tenaga khusus
- e. Adanya masa puncak yang sangat padat, merupakan masalah tersendiri bagi marketing jasa. Pada masa puncak, ada kemungkinan layanan yang diberikan oleh produsen sangat minim, misalnya waktunya dipersingkat agar dapat melayani langganan sebanyak mungkin. Jika mutu jasanya tetap dikontrol, karena banyak langganan merasa tidak puas.
- f. Usaha jasa sangat mementingkan unsur manusia
- g. Distribusinya bersifat langsung, dari produsen ke konsumen

Selanjutnya dikemukakan sifat-sifat khusus dalam pemasaran jasa sebagai berikut.

- a. Menyesuaikan dengan selera konsumen
- b. Keberhasilan pemasaran jasa dipengaruhi oleh jumlah pendapatan penduduk
- c. Pada pemasaran jasa tidak ada pelaksanaan fungsi penyimpanan
- d. Mutu jasa dipengaruhi oleh benda berwujud sebagai perlengkapan dalam pelayanan
- e. Saluran distribusi dalam marketing jasa tidak begitu penting
- f. Harga jasa sangat bervariasi sesuai dengan karakteristik masyarakat sekitarnya

6. Citra Pendidikan

Citra merupakan kesan atau impresi seseorang terhadap sesuatu. Citra merupakan persepsi yang terbentuk dalam benak manusia. Pembentukan

persepsi manusia menurut K. Sereno & Edward M Bodaken yang dikutip dari buku “Ilmu Komunikasi suatu pengantar”, Deddy Mulyana, terdiri dari tiga aktivitas yaitu seleksi, organisasi & interpretasi. Seleksi yang dimaksudkan adalah sensasi dan atensi terhadap stimulus (fisik & psikologis) yang ditangkap oleh indra manusia, kemudian diorganisasikan atau digabungkan dengan stimulus pengetahuan serta pengalaman masa lalu. Penggabungan itu lalu diinterpretasikan maknanya.

Menurut Frank Jefkin, citra diartikan sebagai kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. Selanjutnya dalam ilmu Psikologi Komunikasi citra diartikan sebagai penggambaran tentang realitas dan tidak harus sesuai dengan realitas, citra adalah dunia menurut persepsi.

Dari definisi-defini tersebut diatas maka citra itu pada intinya bisa disimpulkan:

- a. Kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan
- b. Citra merupakan kesan atau impresi seseorang terhadap sesuatu.
- c. Citra merupakan persepsi yang terbentuk dalam benak manusia
- d. Citra adalah pencapaian tujuan dari kegiatan PR, Citra sesuatu yang abstrak tidak dapat diukur dalam ukuran nominal, tapi dapat dirasakan, dan bisa diciptakan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka PR sebagai devisi yang menjalankan fungsi manajemen yang salah satu tugasnya adalah membentuk image/citra baik oleh khalayak eksternal maupun khalayak internal maka disini peranan PR sangat penting. Citra yang ada dalam perusahaan / lembaga / organisasi tidaklah sama maka selanjutnya bawah ini disebutkan beberapa jenis image atau citra yang bisa timbul atau tercipta dalam suatu organisasi menurut Frank Jefkins (1996:17-20), yaitu:

- a. Citra Bayangan

Citra bayangan adalah citra yang dianut oleh orang-orang dalam (biasanya pimpinan) mengenai pandangan orang luar terhadap organisasi/perusahaannya. Citra ini cenderung positif dan bersifat fantasi. Namun karena ketiadaan informasi yang lengkap, maka citra yang diperoleh itu belum tentu tepat.

b. Citra yang berlaku

Citra yang berlaku adalah citra yang melekat pada orang lain terhadap organisasi/perusahaan. Citra ini sering tidak sesuai kenyataan, karena semata terbentuk karena pengalaman atau pengetahuan orang lain yang belum tentu memadai. Citra ini cenderung negatif.

c. Citra yang diharapkan

Adalah citra yang diinginkan oleh manajemen namun tidak selalu sama dengan citra sebenarnya. Biasanya citra yang diharapkan adalah lebih baik dari citra sebenarnya.

d. Citra organisasi

Citra pendidikan juga sering disebut sebagai citra lembaga yaitu citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, jadi bukan citra atas produk dan pelayanannya.

e. Citra majemuk

Citra majemuk adalah citra yang dibentuk oleh masing-masing orang di dalam suatu perusahaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya dan juga tidak sama dengan citra organisasi atau perusahaan secara keseluruhan.

Selanjutnya Frank Jefkin juga menjelaskan secara singkat citra itu bisa dikategorikan atas:

- a. The mirror image (cerminan citra), yaitu bagaimana dugaan (citra) manajemen terhadap publik eksternal dalam melihat perusahaannya.
- b. The Current image (citra masih hangat), yaitu citra yang terdapat pada publik eksternal, yang berdasarkan pengalaman atau miskinnya informasi dan pemahaman publik esternal
- c. The wish image (citra yang diinginkan), yaitu manageman menginginkan pencapaian prestasi tertentu.
- d. The multiple image (citra yang berlapis), yaitu sejumlah individu, kantor cabang atau perwakilan perusahaan yang dapat membentuk citra tertentu yang belum tentu sesuai dengan keseragaman citra seluruh organisasi atau perusahaan.

Dari pembagian jenis citra itu maka bisa kita simpulkan bahwa citra itu dapat muncul atau diduga oleh manajemen itu sendiri, dibuat oleh masyarakat, diinginkan oleh organisasi dan citra yang berlapis atau berbeda-beda.

7. Proses Pembentukan Citra

Citra adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengetiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan. Untuk mengetahui citra seseorang terhadap objek dapat diketahui dari sikapnya terhadap objek tersebut. Solomon dalam Rakhmat menyatakan semua sikap bersumber pada organisasi kognitif-pada informasi dan pengetahuan yang kita miliki. Tidak akan ada teori dan sikap atau aksi sosial yang tidak didasarkan pada penyelidikan tentang dasar-dasar kognitif. Efek kognitif dari komunikasi sangat mempengaruhi proses pembentukan citra seseorang. Citra terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang diterima seseorang. Komunikasi tidak secara langsung menimbulkan perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara kita mengorganisasikan citra kita tentang lingkungan.

Proses pembentukan citra dalam struktur kognitif yang sesuai dengan pengertian sistem komunikasi dijelaskan oleh John S. Nimpoeno, dalam laporan penelitian tentang tingkah laku konsumen, seperti yang dikutip Danasaputra sebagai berikut: "Publik relation digambarkan sebagai input-output, proses intern dalam model ini adalah pembentukan citra, sedangkan input adalah stimulus yang diberikan dan output adalah tanggapan atau perilaku tertentu. Citra itu sendiri digambarkan melalui persepsi kognisi-motivasi-sikap.

Berdasarkan pemahaman mengenai pembentukan persepsi atau pencitraan, maka seringkali pembentukan citra lebih bersifat subyektif dan tidak sesuai dengan realitas yang ada. Oleh karena itu, banyak organisasi kemudian tidak cukup menjalankan program komunikasinya untuk pembentukan citra, melainkan lebih kepada pembentukan reputasi organisasi. Reputasi yang berasal dari kata bahasa Inggris Reputation memiliki arti nama baik. Tujuan program komunikasi PR pada akhirnya tidak hanya membangun atau menciptakan image/citra positif namun juga membangun kepercayaan terhadap public sehingga mereka percaya dengan apa yang dilakukan organisasi adalah yang terbaik dan mengharumkan namanya. Reputasi pada akhirnya dibentuk dari pembuktian yang kuat mengenai apa yang dilakukan organisasi adalah memberikan yang terbaik bagi public sarasannya.

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Kerlinger (2000) mengemukakan bahwa, penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. David Kline (1985) menyatakan bahwa penelitian survei pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Walaupun metode survei ini tidak memerlukan kelompok kontrol seperti halnya pada metode eksperimen, namun generalisasi yang dilakukan bisa lebih akurat bila digunakan sampel yang representative.

B. Populasi dan sampel

Untuk mengetahui citra pendidikan nasional di mata masyarakat; teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner lewat internet, dan pengumpulan data lapangan. Oleh karena itu populasi dan sampel sumber data penelitian yang menggunakan internet adalah seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mampu menggunakan internet. Selanjutnya sampel sumber data penelitian yang dikumpulkan dengan terjun langsung ke lapangan adalah Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Guru, Komite Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK; dosen PTN dan PTS; pengamat pendidikan, organisasi profesi, pemuka agama dari 15 provinsi. Peta sampel sumber data ditunjukkan pada tabel 3.1. Berdasarkan tabel 3.1 tersebut jumlah seluruh sampel sumber data = 10.80

TABEL 3. 1. JUMLAH SAMPEL MENURUT PROPINSI

Nama Provinsi	Responden						Jml
	KS	Guru	Dosen	Was	Komite	Tokoh Masy	
Sumatera Utara	12	20	12	4	4	20	72
Sumatera Barat	12	20	12	4	4	20	72
Jawa Barat	12	20	12	4	4	20	72
DIY	12	20	12	4	4	20	72
Jawa Timur	12	20	12	4	4	20	72
Jawa Tengah	12	20	12	4	4	20	72
Kalimantan Barat	12	20	12	4	4	20	72
Kalimantan Timur	12	20	12	4	4	20	72
Sulawesi Utara	12	20	12	4	4	20	72
Sulawesi Selatan	12	20	12	4	4	20	72
Maluku Utara	12	20	12	4	4	20	72
Nusa Tenggara Barat	12	20	12	4	4	20	72
Nusa Tenggara Timur	12	20	12	4	4	20	72
Bali	12	20	12	4	4	20	72
Papua	12	20	12	4	4	20	72
Jumlah	180	300	180	60	60	300	1080

C. Teknik pengumpulandata

Seperti telah dikemukakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui citra pendidikan nasional, menggunakan dua teknik pengumpulan data utama, yaitu mengedarkan kuesioner dengan internet dan mengedarkan kuesioner dan wawancara dengan terjun langsung ke lapangan melalui tatap muka.

D. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data baik yang dilakukan dengan menggunakan internet, maupun terjun ke lapangan menggunakan instrumen. Instrumen berbentuk kuesioner terbuka dan tertutup. Instrumen yang terbuka digunakan untuk mengali persepsi dan pendapat masyarakat tentang citra pendidikan nasional secara kualitatif. Sedangkan instrumen tertutup digunakan untuk mengukur sehingga diperoleh data kuantitatif tentang citra pendidikan di Indonesia.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh menggunakan kuesioner tertutup dianalisis secara kuantitatif dengan statistik deskriptif, yang meliputi perhitungan rata-rata, persentasi dan komparasi selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik, sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan.

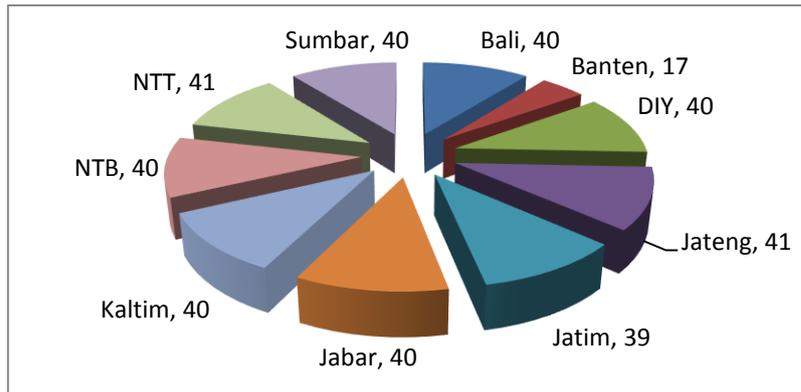
A. SAMPEL PENELITIAN

Sampel penelitian citra pendidikan Indonesia terdiri dari 10 propinsi terpilih dengan sumber data penelitian yang dikumpulkan langsung ke lapangan dengan responden Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Guru, Komite Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK; dosen PTN dan PTS; pengamat pendidikan, organisasi profesi, dan pemuka agama. Secara nasional jumlah sampel tiap provinsi tersaji pada Tabel 4.1. Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa total sampel secara nasional berjumlah 378 responden dengan komposisi sebaran sampel propinsi Bali sebanyak 40 orang, Banten 17 orang, DIY 40 orang, Jateng 41 orang, Jatim 39 orang, Jabar 40 orang, Kaltim 40 orang, NTB 40 orang, NTT 41 orang, dan Sumbar 40 orang.

TABEL 4. 1. DISTRIBUSI SEBARAN SAMPEL PENELITIAN PER PROVINSI

Provinsi	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Bali	40	10,6	10,6	10,6
Banten	17	4,5	4,5	15,1
DIY	40	10,6	10,6	25,7
Jateng	41	10,8	10,8	36,5
Jatim	39	10,3	10,3	46,8
Jabar	40	10,6	10,6	57,4
Kaltim	40	10,6	10,6	68,0
NTB	40	10,6	10,6	78,6
NTT	41	10,8	10,8	89,4
Sumbar	40	10,6	10,6	100,0
Total	378	100,0	100,0	

Jika dilihat dari rata-rata jumlah sampel tiap provinsi adalah sebanyak 40 orang, dengan jumlah sampel terkecil berasal dari propinsi banten sebanyak 17 atau sekitar 4,5% dari jumlah sampel secara keseluruhan. Grafik sebaran sampel tiap propinsi dapat disajikan pada Gambar 4.1.

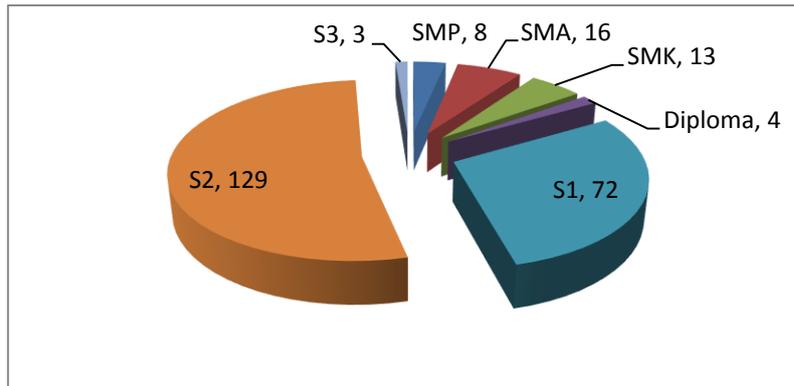


GAMBAR 4. 1. DISTRIBUSI SEBARAN SAMPEL PENELITIAN

Apabila dilihat dari latar belakang pendidikan responden penelitian, responden dengan pendidikan SMP sebanyak 8 orang (2,1%), SMA (4,2%), SMK 13 orang (3,4%), Diploma 4 orang (1,1%), Sarjana 72 orang (19%), S2 129 orang (34,1%), S3 (3 orang (0,8%) dan lainnya sebanyak 245 orang (64,8%). Data responden penelitian berdasarkan latar belakang pendidikan tersaji pada Tabel 4.2 dan Grafik 4.2

TABEL 4. 2. RESPONDEN PENELITIAN BERDASARKAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Pendidikan	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SMP	8	2,1	3,3	3,3
SMA	16	4,2	6,5	9,8
SMK	13	3,4	5,3	15,1
Diploma	4	1,1	1,6	16,7
S1	72	19,0	29,4	46,1
S2	129	34,1	52,7	98,8
S3	3	,8	1,2	100,0
Lain-lain	245	64,8	100,0	

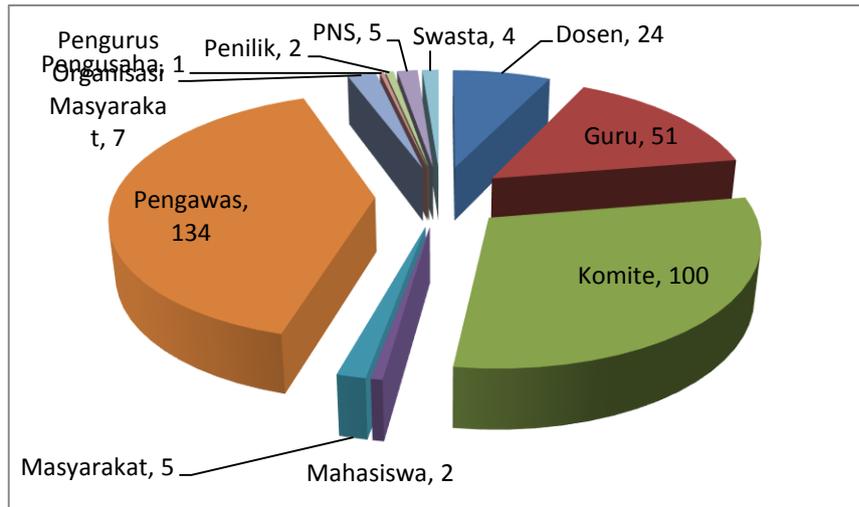


GAMBAR 4. 2. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN RESPONDEN

Berdasarkan profesi, responden penelitian ini terdiri dari profesi dosen sebanyak 24 orang (6,3%), Guru 51 orang (13,5%), Komite 100 orang (26,5%), Mahasiswa 2 orang (0,5%), masyarakat umum 5 orang (1,3%), pengurus organisasi masyarakat 7 orang (1,9%), pengusaha 1 orang (0,3%), dan pengawas 2 orang (0,5%).

TABEL 4. 3. RESPONDEN PENELITIAN BERDASARKAN PROFESI

Pekerjaan	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Dosen	24	6,3	7,2	7,2
Guru	51	13,5	15,2	22,4
Komite	100	26,5	29,9	52,2
Mahasiswa	2	,5	,6	52,8
Masyarakat	5	1,3	1,5	54,3
Pengawas	136	35,9	40,5	94,8
Pengurus Organisasi Masyarakat	7	1,9	2,1	96,9
Pengusaha	1	,3	,3	97,2
PNS	5	1,3	1,5	98,8
Swasta	4	1,1	1,2	100,0
Total	335	88,6	100,0	

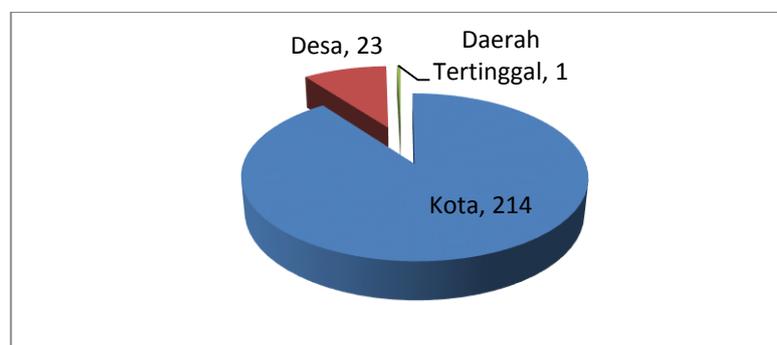


GAMBAR 4. 3. PROFESI RESPONDEN PENELITIAN

Jika dilihat dari kategori tempat tinggal responden yang terbagi atas perkotaan, pedesaan dan daerah tertinggal, sebanyak 56,6% responden tinggal di daerah perkotaan, 6,1% bertempat tinggal di daerah pedesaan dan sisanya sebesar 0,3% tinggal di daerah tertinggal. Data responden berdasarkan tempat tinggalnya tersaji pada Tabel 4.4 dan Grafik 4.4.

TABEL 4. 4. RESPONDEN PENELITIAN BERDASARKAN TEMPAT TINGGAL

Tempat Tinggal	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Kota	214	56,6	89,9	89,9
Desa	23	6,1	9,7	99,6
Daerah Tertinggal	1	,3	,4	100,0
Total	238	63,0	100,0	



GAMBAR 4. 4. TEMPAT TINGGAL RESPONDEN PENELITIAN

B. DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

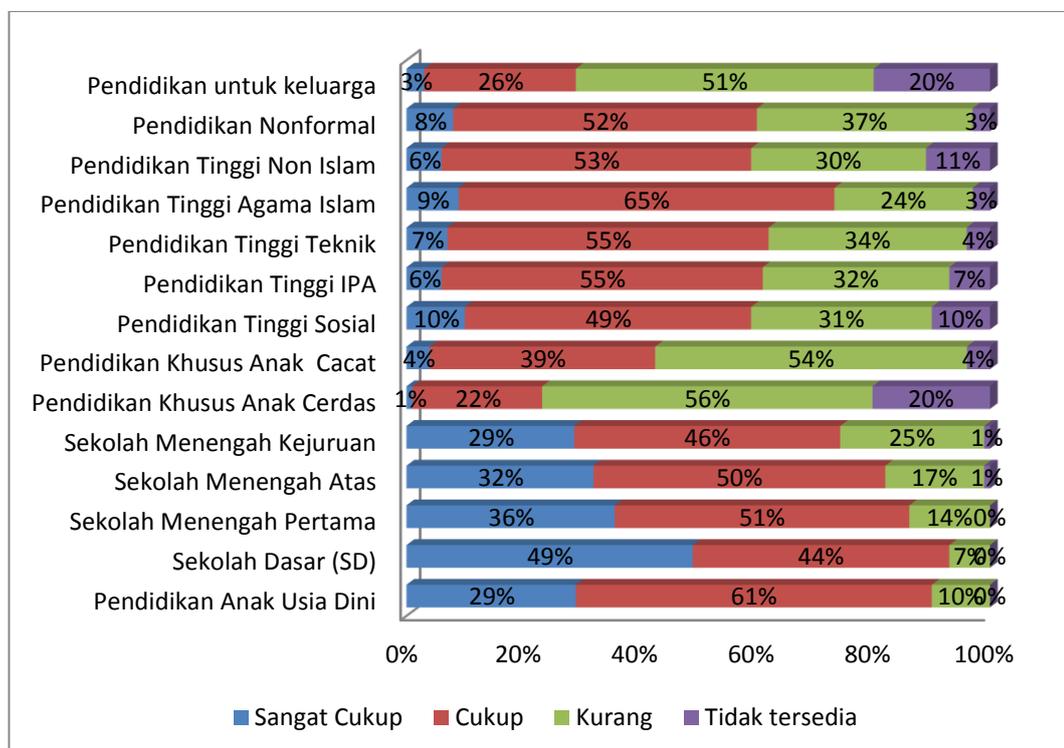
1. Ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk masyarakat secara nasional

Data persepsi responden terhadap ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan di Indonesia digali dari 14 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.5. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat cukup” sampai dengan “tidak tersedia”. Data ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa ketersediaan pendidikan anak usia dini sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan tidak tersedia, SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan belum tersedia, SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan belum tersedia, SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (82%), dan sebagian kecil (18%) menyatakan belum tersedia, SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (75%), dan sebagian kecil (25%) menyatakan belum tersedia.

TABEL 4. 5. KETERSEDIAAN JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN SECARA NASIONAL (N= 378)

No.	Ketersediaan Pendidikan Untuk Masyarakat	% responden menyatakan			
		Sangat Cukup	Cukup	Kurang	Tidak tersedia
1	Pendidikan Anak Usia Dini	29%	61%	10%	0%
2	Sekolah Dasar (SD)	49%	44%	7%	0%
3	Sekolah Menengah Pertama	36%	51%	14%	0%
4	Sekolah Menengah Atas	32%	50%	17%	1%
5	Sekolah Menengah Kejuruan	29%	46%	25%	1%
6	Pendidikan Khusus Anak Cerdas	1%	22%	56%	20%
7	Pendidikan Khusus Anak Cacat	4%	39%	54%	4%
8	Pendidikan Tinggi Sosial	10%	49%	31%	10%
9	Pendidikan Tinggi IPA	6%	55%	32%	7%
10	Pendidikan Tinggi Teknik	7%	55%	34%	4%
11	Pendidikan Tinggi Agama Islam	9%	65%	24%	3%
12	Pendidikan Tinggi Non Islam	6%	53%	30%	11%
13	Pendidikan Nonformal	8%	52%	37%	3%
14	Pendidikan untuk keluarga	3%	26%	51%	20%
	Rata-rata	16%	47%	30%	6%

Selanjutnya untuk ketersediaan pendidikan khusus anak cerdas, sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (76%), dan sebagian kecil (14%) menyatakan sudah tersedia, pendidikan khusus anak cacat sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (58%), dan sebagian kecil (42%) menyatakan sudah tersedia, Pendidikan Tinggi Sosial sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (59%), dan sebagian kecil (41%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi IPA sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (61%), dan sebagian kecil (39%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Teknik sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (62%), dan sebagian kecil (38%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Agama Islam sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (59%), dan sebagian kecil (41%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Non Islam sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (59%), dan sebagian kecil (41%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Nonformal sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (60%), dan sebagian kecil (40%) menyatakan belum tersedia, dan Pendidikan untuk keluarga sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (71%), dan sebagian kecil (29%) menyatakan sudah tersedia.



GAMBAR 4. 5. KETERSEDIAAN JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN MENURUT PERSEPSI SELURUH RESPONDEN

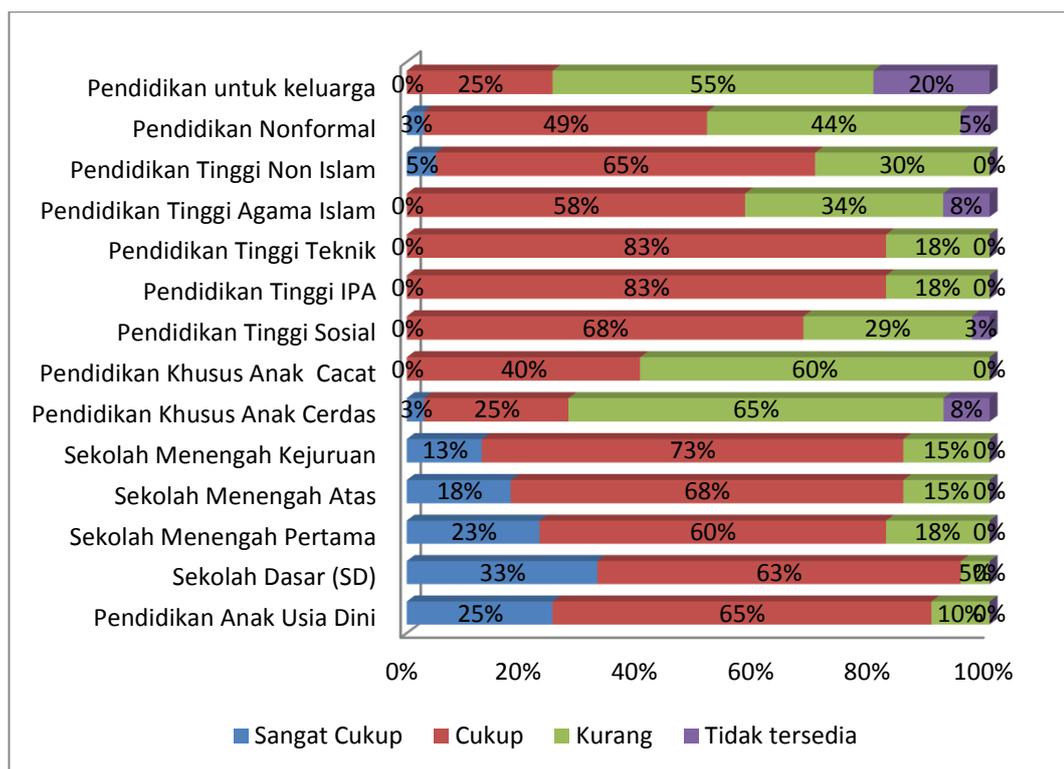
Data persepsi responden terhadap ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan di provinsi Bali digali dari 14 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.6. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat cukup” sampai dengan “tidak tersedia”. Data ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa ketersediaan pendidikan anak usia dini sebagian besar responden (90%) menyatakan sudah cukup, dan sebagian kecil (10%) menyatakan tidak tersedia, SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (96%), dan sebagian kecil (4%) menyatakan belum tersedia, SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (83%), dan sebagian kecil (17%) menyatakan belum tersedia, SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (86%), dan sebagian kecil (14%) menyatakan belum tersedia, SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (86%), dan sebagian kecil (14%) menyatakan belum tersedia.

TABEL 4. 6. KETERSEDIAAN JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN PROVINSI BALI(N= 40)

No.	Ketersediaan Pendidikan Untuk Masyarakat	% responden menjawab			
		Sangat Cukup	Cukup	Kurang	Tidak tersedia
1	Pendidikan Anak Usia Dini	25%	65%	10%	0%
2	Sekolah Dasar (SD)	33%	63%	5%	0%
3	Sekolah Menengah Pertama	23%	60%	18%	0%
4	Sekolah Menengah Atas	18%	68%	15%	0%
5	Sekolah Menengah Kejuruan	13%	73%	15%	0%
6	Pendidikan Khusus Anak Cerdas	3%	25%	65%	8%
7	Pendidikan Khusus Anak Cacat	0%	40%	60%	0%
8	Pendidikan Tinggi Sosial	0%	68%	29%	3%
9	Pendidikan Tinggi IPA	0%	83%	18%	0%
10	Pendidikan Tinggi Teknik	0%	83%	18%	0%
11	Pendidikan Tinggi Agama Islam	0%	58%	34%	8%
12	Pendidikan Tinggi Non Islam	5%	65%	30%	0%
13	Pendidikan Nonformal	3%	49%	44%	5%
14	Pendidikan untuk keluarga	0%	25%	55%	20%
	Rata-rata	9%	59%	30%	3%

Selanjutnya untuk ketersediaan pendidikan khusus anak cerdas, sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (73%), dan sebagian kecil (27%) menyatakan sudah tersedia, pendidikan khusus anak cacat sebagian besar

responden menyatakan belum tersedia (60%), dan sebagian kecil (40%) menyatakan cukup tersedia, Pendidikan Tinggi Sosial sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (68%), dan sebagian kecil (32%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi IPA sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (83%), dan sebagian kecil (17%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Teknik sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (83%), dan sebagian kecil (17%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Agama Islam sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (58%), dan sebagian kecil (42%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Non Islam sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (70%), dan sebagian kecil (30%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Nonformal sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (52%), dan sebagian kecil (48%) menyatakan belum tersedia, dan Pendidikan untuk keluarga sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (75%), dan sebagian kecil (25%) menyatakan sudah tersedia.



GAMBAR 4. 6. KETERSEDIAAN JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN PROVINSI BALI

Data persepsi responden terhadap ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan di provinsi Banten digali dari 14 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.7. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari

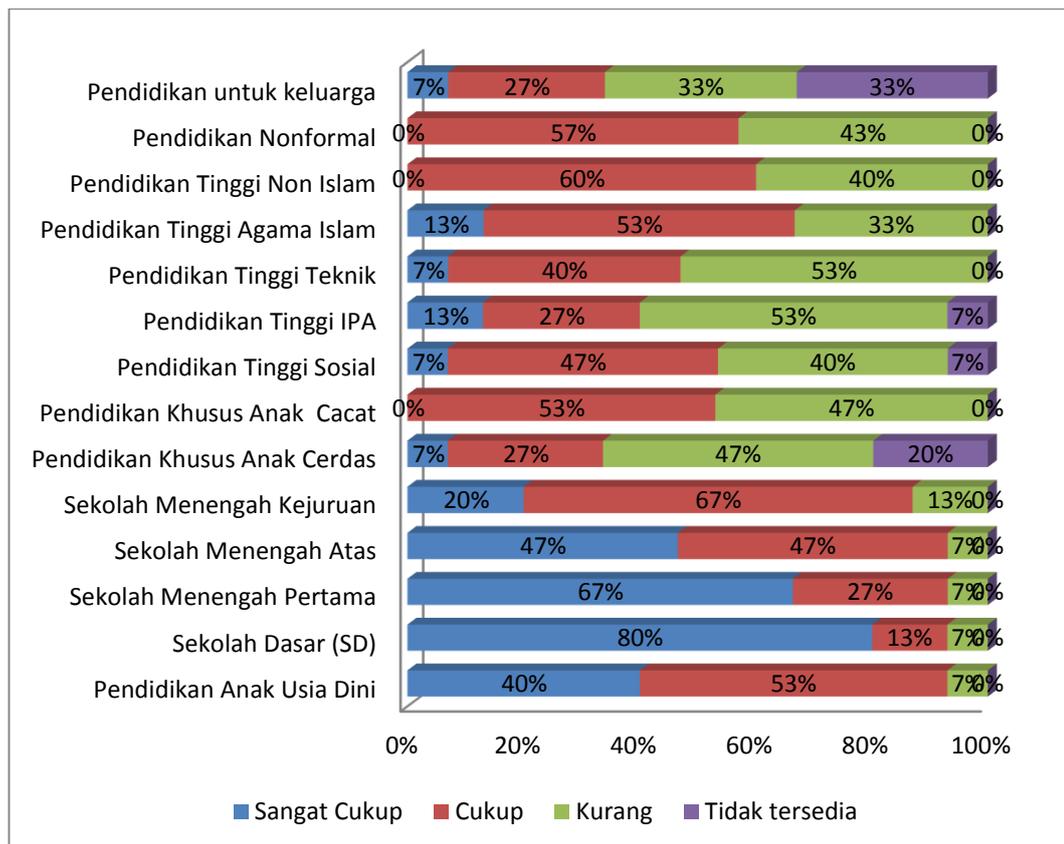
“sangat cukup” sampai dengan “tidak tersedia”. Data ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa ketersediaan pendidikan anak usia dini sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan tidak tersedia, SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan belum tersedia, SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan belum tersedia, SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan belum tersedia, SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan belum tersedia.

TABEL 4. 7. KETERSEDIAAN JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN(N= 17)

No.	Ketersediaan Pendidikan Untuk Masyarakat	% responden menyatakan			
		Sangat Cukup	Cukup	Kurang	Tidak tersedia
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	40%	53%	7%	0%
2.	Sekolah Dasar (SD)	80%	13%	7%	0%
3.	Sekolah Menengah Pertama	67%	27%	7%	0%
4.	Sekolah Menengah Atas	47%	47%	7%	0%
5.	Sekolah Menengah Kejuruan	20%	67%	13%	0%
6.	Pendidikan Khusus Anak Cerdas	7%	27%	47%	20%
7.	Pendidikan Khusus Anak Cacat	0%	53%	47%	0%
8.	Pendidikan Tinggi Sosial	7%	47%	40%	7%
9.	Pendidikan Tinggi IPA	13%	27%	53%	7%
10.	Pendidikan Tinggi Teknik	7%	40%	53%	0%
11.	Pendidikan Tinggi Agama Islam	13%	53%	33%	0%
12.	Pendidikan Tinggi Non Islam	0%	60%	40%	0%
13.	Pendidikan Nonformal	0%	57%	43%	0%
14.	Pendidikan untuk keluarga	7%	27%	33%	33%
	Rata-rata	22%	43%	31%	5%

Selanjutnya untuk ketersediaan pendidikan khusus anak cerdas diprovinsi Banten, sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (67%), dan sebagian kecil (33%) menyatakan sudah tersedia, pendidikan khusus anak cacat sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (53%), dan sebagian kecil

(47%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Sosial sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (54%), dan sebagian kecil (46%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi IPA sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (60%), dan sebagian kecil (40%) menyatakan sudah tersedia, Pendidikan Tinggi Teknik sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (53%), dan sebagian kecil (47%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Agama Islam sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (66%), dan sebagian kecil (34%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Non Islam sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (60%), dan sebagian kecil (40%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Nonformal sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (57%), dan sebagian kecil (43%) menyatakan belum tersedia, dan Pendidikan untuk keluarga sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (66%), dan sebagian kecil (34%) menyatakan sudah tersedia.



GAMBAR 4. 7. KETERSEDIAAN JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN

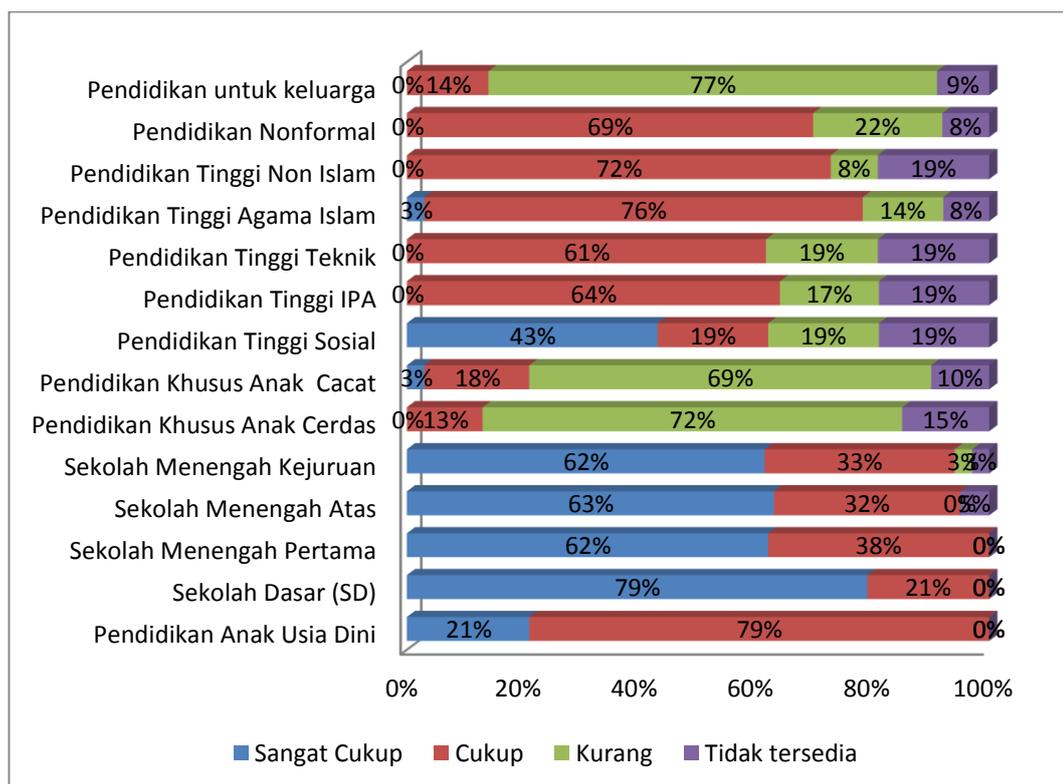
Data persepsi responden terhadap ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan di provinsi DIY digali dari 14 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.7. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat cukup” sampai dengan “tidak tersedia”. Data ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa ketersediaan pendidikan anak usia dini sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan tidak tersedia, SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan belum tersedia, SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan belum tersedia, SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan belum tersedia, SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan belum tersedia.

TABEL 4. 8. KETERSEDIAAN JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN PROVINSI DIY (N=40)

No.	Ketersediaan Pendidikan Untuk Masyarakat	% responden menyatakan			
		Sangat Cukup	Cukup	Kurang	Tidak tersedia
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	21%	79%	0%	0%
2.	Sekolah Dasar (SD)	79%	21%	0%	0%
3.	Sekolah Menengah Pertama	62%	38%	0%	0%
4.	Sekolah Menengah Atas	63%	32%	0%	5%
5.	Sekolah Menengah Kejuruan	62%	33%	3%	3%
6.	Pendidikan Khusus Anak Cerdas	0%	13%	72%	15%
7.	Pendidikan Khusus Anak Cacat	3%	18%	69%	10%
8.	Pendidikan Tinggi Sosial	43%	19%	19%	19%
9.	Pendidikan Tinggi IPA	0%	64%	17%	19%
10.	Pendidikan Tinggi Teknik	0%	61%	19%	19%
11.	Pendidikan Tinggi Agama Islam	3%	76%	14%	8%
12.	Pendidikan Tinggi Non Islam	0%	72%	8%	19%
13.	Pendidikan Nonformal	0%	69%	22%	8%
14.	Pendidikan untuk keluarga	0%	14%	77%	9%
	Rata-rata	24%	44%	23%	10%

Selanjutnya untuk ketersediaan pendidikan khusus anak cerdas diprovinsi DIY, sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (87%), dan sebagian

kecil (13%) menyatakan sudah tersedia, pendidikan khusus anak cacat sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (79%), dan sebagian kecil (21%) menyatakan sudah tersedia, Pendidikan Tinggi Sosial sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (62%), dan sebagian kecil (38%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi IPA sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (64%), dan sebagian kecil (36%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Teknik sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (62%), dan sebagian kecil (38%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Agama Islam sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (79%), dan sebagian kecil (21%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Non Islam sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (73%), dan sebagian kecil (27%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Nonformal sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (69%), dan sebagian kecil (31%) menyatakan belum tersedia, dan Pendidikan untuk keluarga sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (86%), dan sebagian kecil (14%) menyatakan sudah tersedia.



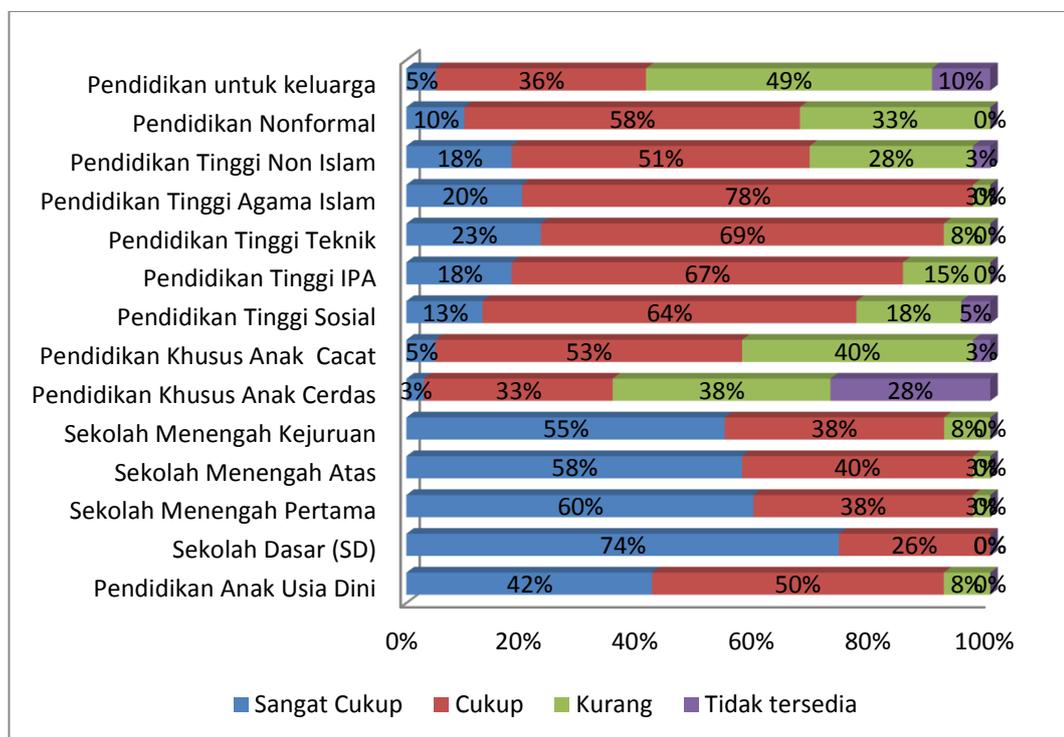
GAMBAR 4. 8. KETERSEDIAAN JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN PROVINSI DIY

Data persepsi responden terhadap ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan di provinsi Jateng digali dari 14 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.8. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat cukup” sampai dengan “tidak tersedia”. Data ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa ketersediaan pendidikan anak usia dini sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan tidak tersedia, SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan belum tersedia, SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan belum tersedia, SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (98%), dan sebagian kecil (2%) menyatakan belum tersedia, SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan belum tersedia.

TABEL 4. 9. KETERSEDIAAN JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
PROVINSIJATENG(N= 41)

No.	Ketersediaan Pendidikan Untuk Masyarakat	% responden menyatakan			
		Sangat Cukup	Cukup	Kurang	Tidak tersedia
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	42%	50%	8%	0%
2.	Sekolah Dasar (SD)	74%	26%	0%	0%
3.	Sekolah Menengah Pertama	60%	38%	3%	0%
4.	Sekolah Menengah Atas	58%	40%	3%	0%
5.	Sekolah Menengah Kejuruan	55%	38%	8%	0%
6.	Pendidikan Khusus Anak Cerdas	3%	33%	38%	28%
7.	Pendidikan Khusus Anak Cacat	5%	53%	40%	3%
8.	Pendidikan Tinggi Sosial	13%	64%	18%	5%
9.	Pendidikan Tinggi IPA	18%	67%	15%	0%
10.	Pendidikan Tinggi Teknik	23%	69%	8%	0%
11.	Pendidikan Tinggi Agama Islam	20%	78%	3%	0%
12.	Pendidikan Tinggi Non Islam	18%	51%	28%	3%
13.	Pendidikan Nonformal	10%	58%	33%	0%
14.	Pendidikan untuk keluarga	5%	36%	49%	10%
	Rata-rata	29%	50%	18%	3%

Selanjutnya untuk ketersediaan pendidikan khusus anak cerdas diprovinsi Jateng, sebagian kecil responden menyatakan sudah tersedia (36%), dan sebagian besar (64%) menyatakan belum tersedia, pendidikan khusus anak cacat sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (58%), dan sebagian kecil (42%) menyatakan sudah tersedia, Pendidikan Tinggi Sosial sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (77%), dan sebagian kecil (23%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi IPA sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Teknik sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Agama Islam sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Non Islam sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (69%), dan sebagian kecil (31%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Nonformal sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (68%), dan sebagian kecil (32%) menyatakan belum tersedia, dan Pendidikan untuk keluarga sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (59%), dan sebagian kecil (41%) menyatakan sudah tersedia.



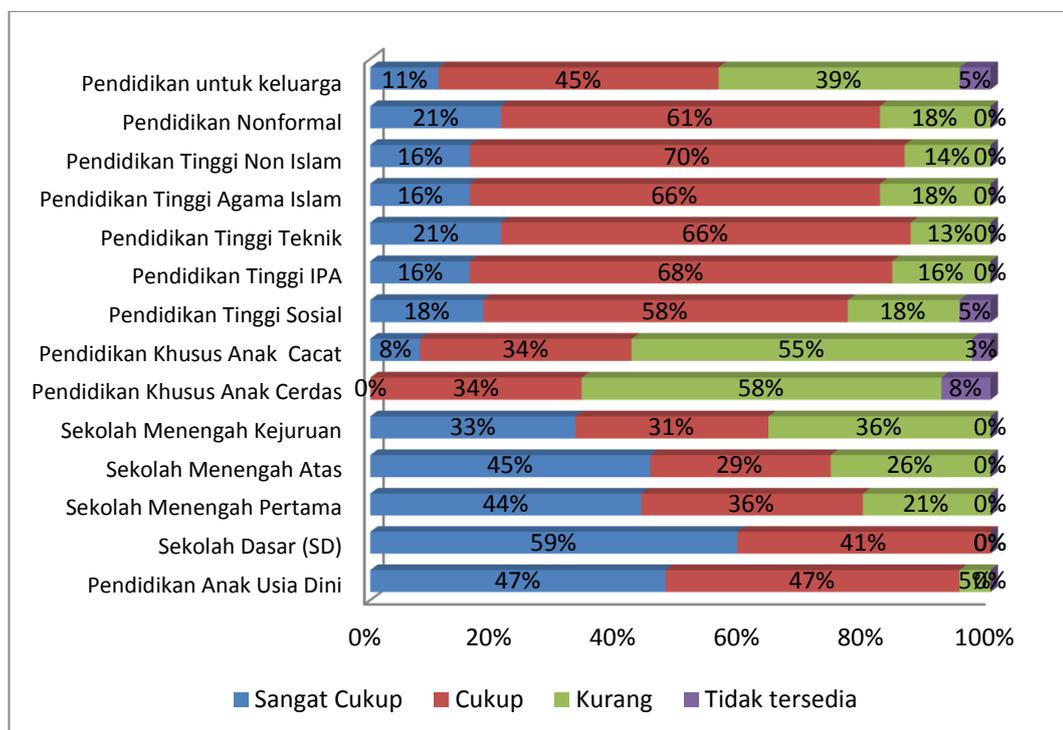
GAMBAR 4. 9. KETERSEDIAAN JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN PROVINSIJATENG

Data persepsi responden terhadap ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan di provinsi Jatim digali dari 14 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.7. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat cukup” sampai dengan “tidak tersedia”. Data ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa ketersediaan pendidikan anak usia dini sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan tidak tersedia, SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan belum tersedia, SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (79%), dan sebagian kecil (21%) menyatakan belum tersedia, SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (74%), dan sebagian kecil (26%) menyatakan belum tersedia, SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (64%), dan sebagian kecil (36%) menyatakan belum tersedia.

TABEL 4. 10. KETERSEDIAAN JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
PROVINSIJATIM(N=39)

No.	Ketersediaan Pendidikan Untuk Masyarakat	% responden menyatakan			
		Sangat Cukup	Cukup	Kurang	Tidak tersedia
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	47%	47%	5%	0%
2.	Sekolah Dasar (SD)	59%	41%	0%	0%
3.	Sekolah Menengah Pertama	44%	36%	21%	0%
4.	Sekolah Menengah Atas	45%	29%	26%	0%
5.	Sekolah Menengah Kejuruan	33%	31%	36%	0%
6.	Pendidikan Khusus Anak Cerdas	0%	34%	58%	8%
7.	Pendidikan Khusus Anak Cacat	8%	34%	55%	3%
8.	Pendidikan Tinggi Sosial	18%	58%	18%	5%
9.	Pendidikan Tinggi IPA	16%	68%	16%	0%
10.	Pendidikan Tinggi Teknik	21%	66%	13%	0%
11.	Pendidikan Tinggi Agama Islam	16%	66%	18%	0%
12.	Pendidikan Tinggi Non Islam	16%	70%	14%	0%
13.	Pendidikan Nonformal	21%	61%	18%	0%
14.	Pendidikan untuk keluarga	11%	45%	39%	5%
	Rata-rata	25%	49%	24%	2%

Selanjutnya untuk ketersediaan pendidikan khusus anak cerdas di provinsi Jatim, sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (66%), dan sebagian kecil (34%) menyatakan sudah tersedia, pendidikan khusus anak cacat sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (58%), dan sebagian kecil (42%) menyatakan sudah tersedia, Pendidikan Tinggi Sosial sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (76%), dan sebagian kecil (24%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi IPA sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (84%), dan sebagian kecil (16%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Teknik sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Agama Islam sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (82%), dan sebagian kecil (18%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Non Islam sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (76%), dan sebagian kecil (24%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Nonformal sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (82%), dan sebagian kecil (18%) menyatakan belum tersedia, dan Pendidikan untuk keluarga sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (56%), dan sebagian kecil (44%) menyatakan belum tersedia.



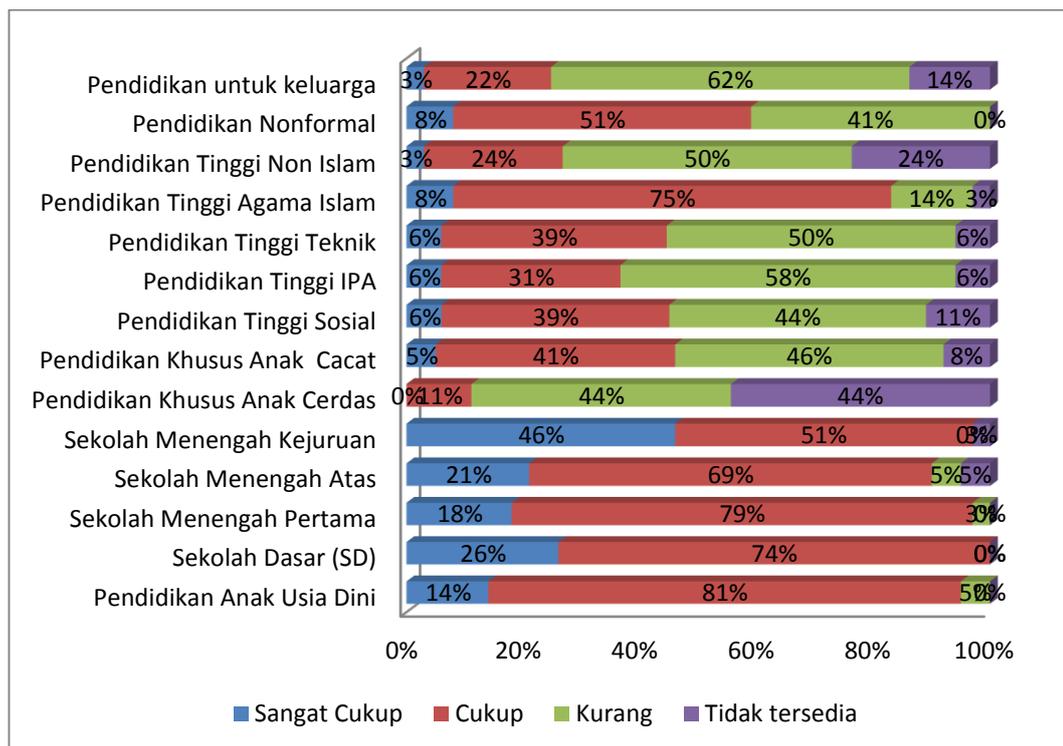
GAMBAR 4. 10. KETERSEDIAAN JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN PROVINSI JATIM

Data persepsi responden terhadap ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan di provinsi Jabar digali dari 14 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.7. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat cukup” sampai dengan “tidak tersedia”. Data ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa ketersediaan pendidikan anak usia dini sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan tidak tersedia, SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan belum tersedia, SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan belum tersedia, SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan belum tersedia, SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan belum tersedia.

TABEL 4. 11. KETERSEDIAAN JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN PROVINSI JABAR (N=41)

No.	Ketersediaan Pendidikan Untuk Masyarakat	% responden menyatakan			
		Sangat Cukup	Cukup	Kurang	Tidak tersedia
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	14%	81%	5%	0%
2.	Sekolah Dasar (SD)	26%	74%	0%	0%
3.	Sekolah Menengah Pertama	18%	79%	3%	0%
4.	Sekolah Menengah Atas	21%	69%	5%	5%
5.	Sekolah Menengah Kejuruan	46%	51%	0%	3%
6.	Pendidikan Khusus Anak Cerdas	0%	11%	44%	44%
7.	Pendidikan Khusus Anak Cacat	5%	41%	46%	8%
8.	Pendidikan Tinggi Sosial	6%	39%	44%	11%
9.	Pendidikan Tinggi IPA	6%	31%	58%	6%
10.	Pendidikan Tinggi Teknik	6%	39%	50%	6%
11.	Pendidikan Tinggi Agama Islam	8%	75%	14%	3%
12.	Pendidikan Tinggi Non Islam	3%	24%	50%	24%
13.	Pendidikan Nonformal	8%	51%	41%	0%
14.	Pendidikan untuk keluarga	3%	22%	62%	14%
	Rata-rata	12%	49%	30%	9%

Selanjutnya untuk ketersediaan pendidikan khusus anak cerdas di provinsi Jabar, sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (88%), dan sebagian kecil (12%) menyatakan sudah tersedia, pendidikan khusus anak cacat sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (54%), dan sebagian kecil (46%) menyatakan sudah tersedia, Pendidikan Tinggi Sosial sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (55%), dan sebagian kecil (45%) menyatakan sudah tersedia, Pendidikan Tinggi IPA sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (64%), dan sebagian kecil (36%) menyatakan sudah tersedia, Pendidikan Tinggi Teknik sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (56%), dan sebagian kecil (44%) menyatakan sudah tersedia, Pendidikan Tinggi Agama Islam sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (83%), dan sebagian kecil (17%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Non Islam sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (74%), dan sebagian kecil (26%) menyatakan sudah tersedia, Pendidikan Nonformal sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (59%), dan sebagian kecil (41%) menyatakan belum tersedia, dan Pendidikan untuk keluarga sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (76%), dan sebagian kecil (24%) menyatakan sudah tersedia.



GAMBAR 4. 11. KETERSEDIAAN JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN PROVINSI JABAR

Data persepsi responden terhadap ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan di provinsi Kaltim digali dari 14 pertanyaan yang tersusun pada Tabel

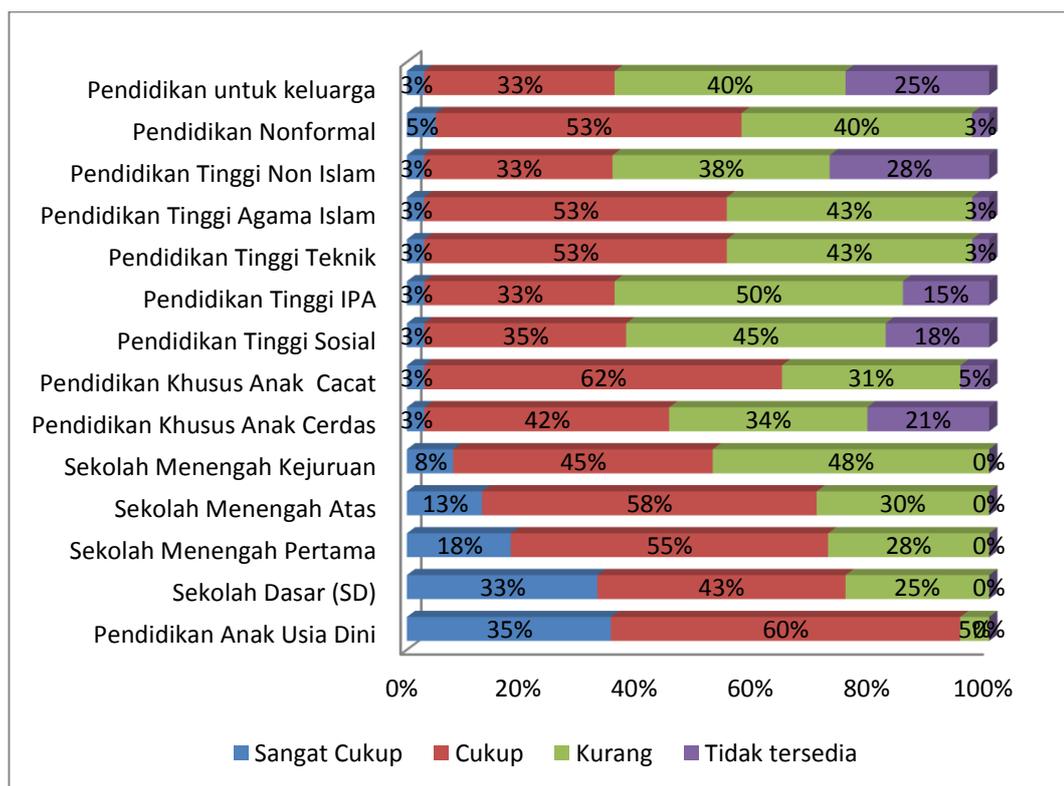
4.11. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat cukup” sampai dengan “tidak tersedia”. Data ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa ketersediaan pendidikan anak usia dini sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan tidak tersedia, SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (76%), dan sebagian kecil (24%) menyatakan belum tersedia, SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (73%), dan sebagian kecil (27%) menyatakan belum tersedia, SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (71%), dan sebagian kecil (29%) menyatakan belum tersedia, SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (52%), dan sebagian kecil (48%) menyatakan belum tersedia.

TABEL 4. 12. KETERSEDIAAN JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN PROVINSI KALTIM (N=40)

No.	Ketersediaan Pendidikan Untuk Masyarakat	% responden menyatakan			
		Sangat Cukup	Cukup	Kurang	Tidak tersedia
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	35%	60%	5%	0%
2.	Sekolah Dasar (SD)	33%	43%	25%	0%
3.	Sekolah Menengah Pertama	18%	55%	28%	0%
4.	Sekolah Menengah Atas	13%	58%	30%	0%
5.	Sekolah Menengah Kejuruan	8%	45%	48%	0%
6.	Pendidikan Khusus Anak Cerdas	3%	42%	34%	21%
7.	Pendidikan Khusus Anak Cacat	3%	62%	31%	5%
8.	Pendidikan Tinggi Sosial	3%	35%	45%	18%
9.	Pendidikan Tinggi IPA	3%	33%	50%	15%
10.	Pendidikan Tinggi Teknik	3%	53%	43%	3%
11.	Pendidikan Tinggi Agama Islam	3%	53%	43%	3%
12.	Pendidikan Tinggi Non Islam	3%	33%	38%	28%
13.	Pendidikan Nonformal	5%	53%	40%	3%
14.	Pendidikan untuk keluarga	3%	33%	40%	25%
	Rata-rata	9%	47%	36%	8%

Selanjutnya untuk ketersediaan pendidikan khusus anak cerdas di provinsi Kaltim, sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (55%), dan sebagian kecil (44%) menyatakan sudah tersedia, pendidikan khusus anak cacat

sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (64%), dan sebagian kecil (36%) menyatakan sudah tersedia, Pendidikan Tinggi Sosial sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (63%), dan sebagian kecil (37%) menyatakan sudah tersedia, Pendidikan Tinggi IPA sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (65%), dan sebagian kecil (35%) menyatakan sudah tersedia, Pendidikan Tinggi Teknik sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (56%), dan sebagian kecil (44%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Agama Islam sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (56%), dan sebagian kecil (44%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Non Islam sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (66%), dan sebagian kecil (44%) menyatakan sudah tersedia, Pendidikan Nonformal sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (58%), dan sebagian kecil (32%) menyatakan belum tersedia, dan Pendidikan untuk keluarga sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (65%), dan sebagian kecil (35%) menyatakan sudah tersedia.



GAMBAR 4. 12. KETERSEDIAAN JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN PROVINSI KALTIM

Data persepsi responden terhadap ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan di provinsi NTB digali dari 14 pertanyaan yang tersusun pada Tabel

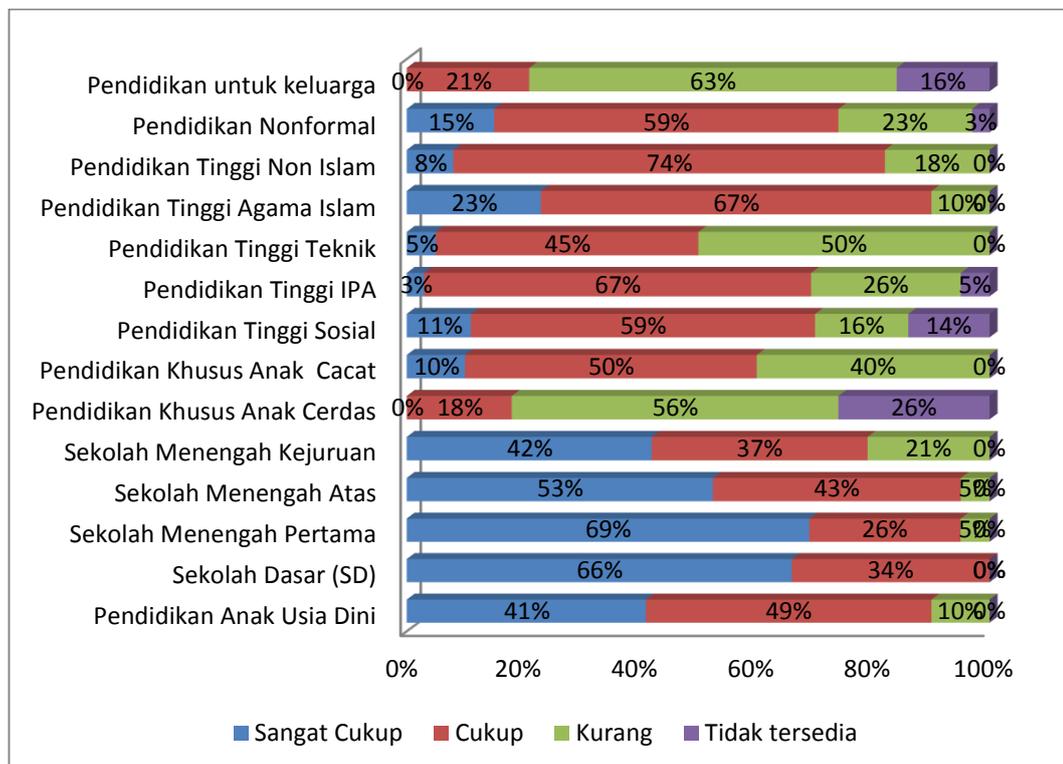
4.12. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat cukup” sampai dengan “tidak tersedia”. Data ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa ketersediaan pendidikan anak usia dini sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan tidak tersedia, SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tersedia (100%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan belum tersedia, SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan belum tersedia, SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (96%), dan sebagian kecil (4%) menyatakan belum tersedia, SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (79%), dan sebagian kecil (21%) menyatakan belum tersedia.

TABEL 4. 13. KETERSEDIAAN JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN PROVINSI NTB (N=40)

No.	Ketersediaan Pendidikan Untuk Masyarakat	% responden menyatakan			
		Sangat Cukup	Cukup	Kurang	Tidak tersedia
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	41%	49%	10%	0%
2.	Sekolah Dasar (SD)	66%	34%	0%	0%
3.	Sekolah Menengah Pertama	69%	26%	5%	0%
4.	Sekolah Menengah Atas	53%	43%	5%	0%
5.	Sekolah Menengah Kejuruan	42%	37%	21%	0%
6.	Pendidikan Khusus Anak Cerdas	0%	18%	56%	26%
7.	Pendidikan Khusus Anak Cacat	10%	50%	40%	0%
8.	Pendidikan Tinggi Sosial	11%	59%	16%	14%
9.	Pendidikan Tinggi IPA	3%	67%	26%	5%
10.	Pendidikan Tinggi Teknik	5%	45%	50%	0%
11.	Pendidikan Tinggi Agama Islam	23%	67%	10%	0%
12.	Pendidikan Tinggi Non Islam	8%	74%	18%	0%
13.	Pendidikan Nonformal	15%	59%	23%	3%
14.	Pendidikan untuk keluarga	0%	21%	63%	16%
	Rata-rata	25%	46%	25%	4%

Selanjutnya untuk ketersediaan pendidikan khusus anak cerdas di provinsi NTB, sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (82%), dan sebagian kecil (18%) menyatakan sudah tersedia, pendidikan khusus anak cacat sebagian

besar responden menyatakan sudah tersedia (60%), dan sebagian kecil (40%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Sosial sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (70%), dan sebagian kecil (30%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi IPA sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (70%), dan sebagian kecil (30%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Teknik sebagian responden menyatakan sudah tersedia (50%), dan sebagian lagi (50%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Agama Islam sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Non Islam sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (82%), dan sebagian kecil (18%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Nonformal sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (74%), dan sebagian kecil (26%) menyatakan belum tersedia, dan Pendidikan untuk keluarga sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (79%), dan sebagian kecil (21%) menyatakan sudah tersedia.



GAMBAR 4. 13. KETERSEDIAAN JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN PROVINSI NTB

Data persepsi responden terhadap ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan di provinsi NTT digali dari 14 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.13. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat cukup” sampai dengan “tidak tersedia”. Data ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi

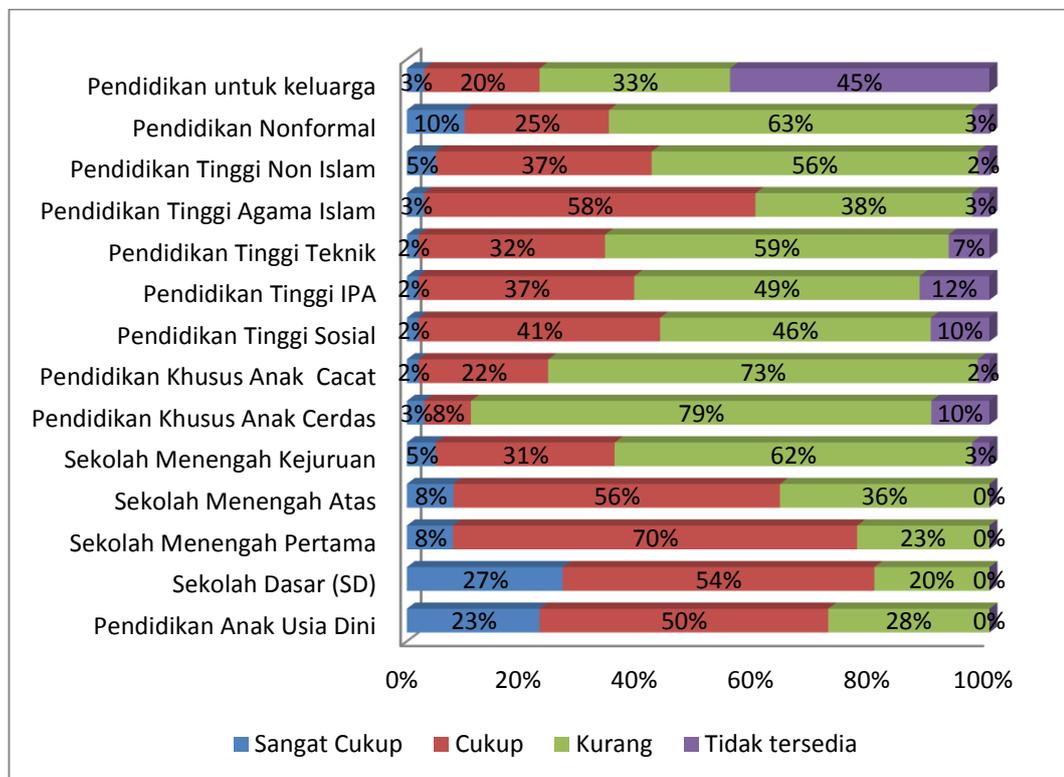
bahwa ketersediaan pendidikan anak usia dini sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (73%), dan sebagian kecil (27%) menyatakan tidak tersedia, SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (80%), dan sebagian kecil (20%) menyatakan belum tersedia, SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (78%), dan sebagian kecil (22%) menyatakan belum tersedia, SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (64%), dan sebagian kecil (36%) menyatakan belum tersedia, SMK sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (65%), dan sebagian kecil (35%) menyatakan sudah tersedia.

TABEL 4. 14. KETERSEDIAAN JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN PROVINSI NTT (N=41)

No.	Ketersediaan Pendidikan Untuk Masyarakat	% responden menyatakan			
		Sangat Cukup	Cukup	Kurang	Tidak tersedia
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	23%	50%	28%	0%
2.	Sekolah Dasar (SD)	27%	54%	20%	0%
3.	Sekolah Menengah Pertama	8%	70%	23%	0%
4.	Sekolah Menengah Atas	8%	56%	36%	0%
5.	Sekolah Menengah Kejuruan	5%	31%	62%	3%
6.	Pendidikan Khusus Anak Cerdas	3%	8%	79%	10%
7.	Pendidikan Khusus Anak Cacat	2%	22%	73%	2%
8.	Pendidikan Tinggi Sosial	2%	41%	46%	10%
9.	Pendidikan Tinggi IPA	2%	37%	49%	12%
10.	Pendidikan Tinggi Teknik	2%	32%	59%	7%
11.	Pendidikan Tinggi Agama Islam	3%	58%	38%	3%
12.	Pendidikan Tinggi Non Islam	5%	37%	56%	2%
13.	Pendidikan Nonformal	10%	25%	63%	3%
14.	Pendidikan untuk keluarga	3%	20%	33%	45%
	Rata-rata	7%	39%	47%	7%

Selanjutnya untuk ketersediaan pendidikan khusus anak cerdas di provinsi NTT, sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (89%), dan sebagian kecil (11%) menyatakan sudah tersedia, pendidikan khusus anak cacat sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (75%), dan sebagian kecil (25%) menyatakan sudah tersedia, Pendidikan Tinggi Sosial sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (56%), dan sebagian kecil (44%) menyatakan belum

tersedia, Pendidikan Tinggi IPA sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (71%), dan sebagian kecil (29%) menyatakan sudah tersedia, Pendidikan Tinggi Teknik sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (66%), dan sebagian kecil (34%) menyatakan sudah tersedia, Pendidikan Tinggi Agama Islam sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (61%), dan sebagian kecil (39%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Non Islam sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (58%), dan sebagian kecil (42%) menyatakan sudah tersedia, Pendidikan Nonformal sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (66%), dan sebagian kecil (34%) menyatakan sudah tersedia, dan Pendidikan untuk keluarga sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (78%), dan sebagian kecil (22%) menyatakan sudah tersedia.



GAMBAR 4. 14. KETERSEDIAAN JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN PROVINSI NTT

Data persepsi responden terhadap ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan di provinsi Sumbar digali dari 14 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.14. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat cukup” sampai dengan “tidak tersedia”. Data ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa ketersediaan pendidikan anak usia dini sebagian besar responden

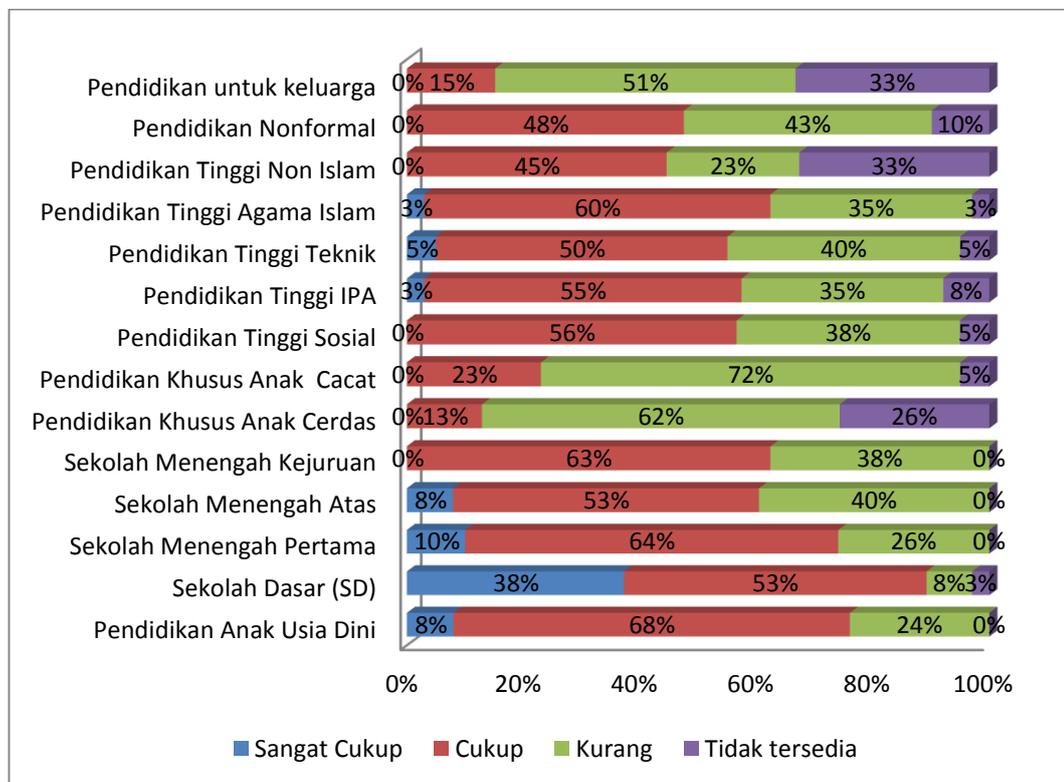
menyatakan sudah cukup (76%), dan sebagian kecil (24%) menyatakan tidak tersedia, SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (91%), dan sebagian kecil (9%) menyatakan belum tersedia, SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (74%), dan sebagian kecil (26%) menyatakan belum tersedia, SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup (60%), dan sebagian kecil (40%) menyatakan belum tersedia, SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tersedia (63%), dan sebagian kecil (38%) menyatakan belum tersedia.

TABEL 4. 15. KETERSEDIAAN JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN PROVINSI SUMBAR (N=40)

No.	Ketersediaan Pendidikan Untuk Masyarakat	% responden menyatakan			
		Sangat Cukup	Cukup	Kurang	Tidak tersedia
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	8%	68%	24%	0%
2.	Sekolah Dasar (SD)	38%	53%	8%	3%
3.	Sekolah Menengah Pertama	10%	64%	26%	0%
4.	Sekolah Menengah Atas	8%	53%	40%	0%
5.	Sekolah Menengah Kejuruan	0%	63%	38%	0%
6.	Pendidikan Khusus Anak Cerdas	0%	13%	62%	26%
7.	Pendidikan Khusus Anak Cacat	0%	23%	72%	5%
8.	Pendidikan Tinggi Sosial	0%	56%	38%	5%
9.	Pendidikan Tinggi IPA	3%	55%	35%	8%
10.	Pendidikan Tinggi Teknik	5%	50%	40%	5%
11.	Pendidikan Tinggi Agama Islam	3%	60%	35%	3%
12.	Pendidikan Tinggi Non Islam	0%	45%	23%	33%
13.	Pendidikan Nonformal	0%	48%	43%	10%
14.	Pendidikan untuk keluarga	0%	15%	51%	33%
	Rata-rata	5%	48%	38%	9%

Selanjutnya untuk ketersediaan pendidikan khusus anak cerdas di provinsi Sumbar, sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (88%), dan sebagian kecil (12%) menyatakan sudah tersedia, pendidikan khusus anak cacat sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (77%), dan sebagian kecil (23%) menyatakan sudah tersedia, Pendidikan Tinggi Sosial sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (56%), dan sebagian kecil (44%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi IPA sebagian besar responden

menyatakan sudah tersedia (58%), dan sebagian kecil (42%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Teknik sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (55%), dan sebagian kecil (45%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Agama Islam sebagian besar responden menyatakan sudah tersedia (63%), dan sebagian kecil (37%) menyatakan belum tersedia, Pendidikan Tinggi Non Islam sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (56%), dan sebagian kecil (44%) menyatakan sudah tersedia, Pendidikan Nonformal sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (52%), dan sebagian kecil (48%) menyatakan sudah tersedia, dan Pendidikan untuk keluarga sebagian besar responden menyatakan belum tersedia (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan sudah tersedia.



GAMBAR 4. 15. KETERSEDIAAN JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN PROVINSI SUMBAR

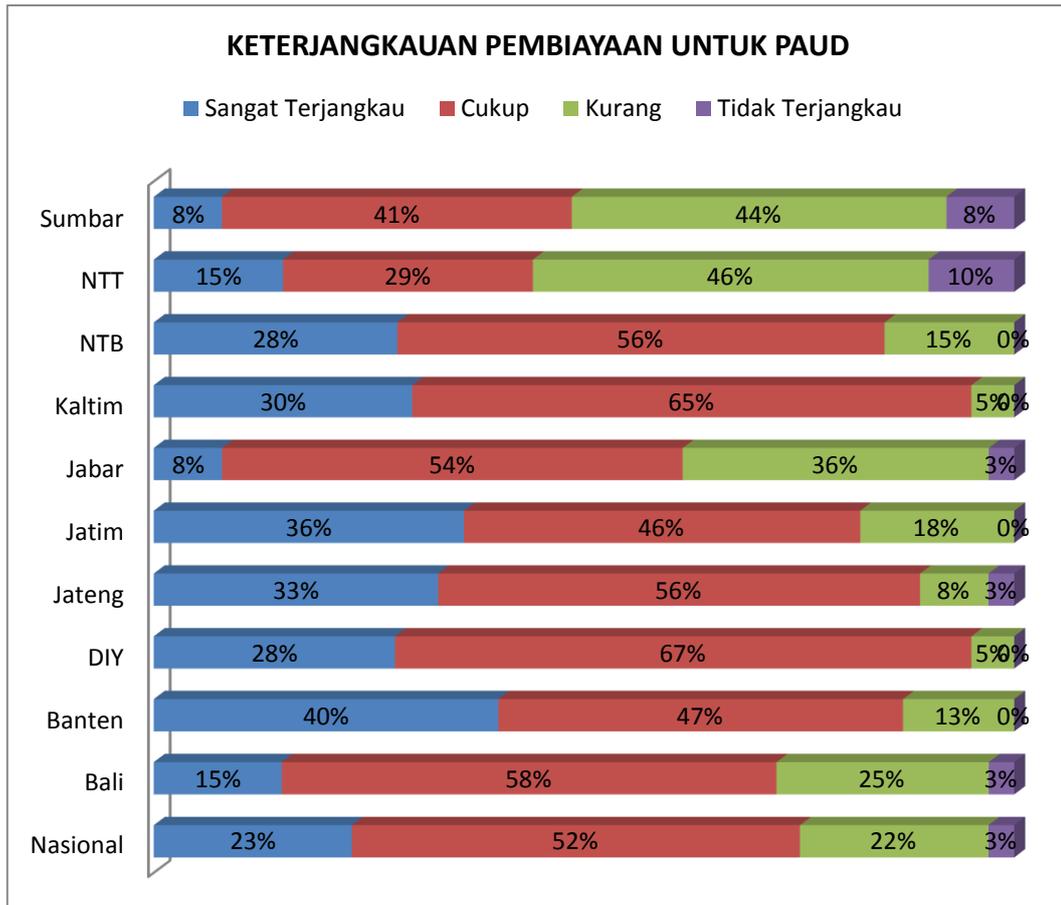
2. Keterjangkauan masyarakat memperoleh pelayanan pendidikan

a. Keterjangkauan Pembiayaan untuk Pendidikan Anak Usia Dini

Keterjangkauan masyarakat dalam memperoleh pendidikan terutama dalam Keterjangkauan Pembiayaan PAUD secara Nasional yang menyatakan sangat terjangkau (23%) dan cukup (52%). Sedangkan jika dilihat tiap provinsi maka provinsi yang masih kurang adalah provinsi NTT, kurang 46% dan tidak terjangkau 10%. Hasil secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL 4. 16. KETERJANGKAUAN PEMBIAYAAN UNTUK PAUD

Keterjangkauan Pembiayaan PAUD	% responden menjawab			
	Sangat Terjangkau	Cukup	Kurang	Tidak Terjangkau
Nasional	23%	52%	22%	3%
Bali	15%	58%	25%	3%
Banten	40%	47%	13%	0%
DIY	28%	67%	5%	0%
Jateng	33%	56%	8%	3%
Jatim	36%	46%	18%	0%
Jabar	8%	54%	36%	3%
Kaltim	30%	65%	5%	0%
NTB	28%	56%	15%	0%
NTT	15%	29%	46%	10%
Sumbar	8%	41%	44%	8%



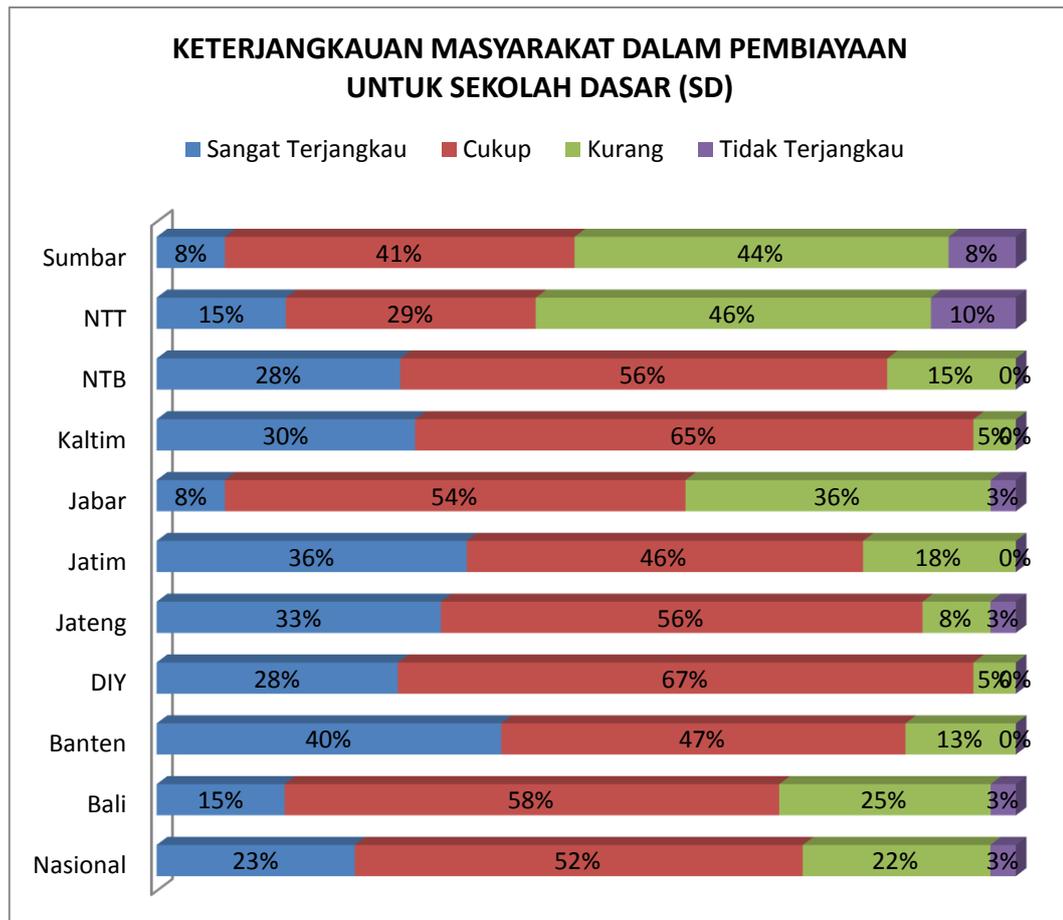
GAMBAR 4. 16. KETERJANGKAUAN PEMBIAYAAN UNTUK PAUD

b. Keterjangkauan Pembiayaan untuk Sekolah Dasar (SD)

Keterjangkauan masyarakat dalam memperoleh pendidikan terutama dalam Keterjangkauan Pembiayaan SD secara Nasional yang menyatakan sangat terjangkau (23%) dan cukup (52%). Sedangkan jika dilihat tiap provinsi maka provinsi yang masih kurang adalah provinsi NTT, kurang 46% dan tidak terjangkau 10%. Hasil secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL 4. 17. KETERJANGKAUAN MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN UNTUK SEKOLAH DASAR (SD)

No.	Keterjangkauan Pembiayaan SD	% responden menjawab			
		Sangat Terjangkau	Cukup	Kurang	Tidak Terjangkau
1	Nasional	23%	52%	22%	3%
2	Bali	15%	58%	25%	3%
3	Banten	40%	47%	13%	0%
4	DIY	28%	67%	5%	0%
5	Jateng	33%	56%	8%	3%
6	Jatim	36%	46%	18%	0%
7	Jabar	8%	54%	36%	3%
8	Kaltim	30%	65%	5%	0%
9	NTB	28%	56%	15%	0%
10	NTT	15%	29%	46%	10%
11	Sumbar	8%	41%	44%	8%



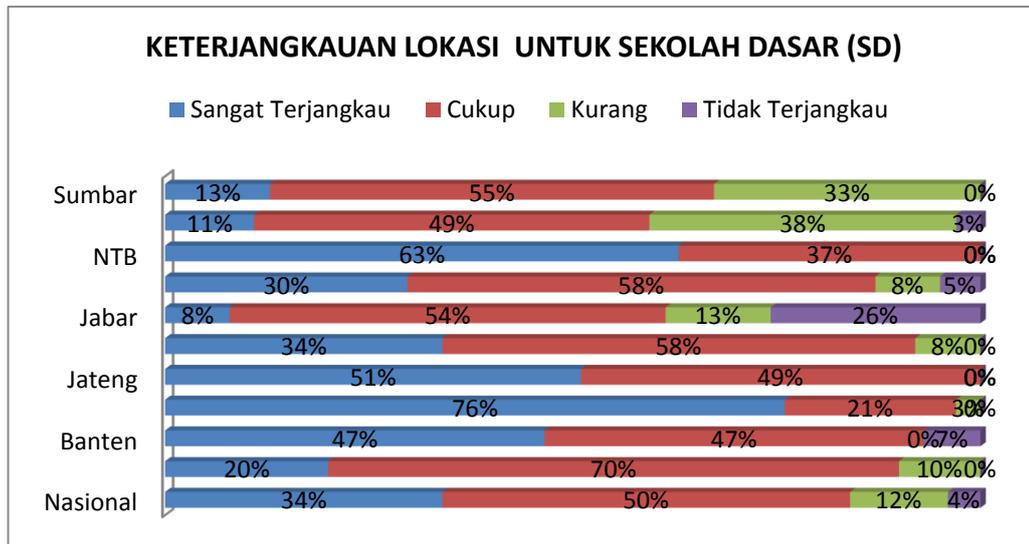
GAMBAR 4. 17. KETERJANGKAUAN MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN UNTUK SEKOLAH DASAR (SD)

c. Keterjangkauan Lokasi untuk Sekolah Dasar (SD)

Keterjangkauan masyarakat dalam memperoleh pendidikan terutama dalam Keterjangkauan Lokasi SD secara Nasional yang menyatakan sangat terjangkau (34%) dan cukup (50%). Sedangkan jika dilihat tiap provinsi maka provinsi yang masih kurang adalah Provinsi NTT, kurang (38%) dan tidak terjangkau (3%). Hasil secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL 4. 18. KETERJANGKAUAN LOKASI UNTUK SEKOLAH DASAR (SD)

No.	Keterjangkauan Lokasi SD	% responden menjawab			
		Sangat Terjangkau	Cukup	Kurang	Tidak Terjangkau
1	Nasional	34%	50%	12%	4%
2	Bali	20%	70%	10%	0%
3	Banten	47%	47%	0%	7%
4	DIY	76%	21%	3%	0%
5	Jateng	51%	49%	0%	0%
6	Jatim	34%	58%	8%	0%
7	Jabar	8%	54%	13%	26%
8	Kaltim	30%	58%	8%	5%
9	NTB	63%	37%	0%	0%
10	NTT	11%	49%	38%	3%
11	Sumbar	13%	55%	33%	0%



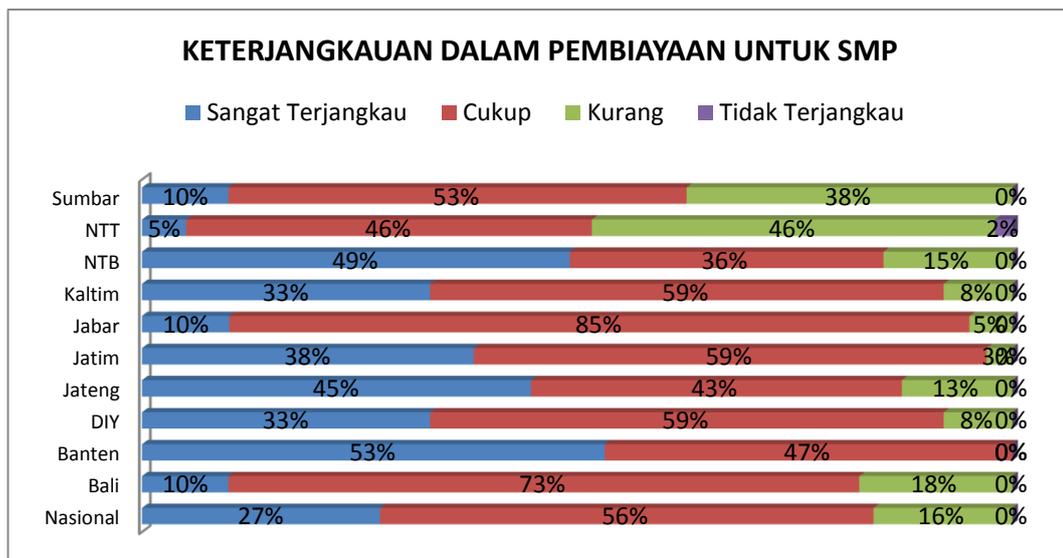
GAMBAR 4. 18. KETERJANGKAUAN LOKASI UNTUK SEKOLAH DASAR (SD)

d. Keterjangkauan Pembiayaan untuk SMP

Keterjangkauan masyarakat dalam memperoleh pendidikan terutama dalam Keterjangkauan Pembiayaan SMP secara Nasional yang menyatakan sangat terjangkau (27%) dan cukup (56%). Sedangkan jika dilihat tiap provinsi maka provinsi yang masih kurang adalah Provinsi NTT, kurang (46%) dan tidak terjangkau (2%). Hasil secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 4. 19. KETERJANGKAUAN MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No.	Keterjangkauan Pembiayaan SMP	% responden menjawab			
		Sangat Terjangkau	Cukup	Kurang	Tidak Terjangkau
1	Nasional	27%	56%	16%	0%
2	Bali	10%	73%	18%	0%
3	Banten	53%	47%	0%	0%
4	DIY	33%	59%	8%	0%
5	Jateng	45%	43%	13%	0%
6	Jatim	38%	59%	3%	0%
7	Jabar	10%	85%	5%	0%
8	Kaltim	33%	59%	8%	0%
9	NTB	49%	36%	15%	0%
10	NTT	5%	46%	46%	2%
11	Sumbar	10%	53%	38%	0%



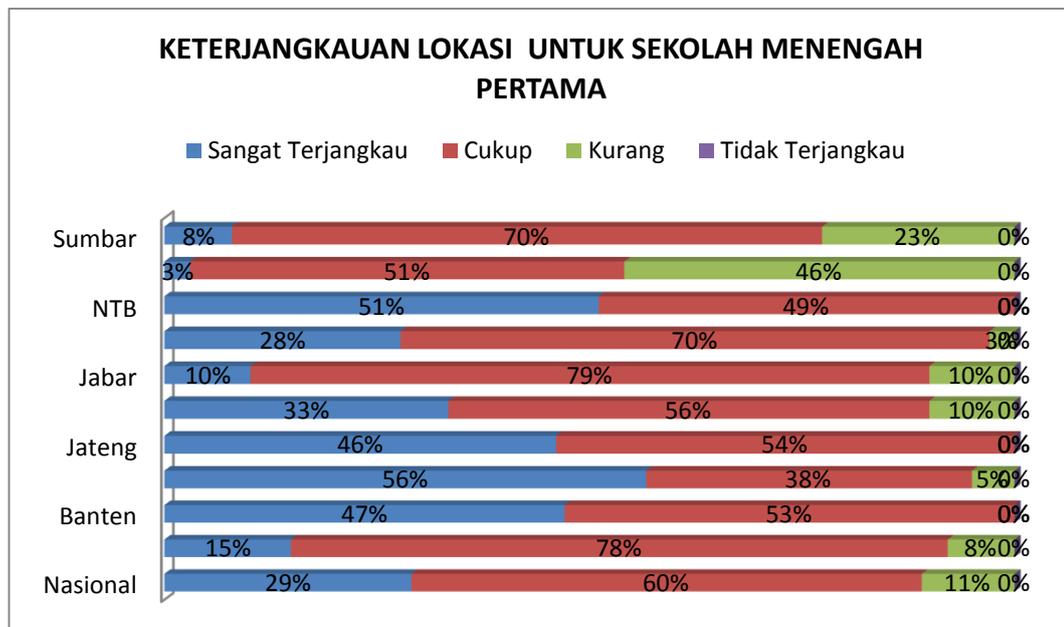
GAMBAR 4. 19. KETERJANGKAUAN MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

e. Keterjangkauan Lokasi untuk SMP

Keterjangkauan masyarakat dalam memperoleh pendidikan terutama dalam Keterjangkauan Lokasi SMP secara Nasional yang menyatakan sangat terjangkau (29%) dan cukup (60%). Sedangkan jika dilihat tiap provinsi maka provinsi yang masih kurang adalah Provinsi NTT, kurang (46%) dan tidak terjangkau (0%). Hasil secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 4. 20. KETERJANGKAUAN LOKASI UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No.	Keterjangkauan Lokasi SMP	% responden menjawab			
		Sangat Terjangkau	Cukup	Kurang	Tidak Terjangkau
1	Nasional	29%	60%	11%	0%
2	Bali	15%	78%	8%	0%
3	Banten	47%	53%	0%	0%
4	DIY	56%	38%	5%	0%
5	Jateng	46%	54%	0%	0%
6	Jatim	33%	56%	10%	0%
7	Jabar	10%	79%	10%	0%
8	Kaltim	28%	70%	3%	0%
9	NTB	51%	49%	0%	0%
10	NTT	3%	51%	46%	0%
11	Sumbar	8%	70%	23%	0%



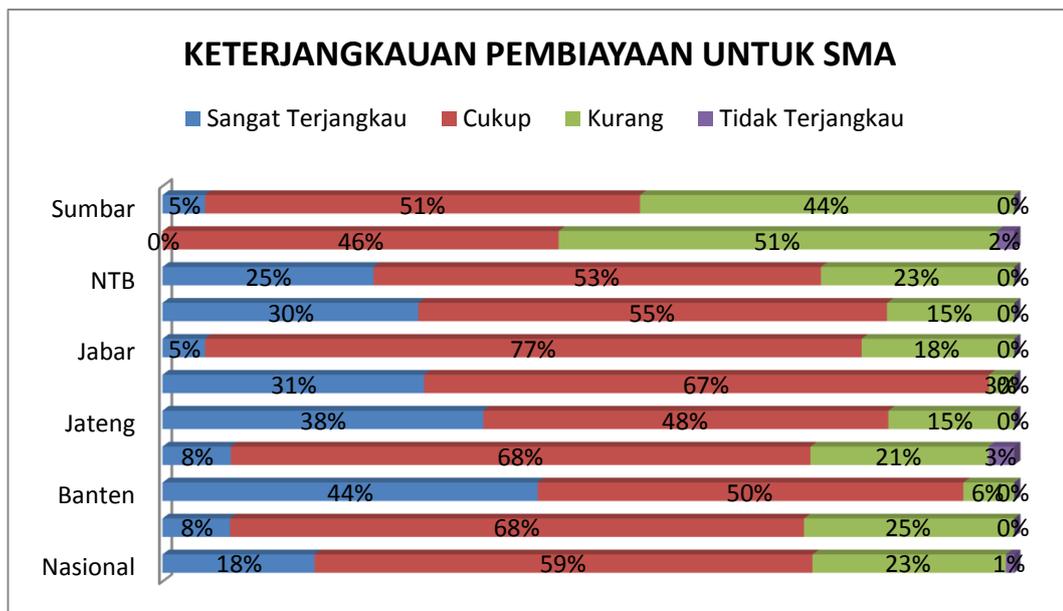
GAMBAR 4. 20. KETERJANGKAUAN LOKASI UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

f. Keterjangkauan Pembiayaan untuk SMA

Keterjangkauan masyarakat dalam memperoleh pendidikan terutama dalam Keterjangkauan Pembiayaan SMA secara Nasional yang menyatakan sangat terjangkau (18%) dan cukup (59%). Sedangkan jika dilihat tiap provinsi maka provinsi yang masih kurang adalah Provinsi NTT, kurang (51%) dan tidak terjangkau (2%). Hasil secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL 4. 21. KETERJANGKAUAN MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS

No.	Keterjangkauan Pembiayaan SMA	% responden menjawab			
		Sangat Terjangkau	Cukup	Kurang	Tidak Terjangkau
1	Nasional	18%	59%	23%	1%
2	Bali	8%	68%	25%	0%
3	Banten	44%	50%	6%	0%
4	DIY	8%	68%	21%	3%
5	Jateng	38%	48%	15%	0%
6	Jatim	31%	67%	3%	0%
7	Jabar	5%	77%	18%	0%
8	Kaltim	30%	55%	15%	0%
9	NTB	25%	53%	23%	0%
10	NTT	0%	46%	51%	2%
11	Sumbar	5%	51%	44%	0%



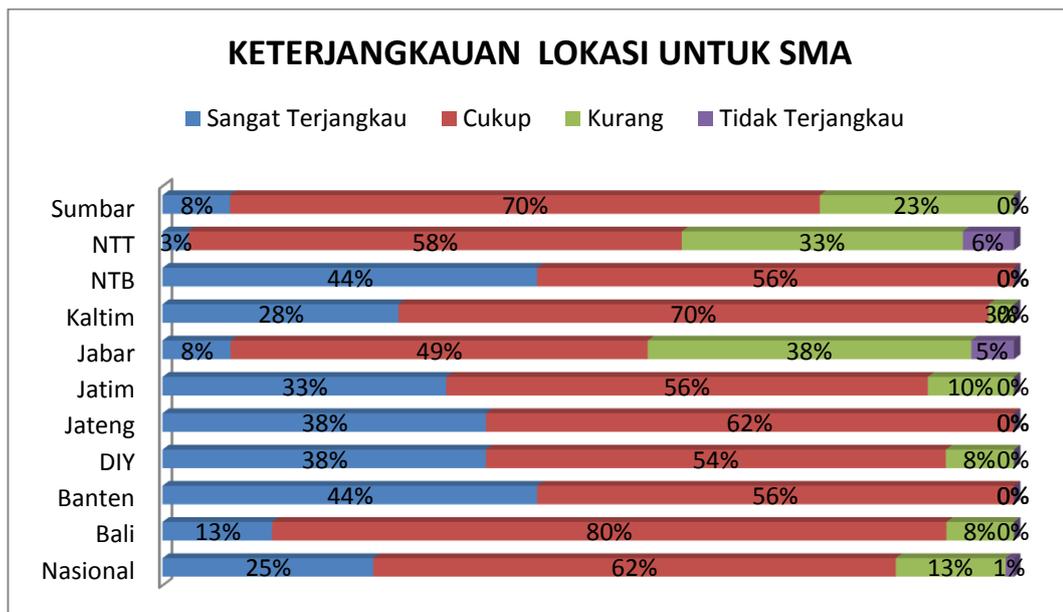
GAMBAR 4. 21. KETERJANGKAUAN MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS

g. Keterjangkauan Lokasi untuk SMA

Keterjangkauan masyarakat dalam memperoleh pendidikan terutama dalam Keterjangkauan Lokasi SMA secara Nasional yang menyatakan sangat terjangkau (25%) dan cukup (62%). Sedangkan jika dilihat tiap provinsi maka provinsi yang masih kurang adalah Provinsi NTT, kurang (33%) dan tidak terjangkau (6%). Hasil secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL 4. 22. KETERJANGKAUAN LOKASI UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS

No.	Keterjangkauan Lokasi SMA	% responden menjawab			
		Sangat Terjangkau	Cukup	Kurang	Tidak Terjangkau
1	Nasional	25%	62%	13%	1%
2	Bali	13%	80%	8%	0%
3	Banten	44%	56%	0%	0%
4	DIY	38%	54%	8%	0%
5	Jateng	38%	62%	0%	0%
6	Jatim	33%	56%	10%	0%
7	Jabar	8%	49%	38%	5%
8	Kaltim	28%	70%	3%	0%
9	NTB	44%	56%	0%	0%
10	NTT	3%	58%	33%	6%
11	Sumbar	8%	70%	23%	0%



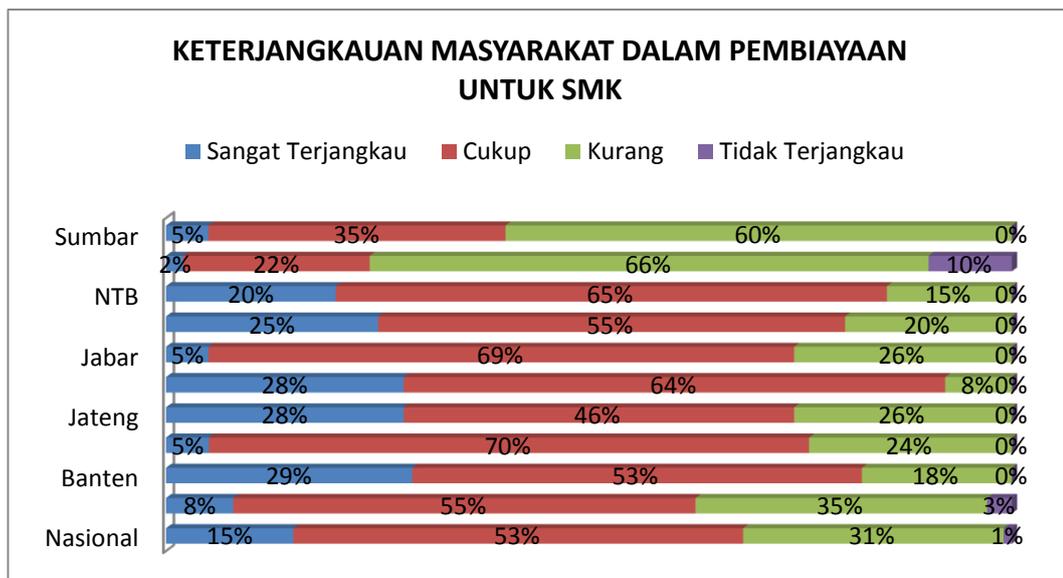
GAMBAR 4. 22. KETERJANGKAUAN LOKASI UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS

h. Keterjangkauan Pembiayaan untuk SMK

Keterjangkauan masyarakat dalam memperoleh pendidikan terutama dalam Keterjangkauan Pembiayaan SMK secara Nasional yang menyatakan sangat terjangkau (15%) dan cukup (53%). Sedangkan jika dilihat tiap provinsi maka provinsi yang masih kurang adalah Provinsi NTT, kurang (66%) dan tidak terjangkau (10%). Hasil secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL 4. 23. KETERJANGKAUAN MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

No.	Keterjangkauan Pembiayaan SMK	% responden menjawab			
		Sangat Terjangkau	Cukup	Kurang	Tidak Terjangkau
1	Nasional	15%	53%	31%	1%
2	Bali	8%	55%	35%	3%
3	Banten	29%	53%	18%	0%
4	DIY	5%	70%	24%	0%
5	Jateng	28%	46%	26%	0%
6	Jatim	28%	64%	8%	0%
7	Jabar	5%	69%	26%	0%
8	Kaltim	25%	55%	20%	0%
9	NTB	20%	65%	15%	0%
10	NTT	2%	22%	66%	10%
11	Sumbar	5%	35%	60%	0%



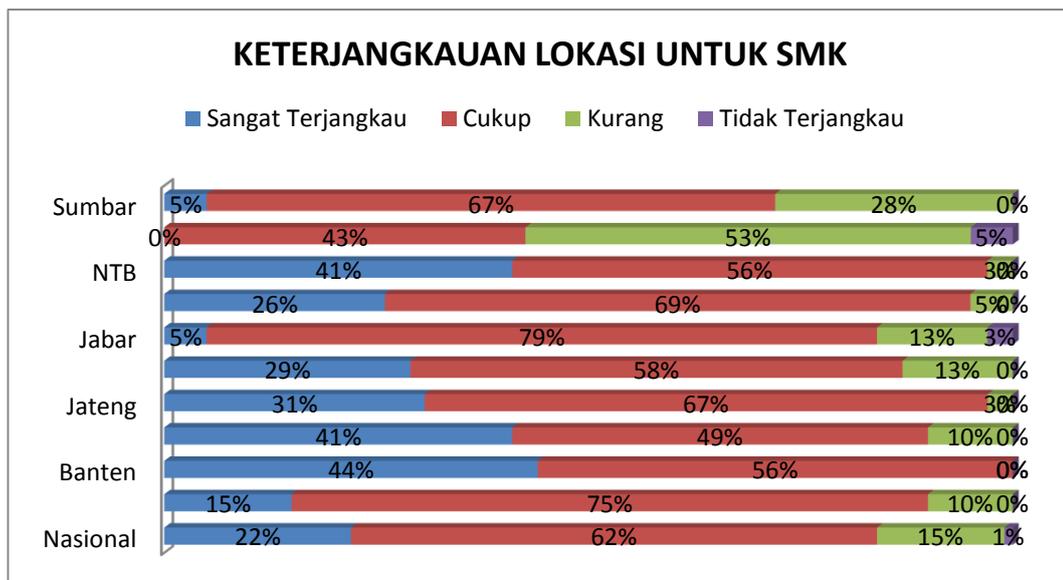
GAMBAR 4. 23. KETERJANGKAUAN MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

i. Keterjangkauan Lokasi untuk SMK

Keterjangkauan masyarakat dalam memperoleh pendidikan terutama dalam Keterjangkauan Lokasi SMK secara Nasional yang menyatakan sangat terjangkau (22%) dan cukup (62%). Sedangkan jika dilihat tiap provinsi maka provinsi yang masih kurang adalah Provinsi NTT, kurang (53%) dan tidak terjangkau (5%). Hasil secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 4. 24. KETERJANGKAUAN LOKASI UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

No.	Keterjangkauan Lokasi SMK	% responden menjawab			
		Sangat Terjangkau	Cukup	Kurang	Tidak Terjangkau
1	Nasional	22%	62%	15%	1%
2	Bali	15%	75%	10%	0%
3	Banten	44%	56%	0%	0%
4	DIY	41%	49%	10%	0%
5	Jateng	31%	67%	3%	0%
6	Jatim	29%	58%	13%	0%
7	Jabar	5%	79%	13%	3%
8	Kaltim	26%	69%	5%	0%
9	NTB	41%	56%	3%	0%
10	NTT	0%	43%	53%	5%
11	Sumbar	5%	67%	28%	0%



GAMBAR 4. 24. KETERJANGKAUAN LOKASI UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

3. Kualitas Pelayanan Pendidikan

a. Kualitas Pelayanan PAUD

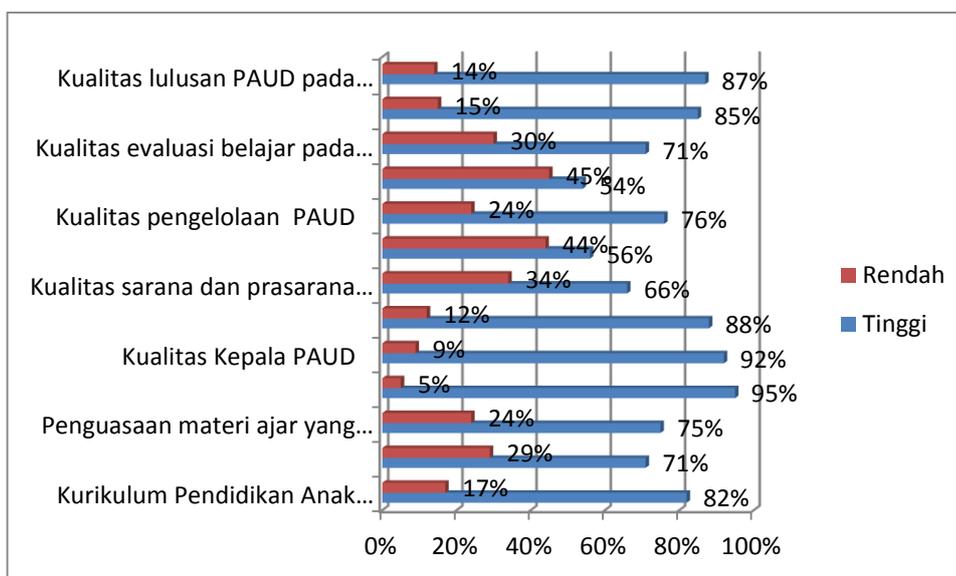
Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.25. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan PAUD hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini sebagian besar responden menyatakan tinggi (82%), dan sebagian kecil (18%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (70%), dan sebagian kecil (30%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (75%), dan sebagian kecil (25%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (88%), dan sebagian kecil (12%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 25. KUALITAS PELAYANAN PAUD BERDASARKAN RESPONDEN NASIONAL (N = 370)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini	10%	72%	14%	3%
Kualitas cara mengajar guru PAUD	7%	64%	25%	4%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru PAUD	7%	68%	22%	2%
Kepribadian guru PAUD	23%	72%	4%	1%
Kualitas Kepala PAUD	15%	77%	8%	1%
Kualitas Pengawas PAUD	17%	71%	12%	0%
Kualitas sarana dan prasarana PAUD	9%	57%	32%	2%
Kecukupan sarana dan prasarana PAUD	3%	53%	42%	2%
Kualitas pengelolaan PAUD	9%	67%	22%	2%
Kecukupan pembiayaan untuk PAUD	5%	49%	40%	5%
Kualitas evaluasi belajar pada PAUD	6%	65%	28%	2%

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kualitas lulusan PAUD pada aspek pengetahuan	7%	78%	15%	0%
Kualitas lulusan PAUD pada aspek sikap dan karakter	11%	76%	13%	1%
Rata-rata	10%	67%	21%	2%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (66%), dan sebagian kecil (34%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (56%), dan sebagian kecil (44%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (76%), dan sebagian kecil (24%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (54%), dan sebagian kecil (46%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (71%), dan sebagian kecil (29%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan PAUD pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan PAUD pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah.



GAMBAR 4. 25. KUALITAS PELAYANAN PAUD secara NASIONAL

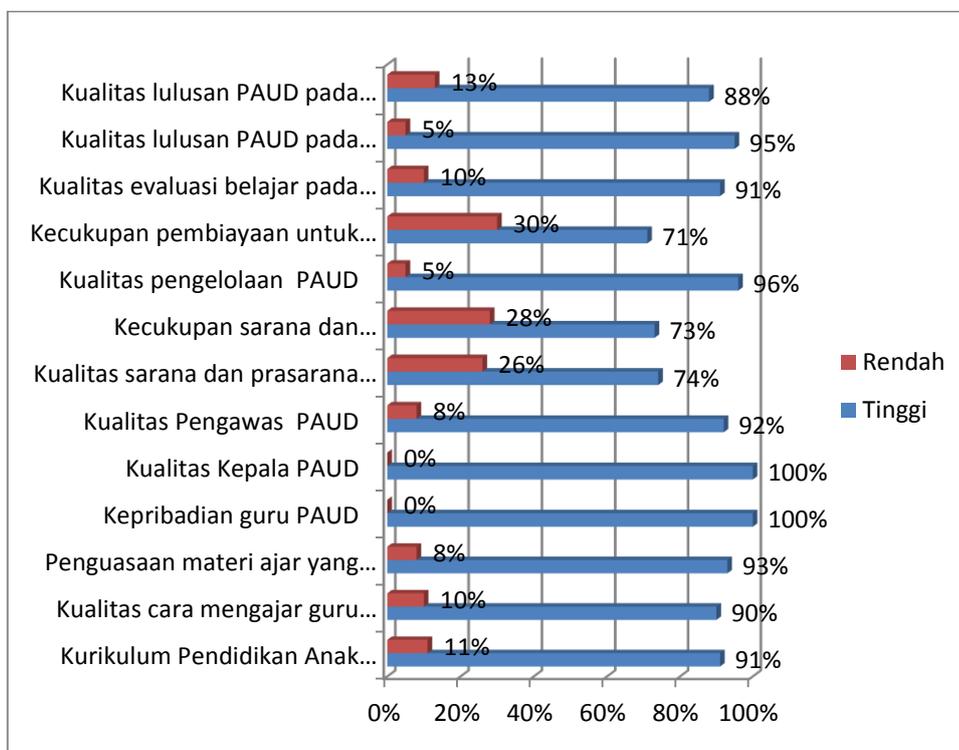
Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) di provinsi Bali digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.26. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan PAUD hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini sebagian besar responden menyatakan tinggi (91%), dan sebagian kecil (9%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 26. KUALITAS PELAYANAN PAUD BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI BALI (N=40)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini	18%	73%	6%	3%
Kualitas cara mengajar guru PAUD	10%	80%	10%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru PAUD	3%	90%	8%	0%
Kepribadian guru PAUD	20%	80%	0%	0%
Kualitas Kepala PAUD	15%	85%	0%	0%
Kualitas Pengawas PAUD	15%	77%	8%	0%
Kualitas sarana dan prasarana PAUD	11%	63%	26%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana PAUD	5%	68%	28%	0%
Kualitas pengelolaan PAUD	8%	88%	5%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk PAUD	8%	63%	30%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada PAUD	8%	83%	10%	0%
Kualitas lulusan PAUD pada aspek pengetahuan	10%	85%	5%	0%
Kualitas lulusan PAUD pada aspek sikap dan karakter	13%	75%	13%	0%
Rata-rata	11%	78%	12%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (74%), dan sebagian kecil (26%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana PAUD sebagian besar responden

menyatakan tinggi (73%), dan sebagian kecil (27%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (96%), dan sebagian kecil (4%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (71%), dan sebagian kecil (29%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (91%), dan sebagian kecil (9%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan PAUD pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan PAUD pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (88%), dan sebagian kecil (12%) menyatakan rendah.



GAMBAR 4. 26. KUALITAS PELAYANAN PAUD di PROVINSI BALI

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) di provinsi Banten digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.27. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari "sangat tinggi" sampai dengan "rendah". Data kualitas layanan PAUD hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini sebagian besar responden menyatakan tinggi (93%),

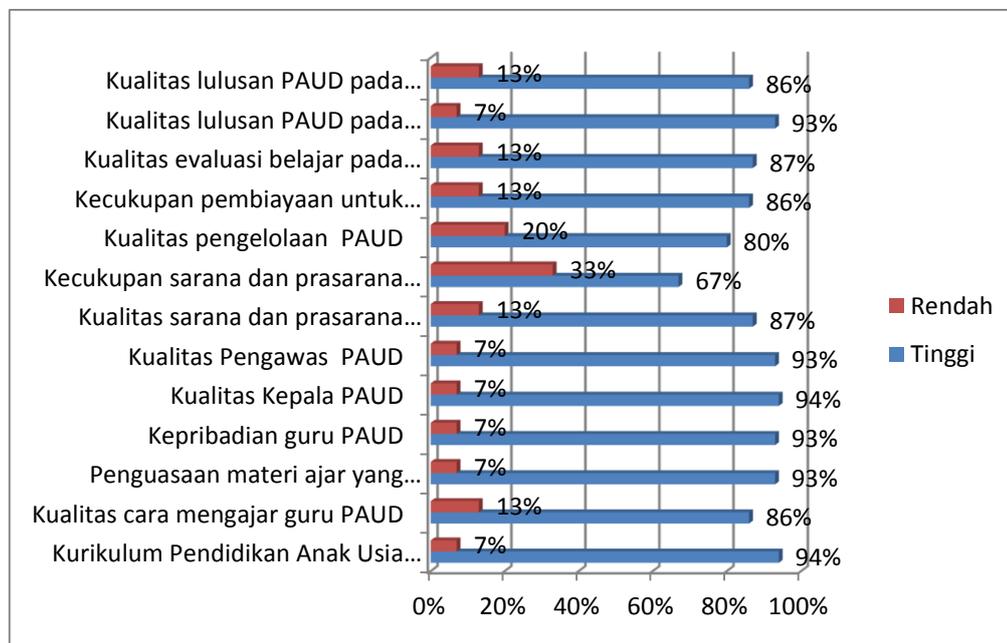
dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (86%), dan sebagian kecil (14%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 27. KUALITAS PELAYANAN PAUD BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI BANTEN (N=17)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini	27%	67%	7%	0%
Kualitas cara mengajar guru PAUD	13%	73%	13%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru PAUD	20%	73%	7%	0%
Kepribadian guru PAUD	13%	80%	7%	0%
Kualitas Kepala PAUD	7%	87%	7%	0%
Kualitas Pengawas PAUD	33%	60%	7%	0%
Kualitas sarana dan prasarana PAUD	20%	67%	13%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana PAUD	7%	60%	33%	0%
Kualitas pengelolaan PAUD	33%	47%	20%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk PAUD	13%	73%	13%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada PAUD	20%	67%	13%	0%
Kualitas lulusan PAUD pada aspek pengetahuan	13%	80%	7%	0%
Kualitas lulusan PAUD pada aspek sikap dan karakter	13%	73%	13%	0%
Rata-rata	18%	70%	12%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan masih

rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (67%), dan sebagian kecil (33%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (80%), dan sebagian kecil (20%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (86%), dan sebagian kecil (14%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan PAUD pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan PAUD pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah.



GAMBAR 4. 27. KUALITAS PELAYANAN PAUD diPROVINSI BANTEN

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) di provinsi DIY digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.28. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan PAUD hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru PAUD sebagian besar responden menyatakan rendah (41%), dan sebagian kecil (59%) menyatakan sudah cukup tinggi, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan

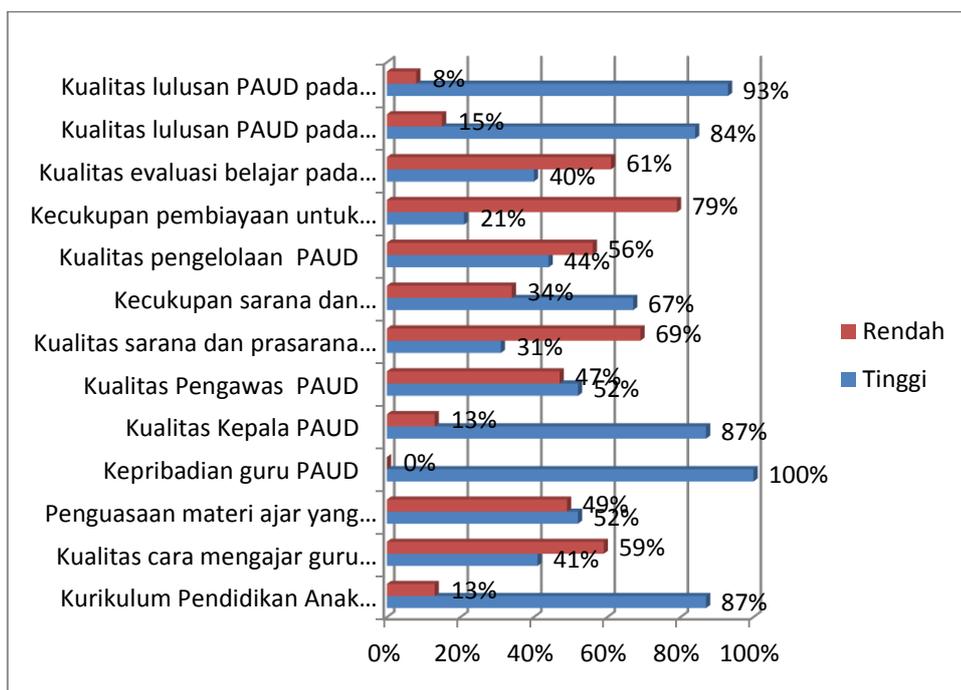
guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (52%), dan sebagian kecil (48%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (53%), dan sebagian kecil (47%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 28. KUALITAS PELAYANAN PAUD BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI DIY (N=40)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini	0%	87%	10%	3%
Kualitas cara mengajar guru PAUD	5%	36%	54%	5%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru PAUD	3%	49%	46%	3%
Kepribadian guru PAUD	13%	87%	0%	0%
Kualitas Kepala PAUD	8%	79%	13%	0%
Kualitas Pengawas PAUD	5%	47%	47%	0%
Kualitas sarana dan prasarana PAUD	5%	26%	64%	5%
Kecukupan sarana dan prasarana PAUD	3%	64%	31%	3%
Kualitas pengelolaan PAUD	8%	36%	56%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk PAUD	3%	18%	74%	5%
Kualitas evaluasi belajar pada PAUD	3%	37%	58%	3%
Kualitas lulusan PAUD pada aspek pengetahuan	5%	79%	15%	0%
Kualitas lulusan PAUD pada aspek sikap dan karakter	8%	85%	8%	0%
Rata-rata	5%	56%	37%	2%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana PAUD sebagian besar responden menyatakan masih rendah (59%), dan sebagian kecil (41%) menyatakan tinggi, (8) Kecukupan sarana dan prasarana PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (67%), dan sebagian kecil (33%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan PAUD sebagian besar responden menyatakan

rendah (56%), dan sebagian kecil (44%) menyatakan tinggi, (10) Kecukupan pembiayaan untuk PAUD sebagian besar responden menyatakan rendah (79%), dan sebagian kecil (21%) menyatakan tinggi, (11) Kualitas evaluasi belajar pada PAUD sebagian besar responden menyatakan rendah (61%), dan sebagian kecil (39%) menyatakan tinggi, (12) Kualitas lulusan PAUD pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (84%), dan sebagian kecil (16%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan PAUD pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah.



GAMBAR 4. 28. KUALITAS PELAYANAN PAUD di PROVINSI DIY

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) di provinsi Jateng digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.29. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan PAUD hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini sebagian besar responden menyatakan tinggi (83%), dan sebagian kecil (17%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (81%), dan sebagian kecil (19%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang

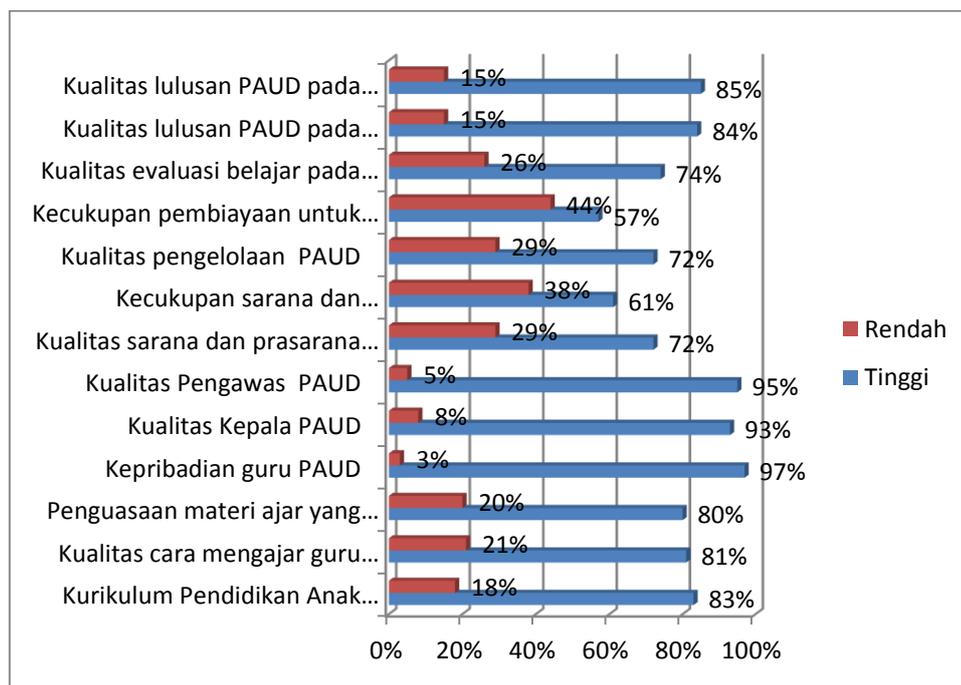
diajarkan guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (80%), dan sebagian kecil (20%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 29. KUALITAS PELAYANAN PAUD BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI JATENG

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini	15%	68%	15%	3%
Kualitas cara mengajar guru PAUD	13%	68%	18%	3%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru PAUD	10%	70%	20%	0%
Kepribadian guru PAUD	33%	64%	3%	0%
Kualitas Kepala PAUD	10%	83%	8%	0%
Kualitas Pengawas PAUD	28%	67%	5%	0%
Kualitas sarana dan prasarana PAUD	10%	62%	26%	3%
Kecukupan sarana dan prasarana PAUD	5%	56%	38%	0%
Kualitas pengelolaan PAUD	13%	59%	26%	3%
Kecukupan pembiayaan untuk PAUD	3%	54%	44%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada PAUD	10%	64%	26%	0%
Kualitas lulusan PAUD pada aspek pengetahuan	15%	69%	15%	0%
Kualitas lulusan PAUD pada aspek sikap dan karakter	21%	64%	15%	0%
Rata-rata	14%	65%	20%	1%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (82%), dan sebagian kecil (18%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (61%), dan sebagian kecil (39%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (72%), dan sebagian kecil (28%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk

PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (57%), dan sebagian kecil (43%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (74%), dan sebagian kecil (24%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan PAUD pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan PAUD pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah.



GAMBAR 4. 29. KUALITAS PELAYANAN PAUD di PROVINSI JATENG

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) di provinsi Jatim digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.30. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari "sangat tinggi" sampai dengan "rendah". Data kualitas layanan PAUD hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini sebagian besar responden menyatakan tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (86%), dan

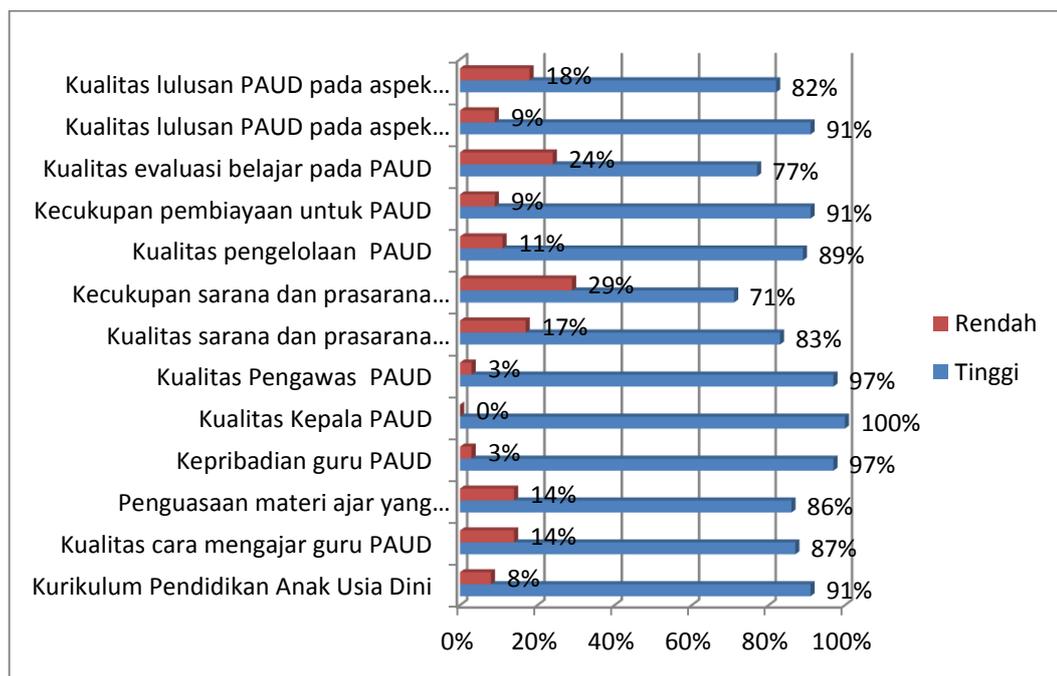
sebagian kecil (14%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 30. KUALITAS PELAYANAN PAUD BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI JATIM (N=39)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini	22%	69%	8%	0%
Kualitas cara mengajar guru PAUD	14%	73%	14%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru PAUD	19%	67%	14%	0%
Kepribadian guru PAUD	39%	58%	3%	0%
Kualitas Kepala PAUD	21%	79%	0%	0%
Kualitas Pengawas PAUD	26%	71%	3%	0%
Kualitas sarana dan prasarana PAUD	17%	66%	17%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana PAUD	9%	62%	29%	0%
Kualitas pengelolaan PAUD	20%	69%	11%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk PAUD	15%	76%	9%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada PAUD	9%	68%	24%	0%
Kualitas lulusan PAUD pada aspek pengetahuan	12%	79%	9%	0%
Kualitas lulusan PAUD pada aspek sikap dan karakter	15%	67%	18%	0%
Rata-rata	18%	70%	12%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (83%), dan sebagian kecil (17%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (71%), dan sebagian kecil (29%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (89%), dan sebagian kecil (11%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk

PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (91%), dan sebagian kecil (9%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (77%), dan sebagian kecil (23%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan PAUD pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (91%), dan sebagian kecil (9%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan PAUD pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (82%), dan sebagian kecil (17%) menyatakan rendah.



GAMBAR 4. 30. KUALITAS PELAYANAN PAUD di PROVINSI JATIM

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) di provinsi Jabar dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.31. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan PAUD hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini sebagian besar responden menyatakan tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (81%), dan sebagian kecil (19%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (85%), dan sebagian

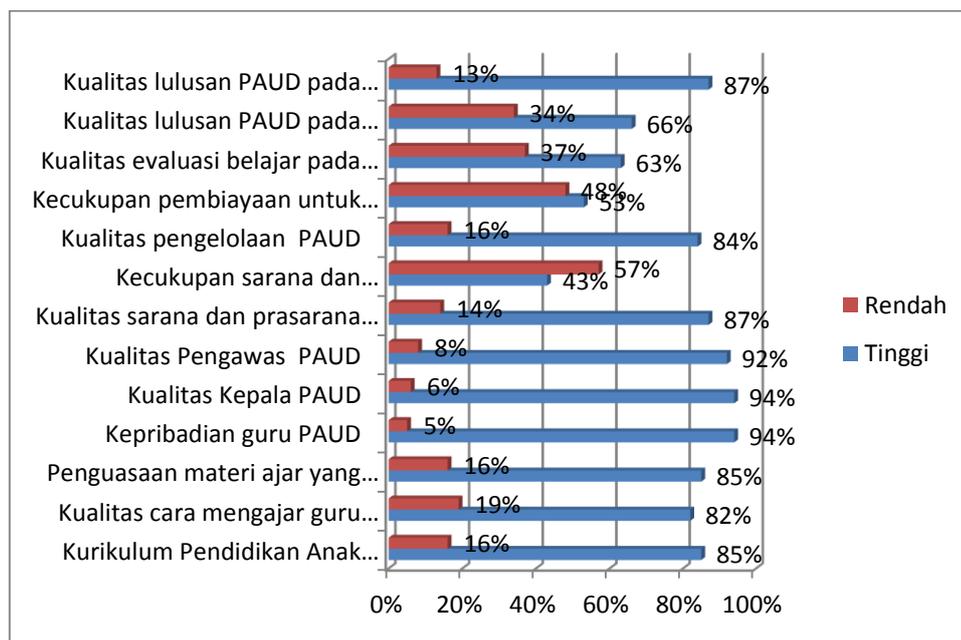
kecil (15%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 31. KUALITAS PELAYANAN PAUD BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI JABAR (N=41)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini	3%	82%	16%	0%
Kualitas cara mengajar guru PAUD	3%	79%	16%	3%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru PAUD	3%	82%	13%	3%
Kepribadian guru PAUD	5%	89%	5%	0%
Kualitas Kepala PAUD	5%	89%	3%	3%
Kualitas Pengawas PAUD	3%	89%	5%	3%
Kualitas sarana dan prasarana PAUD	3%	84%	11%	3%
Kecukupan sarana dan prasarana PAUD	0%	43%	54%	3%
Kualitas pengelolaan PAUD	0%	84%	16%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk PAUD	0%	53%	32%	16%
Kualitas evaluasi belajar pada PAUD	0%	63%	34%	3%
Kualitas lulusan PAUD pada aspek pengetahuan	3%	63%	34%	0%
Kualitas lulusan PAUD pada aspek sikap dan karakter	3%	84%	13%	0%
Rata-rata	2%	76%	19%	3%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana PAUD sebagian besar responden menyatakan rendah (43%), dan sebagian kecil (57%) menyatakan tinggi, (9) Kualitas pengelolaan PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (84%), dan sebagian kecil (16%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk

PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (53%), dan sebagian kecil (47%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (63%), dan sebagian kecil (37%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan PAUD pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (66%), dan sebagian kecil (34%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan PAUD pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah.



GAMBAR 4. 31. KUALITAS PELAYANAN PAUD di PROVINSI JABAR

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) di provinsi Kaltim digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.32. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari "sangat tinggi" sampai dengan "rendah". Data kualitas layanan PAUD hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini sebagian besar responden menyatakan tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (79%), dan sebagian kecil (21%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (82%), dan sebagian kecil (18%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru PAUD sebagian

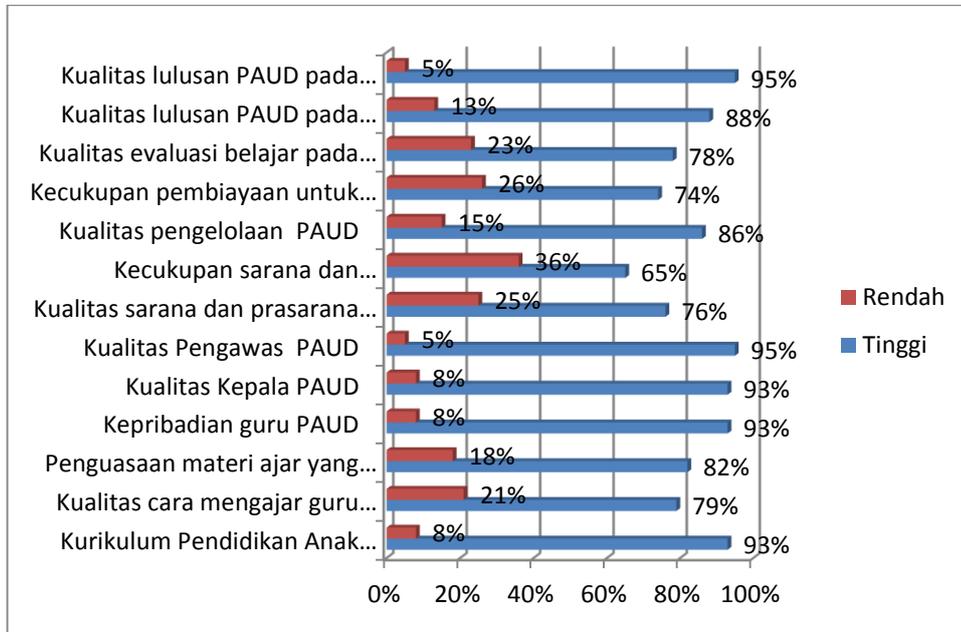
besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 32. KUALITAS PELAYANAN PAUD BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI KALTIM

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini	13%	80%	5%	3%
Kualitas cara mengajar guru PAUD	5%	74%	21%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru PAUD	8%	74%	18%	0%
Kepribadian guru PAUD	23%	70%	8%	0%
Kualitas Kepala PAUD	21%	72%	8%	0%
Kualitas Pengawas PAUD	18%	77%	5%	0%
Kualitas sarana dan prasarana PAUD	8%	68%	25%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana PAUD	3%	62%	36%	0%
Kualitas pengelolaan PAUD	3%	83%	15%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk PAUD	5%	69%	26%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada PAUD	5%	73%	23%	0%
Kualitas lulusan PAUD pada aspek pengetahuan	3%	85%	13%	0%
Kualitas lulusan PAUD pada aspek sikap dan karakter	5%	90%	5%	0%
Rata-rata	9%	75%	16%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (76%), dan sebagian kecil (24%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (65%), dan sebagian kecil (35%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (86%), dan sebagian kecil (14%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (74%), dan sebagian kecil (26%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (78%), dan sebagian kecil (22%) menyatakan

rendah, (12) Kualitas lulusan PAUD pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (88%), dan sebagian kecil (12%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan PAUD pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah.



GAMBAR 4. 32. KUALITAS PELAYANAN PAUD di PROVINSI KALTIM

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) di provinsi NTB digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.33. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan PAUD hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini sebagian besar responden menyatakan tinggi (86%), dan sebagian kecil (14%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (73%), dan sebagian kecil (27%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas PAUD sebagian besar responden

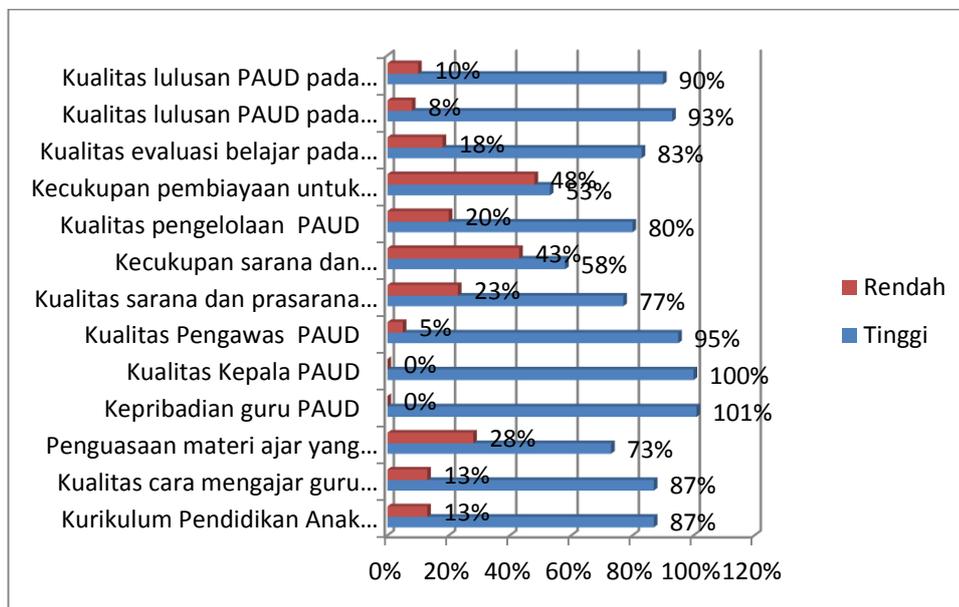
menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 33. KUALITAS PELAYANAN PAUD BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI NTB (N=40)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini	16%	71%	13%	0%
Kualitas cara mengajar guru PAUD	11%	76%	13%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru PAUD	13%	60%	28%	0%
Kepribadian guru PAUD	48%	53%	0%	0%
Kualitas Kepala PAUD	36%	64%	0%	0%
Kualitas Pengawas PAUD	36%	59%	5%	0%
Kualitas sarana dan prasarana PAUD	13%	64%	23%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana PAUD	0%	58%	43%	0%
Kualitas pengelolaan PAUD	15%	65%	20%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk PAUD	8%	45%	48%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada PAUD	8%	75%	18%	0%
Kualitas lulusan PAUD pada aspek pengetahuan	8%	85%	8%	0%
Kualitas lulusan PAUD pada aspek sikap dan karakter	15%	75%	10%	0%
Rata-rata	17%	65%	18%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (77%), dan sebagian kecil (23%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (58%), dan sebagian kecil (42%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (80%), dan sebagian kecil (20%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (53%), dan sebagian kecil (47%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (83%), dan sebagian kecil (17%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan PAUD pada aspek pengetahuan sebagian besar

responden menyatakan tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan PAUD pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah.



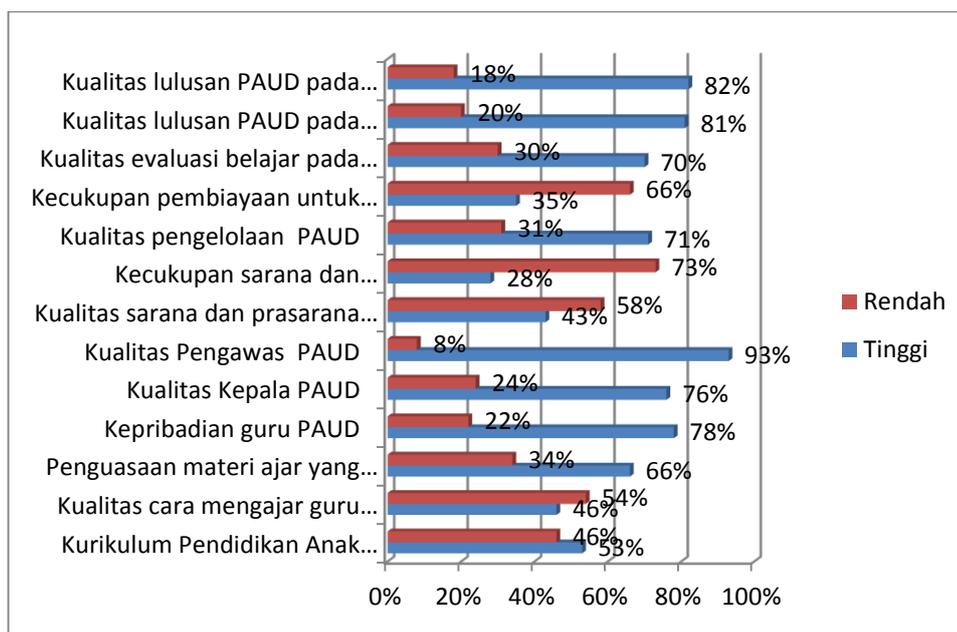
GAMBAR 4. 33. KUALITAS PELAYANAN PAUD di PROVINSI NTB

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) di provinsi NTT digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.34. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari "sangat tinggi" sampai dengan "rendah". Data kualitas layanan PAUD hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini sebagian besar responden menyatakan tinggi (54%), dan sebagian kecil (46%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru PAUD sebagian besar responden menyatakan rendah (54%), dan sebagian kecil (46%) menyatakansudah cukup tinggi, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (66%), dan sebagian kecil (34%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (78%), dan sebagian kecil (22%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (76%), dan sebagian kecil (24%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 34. KUALITAS PELAYANAN PAUD BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI NTT

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini	2%	51%	34%	12%
Kualitas cara mengajar guru PAUD	0%	46%	34%	20%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru PAUD	0%	66%	24%	10%
Kepribadian guru PAUD	7%	71%	12%	10%
Kualitas Kepala PAUD	5%	71%	24%	0%
Kualitas Pengawas PAUD	5%	88%	8%	0%
Kualitas sarana dan prasarana PAUD	0%	43%	48%	10%
Kecukupan sarana dan prasarana PAUD	0%	28%	60%	13%
Kualitas pengelolaan PAUD	3%	68%	23%	8%
Kecukupan pembiayaan untuk PAUD	0%	35%	48%	18%
Kualitas evaluasi belajar pada PAUD	0%	70%	25%	5%
Kualitas lulusan PAUD pada aspek pengetahuan	3%	78%	20%	0%
Kualitas lulusan PAUD pada aspek sikap dan karakter	3%	79%	15%	3%
Rata-rata	2%	61%	29%	8%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana PAUD sebagian besar responden menyatakan masih rendah (58%), dan sebagian kecil (34%) menyatakan tinggi, (8) Kecukupan sarana dan prasarana PAUD sebagian besar responden menyatakan rendah (73%), dan sebagian kecil (27%) menyatakan tinggi, (9) Kualitas pengelolaan PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (71%), dan sebagian kecil (29%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk PAUD sebagian besar responden menyatakan rendah (66%), dan sebagian kecil (34%) menyatakan tinggi, (11) Kualitas evaluasi belajar pada PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (70%), dan sebagian kecil (30%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan PAUD pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (81%), dan sebagian kecil (19%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan PAUD pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (82%), dan sebagian kecil (18%) menyatakan rendah.



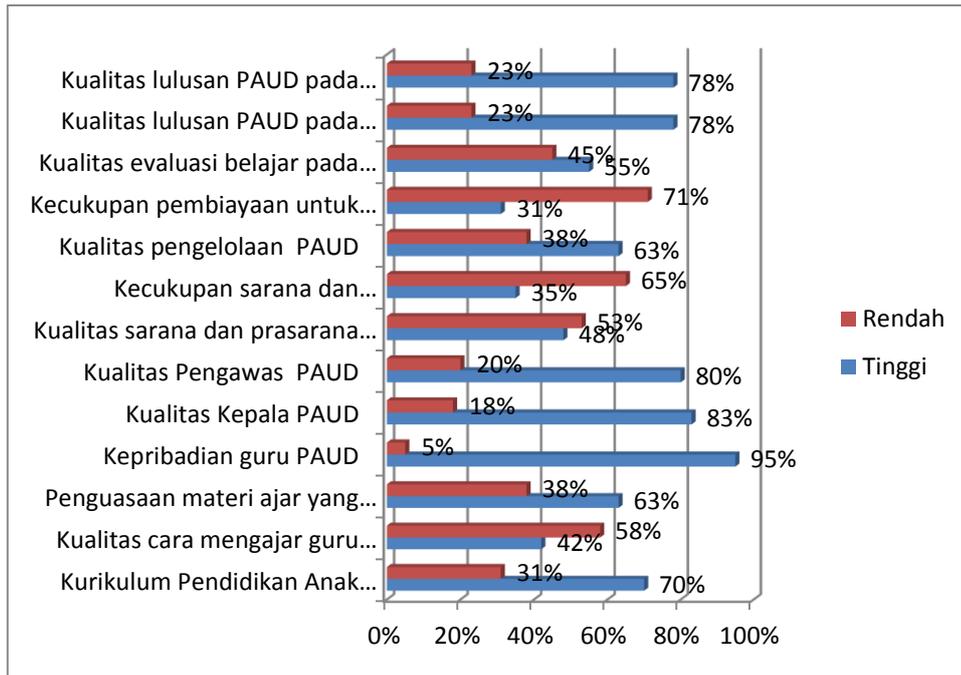
GAMBAR 4. 34. KUALITAS PELAYANAN PAUD di PROVINSI NTT

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) di provinsi Sumbar digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.35. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan PAUD hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini sebagian besar responden menyatakan tinggi (70%), dan sebagian kecil (30%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru PAUD sebagian besar responden menyatakan rendah (58%), dan sebagian kecil (42%) menyatakan sudah cukup tinggi, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (63%), dan sebagian kecil (37%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (83%), dan sebagian kecil (17%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas PAUD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (80%), dan sebagian kecil (20%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 35. KUALITAS PELAYANAN PAUD BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI SUMBAR (N=40)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini	0%	70%	23%	8%
Kualitas cara mengajar guru PAUD	3%	39%	53%	5%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru PAUD	5%	58%	35%	3%
Kepribadian guru PAUD	21%	74%	5%	0%
Kualitas Kepala PAUD	18%	65%	15%	3%
Kualitas Pengawas PAUD	15%	65%	20%	0%
Kualitas sarana dan prasarana PAUD	8%	40%	50%	3%
Kecukupan sarana dan prasarana PAUD	0%	35%	60%	5%
Kualitas pengelolaan PAUD	3%	60%	30%	8%
Kecukupan pembiayaan untuk PAUD	3%	28%	58%	13%
Kualitas evaluasi belajar pada PAUD	5%	50%	40%	5%
Kualitas lulusan PAUD pada aspek pengetahuan	3%	75%	20%	3%
Kualitas lulusan PAUD pada aspek sikap dan karakter	15%	63%	18%	5%
Rata-rata	8%	56%	33%	5%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana PAUD sebagian besar responden menyatakan masih rendah (53%), dan sebagian kecil (47%) menyatakan tinggi, (8) Kecukupan sarana dan prasarana PAUD sebagian besar responden menyatakan rendah (65%), dan sebagian kecil (35%) menyatakan tinggi, (9) Kualitas pengelolaan PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (63%), dan sebagian kecil (37%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk PAUD sebagian besar responden menyatakan rendah (70%), dan sebagian kecil (30%) menyatakan tinggi, (11) Kualitas evaluasi belajar pada PAUD sebagian besar responden menyatakan tinggi (55%), dan sebagian kecil (45%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan PAUD pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (78%), dan sebagian kecil (22%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan PAUD pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (78%), dan sebagian kecil (2%) menyatakan rendah.



GAMBAR 4. 35. KUALITAS PELAYANAN PAUD di PROVINSI SUMBAR

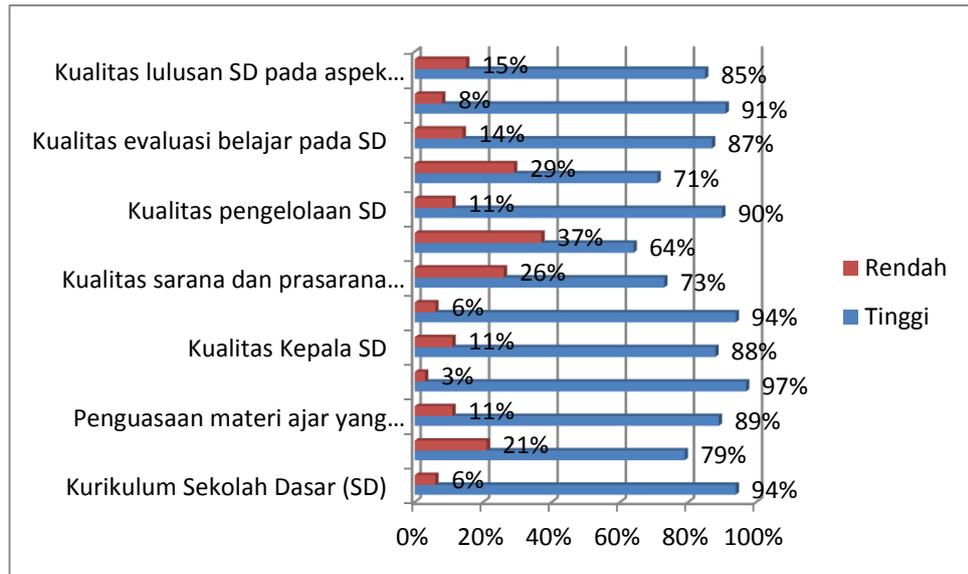
b. Kualitas Pelayanan SD

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan dasar (SD) secara nasional digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.36. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SD hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (79%), dan sebagian kecil (21%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (89%), dan sebagian kecil (11%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (88%), dan sebagian kecil (12%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 36. KUALITAS PELAYANAN SD BERDASARKAN RESPONDEN NASIONAL(N = 370)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Dasar (SD)	17%	77%	6%	0%
Kualitas cara mengajar guru SD	10%	69%	20%	1%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SD	10%	79%	10%	1%
Kepribadian guru SD	24%	73%	3%	0%
Kualitas Kepala SD	17%	71%	11%	0%
Kualitas Pengawas SD	20%	74%	6%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SD	10%	63%	25%	1%
Kecukupan sarana dan prasarana SD	5%	59%	35%	2%
Kualitas pengelolaan SD	12%	78%	10%	1%
Kecukupan pembiayaan untuk SD	9%	62%	26%	3%
Kualitas evaluasi belajar pada SD	10%	77%	13%	1%
Kualitas lulusan SD pada aspek pengetahuan	11%	80%	8%	0%
Kualitas lulusan SD pada aspek sikap dan karakter	14%	71%	14%	1%
Rata-rata	13%	72%	14%	1%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (73%), dan sebagian kecil (27%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (64%), dan sebagian kecil (36%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (89%), dan sebagian kecil (11%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (71%), dan sebagian kecil (29%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SD pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (91%), dan sebagian kecil (9%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SD pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah.



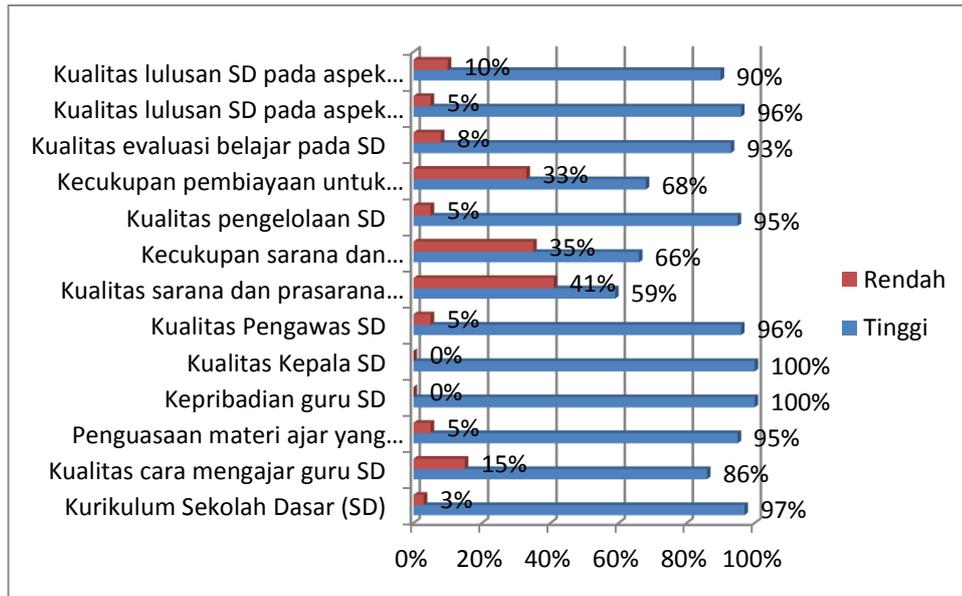
GAMBAR 4. 36. KUALITAS PELAYANAN SD secara NASIONAL

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan sekolah dasar (SD) di provinsi Bali digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.37. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SD hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (86%), dan sebagian kecil (14%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 37. KUALITAS PELAYANAN SD BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI BALI (N=40)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Dasar (SD)	18%	79%	3%	0%
Kualitas cara mengajar guru SD	8%	78%	15%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SD	5%	90%	5%	0%
Kepribadian guru SD	20%	80%	0%	0%
Kualitas Kepala SD	15%	85%	0%	0%
Kualitas Pengawas SD	13%	83%	5%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SD	0%	59%	41%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana SD	3%	63%	35%	0%
Kualitas pengelolaan SD	10%	85%	5%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SD	5%	63%	33%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada SD	8%	85%	8%	0%
Kualitas lulusan SD pada aspek pengetahuan	8%	88%	5%	0%
Kualitas lulusan SD pada aspek sikap dan karakter	15%	75%	10%	0%
Rata-rata	10%	78%	13%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (59%), dan sebagian kecil (41%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (66%), dan sebagian kecil (34%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (68%), dan sebagian kecil (32%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SD pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (96%), dan sebagian kecil (4%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SD pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah.



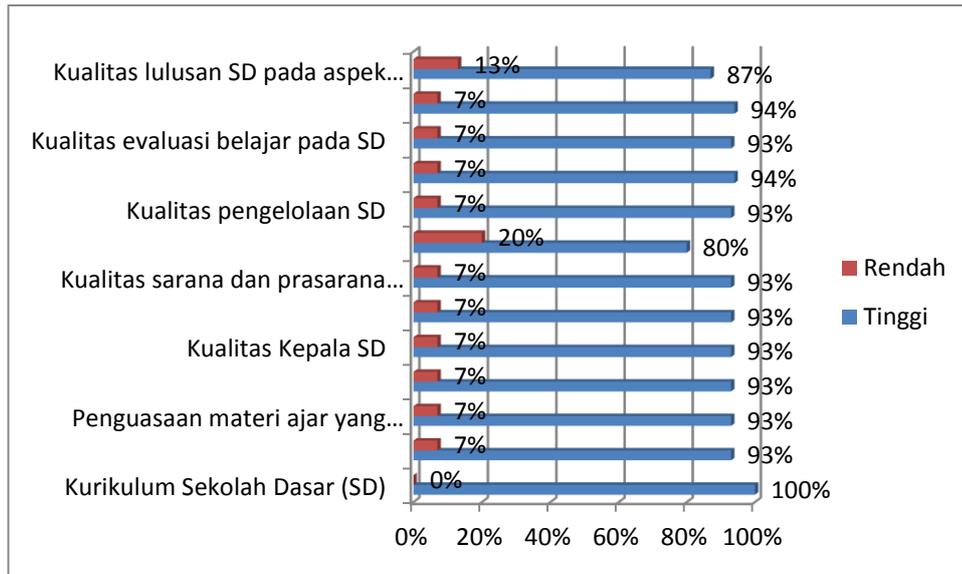
GAMBAR 4. 37. KUALITAS PELAYANAN SD di PROVINSI BALI

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan sekolah dasar (SD) di provinsi Banten digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.37. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SD hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 38. KUALITAS PELAYANAN SD BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI BANTEN (N=17)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Dasar (SD)	33%	67%	0%	0%
Kualitas cara mengajar guru SD	20%	73%	7%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SD	20%	73%	7%	0%
Kepribadian guru SD	20%	73%	7%	0%
Kualitas Kepala SD	33%	60%	7%	0%
Kualitas Pengawas SD	40%	53%	7%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SD	40%	53%	7%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana SD	20%	60%	20%	0%
Kualitas pengelolaan SD	40%	53%	7%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SD	27%	67%	7%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada SD	20%	73%	7%	0%
Kualitas lulusan SD pada aspek pengetahuan	27%	67%	7%	0%
Kualitas lulusan SD pada aspek sikap dan karakter	20%	67%	13%	0%
Rata-rata	28%	65%	8%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (80%), dan sebagian kecil (20%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SD pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SD pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah.



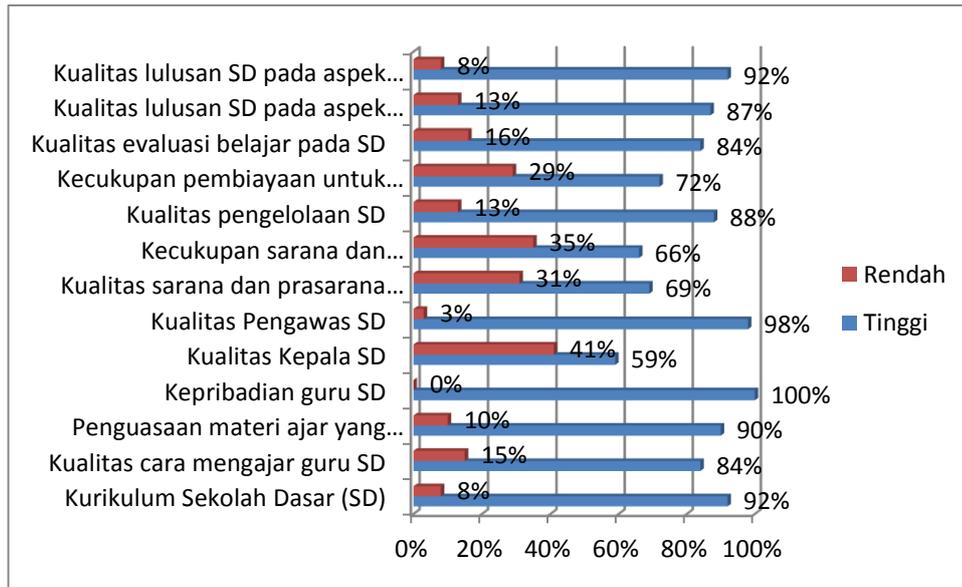
GAMBAR 4. 38. KUALITAS PELAYANAN SD diPROVINSI BANTEN

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan anak usia dini (SD) di provinsi DIY digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.39. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SD hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (59%), dan sebagian kecil (41%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 39. KUALITAS PELAYANAN SD BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI
DIY (N=40)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Dasar (SD)	8%	84%	8%	0%
Kualitas cara mengajar guru SD	5%	79%	15%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SD	3%	87%	10%	0%
Kepribadian guru SD	15%	85%	0%	0%
Kualitas Kepala SD	5%	54%	41%	0%
Kualitas Pengawas SD	13%	85%	3%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SD	5%	64%	28%	3%
Kecukupan sarana dan prasarana SD	0%	66%	32%	3%
Kualitas pengelolaan SD	3%	85%	13%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SD	8%	64%	26%	3%
Kualitas evaluasi belajar pada SD	5%	79%	13%	3%
Kualitas lulusan SD pada aspek pengetahuan	0%	87%	13%	0%
Kualitas lulusan SD pada aspek sikap dan karakter	5%	87%	8%	0%
Rata-rata	6%	77%	16%	1%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (69%), dan sebagian kecil (31%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (66%), dan sebagian kecil (44%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (88%), dan sebagian kecil (12%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (70%), dan sebagian kecil (30%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (84%), dan sebagian kecil (16%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SD pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SD pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah.



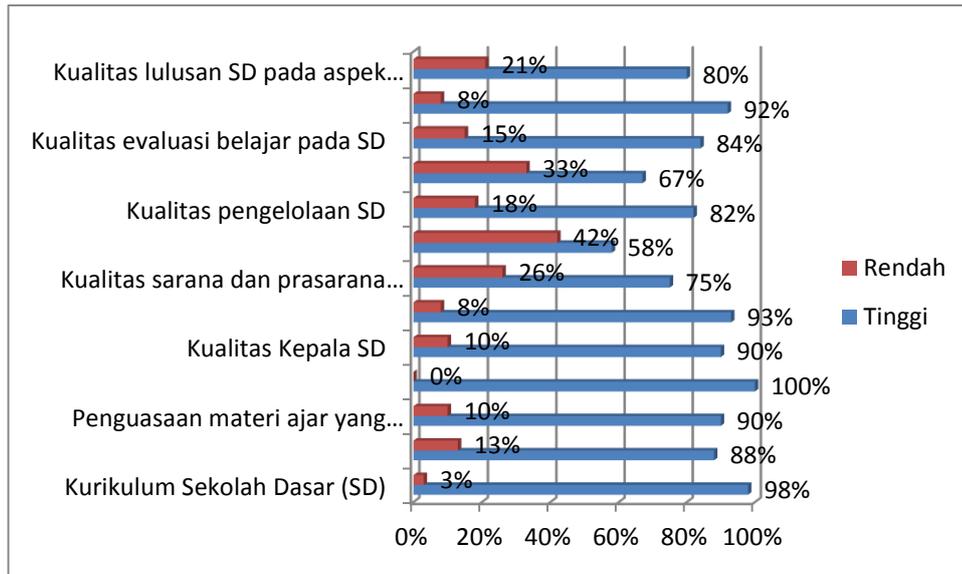
GAMBAR 4. 39. KUALITAS PELAYANAN SD di PROVINSI DIY

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan anak usia dini (SD) di provinsi Jateng digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.40. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SD hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (98%), dan sebagian kecil (2%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (88%), dan sebagian kecil (12%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 40. KUALITAS PELAYANAN SD BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI JATENG (N=41)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Dasar (SD)	20%	78%	3%	0%
Kualitas cara mengajar guru SD	18%	70%	10%	3%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SD	15%	75%	10%	0%
Kepribadian guru SD	33%	67%	0%	0%
Kualitas Kepala SD	31%	59%	10%	0%
Kualitas Pengawas SD	31%	62%	8%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SD	3%	72%	23%	3%
Kecukupan sarana dan prasarana SD	3%	55%	42%	0%
Kualitas pengelolaan SD	13%	69%	15%	3%
Kecukupan pembiayaan untuk SD	5%	62%	33%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada SD	15%	69%	15%	0%
Kualitas lulusan SD pada aspek pengetahuan	18%	74%	8%	0%
Kualitas lulusan SD pada aspek sikap dan karakter	18%	62%	21%	0%
Rata-rata	17%	67%	15%	1%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (74%), dan sebagian kecil (26%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (58%), dan sebagian kecil (42%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (82%), dan sebagian kecil (18%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (67%), dan sebagian kecil (33%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (84%), dan sebagian kecil (16%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SD pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SD pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (79%), dan sebagian kecil (21%) menyatakan rendah.



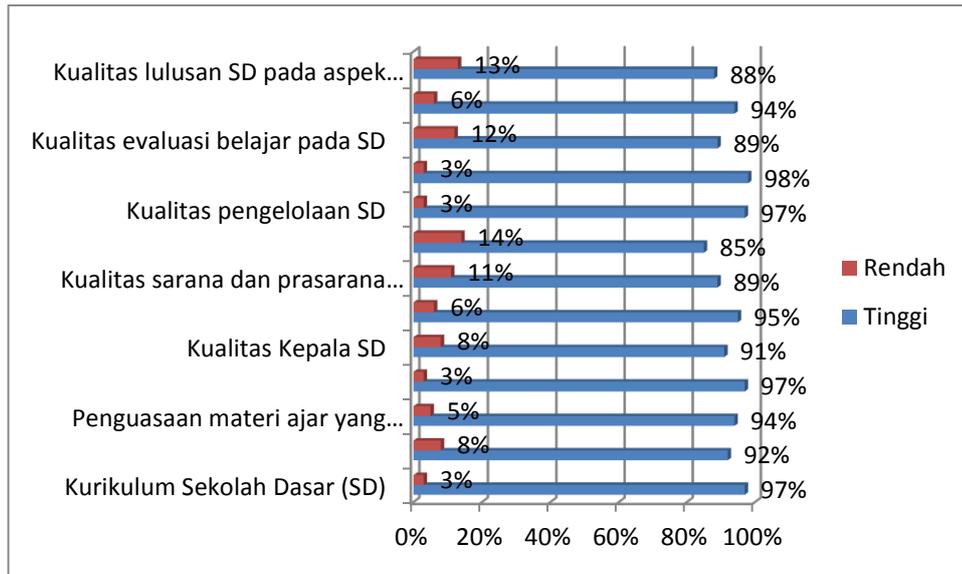
GAMBAR 4. 40. KUALITAS PELAYANAN SD di PROVINSI JATENG

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan sekolah dasar (SD) di provinsi Jatim digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.41. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SD hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 41. KUALITAS PELAYANAN SD BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI JATIM (N=39)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Dasar (SD)	34%	63%	3%	0%
Kualitas cara mengajar guru SD	19%	73%	8%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SD	24%	70%	5%	0%
Kepribadian guru SD	28%	69%	3%	0%
Kualitas Kepala SD	19%	72%	8%	0%
Kualitas Pengawas SD	26%	69%	6%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SD	26%	63%	11%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana SD	14%	71%	14%	0%
Kualitas pengelolaan SD	23%	74%	3%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SD	24%	74%	3%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada SD	15%	74%	12%	0%
Kualitas lulusan SD pada aspek pengetahuan	18%	76%	6%	0%
Kualitas lulusan SD pada aspek sikap dan karakter	19%	69%	13%	0%
Rata-rata	22%	71%	7%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (89%), dan sebagian kecil (11%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (98%), dan sebagian kecil (2%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (89%), dan sebagian kecil (11%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SD pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SD pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah.



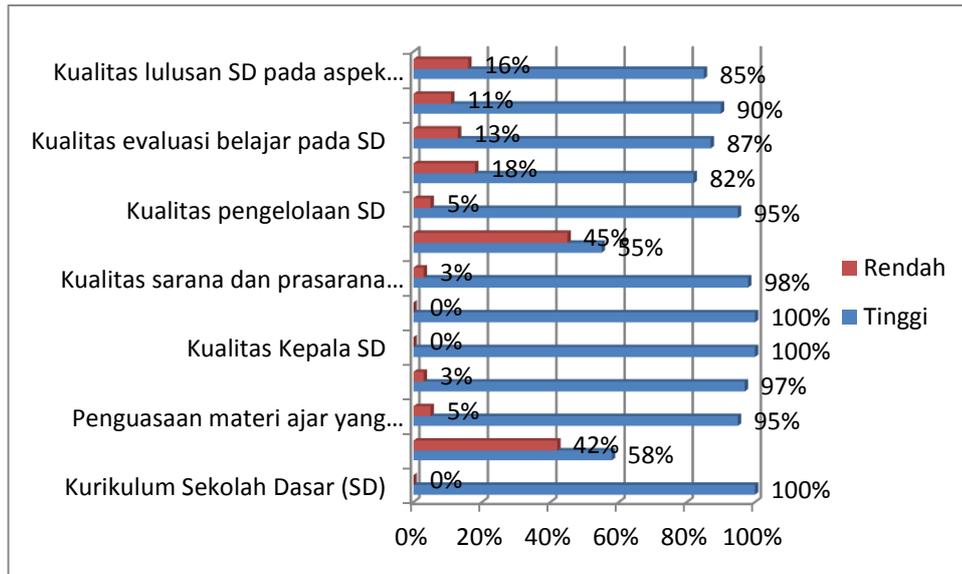
GAMBAR 4. 41. KUALITAS PELAYANAN SD di PROVINSI JATIM

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan sekolah dasar (SD) di provinsi Jabar digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.42. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SD hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (58%), dan sebagian kecil (42%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah.

TABEL 4. 42. KUALITAS PELAYANAN SD BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI JABAR (N=41)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Dasar (SD)	3%	97%	0%	0%
Kualitas cara mengajar guru SD	5%	53%	39%	3%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SD	3%	92%	5%	0%
Kepribadian guru SD	8%	89%	3%	0%
Kualitas Kepala SD	5%	95%	0%	0%
Kualitas Pengawas SD	3%	97%	0%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SD	3%	95%	3%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana SD	0%	55%	45%	0%
Kualitas pengelolaan SD	3%	92%	5%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SD	3%	79%	10%	8%
Kualitas evaluasi belajar pada SD	3%	84%	13%	0%
Kualitas lulusan SD pada aspek pengetahuan	3%	87%	11%	0%
Kualitas lulusan SD pada aspek sikap dan karakter	24%	61%	16%	0%
Rata-rata	5%	83%	12%	1%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (55%), dan sebagian kecil (45%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (82%), dan sebagian kecil (18%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SD pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SD pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (84%), dan sebagian kecil (16%) menyatakan rendah.



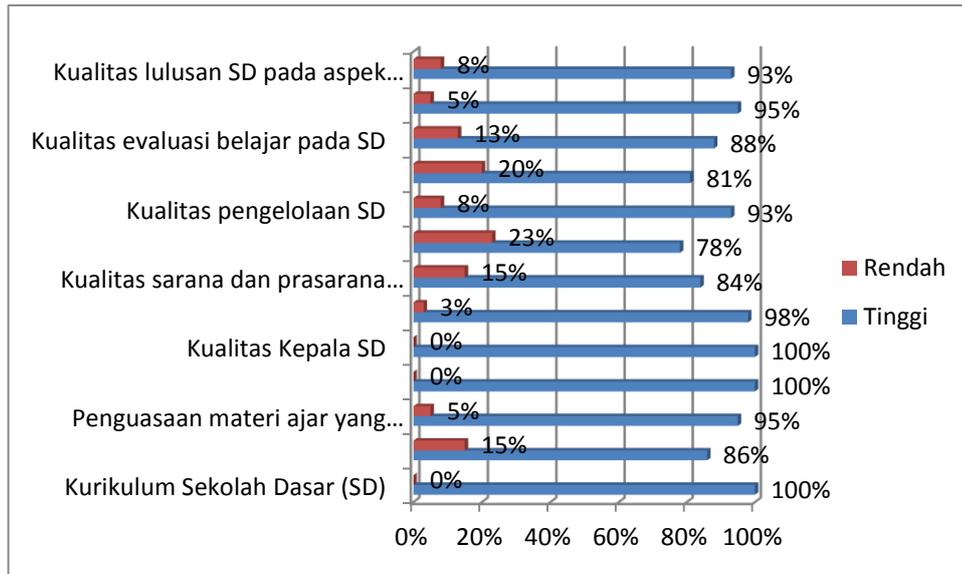
GAMBAR 4. 42. KUALITAS PELAYANAN SD di PROVINSI JABAR

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan sekolah dasar (SD) di provinsi Kaltim digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.43. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SD hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (86%), dan sebagian kecil (14%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 43. KUALITAS PELAYANAN SD BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI KALTIM (N=40)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Dasar (SD)	13%	88%	0%	0%
Kualitas cara mengajar guru SD	8%	78%	15%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SD	10%	85%	5%	0%
Kepribadian guru SD	25%	75%	0%	0%
Kualitas Kepala SD	25%	75%	0%	0%
Kualitas Pengawas SD	25%	73%	3%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SD	10%	74%	15%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana SD	3%	75%	23%	0%
Kualitas pengelolaan SD	5%	88%	8%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SD	8%	73%	20%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada SD	8%	80%	13%	0%
Kualitas lulusan SD pada aspek pengetahuan	10%	85%	5%	0%
Kualitas lulusan SD pada aspek sikap dan karakter	8%	85%	8%	0%
Rata-rata	12%	80%	9%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (66%), dan sebagian kecil (34%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (88%), dan sebagian kecil (12%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SD pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SD pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah.



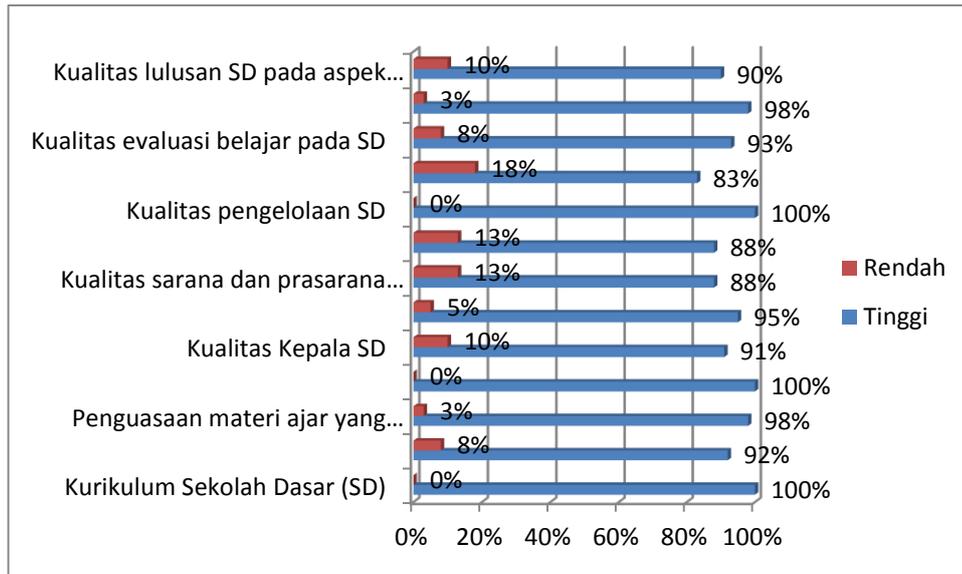
GAMBAR 4. 43. KUALITAS PELAYANAN SD di PROVINSI KALTIM

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan sekolah dasar (SD) di provinsi NTB digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.44. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SD hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 44. KUALITAS PELAYANAN SD BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI NTB (N=40)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Dasar (SD)	40%	60%	0%	0%
Kualitas cara mengajar guru SD	23%	69%	8%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SD	25%	73%	3%	0%
Kepribadian guru SD	55%	45%	0%	0%
Kualitas Kepala SD	33%	58%	10%	0%
Kualitas Pengawas SD	40%	55%	5%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SD	30%	58%	13%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana SD	13%	75%	13%	0%
Kualitas pengelolaan SD	25%	75%	0%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SD	20%	63%	18%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada SD	23%	70%	8%	0%
Kualitas lulusan SD pada aspek pengetahuan	25%	73%	3%	0%
Kualitas lulusan SD pada aspek sikap dan karakter	15%	75%	10%	0%
Rata-rata	28%	65%	7%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (88%), dan sebagian kecil (12%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (83%), dan sebagian kecil (17%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SD pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SD pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah.



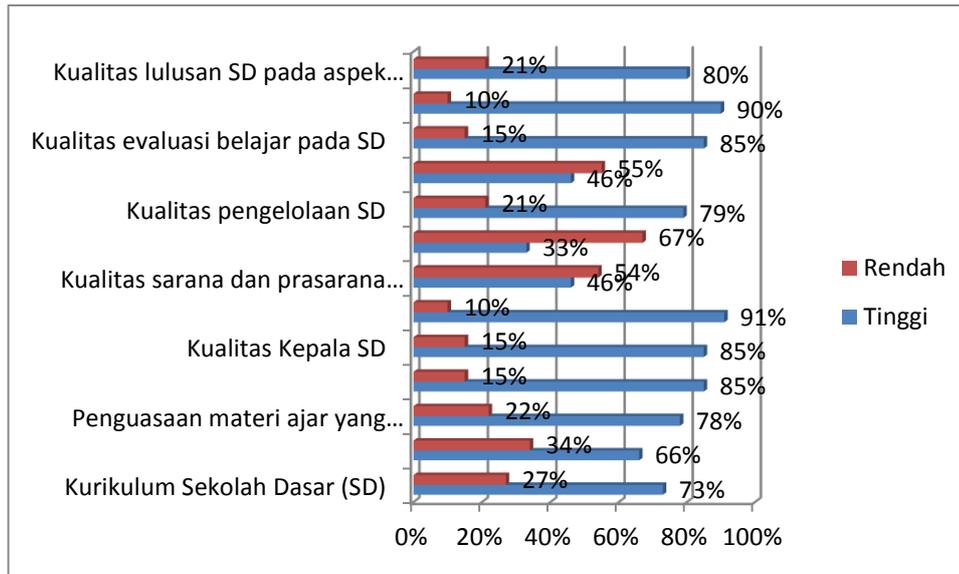
GAMBAR 4. 44. KUALITAS PELAYANAN SD di PROVINSI NTB

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan anak usia dini (SD) di provinsi NTT digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.45. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SD hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (73%), dan sebagian kecil (27%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (66%), dan sebagian kecil (34%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (78%), dan sebagian kecil (22%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 45. KUALITAS PELAYANAN SD BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI NTT (N=41)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Dasar (SD)	2%	71%	27%	0%
Kualitas cara mengajar guru SD	0%	66%	29%	5%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SD	0%	78%	20%	2%
Kepribadian guru SD	7%	78%	15%	0%
Kualitas Kepala SD	5%	80%	15%	0%
Kualitas Pengawas SD	8%	83%	10%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SD	0%	46%	49%	5%
Kecukupan sarana dan prasarana SD	0%	33%	59%	8%
Kualitas pengelolaan SD	5%	74%	21%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SD	3%	43%	45%	10%
Kualitas evaluasi belajar pada SD	0%	85%	15%	0%
Kualitas lulusan SD pada aspek pengetahuan	0%	90%	10%	0%
Kualitas lulusan SD pada aspek sikap dan karakter	5%	75%	18%	3%
Rata-rata	3%	69%	26%	3%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SD sebagian besar responden menyatakan rendah (54%), dan sebagian kecil (46%) menyatakan masihtinggi, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SD sebagian besar responden menyatakan rendah (67%), dan sebagian kecil (33%) menyatakantinggi, (9) Kualitas pengelolaan SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (79%), dan sebagian kecil (21%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SD sebagian besar responden menyatakan rendah (65%), dan sebagian kecil (35%) menyatakan tinggi, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SD pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SD pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (80%), dan sebagian kecil (20%) menyatakan rendah.



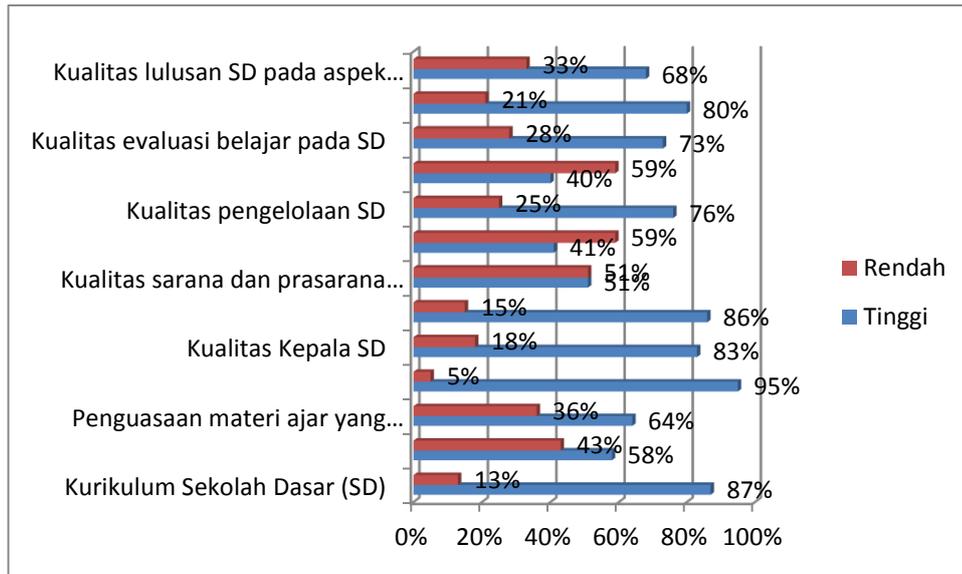
GAMBAR 4. 45. KUALITAS PELAYANAN SD di PROVINSI NTT

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan anak usia dini (SD) di provinsi SUMBAR digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.46. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SD hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (58%), dan sebagian kecil (42%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (64%), dan sebagian kecil (36%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (83%), dan sebagian kecil (17%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SD sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 46. KUALITAS PELAYANAN SD BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI SUMBAR (N=40)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Dasar (SD)	8%	79%	13%	0%
Kualitas cara mengajar guru SD	3%	55%	40%	3%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SD	5%	59%	31%	5%
Kepribadian guru SD	25%	70%	5%	0%
Kualitas Kepala SD	13%	70%	18%	0%
Kualitas Pengawas SD	13%	73%	15%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SD	8%	43%	48%	3%
Kecukupan sarana dan prasarana SD	5%	36%	54%	5%
Kualitas pengelolaan SD	8%	68%	20%	5%
Kecukupan pembiayaan untuk SD	5%	35%	51%	8%
Kualitas evaluasi belajar pada SD	8%	65%	25%	3%
Kualitas lulusan SD pada aspek pengetahuan	15%	65%	18%	3%
Kualitas lulusan SD pada aspek sikap dan karakter	15%	53%	28%	5%
Rata-rata	10%	59%	28%	3%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SD sebagian responden menyatakan tinggi (51%), dan sebagian (51%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SD sebagian besar responden menyatakan rendah (59%), dan sebagian kecil (41%) menyatakan tinggi, (9) Kualitas pengelolaan SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (76%), dan sebagian kecil (24%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SD sebagian besar responden menyatakan rendah (59%), dan sebagian kecil (41%) menyatakan tinggi, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (73%), dan sebagian kecil (27%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SD pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (80%), dan sebagian kecil (20%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SD pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (68%), dan sebagian kecil (32%) menyatakan rendah.



GAMBAR 4. 46. KUALITAS PELAYANAN SD di PROVINSI SUMBAR

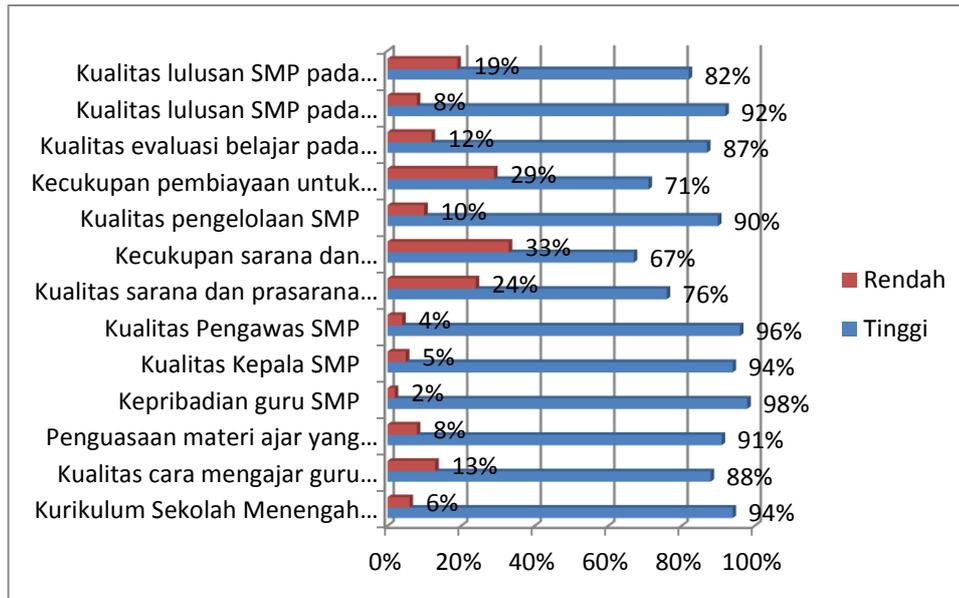
c. Kualitas Pelayanan SMP

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMP) secara nasional digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.47. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMP hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (88%), dan sebagian kecil (12%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (98%), dan sebagian kecil (2%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (96%), dan sebagian kecil (4%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 47. KUALITAS PELAYANAN SMP BERDASARKAN RESPONDEN NASIONAL(N = 370)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Menengah Pertama	16%	78%	6%	0%
Kualitas cara mengajar guru SMP	12%	76%	12%	1%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMP	12%	79%	8%	0%
Kepribadian guru SMP	23%	75%	2%	0%
Kualitas Kepala SMP	19%	75%	5%	0%
Kualitas Pengawas SMP	22%	74%	4%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMP	12%	64%	22%	2%
Kecukupan sarana dan prasarana SMP	6%	61%	32%	1%
Kualitas pengelolaan SMP	12%	78%	9%	1%
Kecukupan pembiayaan untuk SMP	8%	63%	27%	2%
Kualitas evaluasi belajar pada SMP	9%	78%	12%	0%
Kualitas lulusan SMP pada aspek pengetahuan	15%	77%	8%	0%
Kualitas lulusan SMP pada aspek sikap dan karakter	11%	71%	18%	1%
Rata-rata	14%	73%	13%	1%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (76%), dan sebagian kecil (24%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (67%), dan sebagian kecil (33%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (71%), dan sebagian kecil (29%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMP pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SMP pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (82%), dan sebagian kecil (18%).



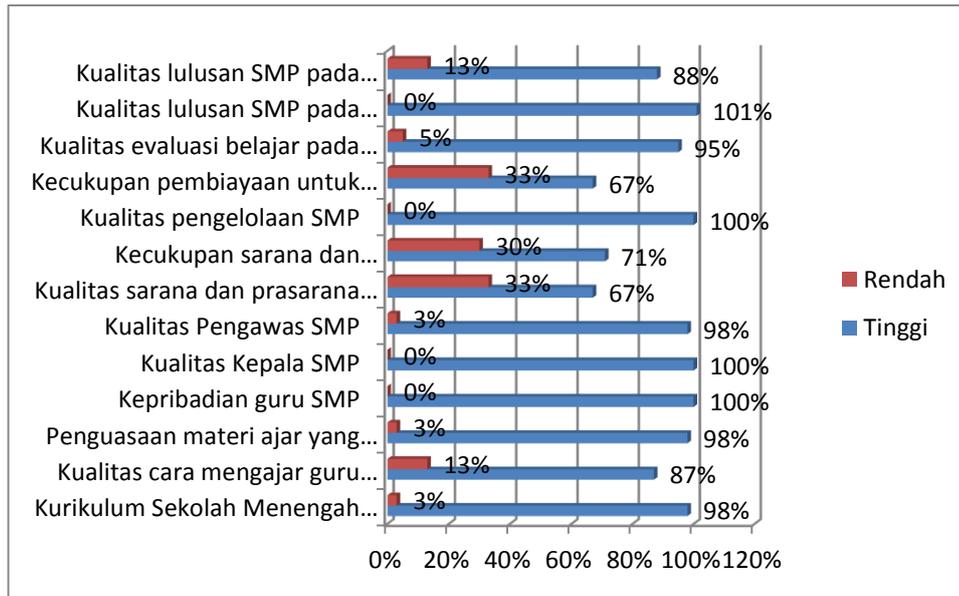
GAMBAR 4. 47. KUALITAS PELAYANAN SMP MENURUT SELURUH RESPONDEN

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMP) di provinsi Bali digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.48. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMP hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (98%), dan sebagian kecil (2%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 48. KUALITAS PELAYANAN SMP BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI BALI (N=40)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Menengah Pertama	15%	83%	3%	0%
Kualitas cara mengajar guru SMP	8%	79%	13%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMP	10%	88%	3%	0%
Kepribadian guru SMP	20%	80%	0%	0%
Kualitas Kepala SMP	20%	80%	0%	0%
Kualitas Pengawas SMP	13%	85%	3%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMP	5%	62%	33%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana SMP	8%	63%	30%	0%
Kualitas pengelolaan SMP	10%	90%	0%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SMP	3%	64%	33%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada SMP	10%	85%	5%	0%
Kualitas lulusan SMP pada aspek pengetahuan	8%	93%	0%	0%
Kualitas lulusan SMP pada aspek sikap dan karakter	15%	73%	13%	0%
Rata-rata	11%	79%	10%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (67%), dan sebagian kecil (33%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (70%), dan sebagian kecil (30%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (70%), dan sebagian kecil (30%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (95%), dan sebagian kecil 5%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMP pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SMP pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah.



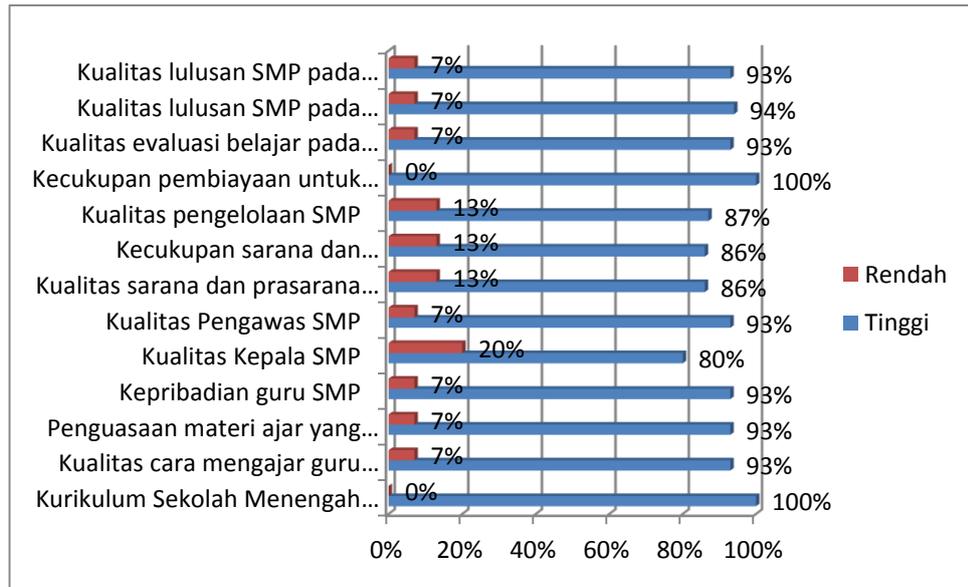
GAMBAR 4. 48. KUALITAS PELAYANAN SMP di PROVINSI BALI

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMP) di provinsi Banten digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.49. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMP hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (80%), dan sebagian kecil (20%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 49. KUALITAS PELAYANAN SMP BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI BANTEN (N=17)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Menengah Pertama	33%	67%	0%	0%
Kualitas cara mengajar guru SMP	20%	73%	7%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMP	13%	80%	7%	0%
Kepribadian guru SMP	20%	73%	7%	0%
Kualitas Kepala SMP	33%	47%	20%	0%
Kualitas Pengawas SMP	33%	60%	7%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMP	53%	33%	13%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana SMP	13%	73%	13%	0%
Kualitas pengelolaan SMP	40%	47%	13%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SMP	27%	73%	0%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada SMP	20%	73%	7%	0%
Kualitas lulusan SMP pada aspek pengetahuan	27%	67%	7%	0%
Kualitas lulusan SMP pada aspek sikap dan karakter	20%	73%	7%	0%
Rata-rata	27%	65%	8%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (86%), dan sebagian kecil (14%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (86%), dan sebagian kecil (14%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMP pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SMP pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah.



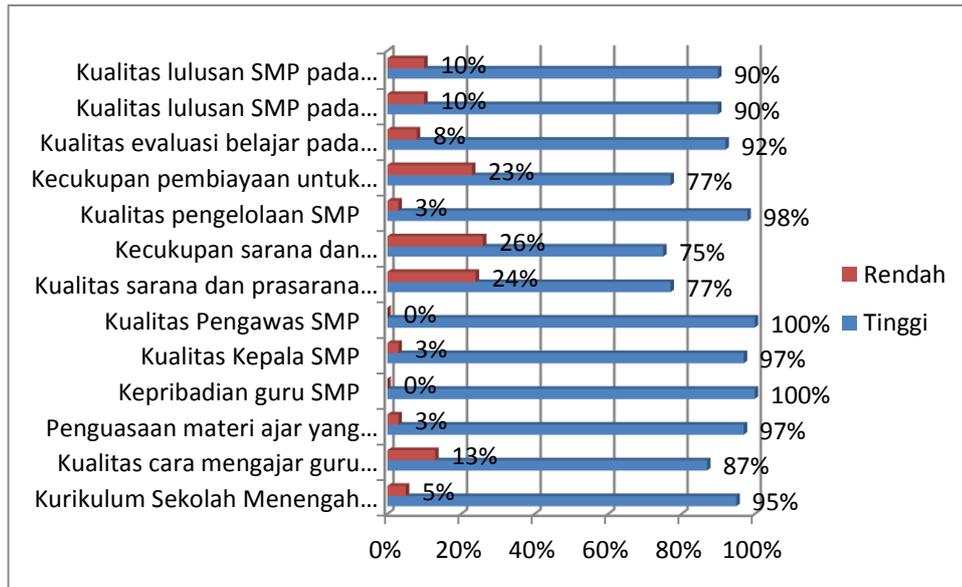
GAMBAR 4. 49. KUALITAS PELAYANAN SMP di PROVINSI BANTEN

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMP) di provinsi DIY digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.50. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMP hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah.

TABEL 4. 50. KUALITAS PELAYANAN SMP BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI
DIY (N=40)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Menengah Pertama	5%	90%	5%	0%
Kualitas cara mengajar guru SMP	8%	79%	13%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMP	5%	92%	3%	0%
Kepribadian guru SMP	15%	85%	0%	0%
Kualitas Kepala SMP	10%	87%	3%	0%
Kualitas Pengawas SMP	15%	85%	0%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMP	5%	72%	21%	3%
Kecukupan sarana dan prasarana SMP	3%	72%	23%	3%
Kualitas pengelolaan SMP	3%	95%	3%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SMP	3%	74%	23%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada SMP	0%	92%	8%	0%
Kualitas lulusan SMP pada aspek pengetahuan	5%	85%	10%	0%
Kualitas lulusan SMP pada aspek sikap dan karakter	5%	85%	10%	0%
Rata-rata	6%	84%	9%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (77%), dan sebagian kecil (27%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (75%), dan sebagian kecil (25%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (77%), dan sebagian kecil (23%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMP pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SMP pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah.



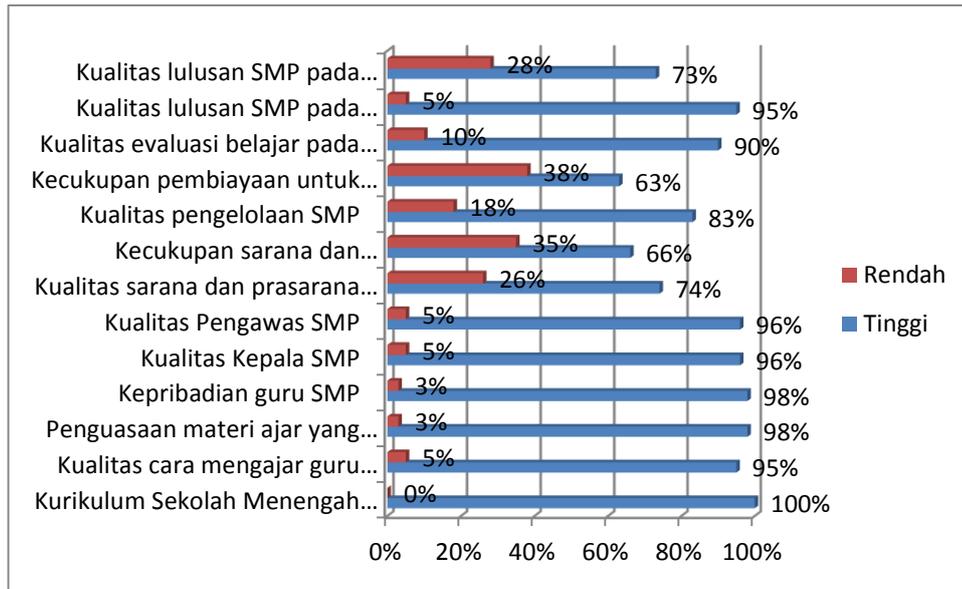
GAMBAR 4. 50. KUALITAS PELAYANAN SMP di PROVINSI DIY

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMP) di provinsi Jateng digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.51. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMP hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (96%), dan sebagian kecil (4%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (96%), dan sebagian kecil (4%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 51. KUALITAS PELAYANAN SMP BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI JATENG (N=41)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Menengah Pertama	21%	79%	0%	0%
Kualitas cara mengajar guru SMP	18%	77%	5%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMP	18%	80%	3%	0%
Kepribadian guru SMP	33%	65%	3%	0%
Kualitas Kepala SMP	33%	63%	5%	0%
Kualitas Pengawas SMP	33%	63%	5%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMP	5%	69%	26%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana SMP	3%	63%	35%	0%
Kualitas pengelolaan SMP	18%	65%	18%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SMP	5%	58%	38%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada SMP	15%	75%	10%	0%
Kualitas lulusan SMP pada aspek pengetahuan	20%	75%	5%	0%
Kualitas lulusan SMP pada aspek sikap dan karakter	15%	58%	28%	0%
Rata-rata	18%	68%	14%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (74%), dan sebagian kecil (26%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (66%), dan sebagian kecil (34%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (83%), dan sebagian kecil (17%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (63%), dan sebagian kecil (37%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMP pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SMP pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (73%), dan sebagian kecil (27%) menyatakan rendah.



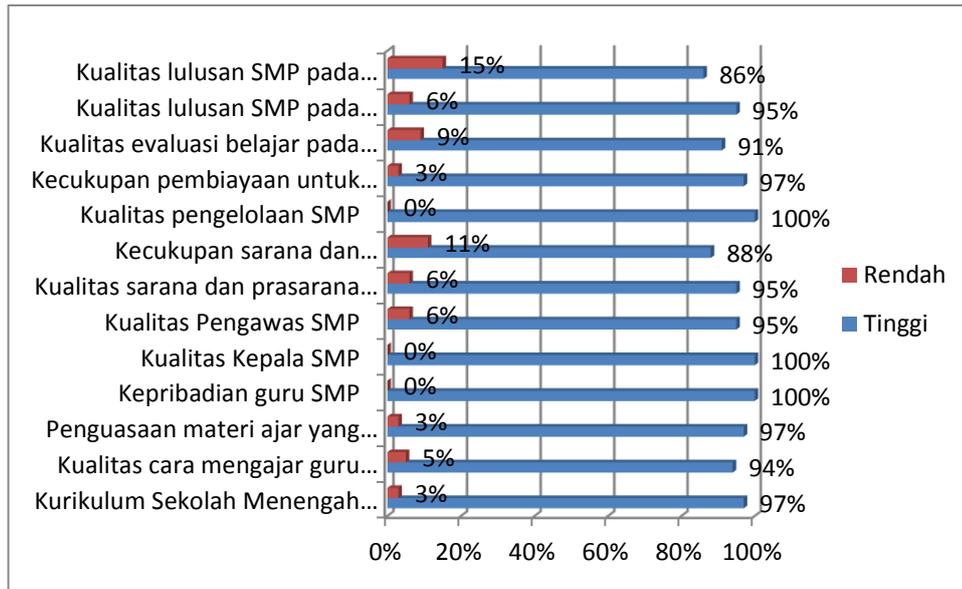
GAMBAR 4. 51. KUALITAS PELAYANAN SMP di PROVINSI JATENG

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMP) di provinsi Jatim digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.52. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMP hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 52. KUALITAS PELAYANAN SMP BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI JATIM (N=39)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Menengah Pertama	38%	59%	3%	0%
Kualitas cara mengajar guru SMP	24%	70%	5%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMP	24%	73%	3%	0%
Kepribadian guru SMP	27%	73%	0%	0%
Kualitas Kepala SMP	25%	75%	0%	0%
Kualitas Pengawas SMP	28%	67%	6%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMP	26%	69%	6%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana SMP	14%	74%	11%	0%
Kualitas pengelolaan SMP	23%	77%	0%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SMP	23%	74%	3%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada SMP	15%	76%	9%	0%
Kualitas lulusan SMP pada aspek pengetahuan	24%	71%	6%	0%
Kualitas lulusan SMP pada aspek sikap dan karakter	15%	71%	15%	0%
Rata-rata	24%	71%	5%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (89%), dan sebagian kecil (11%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (91%), dan sebagian kecil (9%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMP pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SMP pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah.



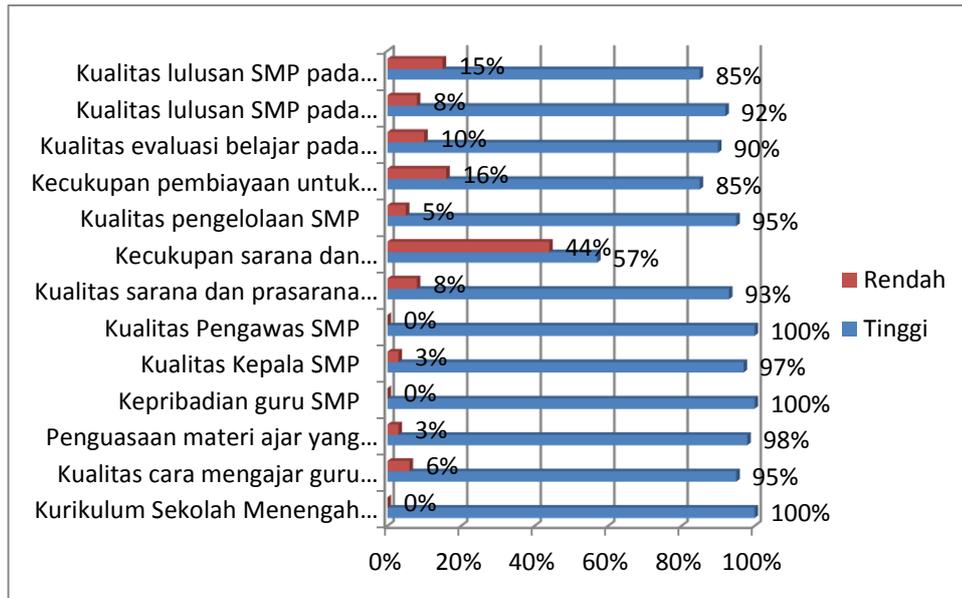
GAMBAR 4. 52. KUALITAS PELAYANAN SMP di PROVINSI JATIM

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan anak usia dini (SMP) di provinsi Jabar digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.53. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMP hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (98%), dan sebagian kecil (2%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan tidak ada (0%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 53. KUALITAS PELAYANAN SMP BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI JABAR (N=41)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Menengah Pertama	5%	95%	0%	0%
Kualitas cara mengajar guru SMP	5%	90%	3%	3%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMP	3%	95%	3%	0%
Kepribadian guru SMP	8%	92%	0%	0%
Kualitas Kepala SMP	5%	92%	3%	0%
Kualitas Pengawas SMP	8%	92%	0%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMP	3%	90%	5%	3%
Kecukupan sarana dan prasarana SMP	3%	54%	44%	0%
Kualitas pengelolaan SMP	3%	92%	5%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SMP	3%	82%	11%	5%
Kualitas evaluasi belajar pada SMP	3%	87%	10%	0%
Kualitas lulusan SMP pada aspek pengetahuan	24%	68%	8%	0%
Kualitas lulusan SMP pada aspek sikap dan karakter	8%	77%	15%	0%
Rata-rata	6%	85%	8%	1%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (57%), dan sebagian kecil (43%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMP pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SMP pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah.



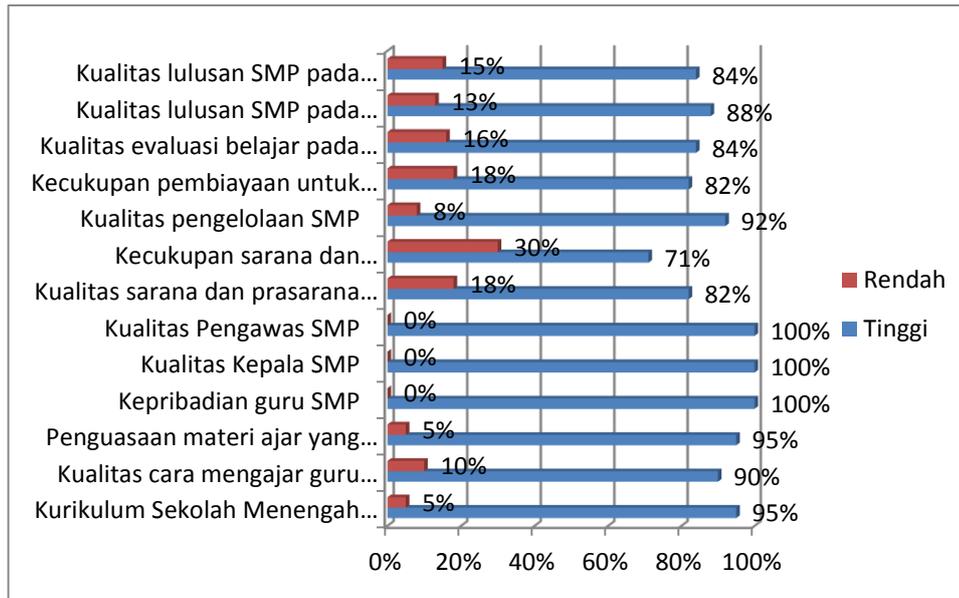
GAMBAR 4. 53. KUALITAS PELAYANAN SMP di PROVINSI JABAR

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMP) di provinsi Kaltim digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.54. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMP hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan tidak ada (0%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan tidak ada (0%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan tidak ada (0%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 54 KUALITAS PELAYANAN SMP BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI KALTIM (N=40)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Menengah Pertama	15%	80%	5%	0%
Kualitas cara mengajar guru SMP	10%	80%	10%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMP	10%	85%	5%	0%
Kepribadian guru SMP	20%	80%	0%	0%
Kualitas Kepala SMP	23%	77%	0%	0%
Kualitas Pengawas SMP	21%	79%	0%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMP	10%	72%	15%	3%
Kecukupan sarana dan prasarana SMP	3%	68%	30%	0%
Kualitas pengelolaan SMP	5%	87%	8%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SMP	8%	74%	18%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada SMP	8%	76%	16%	0%
Kualitas lulusan SMP pada aspek pengetahuan	10%	78%	13%	0%
Kualitas lulusan SMP pada aspek sikap dan karakter	10%	74%	15%	0%
Rata-rata	12%	78%	10%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (82%), dan sebagian kecil (18%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (71%), dan sebagian kecil (29%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (82%), dan sebagian kecil (18%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (84%), dan sebagian kecil (16%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMP pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (88%), dan sebagian kecil (12%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SMP pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (84%), dan sebagian kecil (16%) menyatakan rendah.



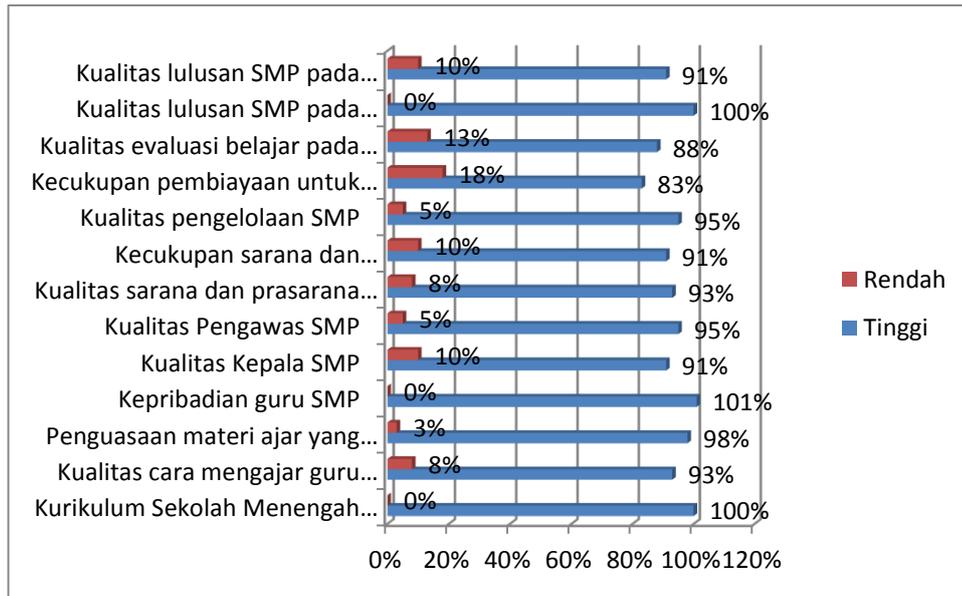
GAMBAR 4. 54. KUALITAS PELAYANAN SMP DI PROVINSI KALTIM

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMP) di provinsi NTB digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.55. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMP hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 55. KUALITAS PELAYANAN SMP BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI NTB (N=40)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Menengah Pertama	31%	69%	0%	0%
Kualitas cara mengajar guru SMP	26%	67%	8%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMP	33%	65%	3%	0%
Kepribadian guru SMP	53%	48%	0%	0%
Kualitas Kepala SMP	33%	58%	10%	0%
Kualitas Pengawas SMP	45%	50%	5%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMP	30%	63%	8%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana SMP	13%	78%	10%	0%
Kualitas pengelolaan SMP	25%	70%	5%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SMP	18%	65%	18%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada SMP	20%	68%	13%	0%
Kualitas lulusan SMP pada aspek pengetahuan	25%	75%	0%	0%
Kualitas lulusan SMP pada aspek sikap dan karakter	18%	73%	10%	0%
Rata-rata	28%	65%	7%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (82%), dan sebagian kecil (18%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (88%), dan sebagian kecil (12%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMP pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (100%), dan tidak ada (0%) yang menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SMP pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah.



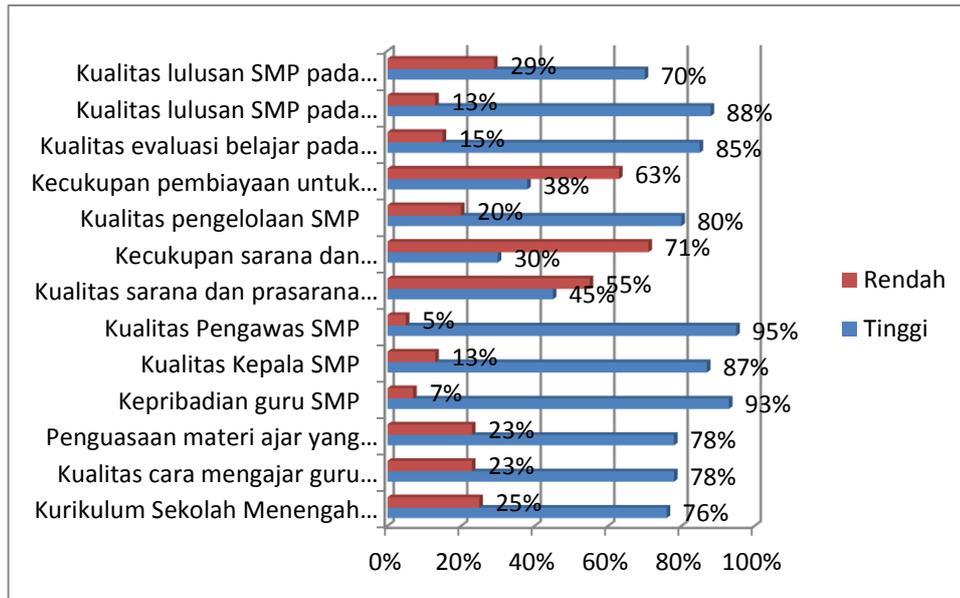
GAMBAR 4. 55. KUALITAS PELAYANAN SMP di PROVINSI NTB

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan (SMP) di provinsi NTT digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.56. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMP hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (75%), dan sebagian kecil (25%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (78%), dan sebagian kecil (22%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (78%), dan sebagian kecil (22%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 56. KUALITAS PELAYANAN SMP BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI NTT (N=41)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Menengah Pertama	3%	73%	25%	0%
Kualitas cara mengajar guru SMP	0%	78%	23%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMP	0%	78%	23%	0%
Kepribadian guru SMP	10%	83%	7%	0%
Kualitas Kepala SMP	5%	82%	13%	0%
Kualitas Pengawas SMP	10%	85%	5%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMP	0%	45%	50%	5%
Kecukupan sarana dan prasarana SMP	0%	30%	68%	3%
Kualitas pengelolaan SMP	5%	75%	20%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SMP	0%	38%	53%	10%
Kualitas evaluasi belajar pada SMP	0%	85%	15%	0%
Kualitas lulusan SMP pada aspek pengetahuan	0%	88%	13%	0%
Kualitas lulusan SMP pada aspek sikap dan karakter	2%	68%	24%	5%
Rata-rata	3%	70%	26%	2%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMP sebagian besar responden menyatakan masih rendah(55%), dan sebagian kecil (45%) menyatakan tinggi, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMP sebagian besar responden menyatakan rendah (71%), dan sebagian kecil (29%) menyatakan tinggi, (9) Kualitas pengelolaan SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (80%), dan sebagian kecil (20%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMP sebagian besar responden menyatakan rendah (63%), dan sebagian kecil (37%) menyatakan tinggi, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMP pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (88%), dan sebagian kecil (12%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SMP pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (70%), dan sebagian kecil (30%) menyatakan rendah.



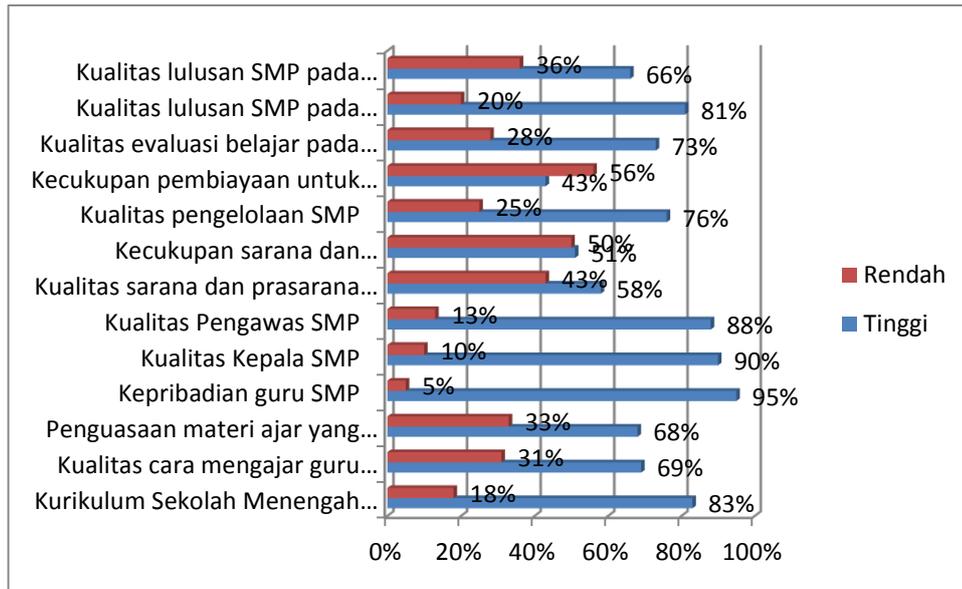
GAMBAR 4. 56. KUALITAS PELAYANAN SMP di PROVINSI NTT

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMP) di provinsi SUMBAR digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.57. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMP hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMP sebagian besar responden menyatakan tinggi (83%), dan sebagian kecil (17%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (69%), dan sebagian kecil (31%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (68%), dan sebagian kecil (32%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMP sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (88%), dan sebagian kecil (12%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 57. KUALITAS PELAYANAN SMP BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI SUMBAR (N=40)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Menengah Pertama	5%	78%	15%	3%
Kualitas cara mengajar guru SMP	5%	64%	28%	3%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMP	8%	60%	30%	3%
Kepribadian guru SMP	25%	70%	5%	0%
Kualitas Kepala SMP	15%	75%	10%	0%
Kualitas Pengawas SMP	18%	70%	10%	3%
Kualitas sarana dan prasarana SMP	10%	48%	40%	3%
Kecukupan sarana dan prasarana SMP	8%	43%	45%	5%
Kualitas pengelolaan SMP	8%	68%	20%	5%
Kecukupan pembiayaan untuk SMP	5%	38%	51%	5%
Kualitas evaluasi belajar pada SMP	10%	63%	25%	3%
Kualitas lulusan SMP pada aspek pengetahuan	18%	63%	20%	0%
Kualitas lulusan SMP pada aspek sikap dan karakter	8%	58%	33%	3%
Rata-rata	11%	61%	26%	3%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (66%), dan sebagian kecil (34%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (56%), dan sebagian kecil (44%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (76%), dan sebagian kecil (24%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (54%), dan sebagian kecil (46%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SD sebagian besar responden menyatakan tinggi (71%), dan sebagian kecil (29%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SD pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SD pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah.



GAMBAR 4. 57. KUALITAS PELAYANAN SMP di PROVINSI SUMBAR

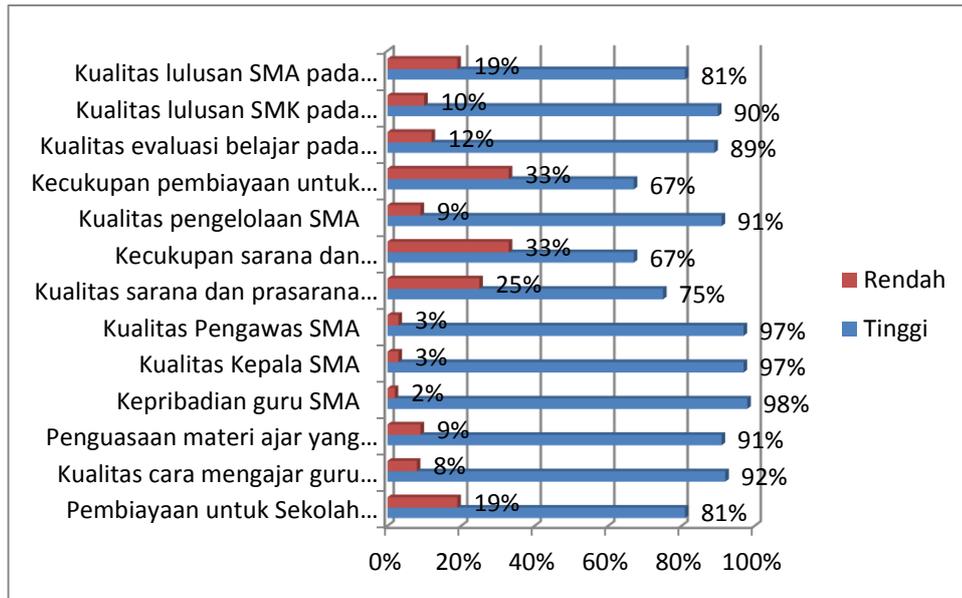
d. Kualitas Pelayanan SMA

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan anak usia dini (SMA) secara nasional digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.58. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMA hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (81%), dan sebagian kecil (19%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (91%), dan sebagian kecil (9%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (98%), dan sebagian kecil (2%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 58. KUALITAS PELAYANAN SMA BERDASARKAN RESPONDEN NASIONAL

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Pembiayaan untuk Sekolah Menengah Atas	11%	70%	18%	1%
Kualitas cara mengajar guru SMA	16%	76%	7%	1%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMA	16%	75%	8%	1%
Kepribadian guru SMA	22%	76%	2%	0%
Kualitas Kepala SMA	21%	76%	3%	0%
Kualitas Pengawas SMA	23%	74%	3%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMA	11%	64%	24%	1%
Kecukupan sarana dan prasarana SMA	8%	59%	32%	1%
Kualitas pengelolaan SMA	12%	79%	8%	1%
Kecukupan pembiayaan untuk SMA	8%	59%	31%	2%
Kualitas evaluasi belajar pada SMA	11%	78%	11%	1%
Kualitas lulusan SMK pada aspek pengetahuan	16%	74%	9%	1%
Kualitas lulusan SMA pada aspek sikap dan karakter	16%	65%	18%	1%
Rata-rata	15%	71%	13%	1%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (75%), dan sebagian kecil (25%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (67%), dan sebagian kecil (33%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (91%), dan sebagian kecil (9%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (67%), dan sebagian kecil (33%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (89%), dan sebagian kecil (11%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMA pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SMA pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (81%), dan sebagian kecil (19%) menyatakan rendah.



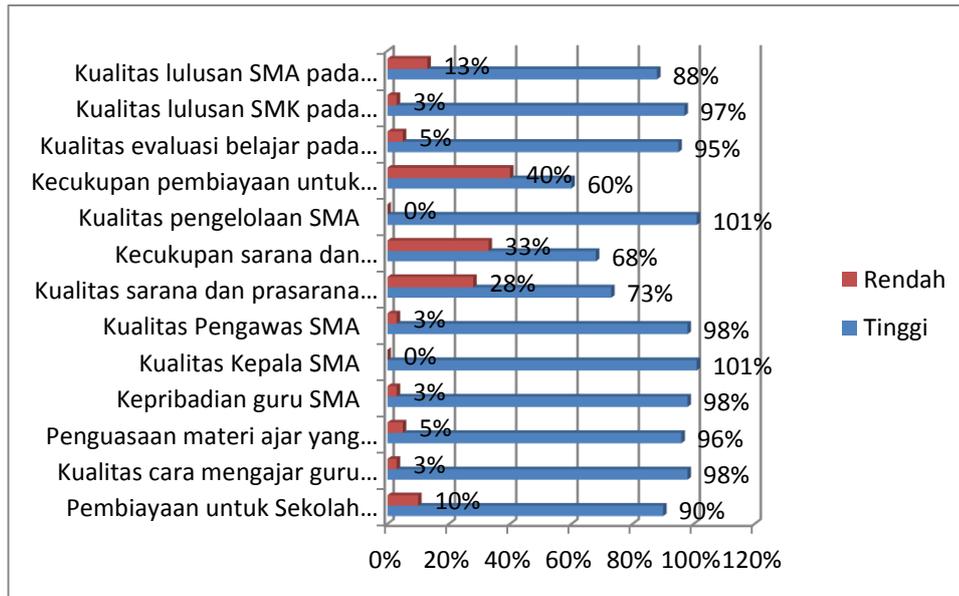
GAMBAR 4. 58. KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN SMA BERDASARKAN RESPONDEN NASIONAL

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMA) di provinsi Bali digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.59. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMA hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 59. KUALITAS PELAYANAN SMA BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI BALI (N=40)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Pembiayaan untuk Sekolah Menengah Atas	8%	82%	10%	0%
Kualitas cara mengajar guru SMA	15%	83%	3%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMA	13%	83%	5%	0%
Kepribadian guru SMA	18%	80%	3%	0%
Kualitas Kepala SMA	18%	83%	0%	0%
Kualitas Pengawas SMA	15%	83%	3%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMA	13%	60%	28%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana SMA	10%	58%	33%	0%
Kualitas pengelolaan SMA	13%	88%	0%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SMA	0%	60%	40%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada SMA	10%	85%	5%	0%
Kualitas lulusan SMK pada aspek pengetahuan	15%	82%	3%	0%
Kualitas lulusan SMA pada aspek sikap dan karakter	18%	70%	13%	0%
Rata-rata	13%	77%	11%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (72%), dan sebagian kecil (28%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (67%), dan sebagian kecil (33%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (60%), dan sebagian kecil (40%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMA pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SMA pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah.



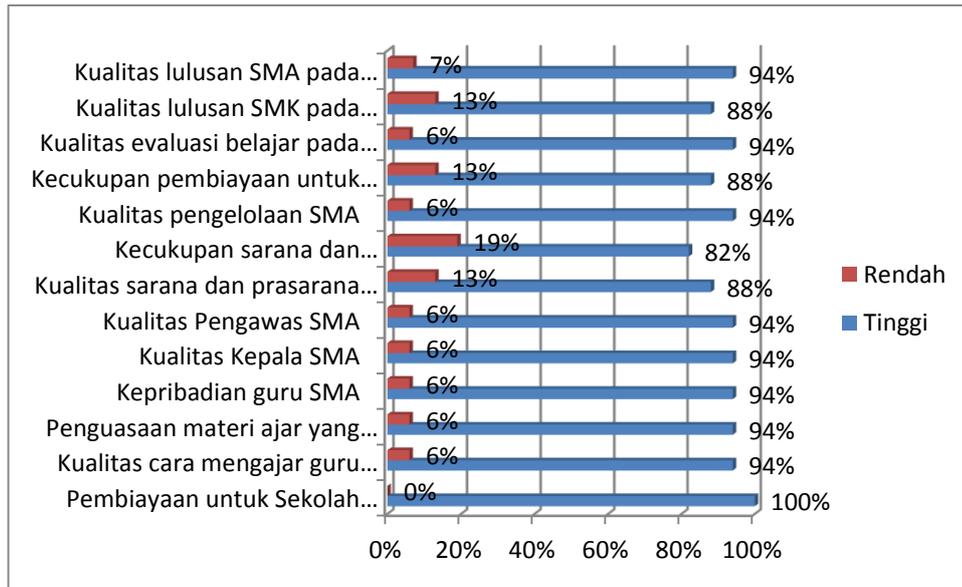
GAMBAR 4. 59. KUALITAS PELAYANAN SMA di PROVINSI BALI

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMA) di provinsi Banten digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.60. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMA hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 60. KUALITAS PELAYANAN SMA BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI BANTEN (N=17)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Pembiayaan untuk Sekolah Menengah Atas	31%	69%	0%	0%
Kualitas cara mengajar guru SMA	25%	69%	6%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMA	13%	81%	6%	0%
Kepribadian guru SMA	13%	81%	6%	0%
Kualitas Kepala SMA	31%	63%	6%	0%
Kualitas Pengawas SMA	31%	63%	6%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMA	38%	50%	13%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana SMA	19%	63%	19%	0%
Kualitas pengelolaan SMA	25%	69%	6%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SMA	25%	63%	13%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada SMA	25%	69%	6%	0%
Kualitas lulusan SMK pada aspek pengetahuan	38%	50%	13%	0%
Kualitas lulusan SMA pada aspek sikap dan karakter	27%	67%	7%	0%
Rata-rata	26%	66%	8%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (81%), dan sebagian kecil (19%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMA pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SMA pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah.



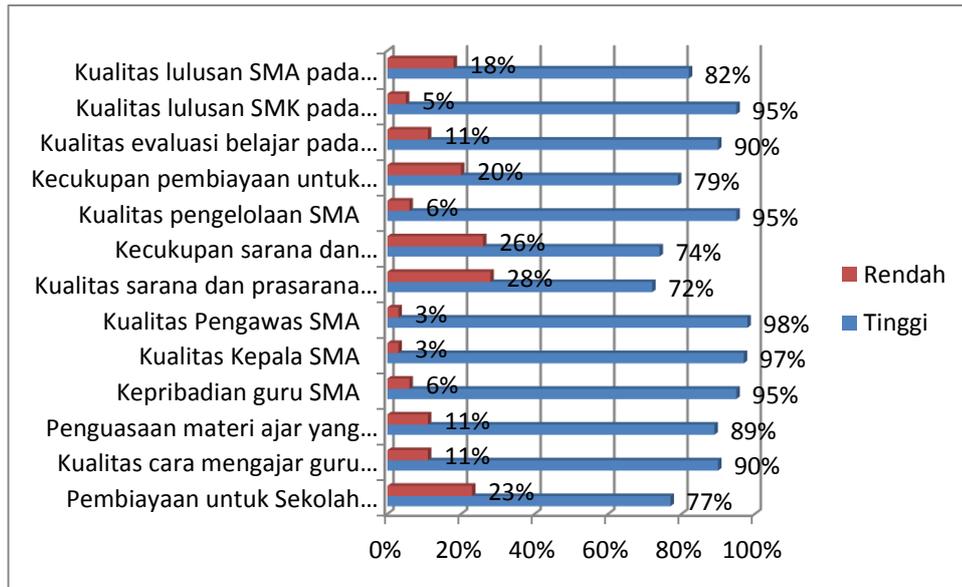
GAMBAR 4. 60. KUALITAS PELAYANAN SMA di PROVINSI BANTEN

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMA) di provinsi DIY digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.61. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMA hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (77%), dan sebagian kecil (23%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (89%), dan sebagian kecil (11%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (89%), dan sebagian kecil (11%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 61. KUALITAS PELAYANAN SMA BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI DIY (N=40)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Pembiayaan untuk Sekolah Menengah Atas	3%	74%	23%	0%
Kualitas cara mengajar guru SMA	37%	53%	8%	3%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMA	34%	55%	8%	3%
Kepribadian guru SMA	13%	82%	3%	3%
Kualitas Kepala SMA	13%	84%	0%	3%
Kualitas Pengawas SMA	16%	82%	0%	3%
Kualitas sarana dan prasarana SMA	8%	64%	23%	5%
Kecukupan sarana dan prasarana SMA	5%	69%	23%	3%
Kualitas pengelolaan SMA	3%	92%	3%	3%
Kecukupan pembiayaan untuk SMA	0%	79%	15%	5%
Kualitas evaluasi belajar pada SMA	3%	87%	8%	3%
Kualitas lulusan SMK pada aspek pengetahuan	3%	92%	5%	0%
Kualitas lulusan SMA pada aspek sikap dan karakter	41%	41%	15%	3%
Rata-rata	14%	73%	10%	3%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (72%), dan sebagian kecil (28%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (74%), dan sebagian kecil (26%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (79%), dan sebagian kecil (21%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMA pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SMA pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (82%), dan sebagian kecil (18%) menyatakan rendah.



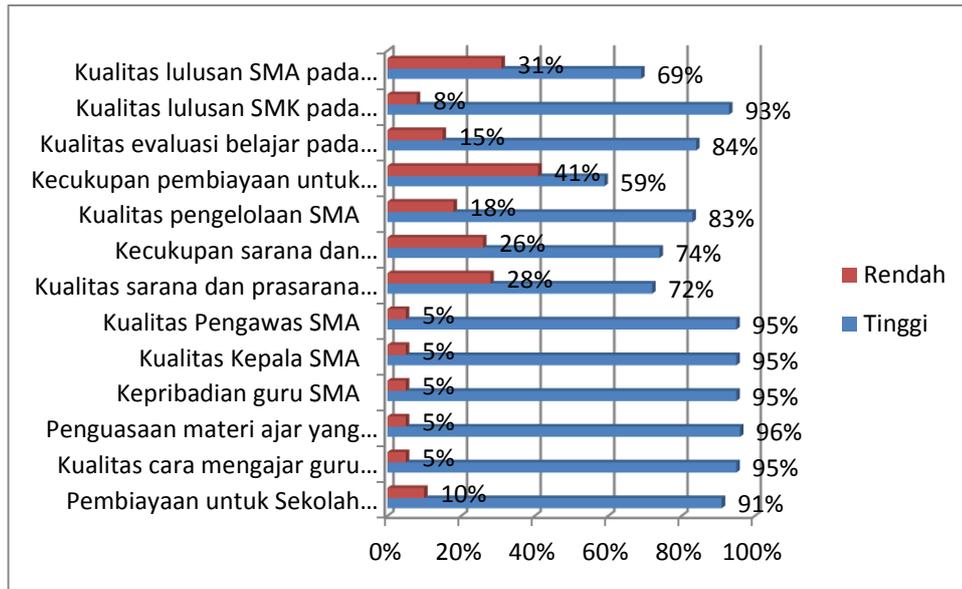
GAMBAR 4. 61. KUALITAS PELAYANAN SMA di PROVINSI DIY

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMA) di provinsi Jateng digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.62. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMA hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 62. KUALITAS PELAYANAN SMA BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI JATENG (N=41)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Pembiayaan untuk Sekolah Menengah Atas	8%	83%	10%	0%
Kualitas cara mengajar guru SMA	20%	75%	5%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMA	23%	73%	5%	0%
Kepribadian guru SMA	30%	65%	5%	0%
Kualitas Kepala SMA	36%	59%	5%	0%
Kualitas Pengawas SMA	33%	62%	5%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMA	8%	64%	28%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana SMA	5%	69%	26%	0%
Kualitas pengelolaan SMA	21%	62%	18%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SMA	8%	51%	41%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada SMA	15%	69%	15%	0%
Kualitas lulusan SMK pada aspek pengetahuan	21%	72%	8%	0%
Kualitas lulusan SMA pada aspek sikap dan karakter	15%	54%	31%	0%
Rata-rata	19%	66%	16%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (72%), dan sebagian kecil (28%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (74%), dan sebagian kecil (26%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (82%), dan sebagian kecil (18%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (59%), dan sebagian kecil (41%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMA pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SMA pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (69%), dan sebagian kecil (31%) menyatakan rendah.



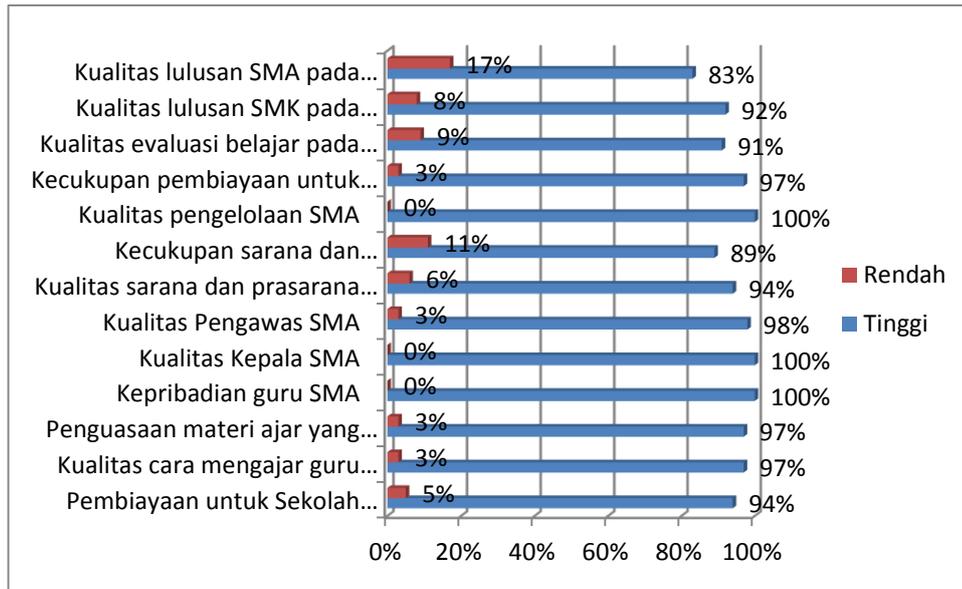
GAMBAR 4. 62. KUALITAS PELAYANAN SMA di PROVINSI JATENG

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMA) di provinsi Jatim digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.63. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMA hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 63. KUALITAS PELAYANAN SMA BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI JATIM (N=39)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Pembiayaan untuk Sekolah Menengah Atas	32%	62%	5%	0%
Kualitas cara mengajar guru SMA	24%	73%	3%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMA	24%	73%	3%	0%
Kepribadian guru SMA	24%	76%	0%	0%
Kualitas Kepala SMA	29%	71%	0%	0%
Kualitas Pengawas SMA	31%	67%	3%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMA	23%	71%	6%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana SMA	17%	72%	11%	0%
Kualitas pengelolaan SMA	25%	75%	0%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SMA	26%	71%	3%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada SMA	17%	74%	9%	0%
Kualitas lulusan SMK pada aspek pengetahuan	25%	67%	8%	0%
Kualitas lulusan SMA pada aspek sikap dan karakter	14%	69%	17%	0%
Rata-rata	24%	71%	5%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (72%), dan sebagian kecil (28%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (74%), dan sebagian kecil (26%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (82%), dan sebagian kecil (18%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (59%), dan sebagian kecil (41%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMA pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SMA pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (69%), dan sebagian kecil (31%) menyatakan rendah.



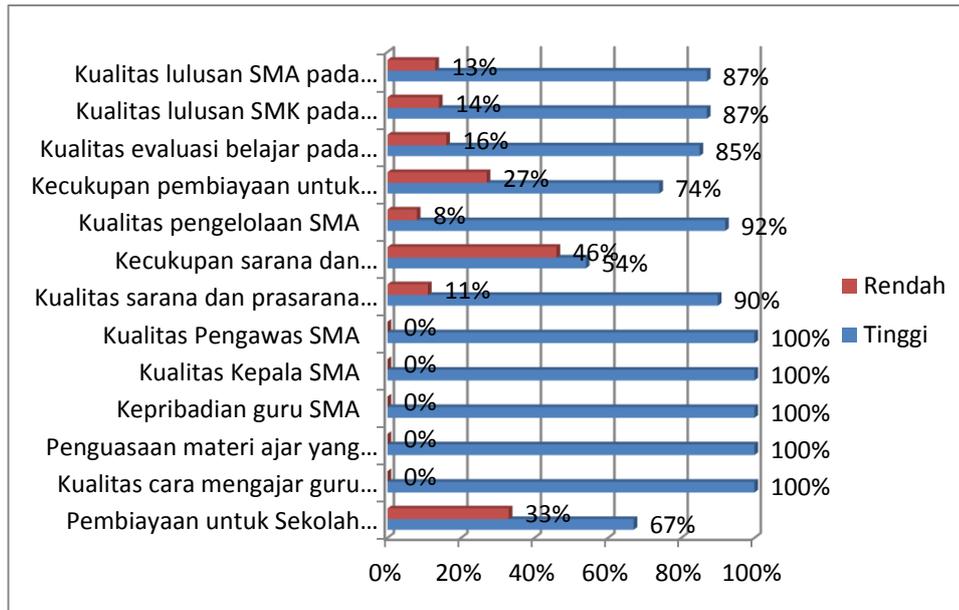
GAMBAR 4. 63. KUALITAS PELAYANAN SMA di PROVINSI JATIM

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMA) di provinsi Jabar digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.64. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMA hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (67%), dan sebagian kecil (33%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 64. KUALITAS PELAYANAN SMA BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI JABAR (N=41)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Pembiayaan untuk Sekolah Menengah Atas	3%	64%	33%	0%
Kualitas cara mengajar guru SMA	5%	95%	0%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMA	3%	97%	0%	0%
Kepribadian guru SMA	5%	95%	0%	0%
Kualitas Kepala SMA	5%	95%	0%	0%
Kualitas Pengawas SMA	8%	92%	0%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMA	3%	87%	11%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana SMA	3%	51%	46%	0%
Kualitas pengelolaan SMA	3%	89%	8%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SMA	3%	71%	24%	3%
Kualitas evaluasi belajar pada SMA	3%	82%	16%	0%
Kualitas lulusan SMK pada aspek pengetahuan	24%	63%	11%	3%
Kualitas lulusan SMA pada aspek sikap dan karakter	8%	79%	13%	0%
Rata-rata	6%	82%	12%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (89%), dan sebagian kecil (11%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (54%), dan sebagian kecil (46%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (74%), dan sebagian kecil (26%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMA pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (89%), dan sebagian kecil (11%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SMA pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah.



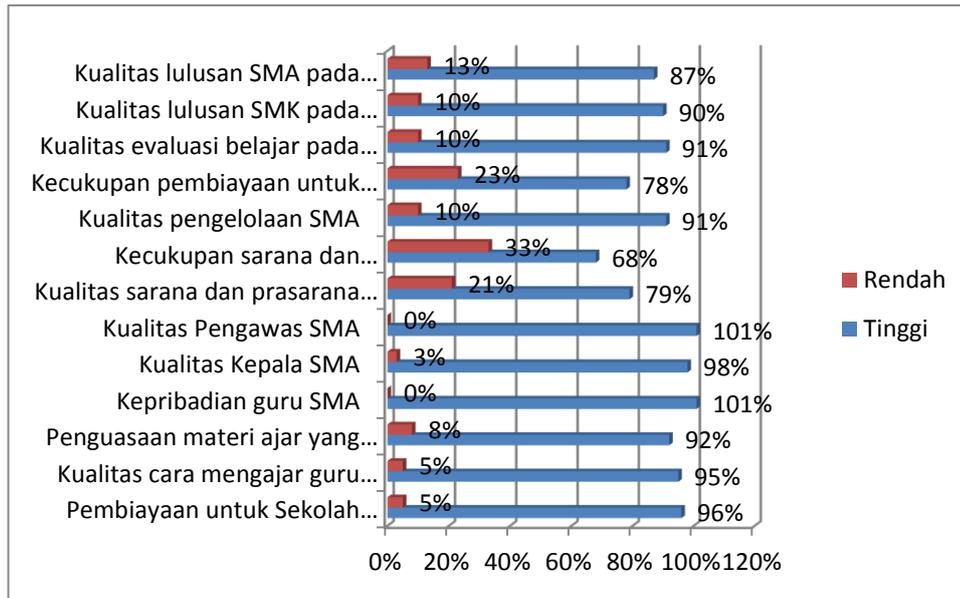
GAMBAR 4. 64. KUALITAS PELAYANAN SMA di PROVINSI JABAR

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMA) di provinsi Kaltim digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.65. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMA hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 65. KUALITAS PELAYANAN SMA BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI KALTIM (N=40)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Pembiayaan untuk Sekolah Menengah Atas	13%	83%	5%	0%
Kualitas cara mengajar guru SMA	13%	82%	5%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMA	10%	82%	8%	0%
Kepribadian guru SMA	18%	83%	0%	0%
Kualitas Kepala SMA	26%	72%	3%	0%
Kualitas Pengawas SMA	23%	78%	0%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMA	5%	74%	21%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana SMA	5%	63%	33%	0%
Kualitas pengelolaan SMA	8%	83%	10%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SMA	8%	70%	23%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada SMA	8%	83%	10%	0%
Kualitas lulusan SMK pada aspek pengetahuan	10%	80%	10%	0%
Kualitas lulusan SMA pada aspek sikap dan karakter	10%	77%	13%	0%
Rata-rata	12%	78%	11%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (79%), dan sebagian kecil (21%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (67%), dan sebagian kecil (33%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (91%), dan sebagian kecil (9%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (78%), dan sebagian kecil (28%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (91%), dan sebagian kecil (9%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMA pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SMA pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah.



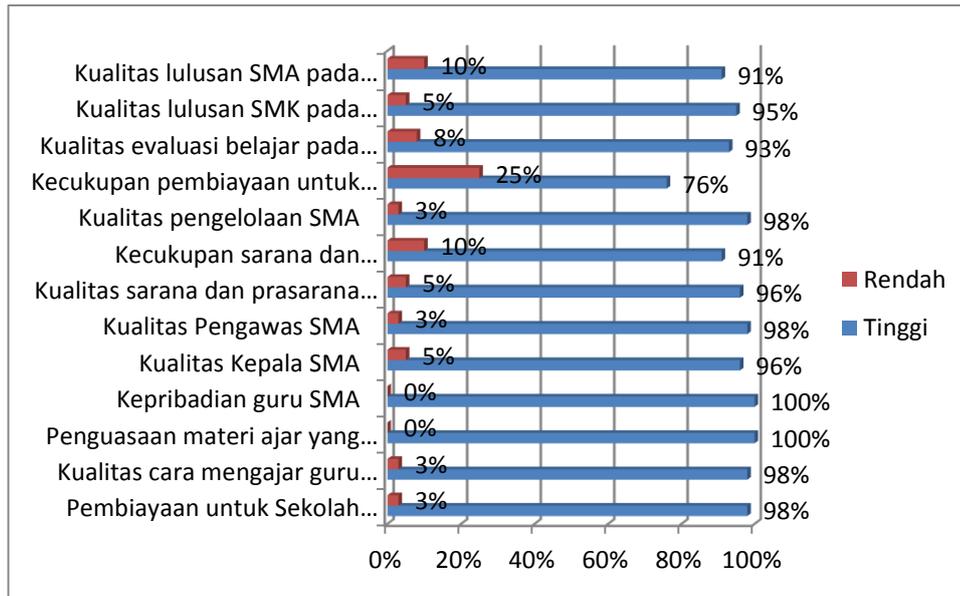
GAMBAR 4. 65. KUALITAS PELAYANAN SMA di PROVINSI KALTIM

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMA) di provinsi NTB digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.66. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMA hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 66. KUALITAS PELAYANAN SMA BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI NTB (N=40)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Pembiayaan untuk Sekolah Menengah Atas	23%	75%	3%	0%
Kualitas cara mengajar guru SMA	20%	78%	3%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMA	25%	75%	0%	0%
Kepribadian guru SMA	50%	50%	0%	0%
Kualitas Kepala SMA	33%	63%	5%	0%
Kualitas Pengawas SMA	43%	55%	3%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMA	23%	73%	5%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana SMA	13%	78%	10%	0%
Kualitas pengelolaan SMA	20%	78%	3%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SMA	18%	58%	25%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada SMA	23%	70%	8%	0%
Kualitas lulusan SMK pada aspek pengetahuan	20%	75%	5%	0%
Kualitas lulusan SMA pada aspek sikap dan karakter	18%	73%	10%	0%
Rata-rata	25%	69%	6%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (75%), dan sebagian kecil (25%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMA pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SMA pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah.



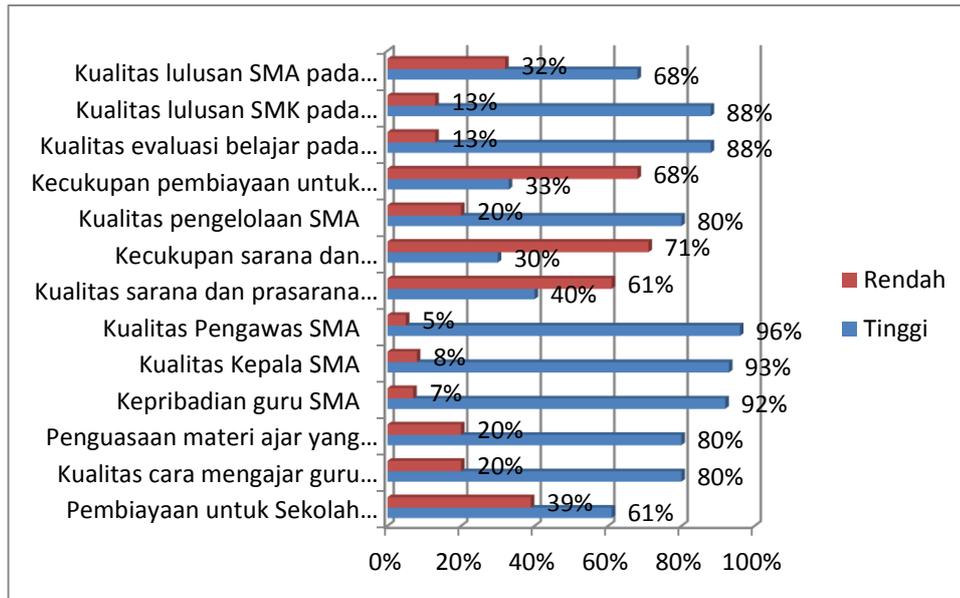
GAMBAR 4. 66. KUALITAS PELAYANAN SMA di PROVINSI NTB

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMA) di provinsi NTT digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.67. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMA hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (61%), dan sebagian kecil (39%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (80%), dan sebagian kecil (20%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (80%), dan sebagian kecil (20%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 67. KUALITAS PELAYANAN SMA BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI NTT (N=41)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Pembiayaan untuk Sekolah Menengah Atas	5%	56%	39%	0%
Kualitas cara mengajar guru SMA	0%	80%	20%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMA	2%	78%	20%	0%
Kepribadian guru SMA	12%	80%	7%	0%
Kualitas Kepala SMA	8%	85%	8%	0%
Kualitas Pengawas SMA	13%	83%	5%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMA	0%	40%	58%	3%
Kecukupan sarana dan prasarana SMA	0%	30%	68%	3%
Kualitas pengelolaan SMA	5%	75%	20%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SMA	8%	25%	60%	8%
Kualitas evaluasi belajar pada SMA	3%	85%	13%	0%
Kualitas lulusan SMK pada aspek pengetahuan	0%	88%	13%	0%
Kualitas lulusan SMA pada aspek sikap dan karakter	2%	66%	27%	5%
Rata-rata	4%	67%	28%	1%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMA sebagian besar responden menyatakan masih rendah(61%), dan sebagian kecil (39%) menyatakan tinggi, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMA sebagian besar responden menyatakan rendah (71%), dan sebagian kecil (29%) menyatakan tinggi, (9) Kualitas pengelolaan SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (80%), dan sebagian kecil (20%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMA sebagian besar responden menyatakan rendah (68%), dan sebagian kecil (32%) menyatakan tinggi, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (88%), dan sebagian kecil (12%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMA pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (88%), dan sebagian kecil (12%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SMA pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (68%), dan sebagian kecil (32%) menyatakan rendah.



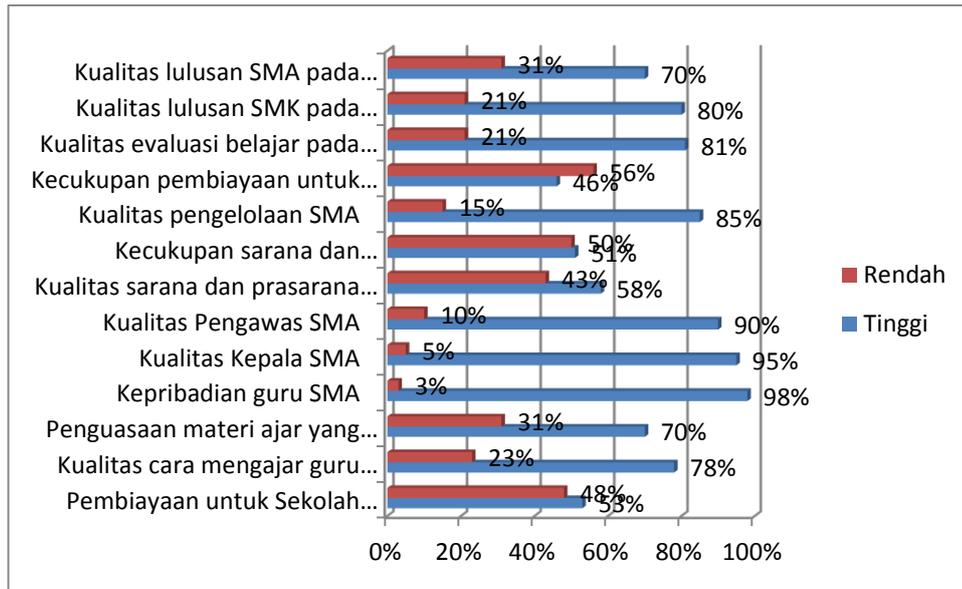
GAMBAR 4. 67. KUALITAS PELAYANAN SMA di PROVINSI NTT

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMA) di provinsi SUMBAR digali dari 13 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.68. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMA hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (53%), dan sebagian kecil (47%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (78%), dan sebagian kecil (22%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (70%), dan sebagian kecil (30%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMA sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 68. KUALITAS PELAYANAN SMA BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI SUMBAR

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Pembiayaan untuk Sekolah Menengah Atas	0%	53%	43%	5%
Kualitas cara mengajar guru SMA	8%	70%	20%	3%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMA	10%	60%	28%	3%
Kepribadian guru SMA	28%	70%	3%	0%
Kualitas Kepala SMA	18%	77%	5%	0%
Kualitas Pengawas SMA	20%	70%	10%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMA	8%	50%	40%	3%
Kecukupan sarana dan prasarana SMA	8%	43%	45%	5%
Kualitas pengelolaan SMA	10%	75%	10%	5%
Kecukupan pembiayaan untuk SMA	3%	43%	48%	8%
Kualitas evaluasi belajar pada SMA	13%	68%	18%	3%
Kualitas lulusan SMK pada aspek pengetahuan	20%	60%	18%	3%
Kualitas lulusan SMA pada aspek sikap dan karakter	10%	60%	28%	3%
Rata-rata	12%	61%	24%	3%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMA sebagian besar responden menyatakan masih rendah(57%), dan sebagian kecil (43%) menyatakan tinggi, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMA sebagian responden menyatakan rendah (50%), dan sebagian (50%) menyatakan tinggi, (9) Kualitas pengelolaan SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMA sebagian besar responden menyatakan rendah (56%), dan sebagian kecil (32%) menyatakan tinggi, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMA sebagian besar responden menyatakan tinggi (81%), dan sebagian kecil (19%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMA pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (80%), dan sebagian kecil (20%) menyatakan rendah, dan (13) Kualitas lulusan SMA pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (70%), dan sebagian kecil (30%) menyatakan rendah.



GAMBAR 4. 68. KUALITAS PELAYANAN SMA di PROVINSI SUMBAR

e. Kualitas Pelayanan SMK

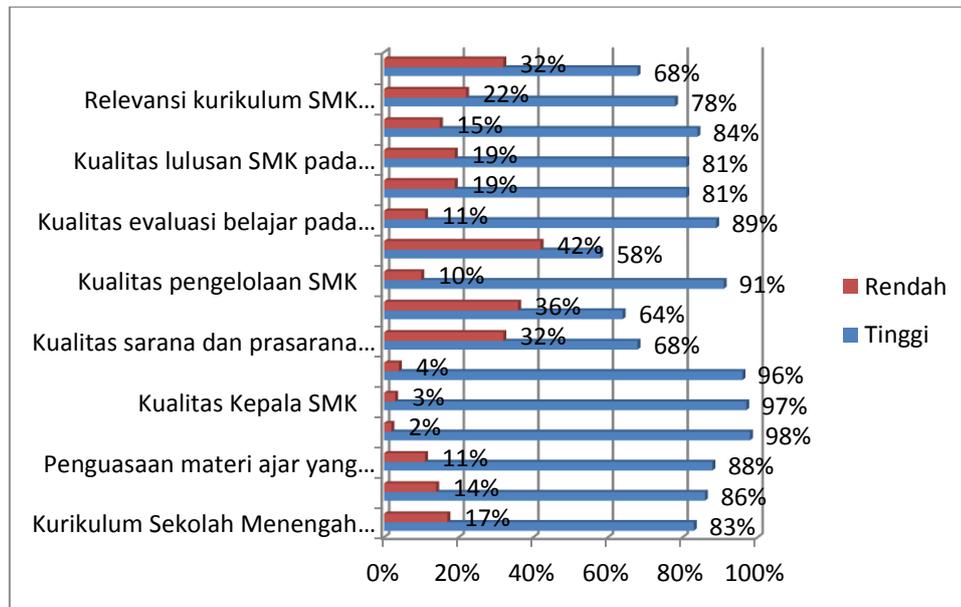
Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMK) secara nasional digali dari 16 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.69. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMK hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (83%), dan sebagian kecil (17%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (86%), dan sebagian kecil (14%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (89%), dan sebagian kecil (11%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (98%), dan sebagian kecil (2%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (96%), dan sebagian kecil (4%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 69. KUALITAS PELAYANAN SMK BERDASARKAN RESPONDEN NASIONAL(N = 370)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan	13%	70%	16%	1%
Kualitas cara mengajar guru SMK	14%	72%	13%	1%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMK	14%	74%	11%	0%
Kepribadian guru SMK	23%	75%	2%	0%
Kualitas Kepala SMK	22%	75%	3%	0%
Kualitas Pengawas SMK	23%	73%	4%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMK	10%	58%	30%	2%
Kecukupan sarana dan prasarana SMK	7%	57%	35%	1%
Kualitas pengelolaan SMK	14%	77%	9%	1%
Kecukupan pembiayaan untuk SMK	8%	50%	38%	4%
Kualitas evaluasi belajar pada SMK	11%	78%	10%	1%
Kualitas lulusan SLB pada aspek pengetahuan	6%	75%	17%	2%
Kualitas lulusan SMK pada aspek sikap dan karakter	15%	66%	18%	1%
Kualitas lulusan SMK pada ketrampilan	13%	71%	15%	0%
Relevansi kurikulum SMK dengan dunia kerja dan dunia industri	15%	63%	22%	0%
Daya serap lulusan SMK	9%	59%	31%	1%
Rata-rata	14%	68%	17%	1%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (68%), dan sebagian kecil (32%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (64%), dan sebagian kecil (36%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (58%), dan sebagian kecil (42%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (89%), dan sebagian kecil (11%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMK pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (81%), dan sebagian kecil (19%) menyatakan rendah, (13) Kualitas lulusan SMK pada aspek sikap dan karakter sebagian besar

responden menyatakan tinggi (81%), dan sebagian kecil (19%) menyatakan rendah, (14) Kualitas lulusan SMK pada ketrampilan sebagian besar responden menyatakan tinggi (84%), dan sebagian kecil (16%) menyatakan rendah, (15) Relevansi kurikulum SMK dengan dunia kerja dan dunia industri sebagian besar responden menyatakan tinggi (78%), dan sebagian kecil (22%) menyatakan rendah, dan (16) Daya serap lulusan SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (68%), dan sebagian kecil (32%) menyatakan rendah.



GAMBAR 4. 69. KUALITAS PELAYANAN SMK BERDASARKAN SELURUH RESPONDEN

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMK) provinsi BALI digali dari 16 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.70. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMK hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (88%), dan sebagian kecil (12%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah, (6)

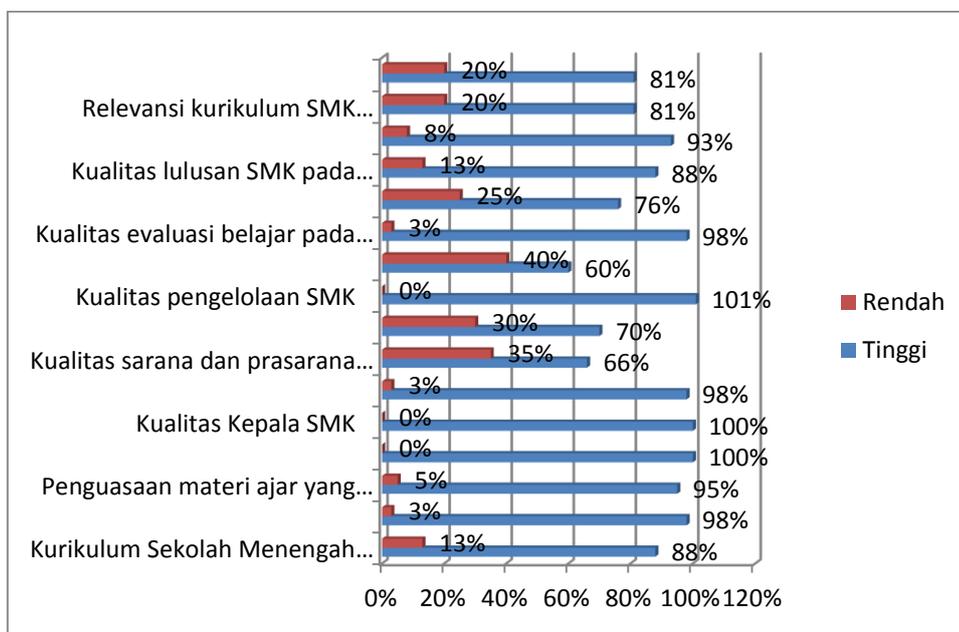
kualitas Pengawas SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah.

\TABEL 4. 70. KUALITAS PELAYANAN SMK BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI BALI (N=40)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan	13%	75%	13%	0%
Kualitas cara mengajar guru SMK	15%	83%	3%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMK	10%	85%	5%	0%
Kepribadian guru SMK	20%	80%	0%	0%
Kualitas Kepala SMK	21%	79%	0%	0%
Kualitas Pengawas SMK	15%	83%	3%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMK	13%	53%	35%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana SMK	10%	60%	30%	0%
Kualitas pengelolaan SMK	18%	83%	0%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SMK	0%	60%	40%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada SMK	10%	88%	3%	0%
Kualitas lulusan SLB pada aspek pengetahuan	8%	68%	25%	0%
Kualitas lulusan SMK pada aspek sikap dan karakter	18%	70%	13%	0%
Kualitas lulusan SMK pada ketrampilan	23%	70%	8%	0%
Relevansi kurikulum SMK dengan dunia kerja dan dunia industri	18%	63%	20%	0%
Daya serap lulusan SMK	18%	63%	20%	0%
Rata-rata	14%	73%	14%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (66%), dan sebagian kecil (34%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (70%), dan sebagian kecil (30%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk

SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (60%), dan sebagian kecil (40%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMK pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (76%), dan sebagian kecil (24%) menyatakan rendah, (13) Kualitas lulusan SMK pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (88%), dan sebagian kecil (12%) menyatakan rendah, (14) Kualitas lulusan SMK pada ketrampilan sebagian besar responden menyatakan tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, (15) Relevansi kurikulum SMK dengan dunia kerja dan dunia industri sebagian besar responden menyatakan tinggi (80%), dan sebagian kecil (20%) menyatakan rendah, dan (16) Daya serap lulusan SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (80%), dan sebagian kecil (20%) menyatakan rendah,



GAMBAR 4. 70. KUALITAS PELAYANAN SMK BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI BALI

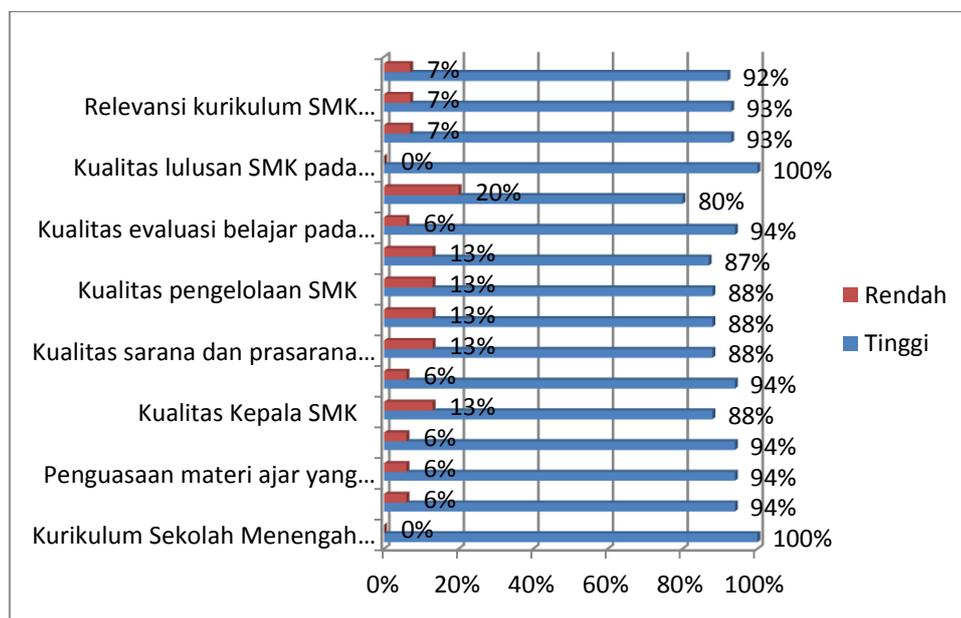
Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMK) provinsi BANTEN digali dari 16 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.71. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMK hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMK sebagian besar responden

menyatakan sudah cukup tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 71. KUALITAS PELAYANAN SMK BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI BANTEN (N=17)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan	31%	69%	0%	0%
Kualitas cara mengajar guru SMK	25%	69%	6%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMK	13%	81%	6%	0%
Kepribadian guru SMK	13%	81%	6%	0%
Kualitas Kepala SMK	38%	50%	13%	0%
Kualitas Pengawas SMK	31%	63%	6%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMK	38%	50%	13%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana SMK	19%	69%	13%	0%
Kualitas pengelolaan SMK	25%	63%	13%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SMK	31%	56%	13%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada SMK	31%	63%	6%	0%
Kualitas lulusan SLB pada aspek pengetahuan	20%	60%	20%	0%
Kualitas lulusan SMK pada aspek sikap dan karakter	27%	73%	0%	0%
Kualitas lulusan SMK pada ketrampilan	20%	73%	7%	0%
Relevansi kurikulum SMK dengan dunia kerja dan dunia industri	14%	79%	7%	0%
Daya serap lulusan SMK	21%	71%	7%	0%
Rata-rata	25%	67%	9%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (94%), dan sebagian kecil (6%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMK pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (80%), dan sebagian kecil (20%) menyatakan rendah, (13) Kualitas lulusan SMK pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah, (14) Kualitas lulusan SMK pada ketrampilan sebagian besar responden menyatakan tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, (15) Relevansi kurikulum SMK dengan dunia kerja dan dunia industri sebagian besar responden menyatakan tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, dan (16) Daya serap lulusan SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah,



GAMBAR 4. 71. KUALITAS PELAYANAN SMK di PROVINSI BANTEN

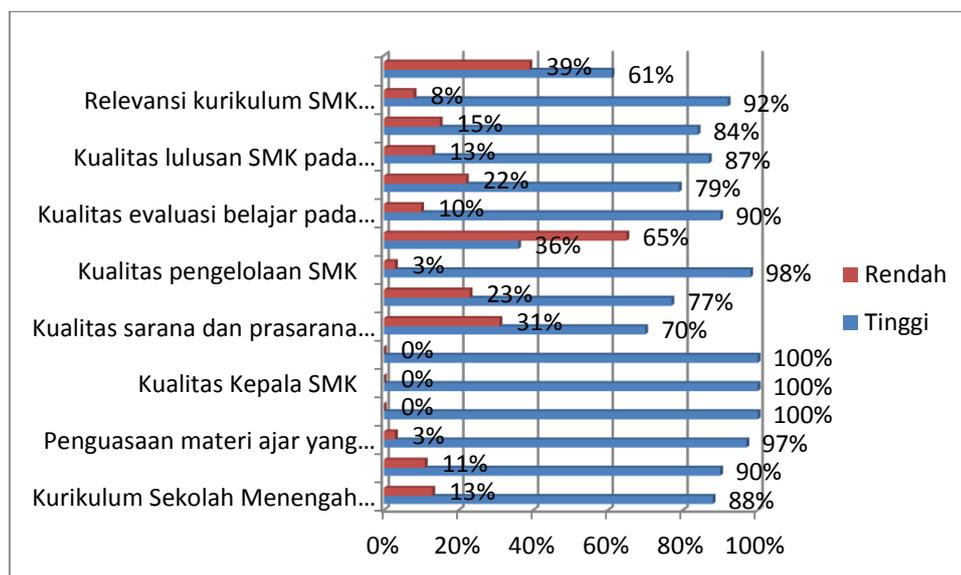
Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMK) provinsi DIY digali dari 16 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.72. Kriteria

jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMK hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (89%), dan sebagian kecil (11%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 72. KUALITAS PELAYANAN SMK BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI DIY (N=40)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan	3%	85%	13%	0%
Kualitas cara mengajar guru SMK	3%	87%	11%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMK	5%	92%	3%	0%
Kepribadian guru SMK	16%	84%	0%	0%
Kualitas Kepala SMK	13%	87%	0%	0%
Kualitas Pengawas SMK	18%	82%	0%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMK	8%	62%	28%	3%
Kecukupan sarana dan prasarana SMK	5%	72%	23%	0%
Kualitas pengelolaan SMK	11%	87%	3%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SMK	0%	36%	62%	3%
Kualitas evaluasi belajar pada SMK	3%	87%	10%	0%
Kualitas lulusan SLB pada aspek pengetahuan	3%	76%	14%	8%
Kualitas lulusan SMK pada aspek sikap dan karakter	41%	46%	13%	0%
Kualitas lulusan SMK pada ketrampilan	10%	74%	15%	0%
Relevansi kurikulum SMK dengan dunia kerja dan dunia industri	10%	82%	8%	0%
Daya serap lulusan SMK	11%	50%	39%	0%
Rata-rata	10%	74%	15%	1%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (70%), dan sebagian kecil (30%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (77%), dan sebagian kecil (23%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMK sebagian besar responden menyatakan rendah (65%), dan sebagian kecil (35%) menyatakan tinggi, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMK pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (78%), dan sebagian kecil (22%) menyatakan rendah, (13) Kualitas lulusan SMK pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (14) Kualitas lulusan SMK pada ketrampilan sebagian besar responden menyatakan tinggi (84%), dan sebagian kecil (16%) menyatakan rendah, (15) Relevansi kurikulum SMK dengan dunia kerja dan dunia industri sebagian besar responden menyatakan tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, dan (16) Daya serap lulusan SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (61%), dan sebagian kecil (39%) menyatakan rendah,



GAMBAR 4. 72. KUALITAS PELAYANAN SMK di PROVINSI DIY

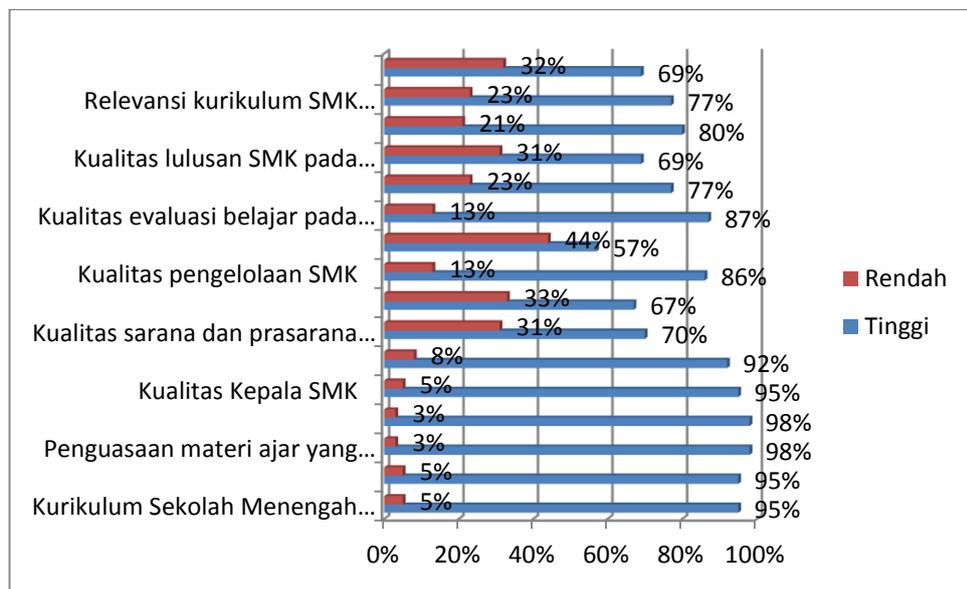
Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMK) provinsi JATENG digali dari 16 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.73. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMK hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMK sebagian

besar responden menyatakan tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 73. KUALITAS PELAYANAN SMK BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI JATENG (N=41)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan	15%	80%	5%	0%
Kualitas cara mengajar guru SMK	20%	75%	5%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMK	26%	72%	3%	0%
Kepribadian guru SMK	30%	68%	3%	0%
Kualitas Kepala SMK	36%	59%	5%	0%
Kualitas Pengawas SMK	33%	59%	8%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMK	3%	67%	31%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana SMK	3%	64%	33%	0%
Kualitas pengelolaan SMK	18%	68%	13%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SMK	8%	49%	44%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada SMK	15%	72%	13%	0%
Kualitas lulusan SLB pada aspek pengetahuan	5%	72%	23%	0%
Kualitas lulusan SMK pada aspek sikap dan karakter	10%	59%	31%	0%
Kualitas lulusan SMK pada ketrampilan	18%	62%	21%	0%
Relevansi kurikulum SMK dengan dunia kerja dan dunia industri	23%	54%	23%	0%
Daya serap lulusan SMK	16%	53%	29%	3%
Rata-rata	17%	65%	18%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (69%), dan sebagian kecil (31%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (67%), dan sebagian kecil (33%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (56%), dan sebagian kecil (44%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMK pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (77%), dan sebagian kecil (23%) menyatakan rendah, (13) Kualitas lulusan SMK pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (69%), dan sebagian kecil (31%) menyatakan rendah, (14) Kualitas lulusan SMK pada ketrampilan sebagian besar responden menyatakan tinggi (80%), dan sebagian kecil (20%) menyatakan rendah, (15) Relevansi kurikulum SMK dengan dunia kerja dan dunia industri sebagian besar responden menyatakan tinggi (77%), dan sebagian kecil (23%) menyatakan rendah, dan (16) Daya serap lulusan SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (68%), dan sebagian kecil (32%) menyatakan rendah.



GAMBAR 4. 73. KUALITAS PELAYANAN SMK di PROVINSI JATENG

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMK) provinsi JATIM digali dari 16 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.74. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi”

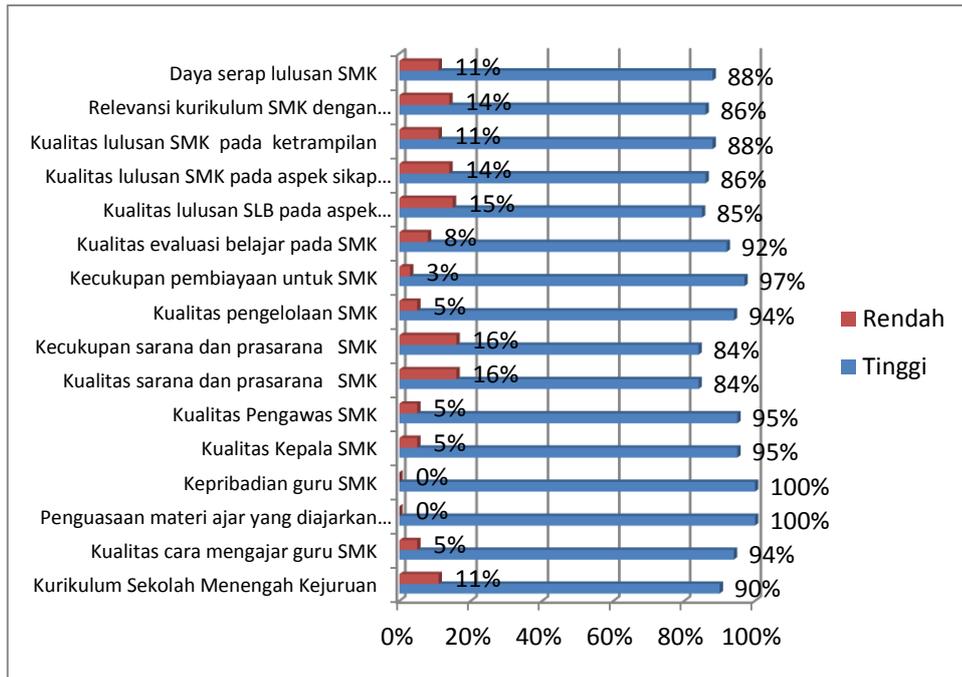
sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMK hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (89%), dan sebagian kecil (11%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 74. KUALITAS PELAYANAN SMK BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI JATIM (N=39)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan	32%	58%	11%	0%
Kualitas cara mengajar guru SMK	26%	68%	5%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMK	27%	73%	0%	0%
Kepribadian guru SMK	29%	71%	0%	0%
Kualitas Kepala SMK	30%	65%	5%	0%
Kualitas Pengawas SMK	32%	63%	5%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMK	18%	66%	16%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana SMK	13%	71%	16%	0%
Kualitas pengelolaan SMK	18%	76%	5%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SMK	22%	75%	3%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada SMK	13%	79%	8%	0%
Kualitas lulusan SLB pada aspek pengetahuan	9%	76%	15%	0%
Kualitas lulusan SMK pada aspek sikap dan karakter	11%	75%	14%	0%
Kualitas lulusan SMK pada ketrampilan	19%	69%	11%	0%

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Relevansi kurikulum SMK dengan dunia kerja dan dunia industri	19%	67%	14%	0%
Daya serap lulusan SMK	17%	71%	11%	0%
Rata-rata	21%	70%	9%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (84%), dan sebagian kecil (16%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (84%), dan sebagian kecil (16%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMK pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah, (13) Kualitas lulusan SMK pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (86%), dan sebagian kecil (14%) menyatakan rendah, (14) Kualitas lulusan SMK pada ketrampilan sebagian besar responden menyatakan tinggi (89%), dan sebagian kecil (11%) menyatakan rendah, (15) Relevansi kurikulum SMK dengan dunia kerja dan dunia industri sebagian besar responden menyatakan tinggi (86%), dan sebagian kecil (14%) menyatakan rendah, dan (16) Daya serap lulusan SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (89%), dan sebagian kecil (11%) menyatakan rendah.



GAMBAR 4. 74. KUALITAS PELAYANAN SMK di PROVINSI JATIM

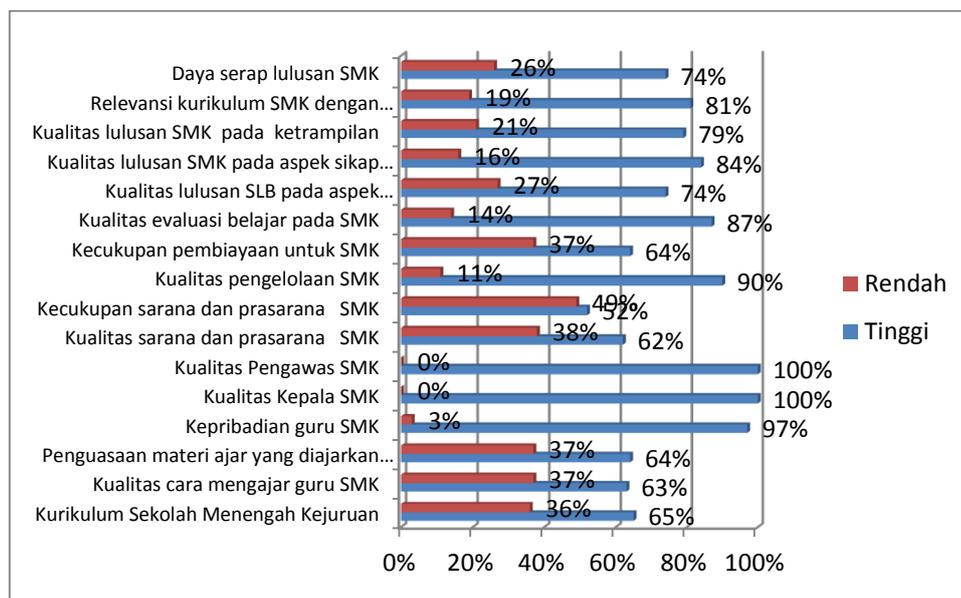
Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMK) provinsi JABAR digali dari 16 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.75. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMK hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (64%), dan sebagian kecil (36%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (63%), dan sebagian kecil (37%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (64%), dan sebagian kecil (36%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 75. KUALITAS PELAYANAN SMK BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI JABAR (N=41)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan	3%	62%	33%	3%
Kualitas cara mengajar guru SMK	5%	58%	34%	3%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMK	3%	61%	37%	0%
Kepribadian guru SMK	5%	92%	3%	0%
Kualitas Kepala SMK	5%	95%	0%	0%
Kualitas Pengawas SMK	8%	92%	0%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMK	3%	59%	38%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana SMK	3%	49%	49%	0%
Kualitas pengelolaan SMK	3%	87%	8%	3%
Kecukupan pembiayaan untuk SMK	3%	61%	26%	11%
Kualitas evaluasi belajar pada SMK	3%	84%	11%	3%
Kualitas lulusan SLB pada aspek pengetahuan	3%	71%	24%	3%
Kualitas lulusan SMK pada aspek sikap dan karakter	8%	76%	16%	0%
Kualitas lulusan SMK pada ketrampilan	3%	76%	21%	0%
Relevansi kurikulum SMK dengan dunia kerja dan dunia industri	26%	55%	16%	3%
Daya serap lulusan SMK	3%	71%	21%	5%
Rata-rata	5%	72%	21%	2%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (62%), dan sebagian kecil (38%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (51%), dan sebagian kecil (49%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (89%), dan sebagian kecil (11%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (64%), dan sebagian kecil (36%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMK pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (73%), dan sebagian kecil (27%) menyatakan

rendah, (13) Kualitas lulusan SMK pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (84%), dan sebagian kecil (16%) menyatakan rendah, (14) Kualitas lulusan SMK pada ketrampilan sebagian besar responden menyatakan tinggi (79%), dan sebagian kecil (21%) menyatakan rendah, (15) Relevansi kurikulum SMK dengan dunia kerja dan dunia industri sebagian besar responden menyatakan tinggi (82%), dan sebagian kecil (18%) menyatakan rendah, dan (16) Daya serap lulusan SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (74%), dan sebagian kecil (26%) menyatakan rendah.



GAMBAR 4. 75. KUALITAS PELAYANAN SMK di PROVINSI JABAR

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMK) provinsi KALTIM digali dari 16 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.76. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMK hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan

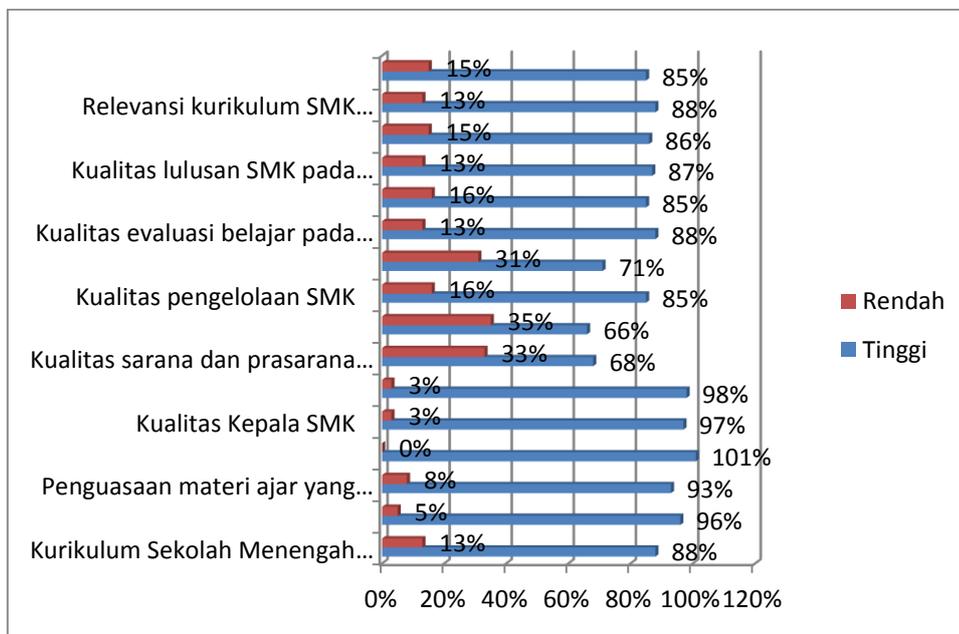
rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 76. KUALITAS PELAYANAN SMK BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI KALTIM (N=40)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan	15%	73%	13%	0%
Kualitas cara mengajar guru SMK	13%	83%	5%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMK	10%	83%	8%	0%
Kepribadian guru SMK	18%	83%	0%	0%
Kualitas Kepala SMK	23%	74%	3%	0%
Kualitas Pengawas SMK	20%	78%	3%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMK	5%	63%	28%	5%
Kecukupan sarana dan prasarana SMK	3%	63%	35%	0%
Kualitas pengelolaan SMK	8%	77%	13%	3%
Kecukupan pembiayaan untuk SMK	8%	63%	28%	3%
Kualitas evaluasi belajar pada SMK	5%	83%	10%	3%
Kualitas lulusan SLB pada aspek pengetahuan	5%	80%	13%	3%
Kualitas lulusan SMK pada aspek sikap dan karakter	10%	77%	13%	0%
Kualitas lulusan SMK pada ketrampilan	8%	78%	15%	0%
Relevansi kurikulum SMK dengan dunia kerja dan dunia industri	13%	75%	13%	0%
Daya serap lulusan SMK	10%	75%	15%	0%
Rata-rata	11%	76%	13%	1%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (68%), dan sebagian kecil (32%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (65%), dan sebagian kecil (35%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (84%), dan sebagian kecil (16%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk

SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (71%), dan sebagian kecil (31%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMK pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (84%), dan sebagian kecil (16%) menyatakan rendah, (13) Kualitas lulusan SMK pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (14) Kualitas lulusan SMK pada ketrampilan sebagian besar responden menyatakan tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah, (15) Relevansi kurikulum SMK dengan dunia kerja dan dunia industri sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, dan (16) Daya serap lulusan SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah,



GAMBAR 4. 76. KUALITAS PELAYANAN SMK di PROVINSI KALTIM

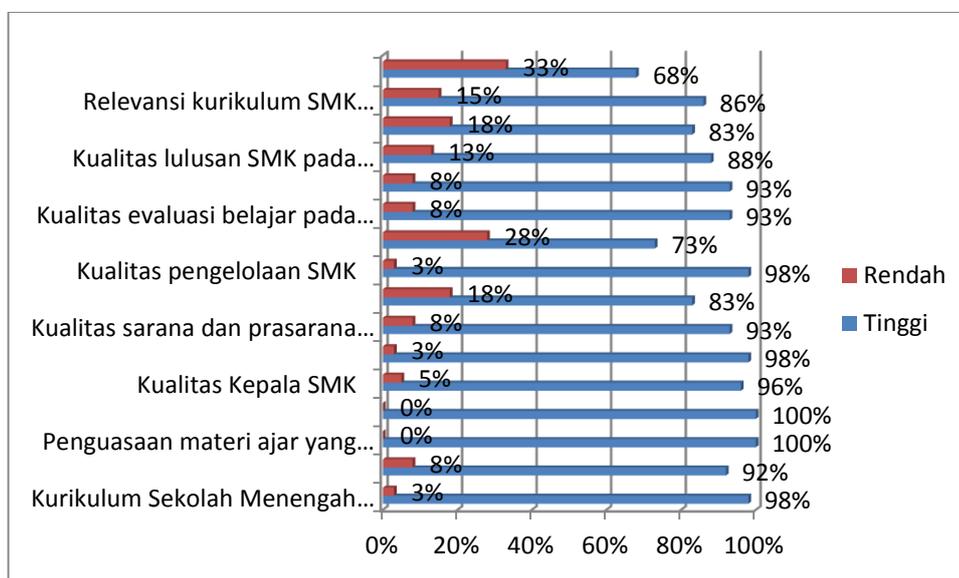
Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMK) provinsi NTB digali dari 16 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.77. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMK hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%)

menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 77. KUALITAS PELAYANAN SMK BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI NTB (N=40)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan	25%	73%	3%	0%
Kualitas cara mengajar guru SMK	23%	69%	8%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMK	30%	70%	0%	0%
Kepribadian guru SMK	50%	50%	0%	0%
Kualitas Kepala SMK	33%	63%	5%	0%
Kualitas Pengawas SMK	45%	53%	3%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMK	18%	75%	8%	0%
Kecukupan sarana dan prasarana SMK	15%	68%	18%	0%
Kualitas pengelolaan SMK	25%	73%	3%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SMK	18%	55%	28%	0%
Kualitas evaluasi belajar pada SMK	25%	68%	8%	0%
Kualitas lulusan SLB pada aspek pengetahuan	15%	78%	8%	0%
Kualitas lulusan SMK pada aspek sikap dan karakter	20%	68%	10%	3%
Kualitas lulusan SMK pada ketrampilan	20%	63%	18%	0%
Relevansi kurikulum SMK dengan dunia kerja dan dunia industri	23%	63%	15%	0%
Daya serap lulusan SMK	8%	60%	33%	0%
Rata-rata	25%	66%	11%	0%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (82%), dan sebagian kecil (18%) menyatakan rendah, (9) Kualitas pengelolaan SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (97%), dan sebagian kecil (3%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (72%), dan sebagian kecil (28%) menyatakan rendah, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMK pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, (13) Kualitas lulusan SMK pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (14) Kualitas lulusan SMK pada ketrampilan sebagian besar responden menyatakan tinggi (82%), dan sebagian kecil (18%) menyatakan rendah, (15) Relevansi kurikulum SMK dengan dunia kerja dan dunia industri sebagian besar responden menyatakan tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah, dan (16) Daya serap lulusan SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (67%), dan sebagian kecil (33%) menyatakan rendah.



GAMBAR 4. 77. KUALITAS PELAYANAN SMK di PROVINSI NTB

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMK) provinsi NTT digali dari 16 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.78. Kriteria jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi”

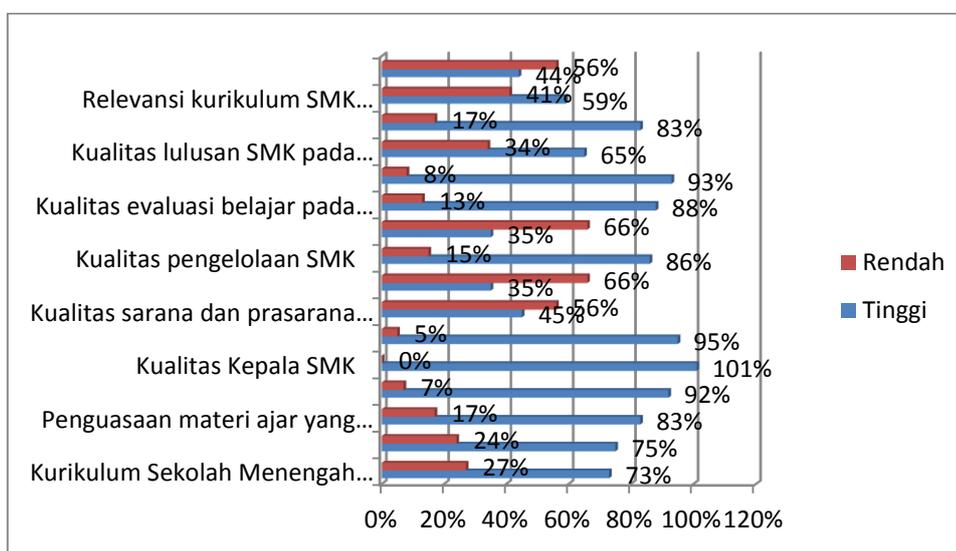
sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMK hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (73%), dan sebagian kecil (27%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (76%), dan sebagian kecil (24%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (83%), dan sebagian kecil (17%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (93%), dan sebagian kecil (7%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (100%), dan sebagian kecil (0%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 78. KUALITAS PELAYANAN SMK BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI NTT (N=41)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan	7%	66%	22%	5%
Kualitas cara mengajar guru SMK	7%	68%	24%	0%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMK	10%	73%	17%	0%
Kepribadian guru SMK	12%	80%	7%	0%
Kualitas Kepala SMK	8%	93%	0%	0%
Kualitas Pengawas SMK	13%	82%	5%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMK	5%	40%	53%	3%
Kecukupan sarana dan prasarana SMK	5%	30%	63%	3%
Kualitas pengelolaan SMK	8%	78%	15%	0%
Kecukupan pembiayaan untuk SMK	10%	25%	58%	8%
Kualitas evaluasi belajar pada SMK	3%	85%	13%	0%
Kualitas lulusan SLB pada aspek pengetahuan	0%	93%	8%	0%
Kualitas lulusan SMK pada aspek sikap dan karakter	2%	63%	32%	2%
Kualitas lulusan SMK pada ketrampilan	5%	78%	15%	2%
Relevansi kurikulum SMK dengan dunia kerja dan dunia industri	0%	59%	41%	0%

Daya serap lulusan SMK	0%	44%	54%	2%
Rata-rata	6%	66%	27%	2%

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMK sebagian besar responden menyatakan masih rendah (56%), dan sebagian kecil (44%) menyatakan tinggi, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMK sebagian besar responden menyatakan rendah(66%), dan sebagian kecil (34%) menyatakan tinggi, (9) Kualitas pengelolaan SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (85%), dan sebagian kecil (15%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMK sebagian besar responden menyatakan rendah (66%), dan sebagian kecil (34%) menyatakantinggi, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (87%), dan sebagian kecil (13%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMK pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (92%), dan sebagian kecil (8%) menyatakan rendah, (13) Kualitas lulusan SMK pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (66%), dan sebagian kecil (34%) menyatakan rendah, (14) Kualitas lulusan SMK pada ketrampilansebagian besar responden menyatakan tinggi (83%), dan sebagian kecil (17%) menyatakan rendah, (15)Relevansi kurikulum SMK dengan dunia kerja dan dunia industrisebagian besar responden menyatakan tinggi (59%), dan sebagian kecil (41%) menyatakan rendah, dan (16) Daya serap lulusan SMKsebagian besar responden menyatakan rendah (56%), dan sebagian kecil (44%) menyatakan tinggi.



GAMBAR 4. 78. KUALITAS PELAYANAN SMK di PROVINSI NTT

Data persepsi responden terhadap kualitas layanan pendidikan (SMK) provinsi SUMBAR digali dari 16 pertanyaan yang tersusun pada Tabel 4.79. Kriteria

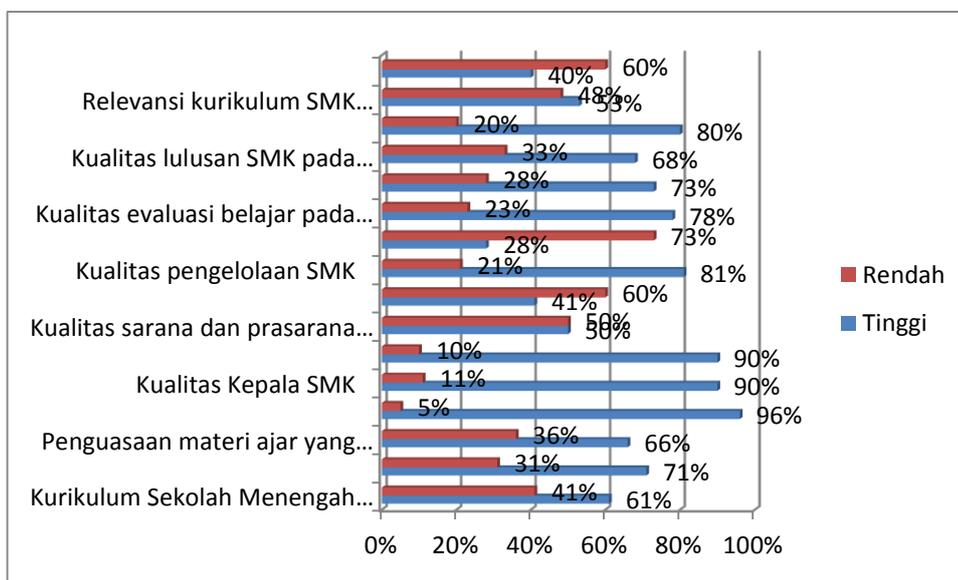
jawaban responden diwujudkan dalam bentuk interval mulai dari “sangat tinggi” sampai dengan “rendah”. Data kualitas layanan SMK hasil penelitian secara keseluruhan diperoleh informasi bahwa: (1) kualitas kurikulum SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (61%), dan sebagian kecil (39%) menyatakan rendah, (2) kualitas cara mengajar guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (70%), dan sebagian kecil (30%) menyatakan rendah, (3) Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (65%), dan sebagian kecil (35%) menyatakan rendah, (4) Kepribadian guru SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (95%), dan sebagian kecil (5%) menyatakan rendah, (5) kualitas Kepala sekolah SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (89%), dan sebagian kecil (11%) menyatakan rendah, (6) kualitas Pengawas SMK sebagian besar responden menyatakan sudah cukup tinggi (90%), dan sebagian kecil (10%) menyatakan rendah.

TABEL 4. 79. KUALITAS PELAYANAN SMK BERDASARKAN RESPONDENPROVINSI SUMBAR (N=40)

Aspek Kualitas Pendidikan	% responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Cukup	Kurang	Rendah
Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan	3%	58%	38%	3%
Kualitas cara mengajar guru SMK	8%	63%	28%	3%
Penguasaan materi ajar yang diajarkan guru SMK	8%	58%	33%	3%
Kepribadian guru SMK	28%	68%	5%	0%
Kualitas Kepala SMK	20%	70%	8%	3%
Kualitas Pengawas SMK	20%	70%	10%	0%
Kualitas sarana dan prasarana SMK	5%	45%	45%	5%
Kecukupan sarana dan prasarana SMK	3%	38%	55%	5%
Kualitas pengelolaan SMK	13%	68%	18%	3%
Kecukupan pembiayaan untuk SMK	0%	28%	63%	10%
Kualitas evaluasi belajar pada SMK	13%	65%	20%	3%
Kualitas lulusan SLB pada aspek pengetahuan	5%	68%	25%	3%
Kualitas lulusan SMK pada aspek sikap dan karakter	8%	60%	30%	3%
Kualitas lulusan SMK pada ketrampilan	10%	70%	20%	0%
Relevansi kurikulum SMK dengan dunia kerja dan dunia industri	8%	45%	48%	0%
Daya serap lulusan SMK	0%	40%	60%	0%

Rata-rata	10%	57%	32%	3%
------------------	-----	-----	-----	----

Selanjutnya (7) kualitas sarana dan prasarana SMK sebagian responden menyatakan tinggi (50%), dan sebagian lagi (50%) menyatakan masih rendah, (8) Kecukupan sarana dan prasarana SMK sebagian besar responden menyatakan rendah (60%), dan sebagian kecil (40%) menyatakan tinggi, (9) Kualitas pengelolaan SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (79%), dan sebagian kecil (21%) menyatakan rendah, (10) Kecukupan pembiayaan untuk SMK sebagian besar responden menyatakan rendah (72%), dan sebagian kecil (28%) menyatakan tinggi, (11) Kualitas evaluasi belajar pada SMK sebagian besar responden menyatakan tinggi (78%), dan sebagian kecil (22%) menyatakan rendah, (12) Kualitas lulusan SMK pada aspek pengetahuan sebagian besar responden menyatakan tinggi (72%), dan sebagian kecil (28%) menyatakan rendah, (13) Kualitas lulusan SMK pada aspek sikap dan karakter sebagian besar responden menyatakan tinggi (68%), dan sebagian kecil (32%) menyatakan rendah, (14) Kualitas lulusan SMK pada ketrampilan sebagian besar responden menyatakan tinggi (80%), dan sebagian kecil (20%) menyatakan rendah, (15) Relevansi kurikulum SMK dengan dunia kerja dan dunia industri sebagian besar responden menyatakan tinggi (52%), dan sebagian kecil (48%) menyatakan rendah, dan (16) Daya serap lulusan SMK sebagian besar responden menyatakan rendah (60%), dan sebagian kecil (40%) menyatakan tinggi.



GAMBAR 4. 79. KUALITAS PELAYANAN SMK di PROVINSI SUMBAR

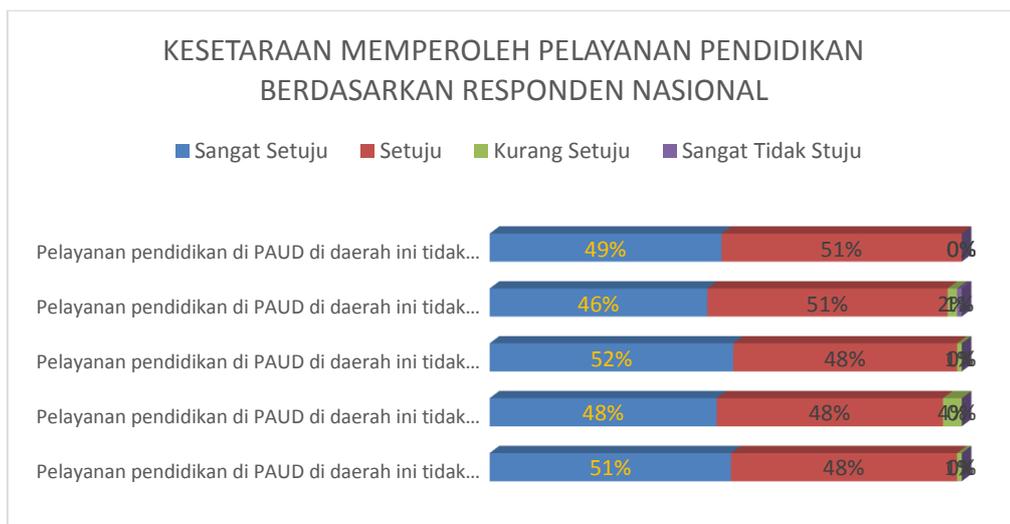
4. Kesetaraan pelayanan pendidikan

a. Kesetaraan Pelayanan Pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini

Kesetaraan pelayanan pendidikan untuk pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat pada pendidikan anak usia dini (PAUD) secara nasional rata-rata responden menjawab sangat setuju (49%) dan setuju (49%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 80. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN NASIONAL

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	51%	48%	1%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	48%	48%	4%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan suku	52%	48%	1%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	46%	51%	2%	1%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan warna kulit	49%	51%	0%	0%
Rata-rata	49%	49%	2%	0%

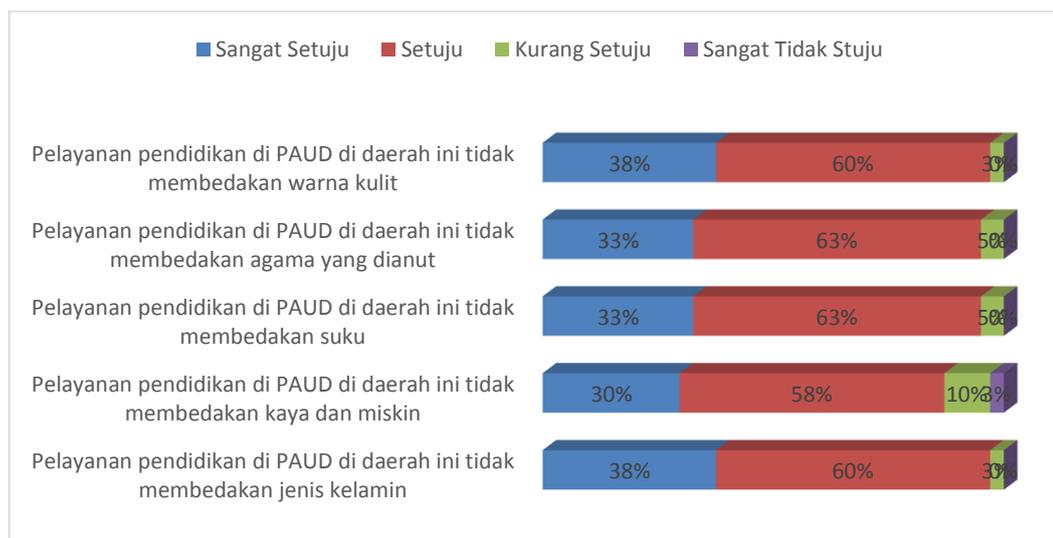


GAMBAR 4. 80. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN NASIONAL

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurut responden di Provinsi Bali rata-rata responden menjawab sangat setuju (34%) dan setuju (61%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 81. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI BALI (N=40)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Stuju
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	38%	60%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	30%	58%	10%	3%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan suku	33%	63%	5%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	33%	63%	5%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan warna kulit	38%	60%	3%	0%
Rata-rata	34%	61%	5%	1%

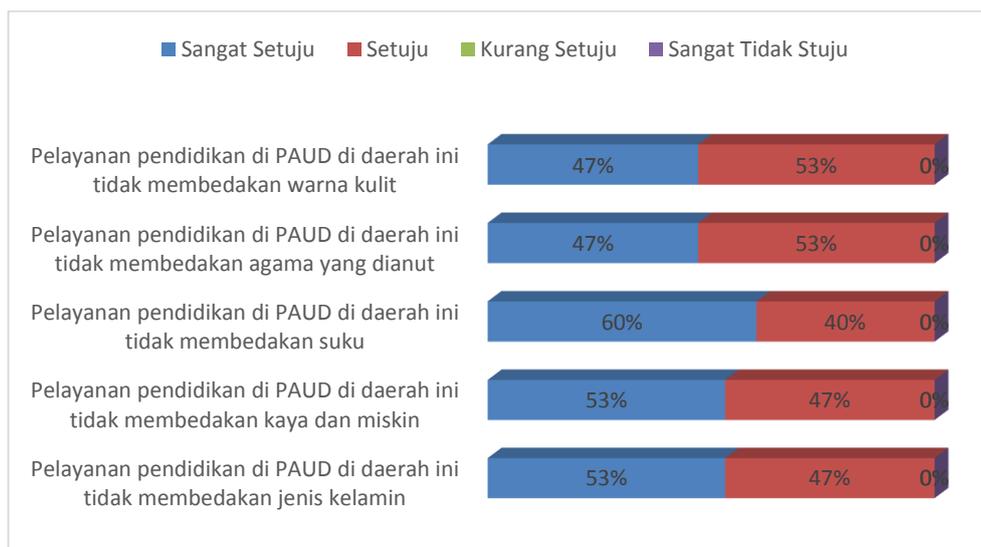


GAMBAR 4. 81. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI BALI

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurut responden di Provinsi Banten rata-rata responden menjawab sangat setuju (52%) dan setuju (48%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 82. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI BANTEN (N=17)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	53%	47%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	53%	47%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan suku	60%	40%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	47%	53%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan warna kulit	47%	53%	0%	0%
Rata-rata	52%	48%	0%	0%

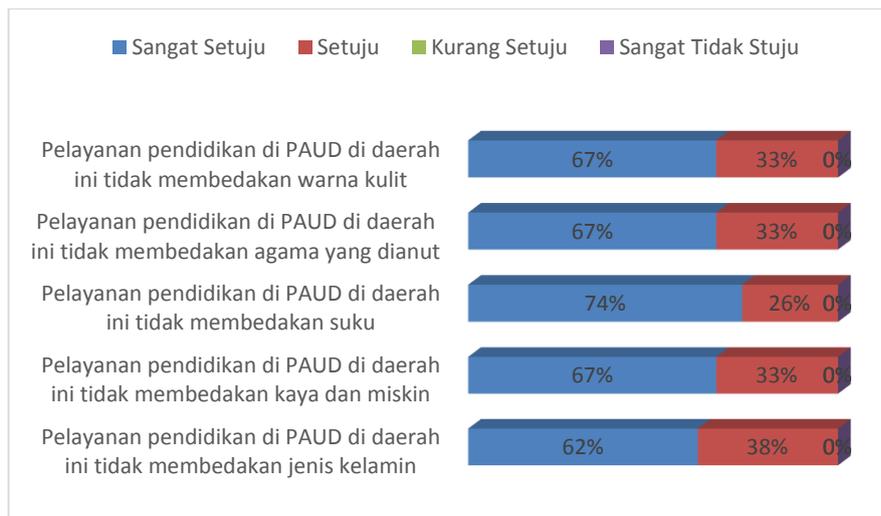


GAMBAR 4. 82. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI BANTEN

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurut responden di Provinsi DIY rata-rata responden menjawab sangat setuju (67%) dan setuju (33%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 83. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI DIY (N=40)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	62%	38%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	67%	33%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan suku	74%	26%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	67%	33%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan warna kulit	67%	33%	0%	0%
Rata-rata	67%	33%	0%	0%

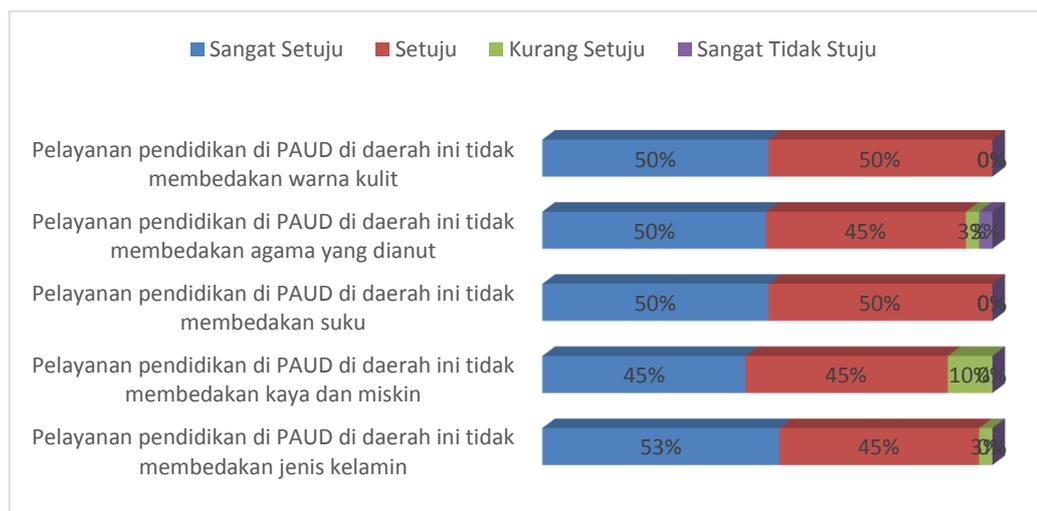


GAMBAR 4. 83. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI DIY

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurut responden di Provinsi Jateng rata-rata responden menjawab sangat setuju (50%) dan setuju (47%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 84. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI JATENG (N=41)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	53%	45%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	45%	45%	10%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan suku	50%	50%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	50%	45%	3%	3%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan warna kulit	50%	50%	0%	0%
Rata-rata	50%	47%	3%	1%

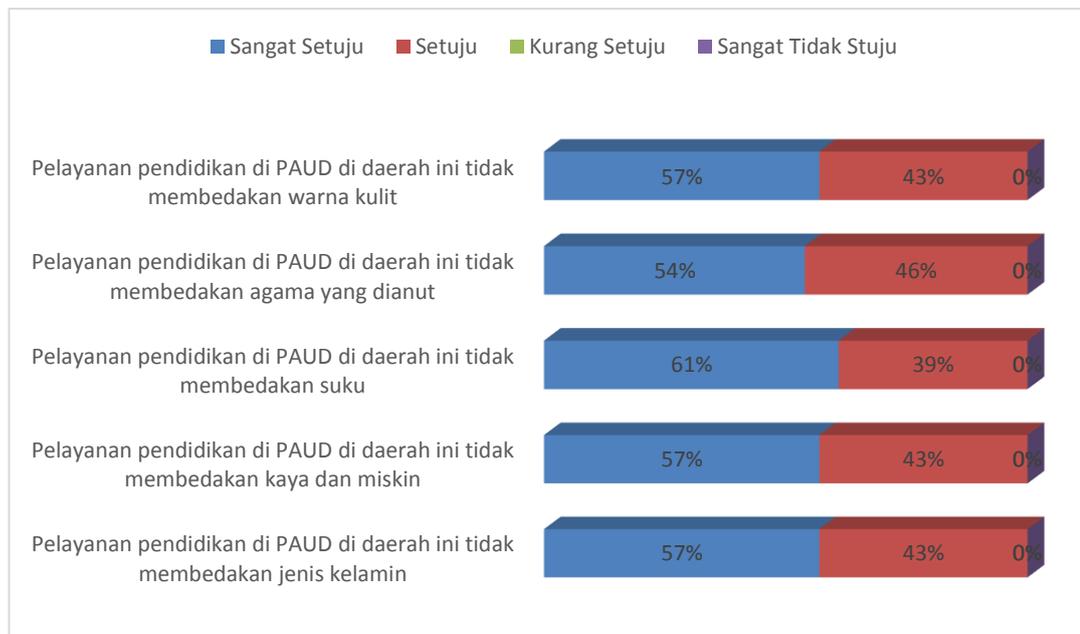


GAMBAR 4. 84. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI JATENG

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurut responden di Provinsi Jatim rata-rata responden menjawab sangat setuju (57%) dan setuju (43%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 85. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI JATIM (N=39)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Stuju
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	57%	43%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	57%	43%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan suku	61%	39%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	54%	46%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan warna kulit	57%	43%	0%	0%
Rata-rata	57%	43%	0%	0%

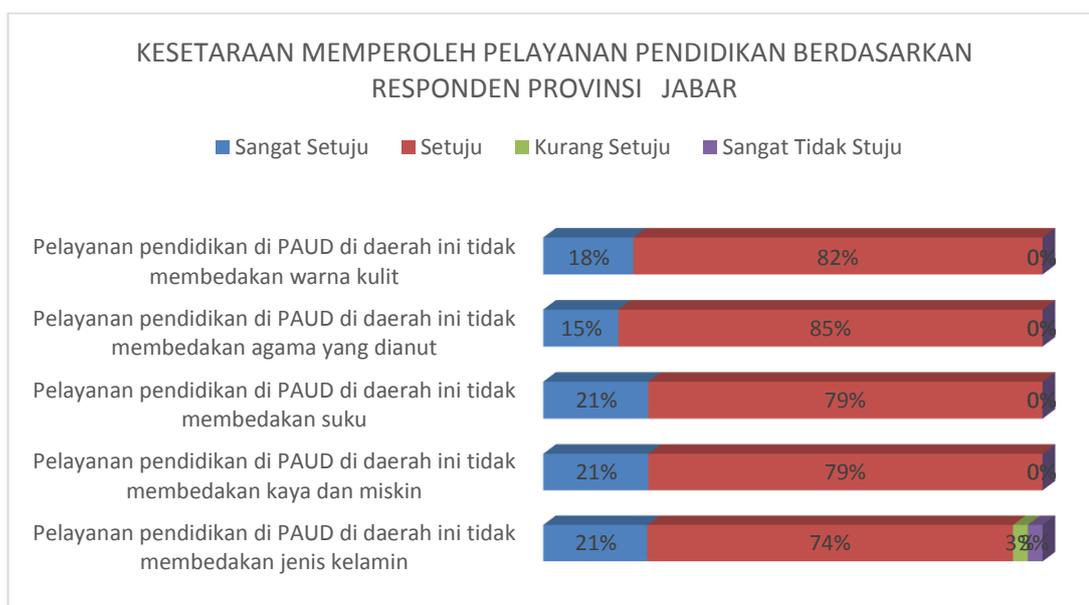


GAMBAR 4. 85. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI JATIM

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurut responden di Provinsi Jabar rata-rata responden menjawab sangat setuju (19%) dan setuju (80%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 86. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI JABAR (N=41)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	21%	74%	3%	3%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	21%	79%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan suku	21%	79%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	15%	85%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan warna kulit	18%	82%	0%	0%
Rata-rata	19%	80%	1%	1%

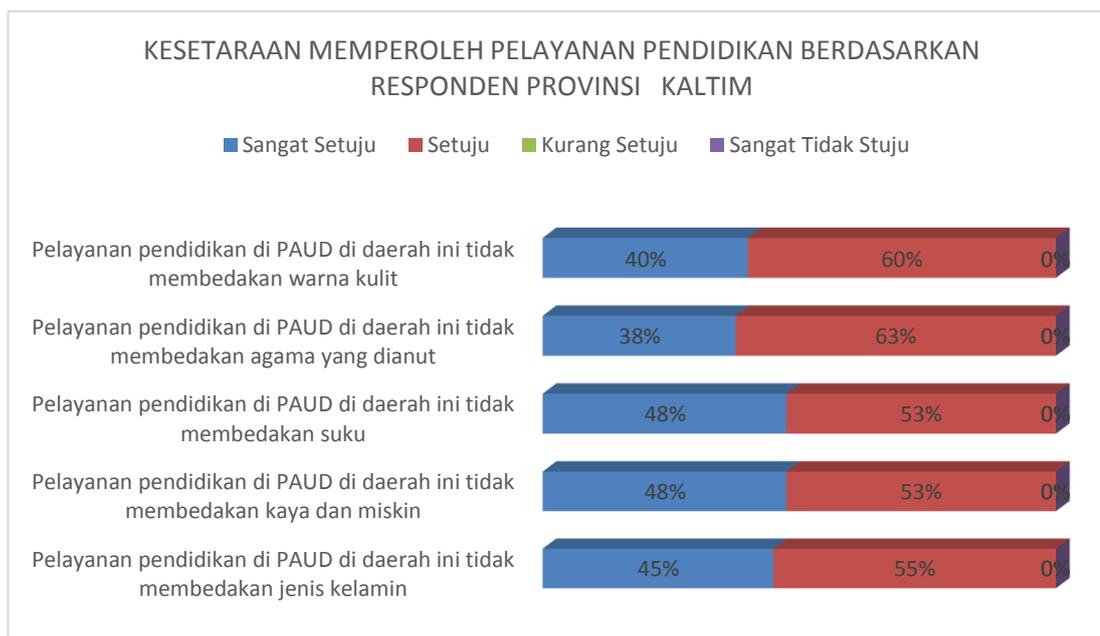


GAMBAR 4. 86. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI JABAR

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurut responden di Provinsi Kaltim rata-rata responden menjawab sangat setuju (44%) dan setuju (57%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 87. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI KALTIM (N=40)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	45%	55%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	48%	53%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan suku	48%	53%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	38%	63%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan warna kulit	40%	60%	0%	0%
Rata-rata	44%	57%	0%	0%

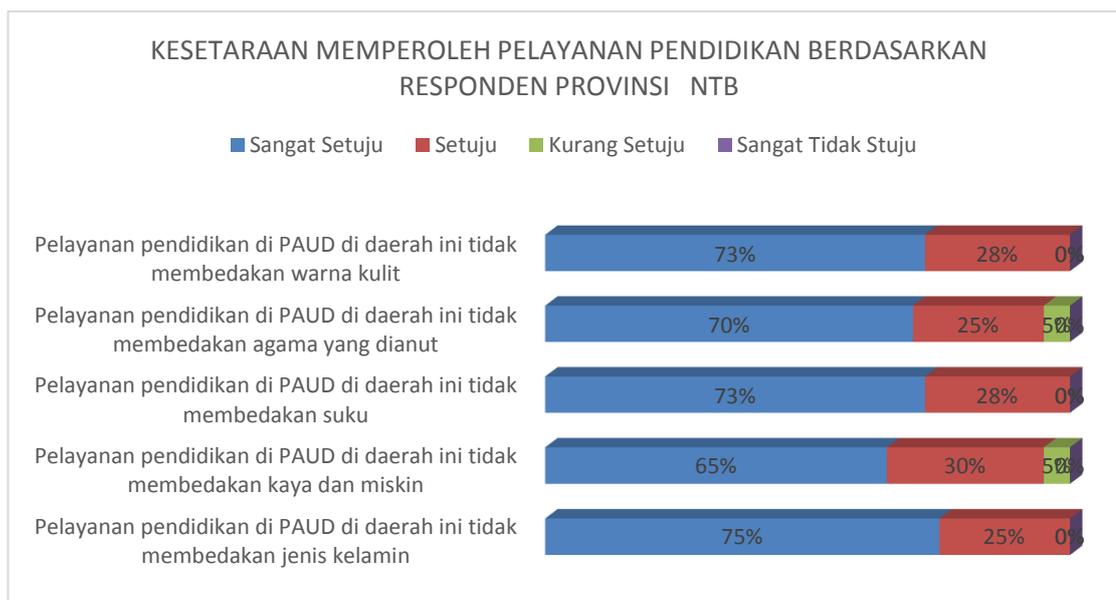


GAMBAR 4. 87. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI KALTIM

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurut responden di Provinsi NTB rata-rata responden menjawab sangat setuju (71%) dan setuju (27%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 88. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI NTB (N=40)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Stuju
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	75%	25%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	65%	30%	5%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan suku	73%	28%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	70%	25%	5%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan warna kulit	73%	28%	0%	0%
Rata-rata	71%	27%	2%	0%

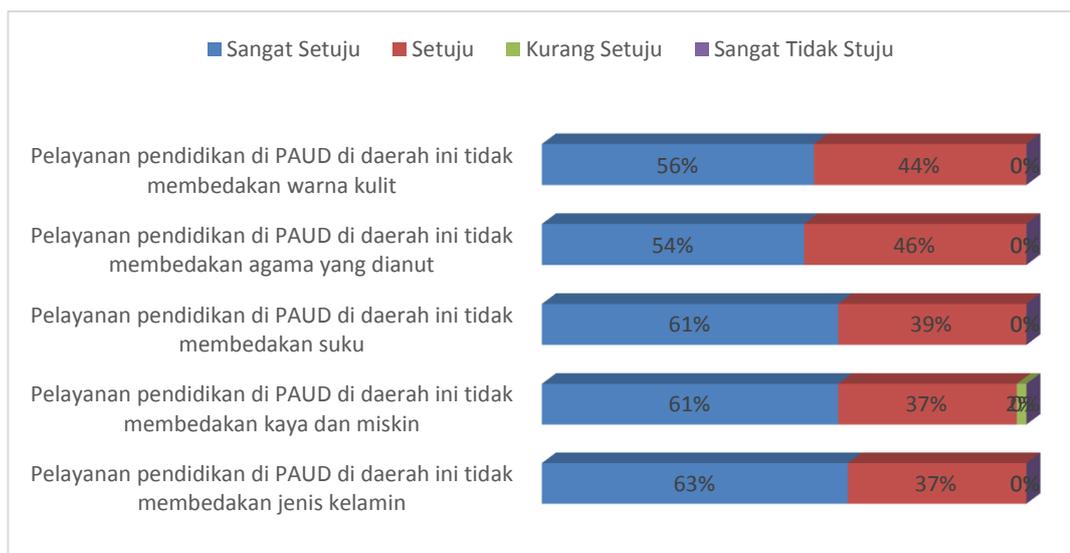


GAMBAR 4. 88. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI NTB

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurut responden di Provinsi NTT rata-rata responden menjawab sangat setuju (59%) dan setuju (41%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 89. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI NTT (N=41)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	63%	37%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	61%	37%	2%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan suku	61%	39%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	54%	46%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan warna kulit	56%	44%	0%	0%
Rata-rata	59%	41%	0%	0%

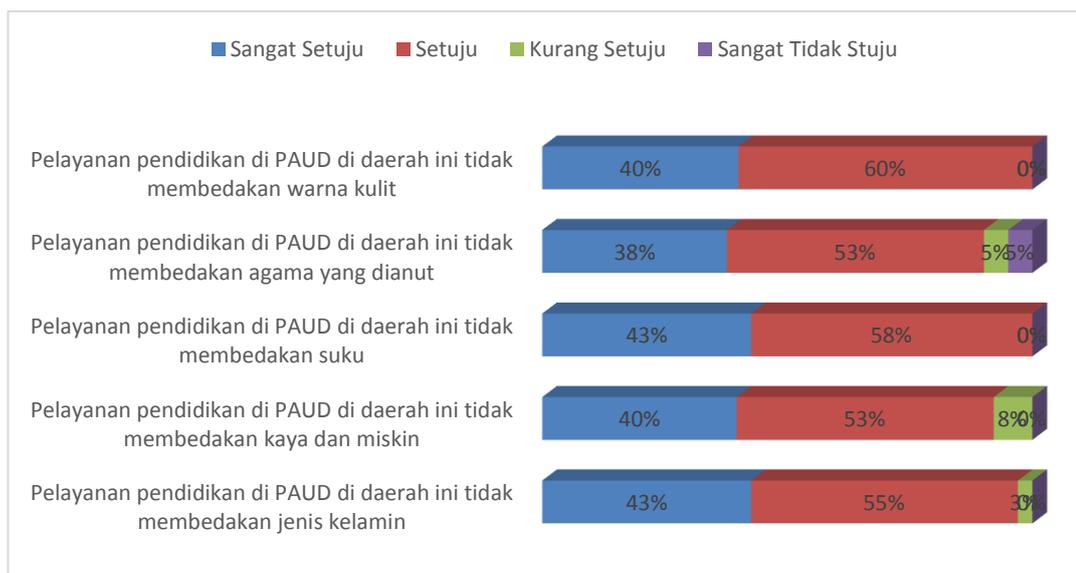


GAMBAR 4. 89. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI NTT

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurut responden di Provinsi Sumbar rata-rata responden menjawab sangat setuju (41%) dan setuju (56%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 90. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI SUMBAR (N=40)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	43%	55%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	40%	53%	8%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan suku	43%	58%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	38%	53%	5%	5%
Pelayanan pendidikan di PAUD di daerah ini tidak membedakan warna kulit	40%	60%	0%	0%
Rata-rata	41%	56%	3%	1%



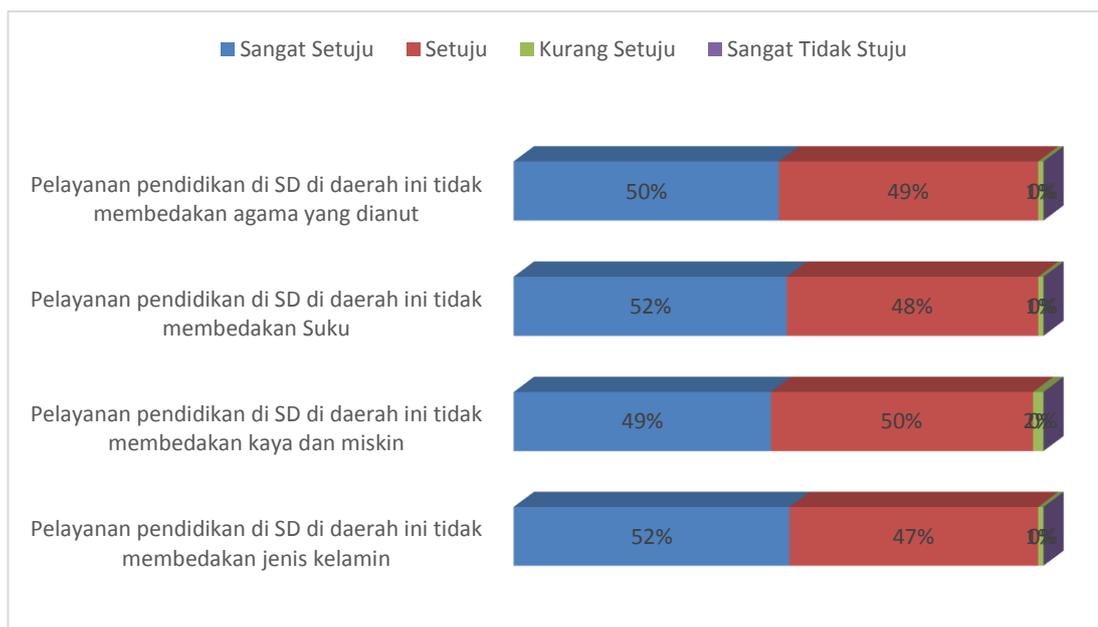
GAMBAR 4. 90. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI SUMBAR

b. Kesetaraan Pelayanan Pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD)

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD) menurut responden secara Nasional rata-rata responden menjawab sangat setuju (51%) dan setuju (49%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 91. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH DASAR

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	52%	47%	1%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	49%	50%	2%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan Suku	52%	48%	1%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	50%	49%	1%	0%
Rata-rata	51%	49%	1%	0%

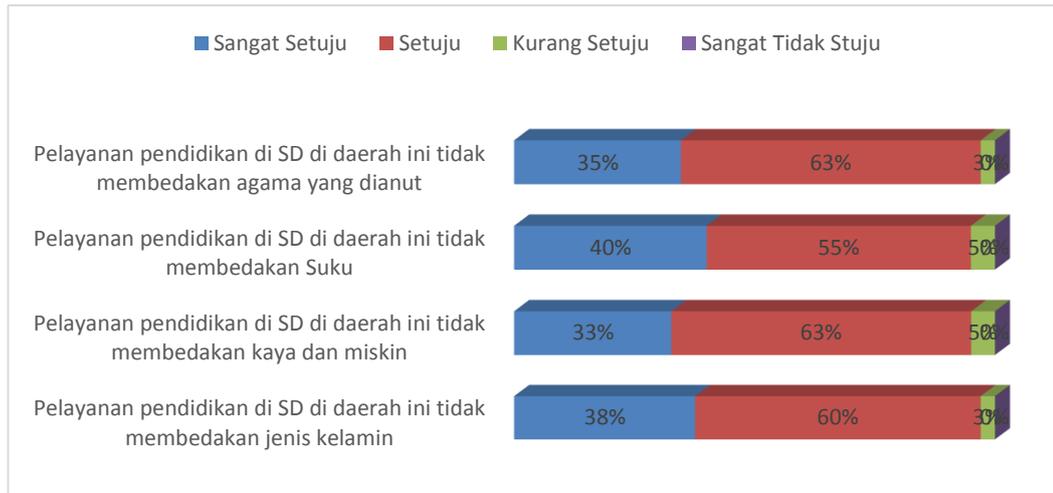


GAMBAR 4. 91. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH DASAR

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD) menurut responden di Provinsi Bali rata-rata responden menjawab sangat setuju (37%) dan setuju (60%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 92. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI BALI (N=40)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	38%	60%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	33%	63%	5%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan Suku	40%	55%	5%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	35%	63%	3%	0%
Rata-rata	37%	60%	4%	0%

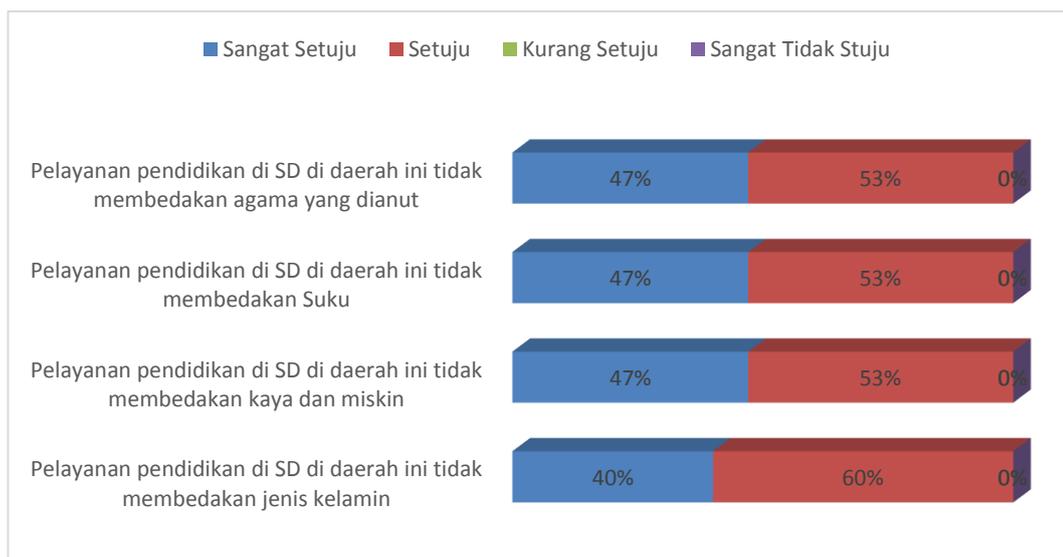


GAMBAR 4. 92. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH DASARBERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI BALI

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD) menurut responden di Provinsi Banten rata-rata responden menjawab sangat setuju (45%) dan setuju (55%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 93. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI BANTEN (N=17)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	40%	60%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	47%	53%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan Suku	47%	53%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	47%	53%	0%	0%
Rata-rata	45%	55%	0%	0%

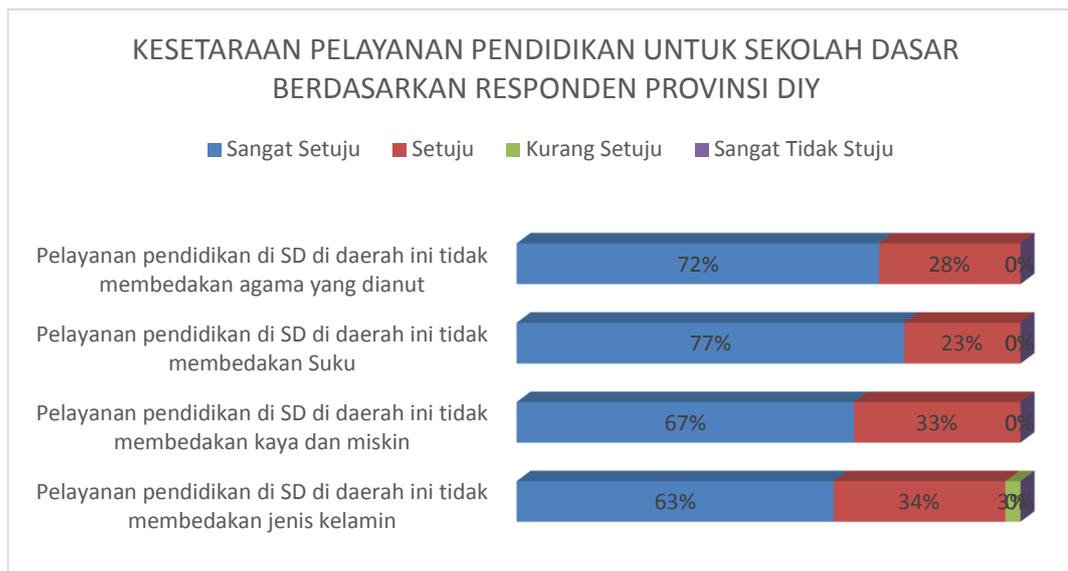


GAMBAR 4. 93. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH DASARBERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI BANTEN

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD) menurut responden di Provinsi DIY rata-rata responden menjawab sangat setuju (70%) dan setuju (30%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 94. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI DIY (N=40)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	63%	34%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	67%	33%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan Suku	77%	23%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	72%	28%	0%	0%
Rata-rata	70%	30%	1%	0%

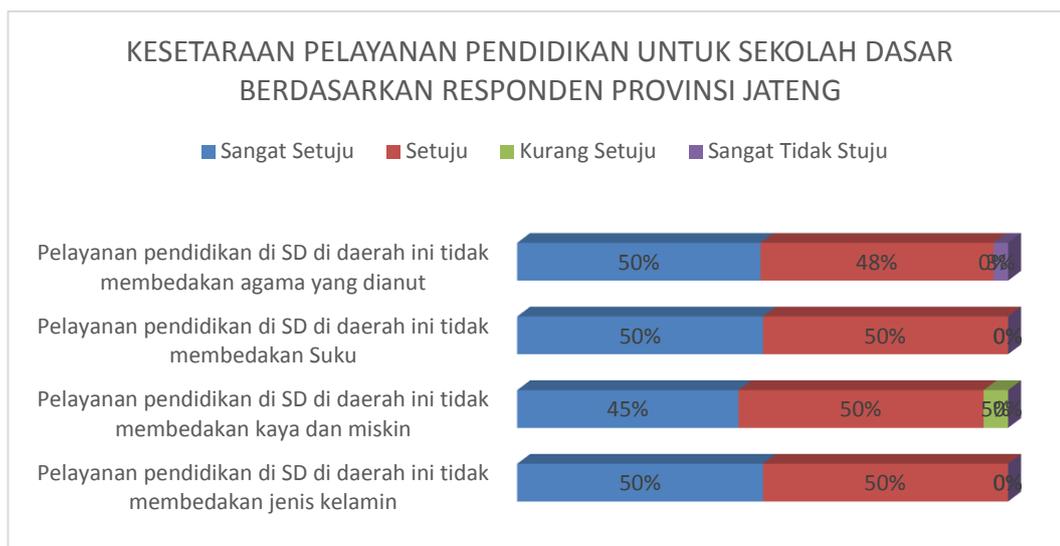


**GAMBAR 4. 94. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH
DASARBERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI DIY**

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD) menurut responden di Provinsi Jateng rata-rata responden menjawab sangat setuju (49%) dan setuju (50%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

**TABEL 4. 95. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN
BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI JATENG (N=41)**

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	50%	50%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	45%	50%	5%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan Suku	50%	50%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	50%	48%	0%	3%
Rata-rata	49%	50%	1%	1%

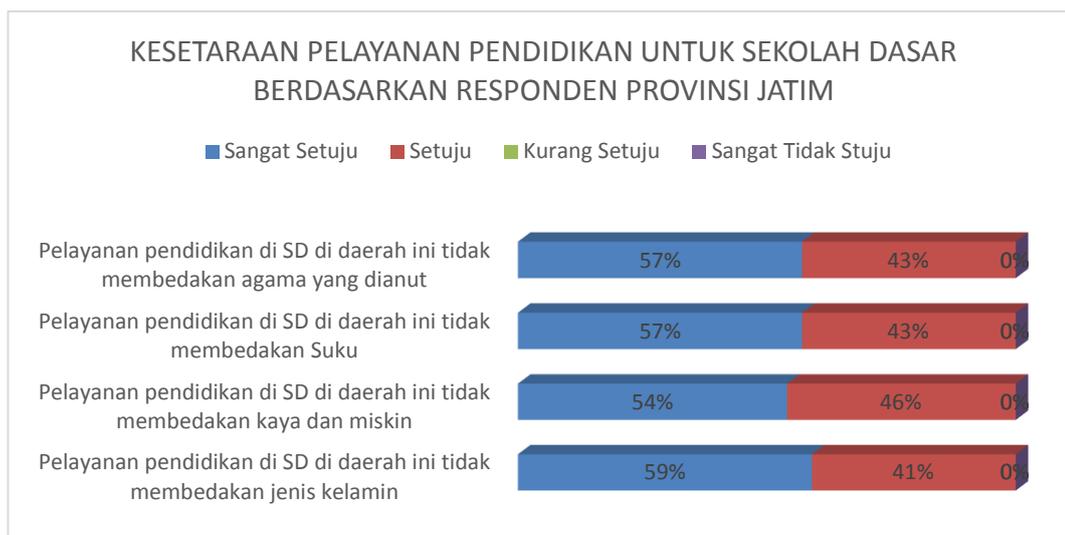


GAMBAR 4. 95. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH DASARBERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI JATENG

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD) menurut responden di Provinsi Jatim rata-rata responden menjawab sangat setuju (57%) dan setuju (43%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 96. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKANBERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI JATIM (N=39)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	59%	41%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	54%	46%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan Suku	57%	43%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	57%	43%	0%	0%
Rata-rata	57%	43%	0%	0%

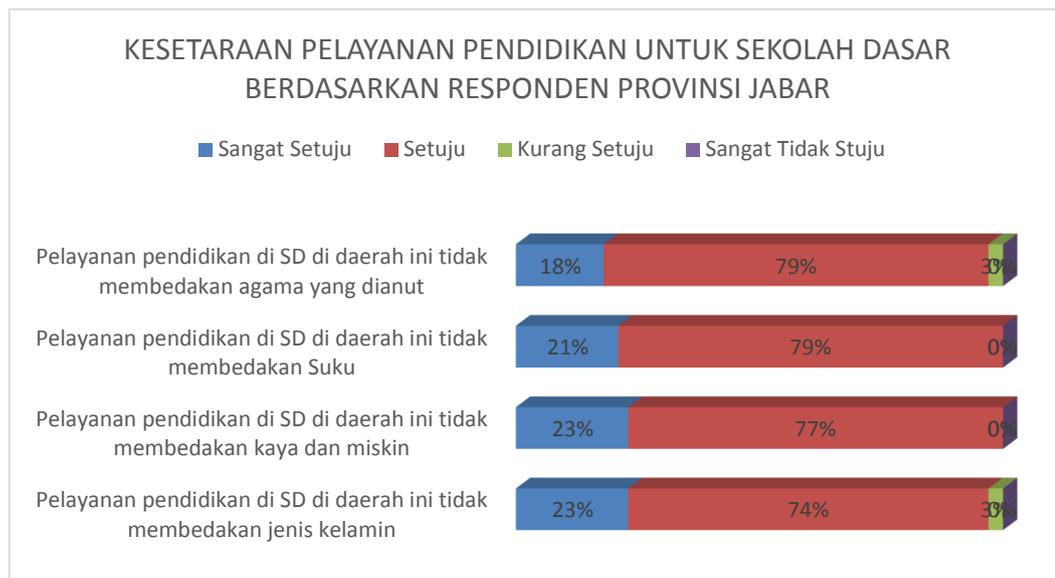


**GAMBAR 4. 96. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH
DASARBERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI JATIM**

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD) menurut responden di Provinsi Jabar rata-rata responden menjawab sangat setuju (21%) dan setuju (77%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

**TABEL 4. 97. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN
BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI JABAR (N=41)**

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	23%	74%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	23%	77%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan Suku	21%	79%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	18%	79%	3%	0%
Rata-rata	21%	77%	2%	0%

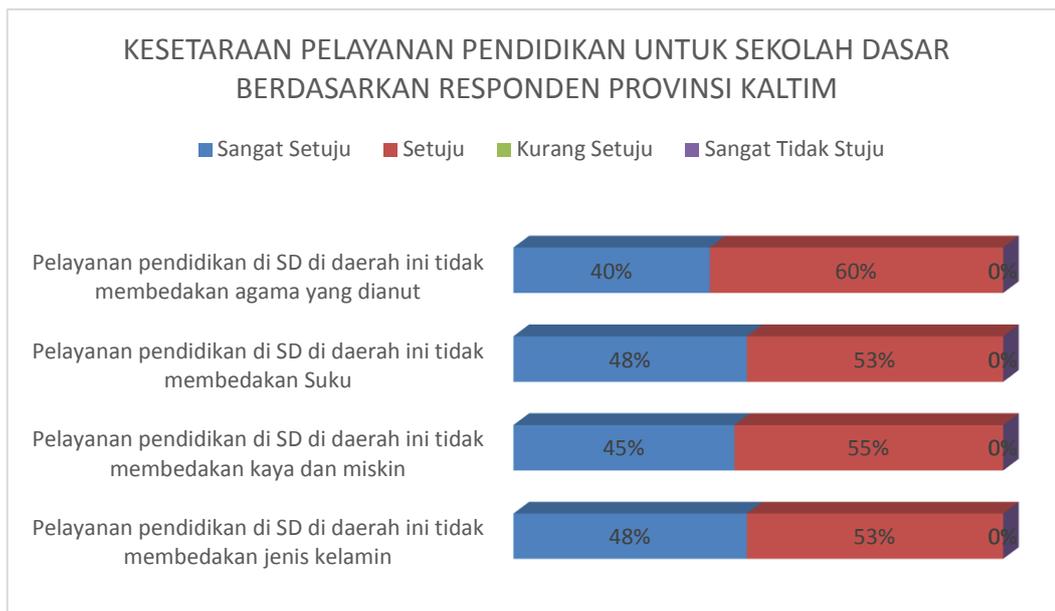


**GAMBAR 4. 97. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH
DASARBERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI JABAR**

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD) menurut responden di Provinsi Kaltim rata-rata responden menjawab sangat setuju (45%) dan setuju (55%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

**TABEL 4. 98. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN
BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI KALTIM**

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	48%	53%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	45%	55%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan Suku	48%	53%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	40%	60%	0%	0%
Rata-rata	45%	55%	0%	0%

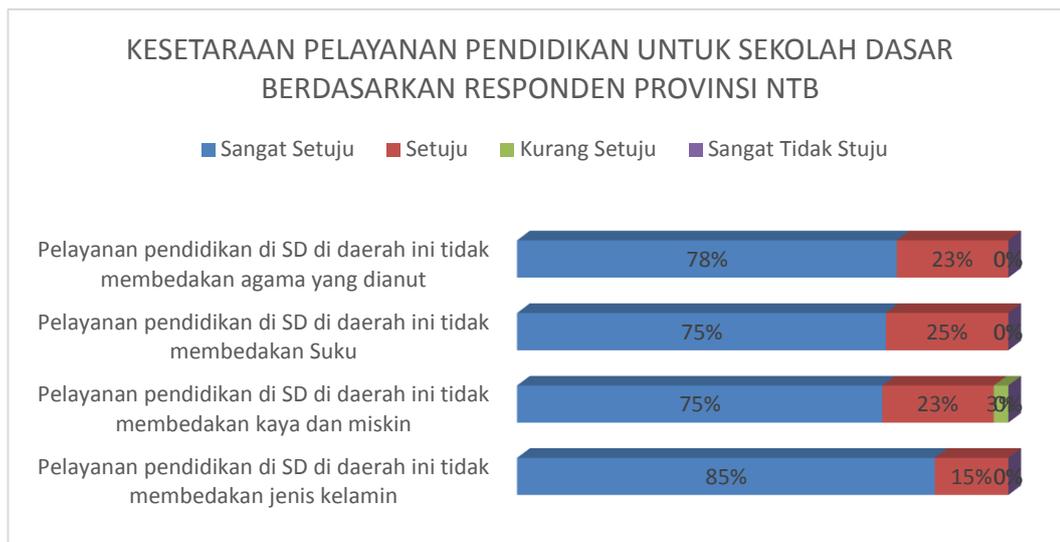


**GAMBAR 4. 98. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH
DASARBERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI KALTIM**

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD) menurut responden di Provinsi NTB rata-rata responden menjawab sangat setuju (78%) dan setuju (22%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

**TABEL 4. 99. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN
BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI NTB (N=40)**

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	85%	15%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	75%	23%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan Suku	75%	25%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	78%	23%	0%	0%
Rata-rata	78%	22%	1%	0%

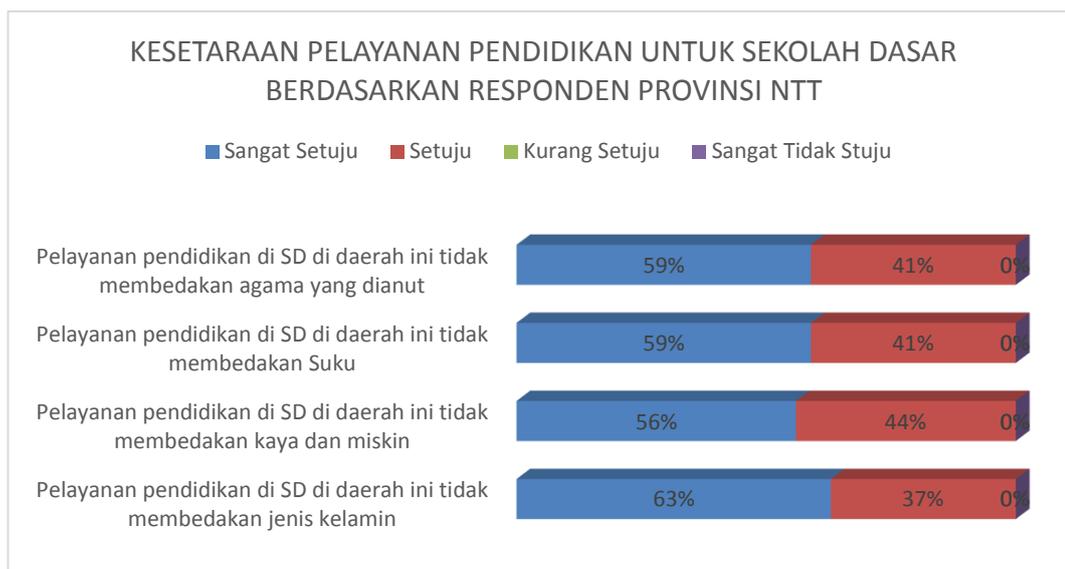


**GAMBAR 4. 99. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH
DASARBERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI NTB**

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD) menurut responden di Provinsi NTT rata-rata responden menjawab sangat setuju (59%) dan setuju (41%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

**TABEL 4. 100. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN
BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI NTT (N=41)**

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	63%	37%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	56%	44%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan Suku	59%	41%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	59%	41%	0%	0%
Rata-rata	59%	41%	0%	0%

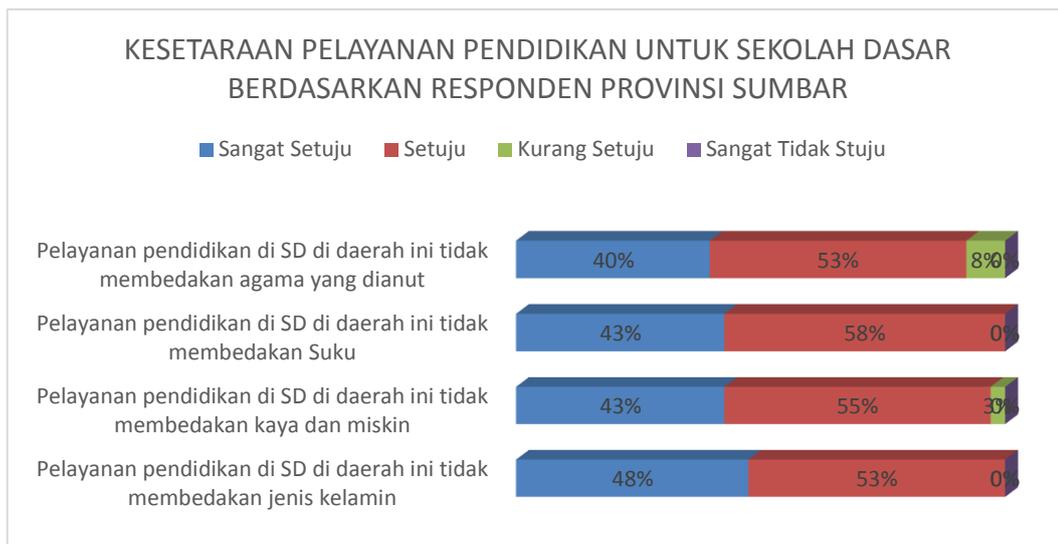


**GAMBAR 4. 100. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH
DASARBERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI NTT**

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD) menurut responden di Provinsi Sumbar rata-rata responden menjawab sangat setuju (44%) dan setuju (55%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

**TABEL 4. 101. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN
BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI SUMBAR (N=40)**

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	48%	53%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	43%	55%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan Suku	43%	58%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SD di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	40%	53%	8%	0%
Rata-rata	44%	55%	3%	0%



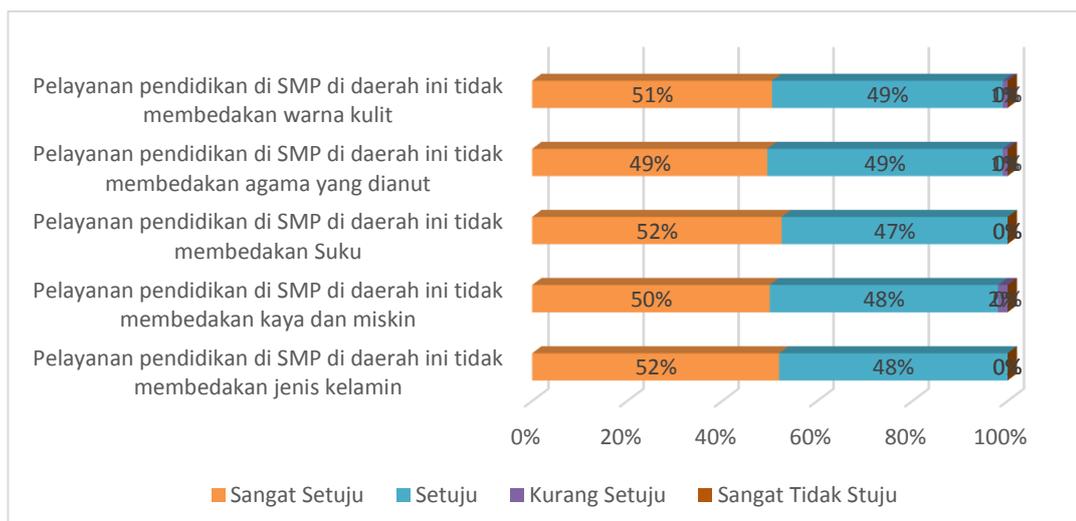
GAMBAR 4. 101. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH DASAR BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI SUMBAR

c. Kesetaraan Pelayanan Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut responden secara Nasional rata-rata responden menjawab sangat setuju (51%) dan setuju (48%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 102. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN NASIONAL.

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	52%	48%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	50%	48%	2%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan Suku	52%	47%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	49%	49%	1%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan warna kulit	51%	49%	1%	0%
Rata-rata	51%	48%	1%	0%

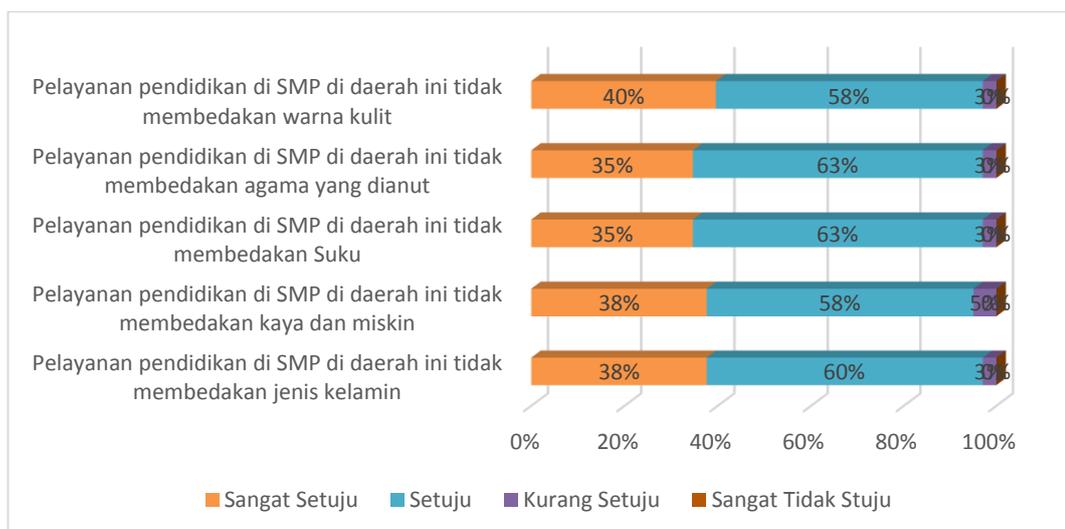


GAMBAR 4. 102. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)BERDASARKAN RESPONDEN NASIONAL

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut responden di Provinsi Bali rata-rata responden menjawab sangat setuju (37%) dan setuju (60%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 103. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI BALI (N=40)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	38%	60%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	38%	58%	5%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan Suku	35%	63%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	35%	63%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan warna kulit	40%	58%	3%	0%
Rata-rata	37%	60%	3%	0%

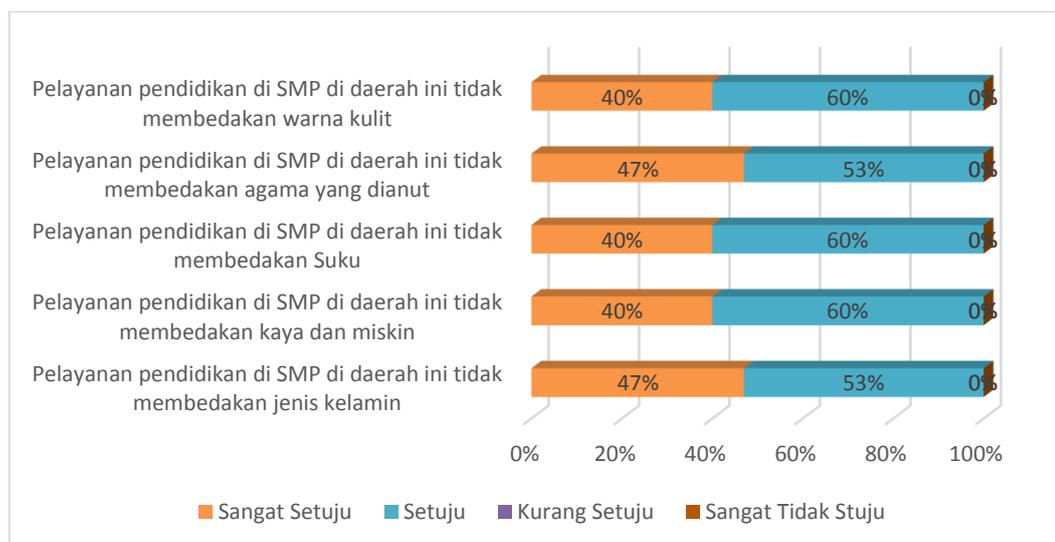


GAMBAR 4. 103. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI BALI

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut responden di Provinsi Banten rata-rata responden menjawab sangat setuju (43%) dan setuju (57%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 104. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI BANTEN (N=17)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	47%	53%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	40%	60%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan Suku	40%	60%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	47%	53%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan warna kulit	40%	60%	0%	0%
Rata-rata	43%	57%	0%	0%

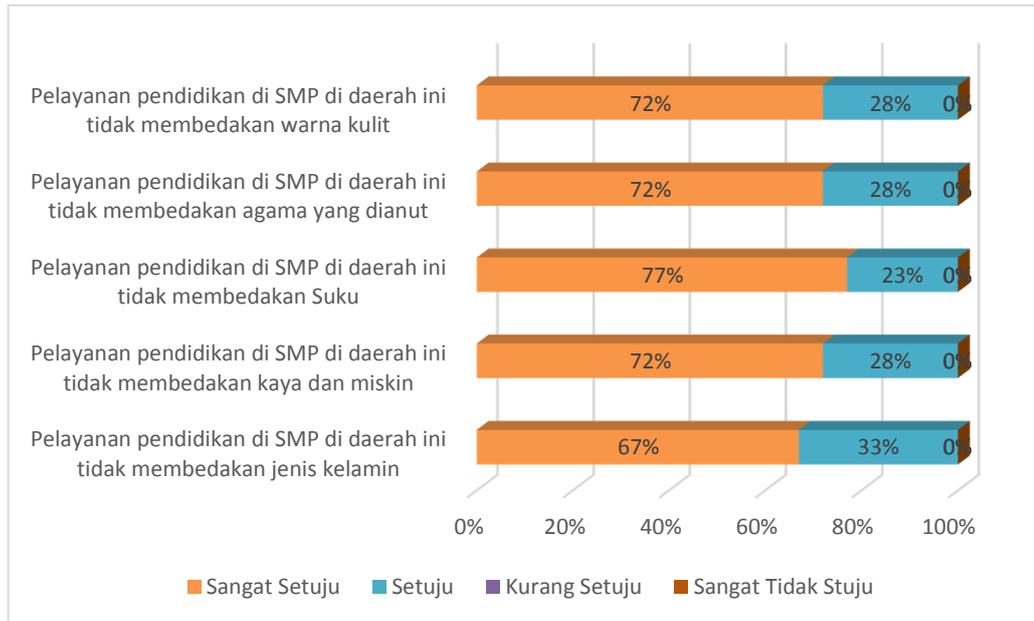


GAMBAR 4. 104. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI BANTEN

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut responden di Provinsi DIY rata-rata responden menjawab sangat setuju (72%) dan setuju (28%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 105. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI DIY (N=40)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	67%	33%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	72%	28%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan Suku	77%	23%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	72%	28%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan warna kulit	72%	28%	0%	0%
Rata-rata	72%	28%	0%	0%

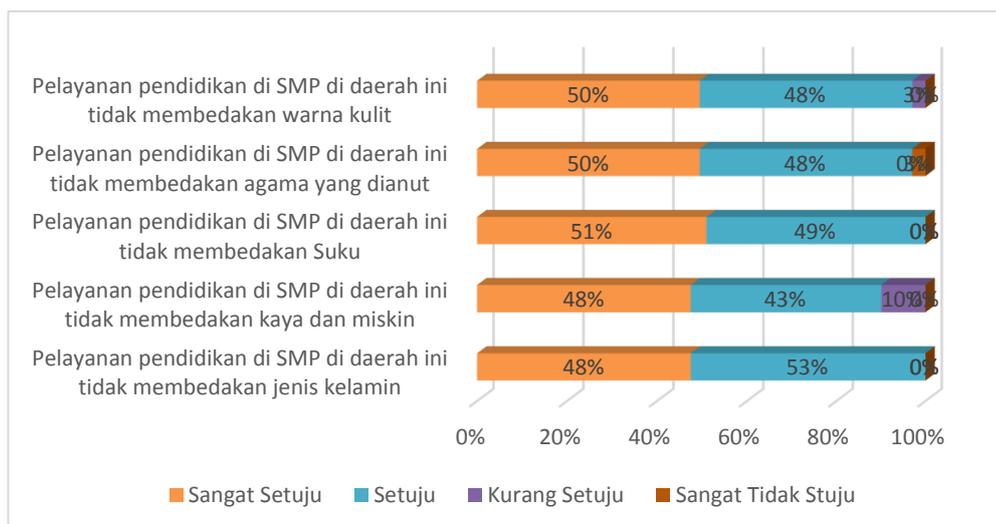


GAMBAR 4. 105. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI DIY

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut responden di Provinsi Jateng rata-rata responden menjawab sangat setuju (49%) dan setuju (48%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 106. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI JATENG (N=41)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	48%	53%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	48%	43%	10%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan Suku	51%	49%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	50%	48%	0%	3%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan warna kulit	50%	48%	3%	0%
Rata-rata	49%	48%	3%	1%

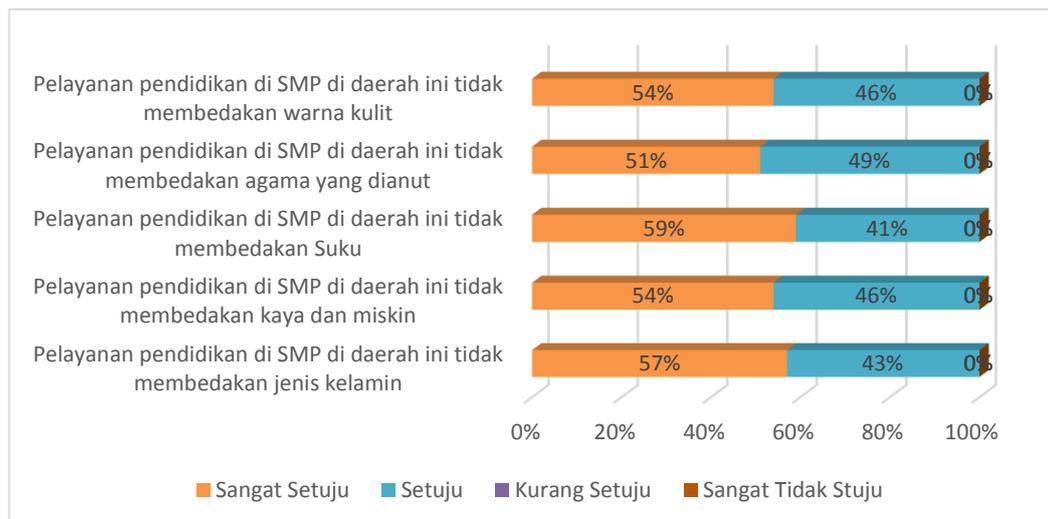


GAMBAR 4. 106. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI JATENG

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut responden di Provinsi Jatim rata-rata responden menjawab sangat setuju (55%) dan setuju (45%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 107. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI JATIM (N=39)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	57%	43%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	54%	46%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan Suku	59%	41%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	51%	49%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan warna kulit	54%	46%	0%	0%
Rata-rata	55%	45%	0%	0%

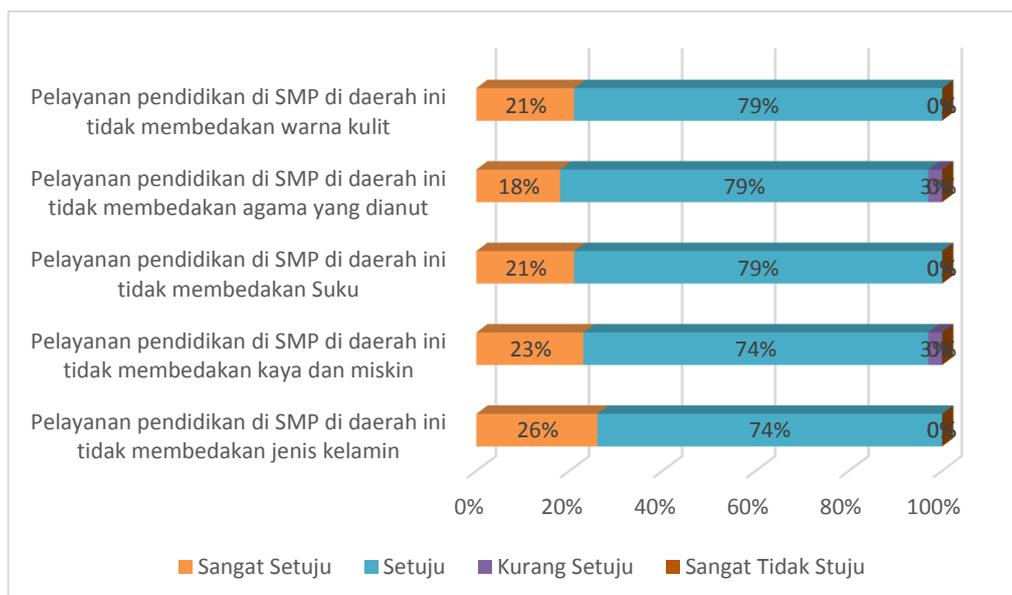


GAMBAR 4. 107. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI JATIM

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut responden di Provinsi Jabar rata-rata responden menjawab sangat setuju (22%) dan setuju (77%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 108. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN ERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI JABAR (N=41)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	26%	74%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	23%	74%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan Suku	21%	79%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	18%	79%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan warna kulit	21%	79%	0%	0%
Rata-rata	22%	77%	1%	0%

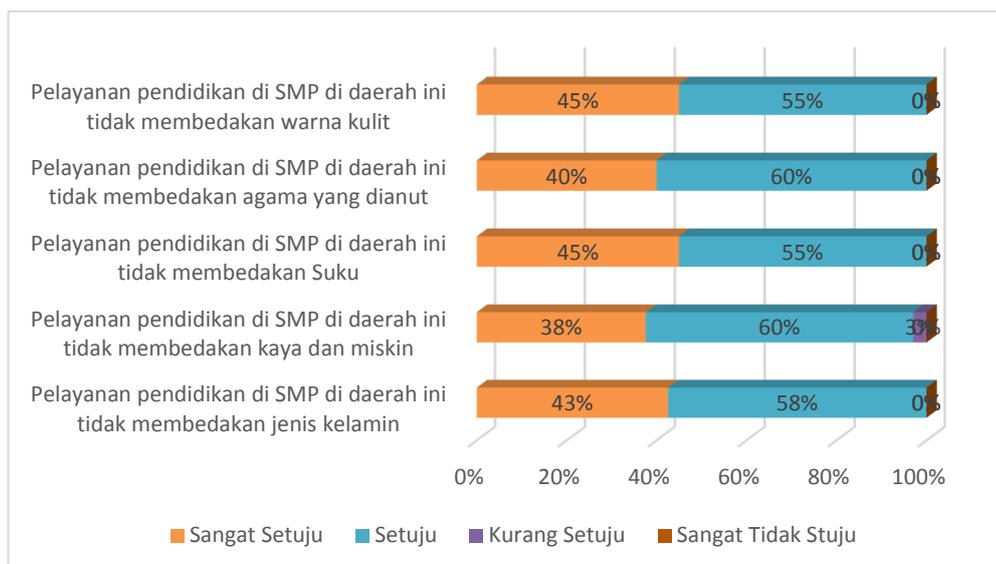


GAMBAR 4. 108. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI JABAR

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut responden di Provinsi Kaltim rata-rata responden menjawab sangat setuju (42%) dan setuju (58%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 109. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI KALTIM (N=40)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	43%	58%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	38%	60%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan Suku	45%	55%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	40%	60%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan warna kulit	45%	55%	0%	0%
Rata-rata	42%	58%	1%	0%

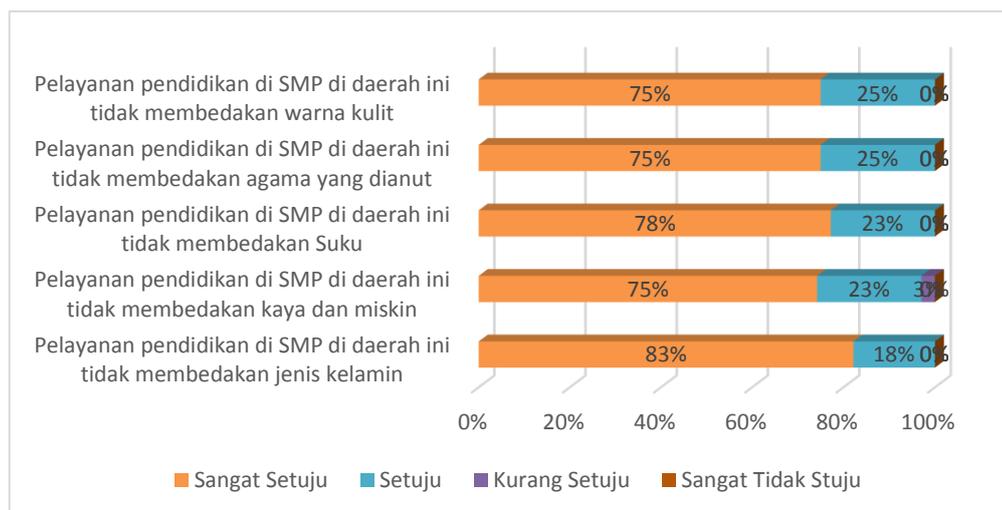


GAMBAR 4. 109. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI KALTIM

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut responden di Provinsi NTB rata-rata responden menjawab sangat setuju (77%) dan setuju (23%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 110. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI NTB (N=40)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	83%	18%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	75%	23%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan Suku	78%	23%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	75%	25%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan warna kulit	75%	25%	0%	0%
Rata-rata	77%	23%	1%	0%

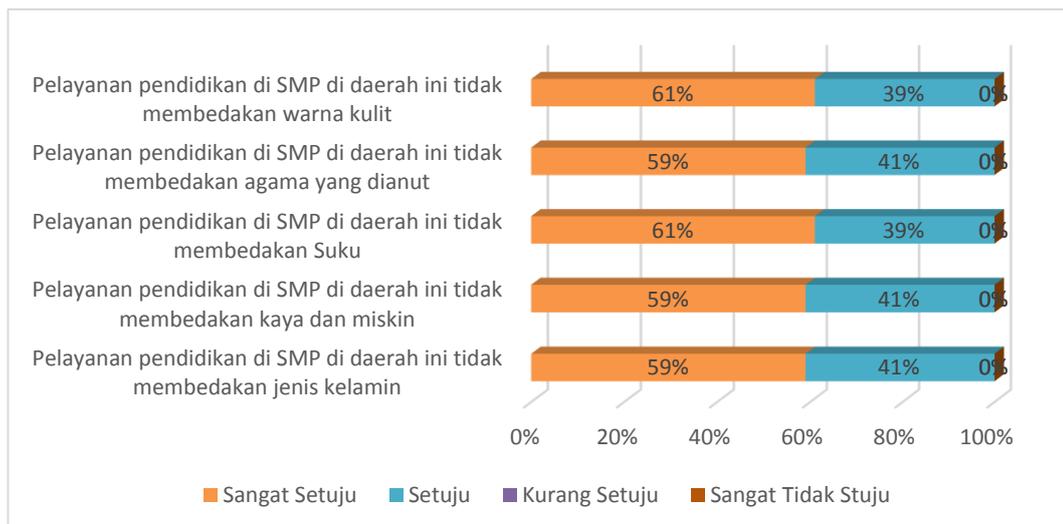


GAMBAR 4. 110. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI NTB

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut responden di Provinsi NTT rata-rata responden menjawab sangat setuju (60%) dan setuju (40%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 111. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKANBERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI NTT (N=41)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	59%	41%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	59%	41%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan Suku	61%	39%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	59%	41%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan warna kulit	61%	39%	0%	0%
Rata-rata	60%	40%	0%	0%

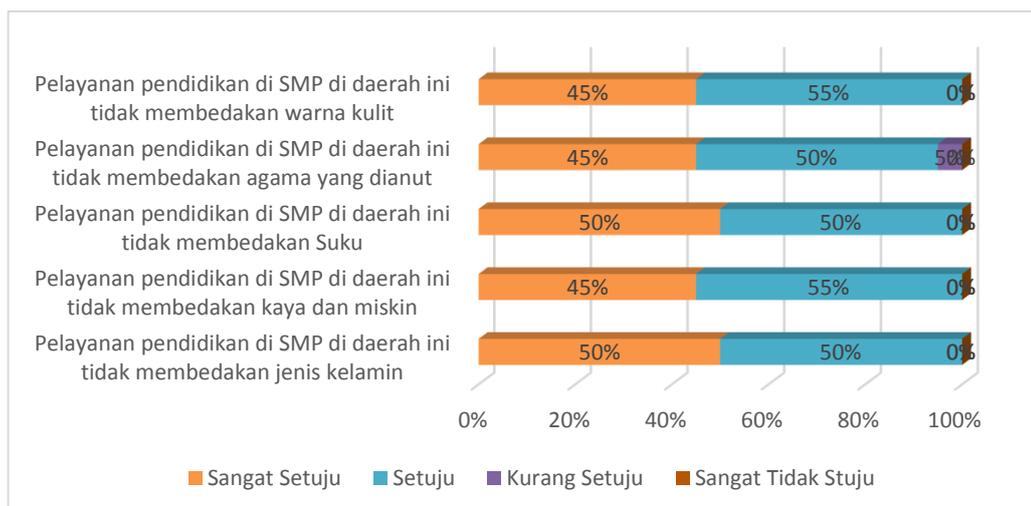


GAMBAR 4. 111. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI NTT

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut responden di Provinsi Sumbar rata-rata responden menjawab sangat setuju (47%) dan setuju (52%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 112. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKANBERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI SUMBAR (N=40)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	50%	50%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	45%	55%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan Suku	50%	50%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	45%	50%	5%	0%
Pelayanan pendidikan di SMP di daerah ini tidak membedakan warna kulit	45%	55%	0%	0%
Rata-rata	47%	52%	1%	0%



GAMBAR 4. 112. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI SUMBAR

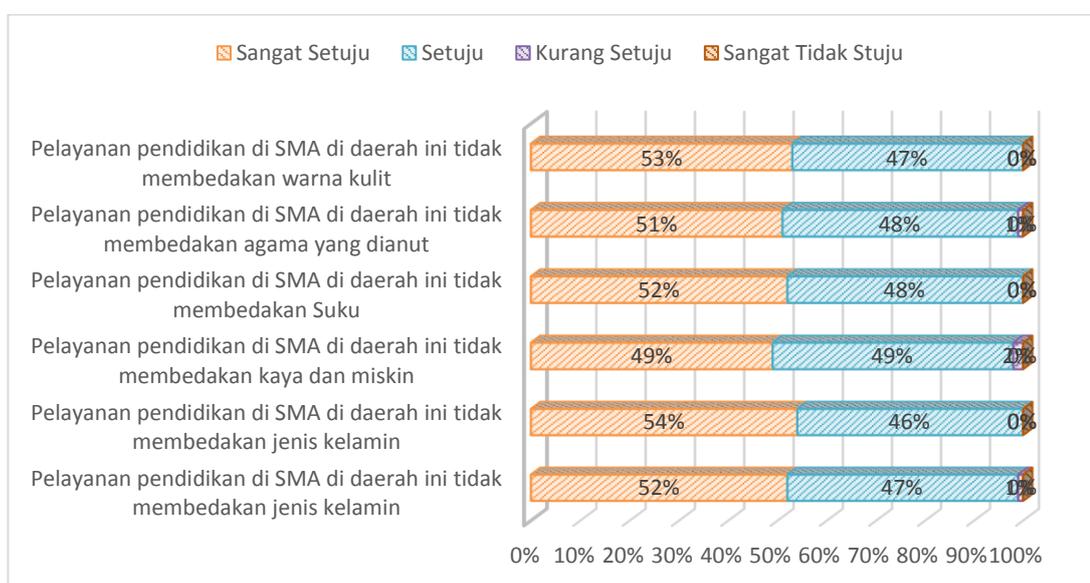
d. Kesetaraan Pelayanan Pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut responden secara Nasional rata-rata responden menjawab sangat setuju (52%) dan setuju (48%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 113. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN NASIONAL.

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	52%	47%	1%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	54%	46%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	49%	49%	2%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan Suku	52%	48%	0%	0%

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	51%	48%	1%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan warna kulit	53%	47%	0%	0%
Rata-rata	52%	48%	1%	0%

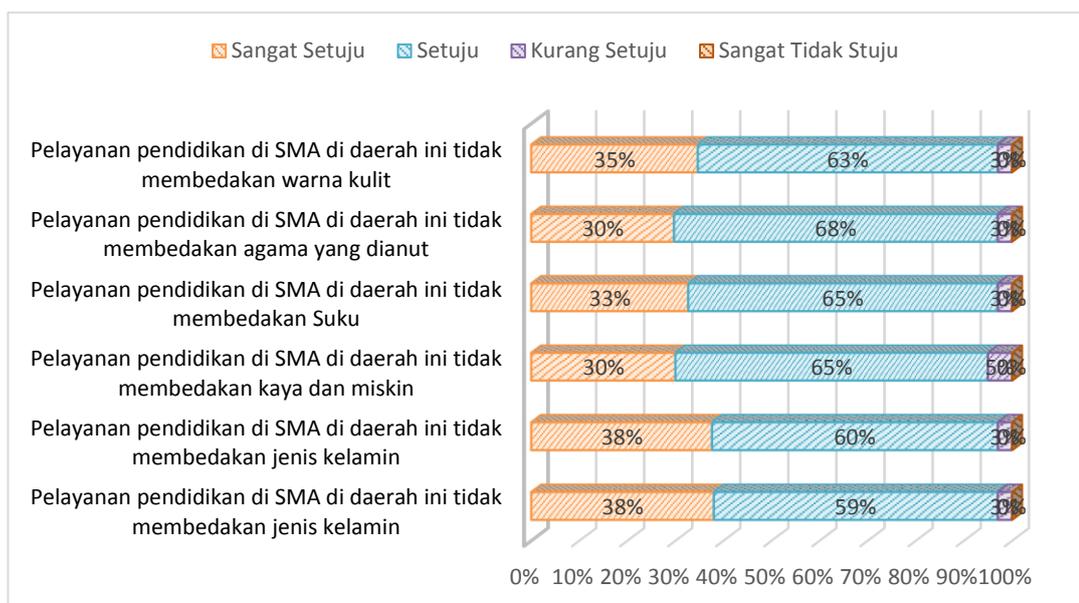


GAMBAR 4. 113. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SECARA NASIONAL

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut responden di Provinsi Bali rata-rata responden menjawab sangat setuju (34%) dan setuju (63%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 114. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI BALI

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	38%	59%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	38%	60%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	30%	65%	5%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan Suku	33%	65%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	30%	68%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan warna kulit	35%	63%	3%	0%
Rata-rata	34%	63%	3%	0%

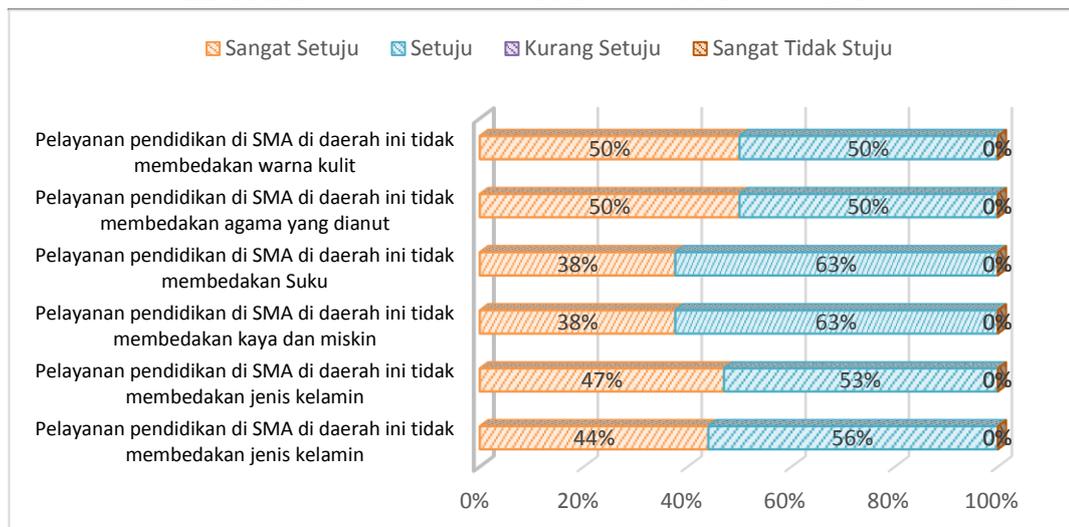


GAMBAR 4. 114. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PROVINSI BALI

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut responden di Provinsi Banten rata-rata responden menjawab sangat setuju (45%) dan setuju (56%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 115. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI BANTEN (N=17)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	44%	56%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	47%	53%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	38%	63%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan Suku	38%	63%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	50%	50%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan warna kulit	50%	50%	0%	0%
Rata-rata	45%	56%	0%	0%

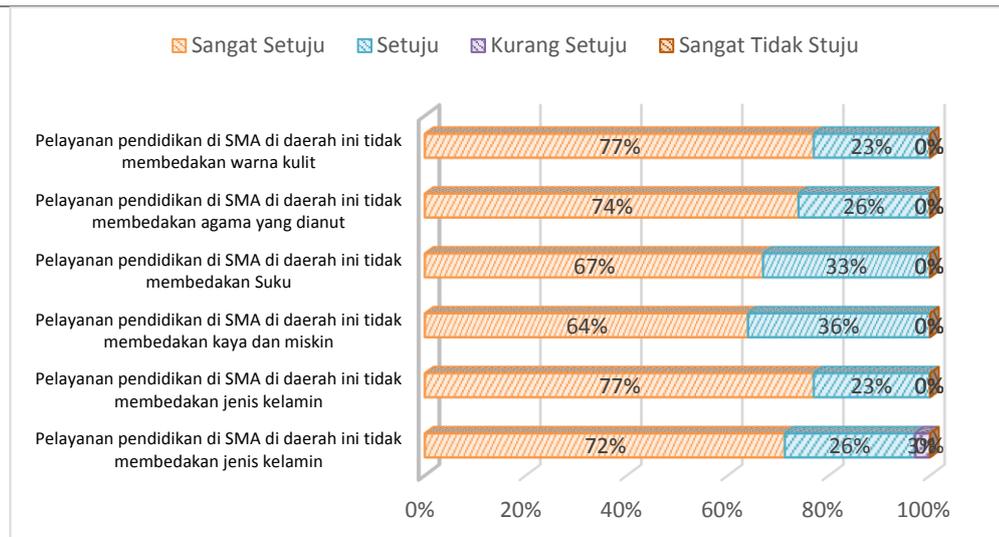


GAMBAR 4. 115. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PROVINSI BANTEN

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut responden di Provinsi DIY rata-rata responden menjawab sangat setuju (72%) dan setuju (28%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 116. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI DIY (N=40)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	72%	26%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	77%	23%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	64%	36%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan Suku	67%	33%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	74%	26%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan warna kulit	77%	23%	0%	0%
Rata-rata	72%	28%	1%	0%

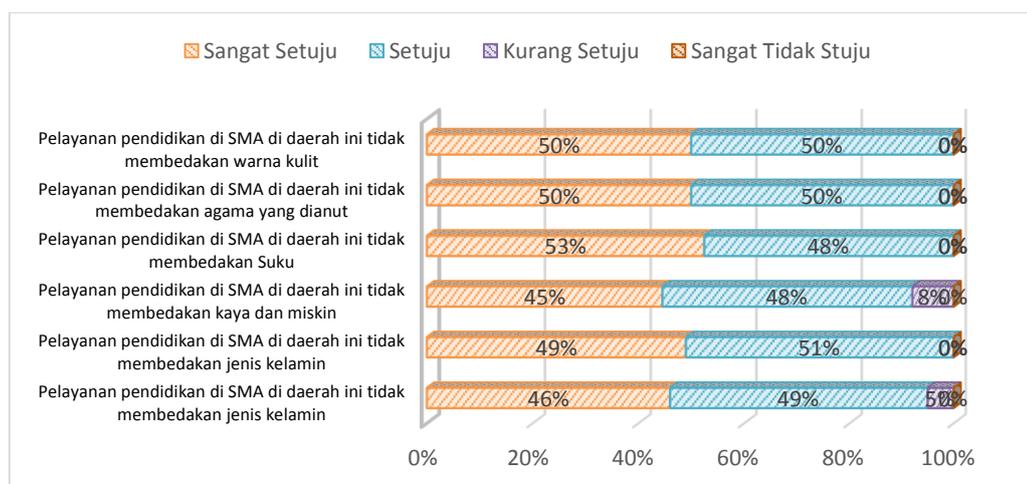


GAMBAR 4. 116. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PROVINSI DIY

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut responden di Provinsi Jateng rata-rata responden menjawab sangat setuju (49%) dan setuju (49%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 117. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI JATENG (N=41)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	46%	49%	5%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	49%	51%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	45%	48%	8%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan Suku	53%	48%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	50%	50%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan warna kulit	50%	50%	0%	0%
Rata-rata	49%	49%	2%	0%

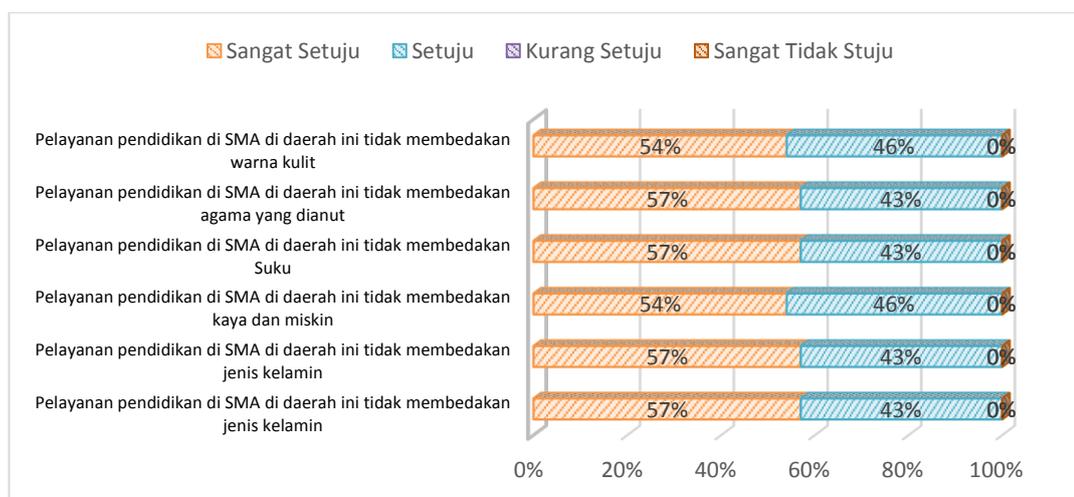


GAMBAR 4. 117. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PROVINSI JATENG

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut responden di Provinsi Jatim rata-rata responden menjawab sangat setuju (56%) dan setuju (44%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 118. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI JATIM (N=39)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	57%	43%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	57%	43%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	54%	46%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan Suku	57%	43%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	57%	43%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan warna kulit	54%	46%	0%	0%
Rata-rata	56%	44%	0%	0%

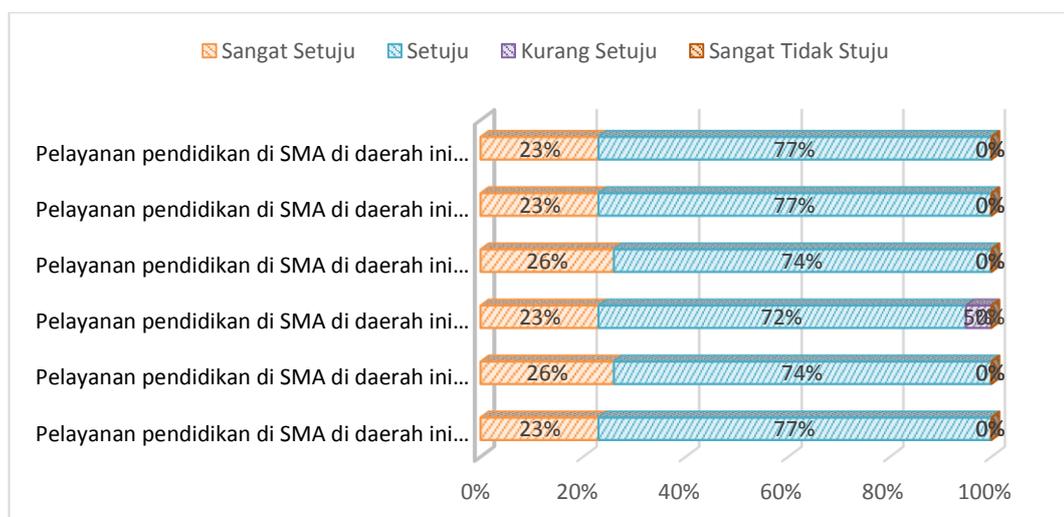


GAMBAR 4. 118. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PROVINSI JATIM

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut responden di Provinsi Jabar rata-rata responden menjawab sangat setuju (24%) dan setuju (75%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 119. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI JABAR (N=41)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	23%	77%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	26%	74%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	23%	72%	5%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan Suku	26%	74%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	23%	77%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan warna kulit	23%	77%	0%	0%
Rata-rata	24%	75%	1%	0%

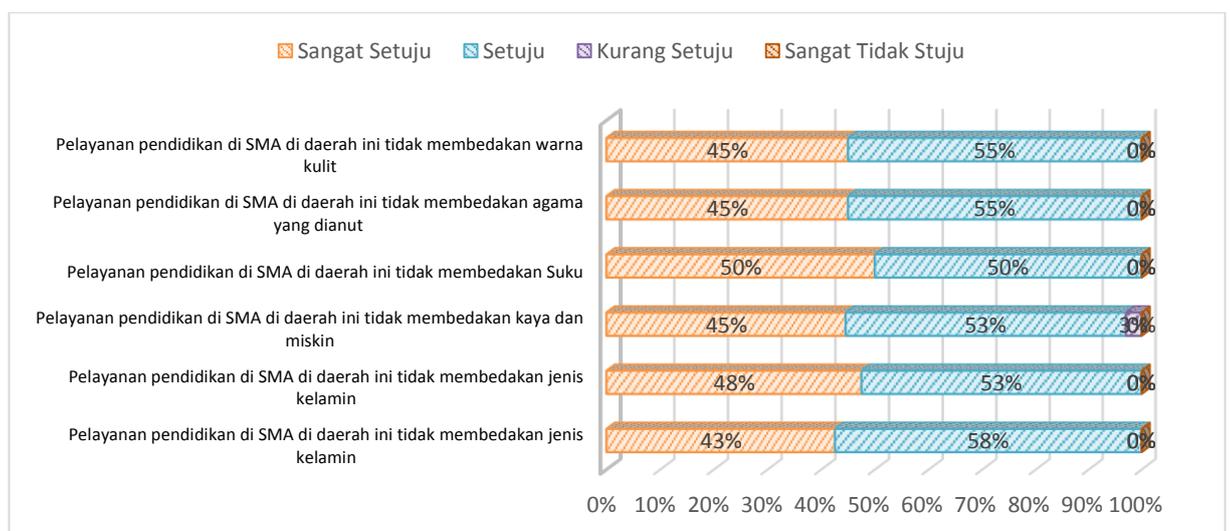


GAMBAR 4. 119. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PROVINSI JABAR

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut responden di Provinsi Kaltim rata-rata responden menjawab sangat setuju (46%) dan setuju (54%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 120. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI KALTIM (N=40)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	43%	58%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	48%	53%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	45%	53%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan Suku	50%	50%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	45%	55%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan warna kulit	45%	55%	0%	0%
Rata-rata	46%	54%	1%	0%

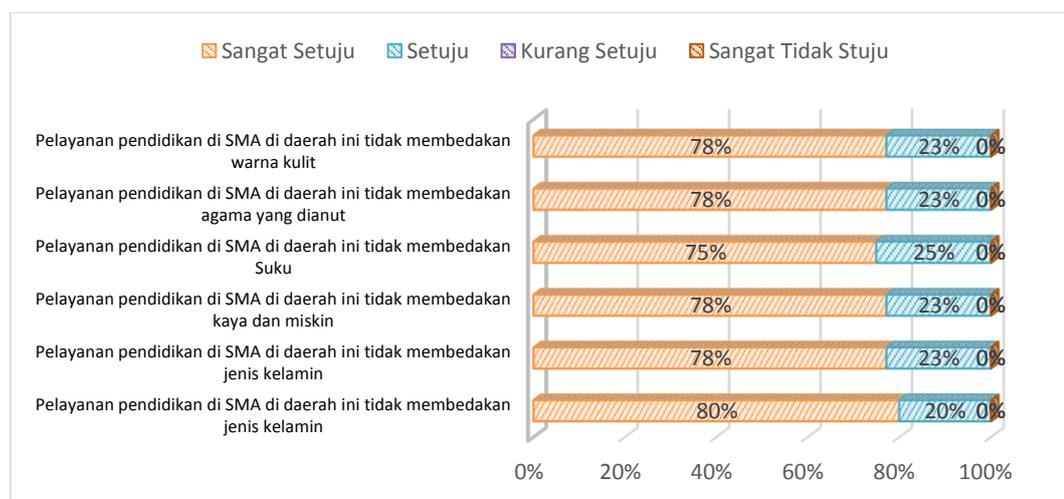


GAMBAR 4. 120. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PROVINSI KALTIM

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut responden di Provinsi NTB rata-rata responden menjawab sangat setuju (78%) dan setuju (23%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 121. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI NTB (N=40)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	80%	20%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	78%	23%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	78%	23%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan Suku	75%	25%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	78%	23%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan warna kulit	78%	23%	0%	0%
Rata-rata	78%	23%	0%	0%

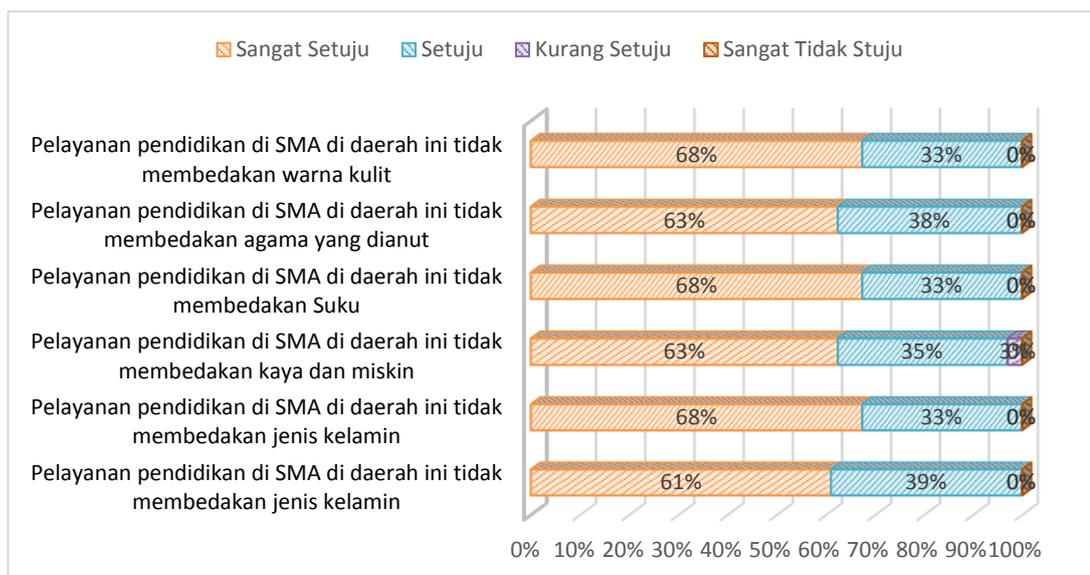


GAMBAR 4. 121. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PROVINSI NTB

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut responden di Provinsi NTT rata-rata responden menjawab sangat setuju (65%) dan setuju (35%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 122. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI NTT (N=41)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	61%	39%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	68%	33%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	63%	35%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan Suku	68%	33%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	63%	38%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan warna kulit	68%	33%	0%	0%
Rata-rata	65%	35%	1%	0%

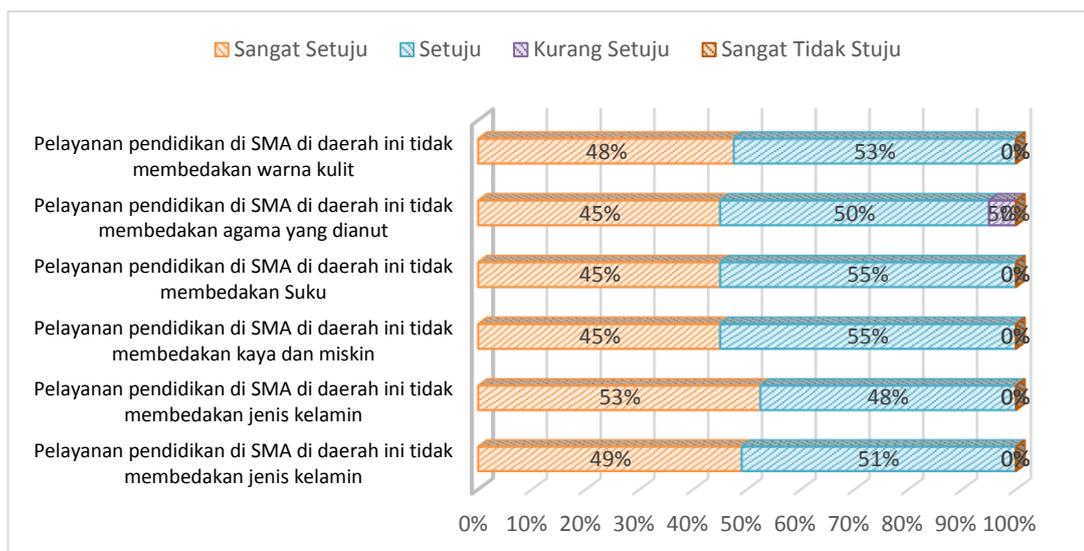


GAMBAR 4. 122. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PROVINSI NTT

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut responden di Provinsi Sumbar rata-rata responden menjawab sangat setuju (48%) dan setuju (52%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 123. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI SUMBAR (N=40)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	49%	51%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	53%	48%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	45%	55%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan Suku	45%	55%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	45%	50%	5%	0%
Pelayanan pendidikan di SMA di daerah ini tidak membedakan warna kulit	48%	53%	0%	0%
Rata-rata	48%	52%	1%	0%



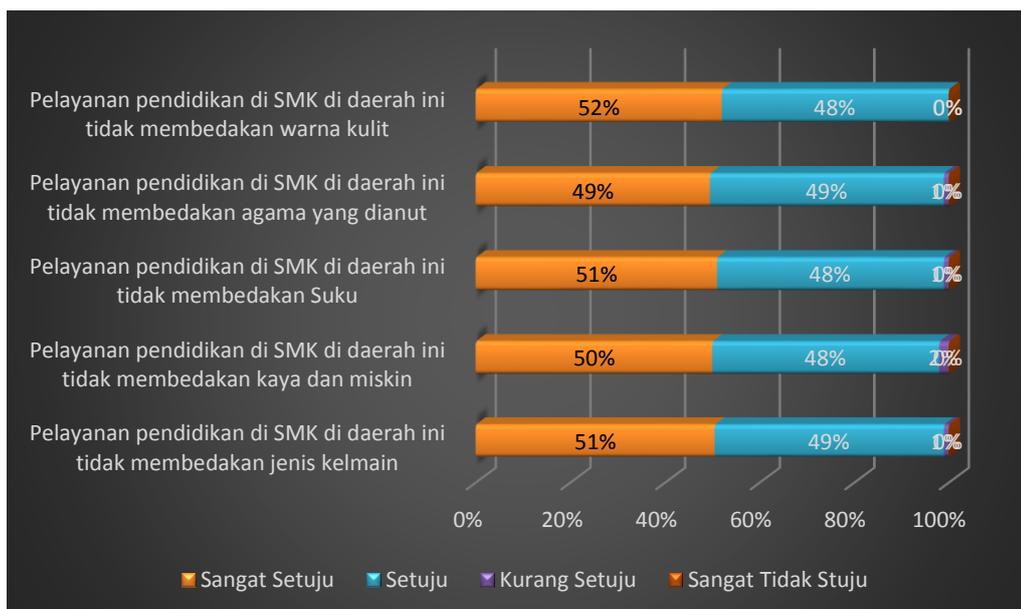
GAMBAR 4. 123. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PROVINSI SUMBAR

e. Kesetaraan Pelayanan Pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut responden secara Nasional rata-rata responden menjawab sangat setuju (51%) dan setuju (48%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 124. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN NASIONAL.

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	51%	49%	1%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	50%	48%	2%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan Suku	51%	48%	1%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	49%	49%	1%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan warna kulit	52%	48%	0%	0%
Rata-rata	51%	48%	1%	0%

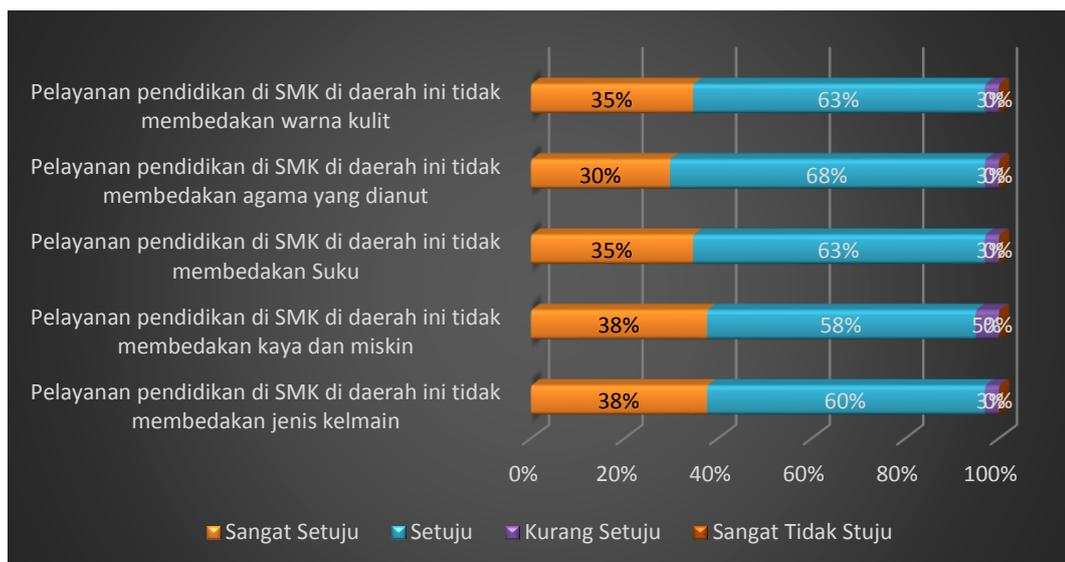


GAMBAR 4. 124. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SECARA NASIONAL

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut responden di Provinsi Bali rata-rata responden menjawab sangat setuju (35%) dan setuju (62%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 125. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI BALI (N=40)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	38%	60%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	38%	58%	5%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan Suku	35%	63%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	30%	68%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan warna kulit	35%	63%	3%	0%
Rata-rata	35%	62%	3%	0%

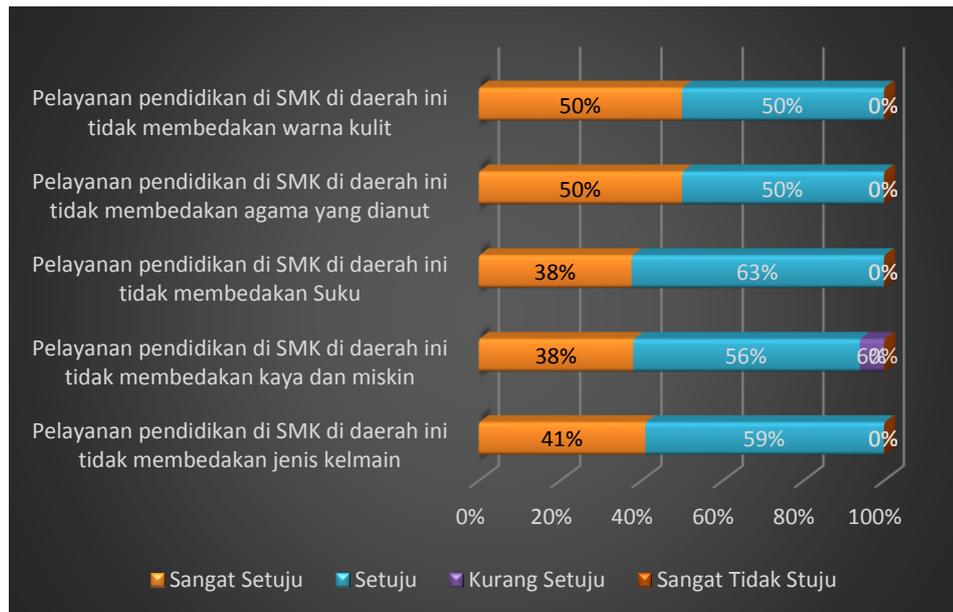


GAMBAR 4. 125. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PROVINSI BALI

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut responden di Provinsi Banten rata-rata responden menjawab sangat setuju (43%) dan setuju (56%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 126. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI BANTEN (N=17)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	41%	59%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	38%	56%	6%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan Suku	38%	63%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	50%	50%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan warna kulit	50%	50%	0%	0%
Rata-rata	43%	56%	1%	0%

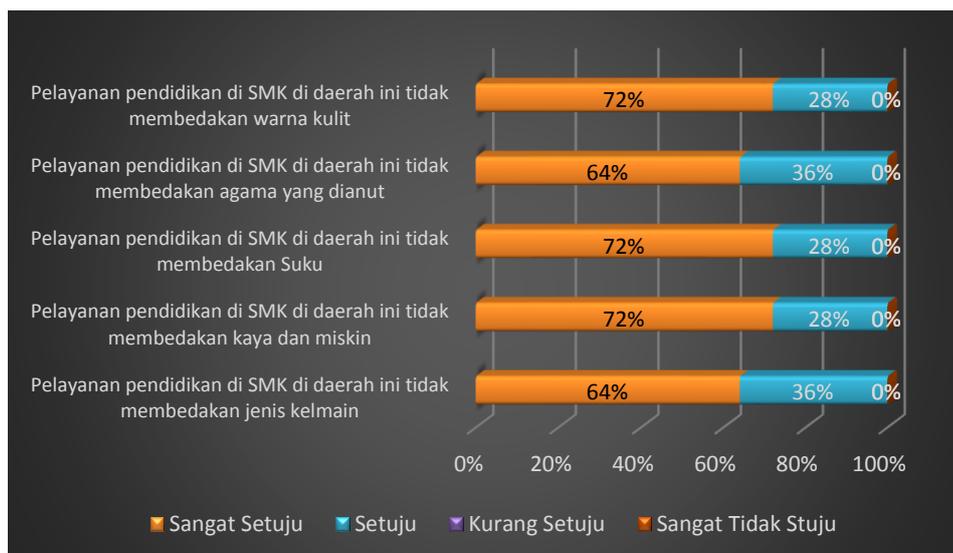


GAMBAR 4. 126. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PROVINSI BANTEN

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut responden di Provinsi DIY rata-rata responden menjawab sangat setuju (69%) dan setuju (31%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 127. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI DIY (N=40)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	64%	36%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	72%	28%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan Suku	72%	28%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	64%	36%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan warna kulit	72%	28%	0%	0%
Rata-rata	69%	31%	0%	0%

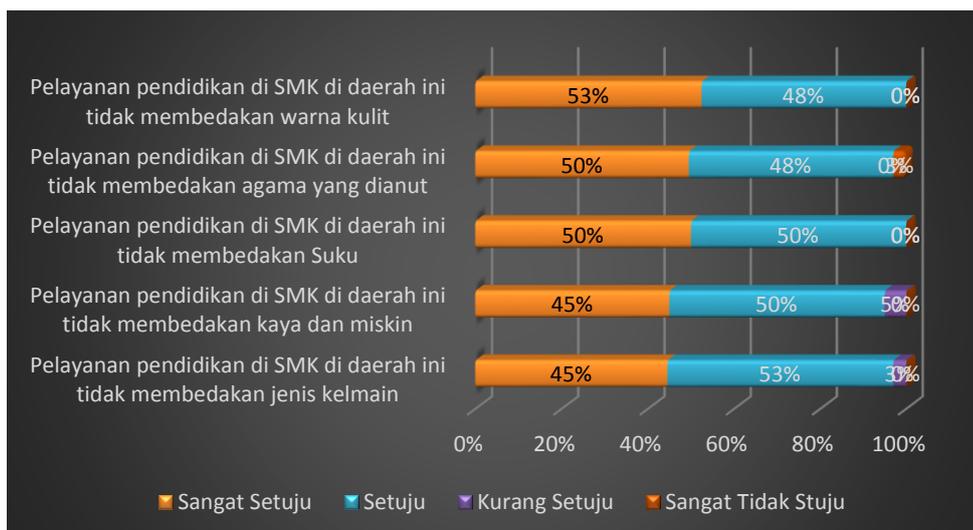


GAMBAR 4. 127. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PROVINSI DIY

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut responden di Provinsi Jateng rata-rata responden menjawab sangat setuju (49%) dan setuju (50%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 128. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI JATENG (N=41)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	45%	53%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	45%	50%	5%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan Suku	50%	50%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	50%	48%	0%	3%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan warna kulit	53%	48%	0%	0%
Rata-rata	49%	50%	2%	1%

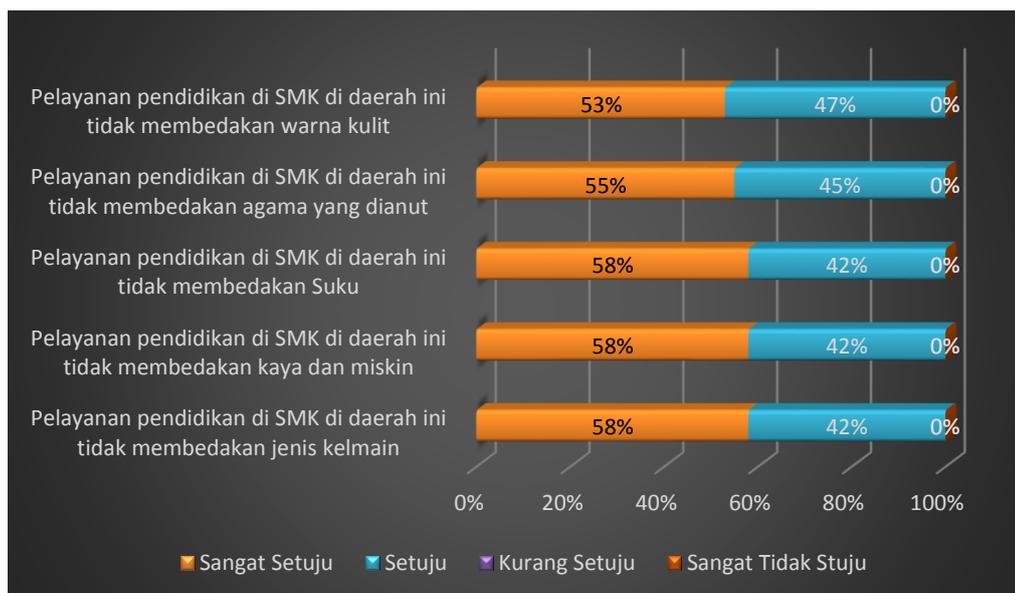


GAMBAR 4. 128. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PROVINSI JATENG

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut responden di Provinsi Jatim rata-rata responden menjawab sangat setuju (56%) dan setuju (44%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 129. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI JATIM (N=39)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	58%	42%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	58%	42%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan Suku	58%	42%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	55%	45%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan warna kulit	53%	47%	0%	0%
Rata-rata	56%	44%	0%	0%



GAMBAR 4. 129. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PROVINSI JATIM

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut responden di Provinsi Jabar rata-rata responden menjawab sangat setuju (22%) dan setuju (76%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 130. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI JABAR (N=41)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	23%	77%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	21%	74%	3%	3%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan Suku	23%	74%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	21%	77%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan warna kulit	23%	77%	0%	0%
Rata-rata	22%	76%	2%	1%

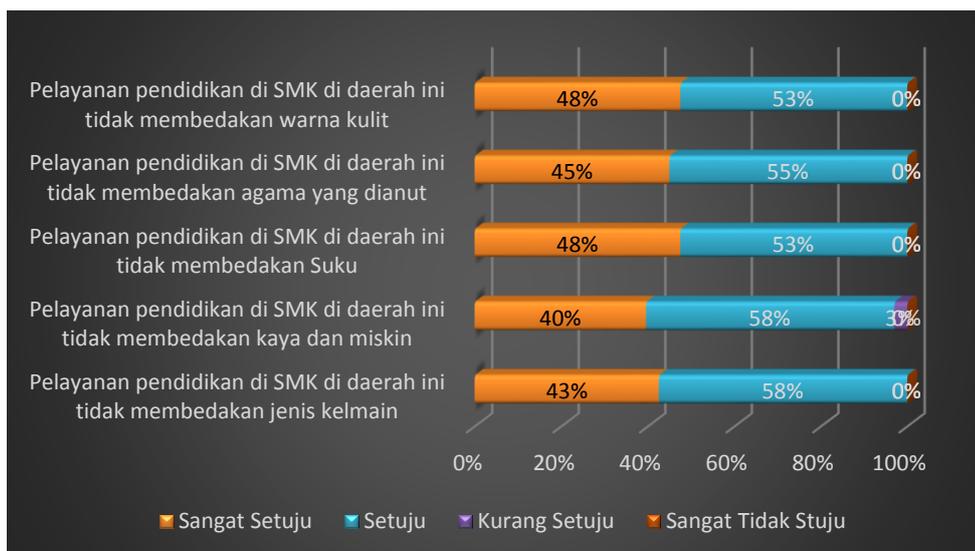


GAMBAR 4. 130. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PROVINSI JABAR

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut responden di Provinsi Kaltim rata-rata responden menjawab sangat setuju (45%) dan setuju (55%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 131. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI KALTIM (N=40)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	43%	58%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	40%	58%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan Suku	48%	53%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	45%	55%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan warna kulit	48%	53%	0%	0%
Rata-rata	45%	55%	1%	0%

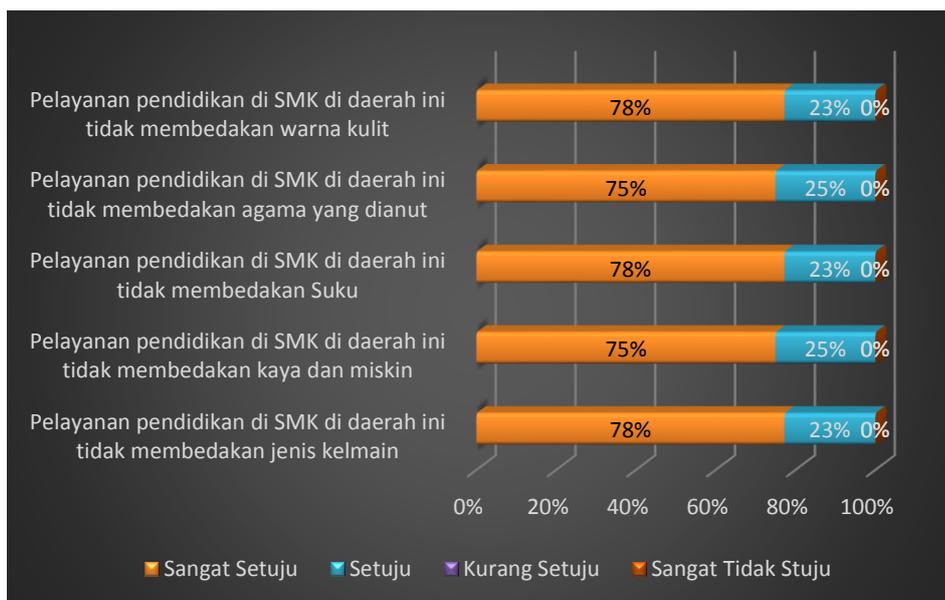


GAMBAR 4. 131. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PROVINSI KALTIM

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut responden di Provinsi NTB rata-rata responden menjawab sangat setuju (77%) dan setuju (24%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 132. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI NTB (N=40)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	78%	23%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	75%	25%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan Suku	78%	23%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	75%	25%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan warna kulit	78%	23%	0%	0%
Rata-rata	77%	24%	0%	0%

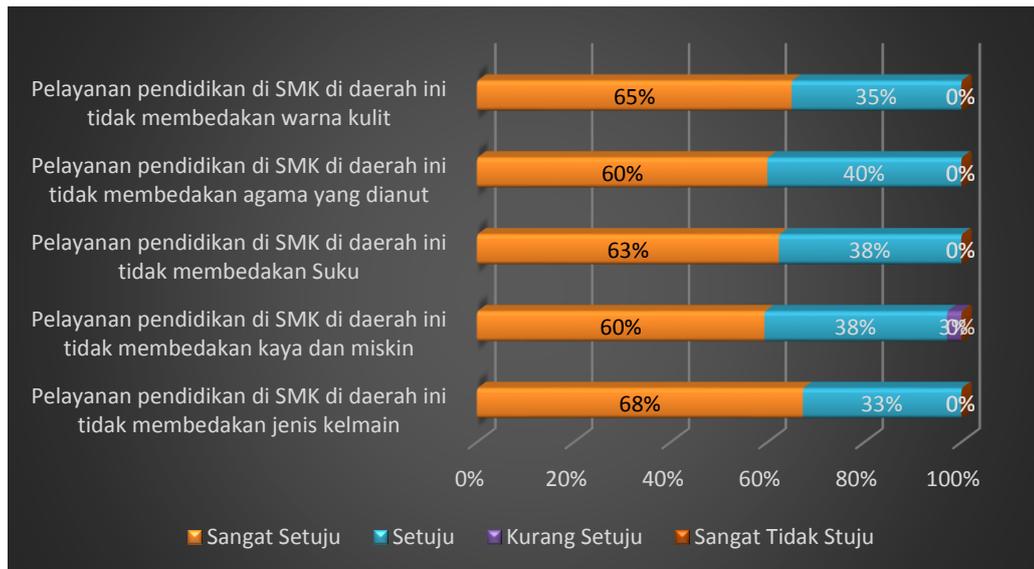


GAMBAR 4. 132. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PROVINSI NTB

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut responden di Provinsi NTT rata-rata responden menjawab sangat setuju (63%) dan setuju (37%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 133. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI NTT (N=41)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	68%	33%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	60%	38%	3%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan Suku	63%	38%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	60%	40%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan warna kulit	65%	35%	0%	0%
Rata-rata	63%	37%	1%	0%

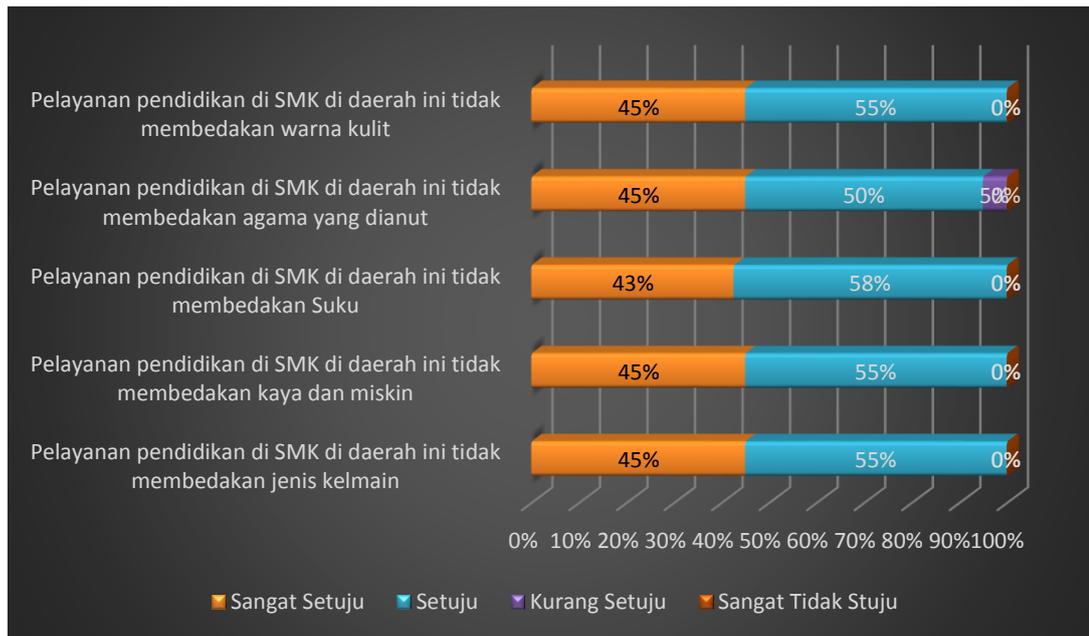


GAMBAR 4. 133. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PROVINSI NTT

Kesetaraan pelayanan pendidikan pada Pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut responden di Provinsi Sumbar rata-rata responden menjawab sangat setuju (45%) dan setuju (55%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 134. KESETARAAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN RESPONDEN PROVINSI SUMBAR (N=40)

Aspek Kesetaraan Memperoleh Pelayanan Pendidikan	% Responden menjawab			
	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Sangat Tidak Setuju
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan jenis kelamin	45%	55%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan kaya dan miskin	45%	55%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan Suku	43%	58%	0%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan agama yang dianut	45%	50%	5%	0%
Pelayanan pendidikan di SMK di daerah ini tidak membedakan warna kulit	45%	55%	0%	0%
Rata-rata	45%	55%	1%	0%



GAMBAR 4. 134. KESETARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PROVINSI SUMBAR

5. Keterjaminan Memperoleh Pelayanan Pendidikan

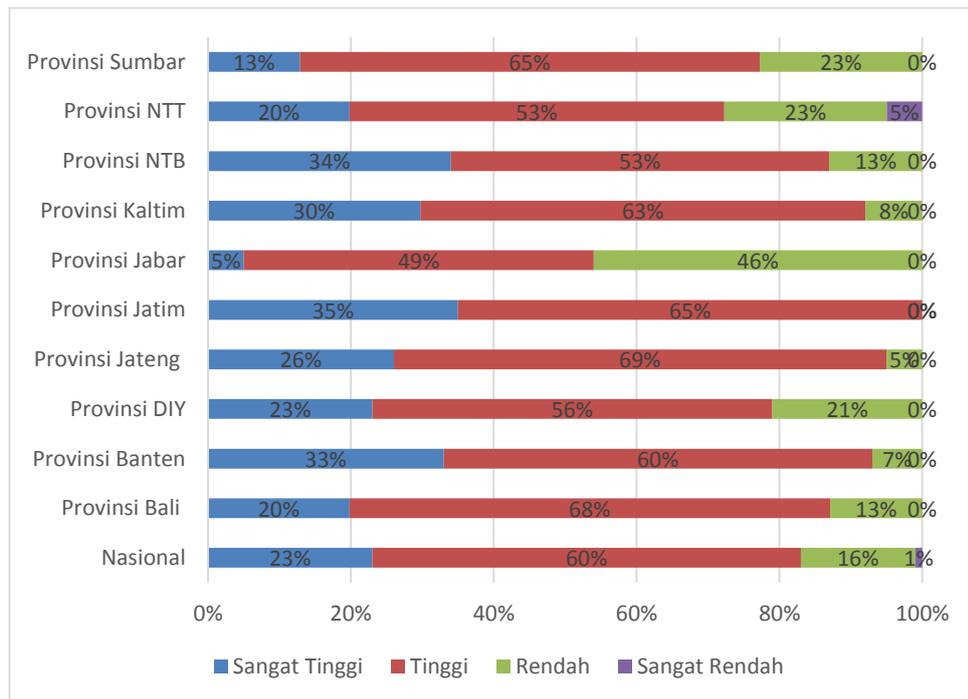
a. Keterjaminan Memperoleh Pelayanan Pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Data penelitian yang diperoleh untuk keterjaminan memperoleh pelayanan pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurut responden secara Nasional rata-rata responden menjawab sangat tinggi (23%) dan tinggi (60%).

Sedangkan jika dilihat dari tiap provinsi dijabarkan sebagai berikut: Provinsi Bali responden yang menjawab Sangat Tinggi (20%) dan Tinggi (68%), Provinsi Banten responden yang menjawab Sangat Tinggi (33%) dan Tinggi (60%), Provinsi DIY responden yang menjawab Sangat Tinggi (23%) dan Tinggi (56%), Provinsi Jateng responden yang menjawab Sangat Tinggi (26%) dan Tinggi (69%), Provinsi Jatim responden yang menjawab Sangat Tinggi (35%) dan Tinggi (65%), Provinsi Jabar responden yang menjawab Sangat Tinggi (5%) dan Tinggi (49%), Provinsi Kaltim responden yang menjawab Sangat Tinggi (30%) dan Tinggi (63%), Provinsi NTB responden yang menjawab Sangat Tinggi (34%) dan Tinggi (53%), Provinsi NTT responden yang menjawab Sangat Tinggi (20%) dan Tinggi (53%), Provinsi Sumbar responden yang menjawab Sangat Tinggi (13%) dan Tinggi (65%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 135. KETERJAMINAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK PAUD

Wilayah	% Responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah
Nasional	23%	60%	16%	1%
Provinsi Bali	20%	68%	13%	0%
Provinsi Banten	33%	60%	7%	0%
Provinsi DIY	23%	56%	21%	0%
Provinsi Jateng	26%	69%	5%	0%
Provinsi Jatim	35%	65%	0%	0%
Provinsi Jabar	5%	49%	46%	0%
Provinsi Kaltim	30%	63%	8%	0%
Provinsi NTB	34%	53%	13%	0%
Provinsi NTT	20%	53%	23%	5%
Provinsi Sumbar	13%	65%	23%	0%



GAMBAR 4. 135. KETERJAMINAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK PAUD

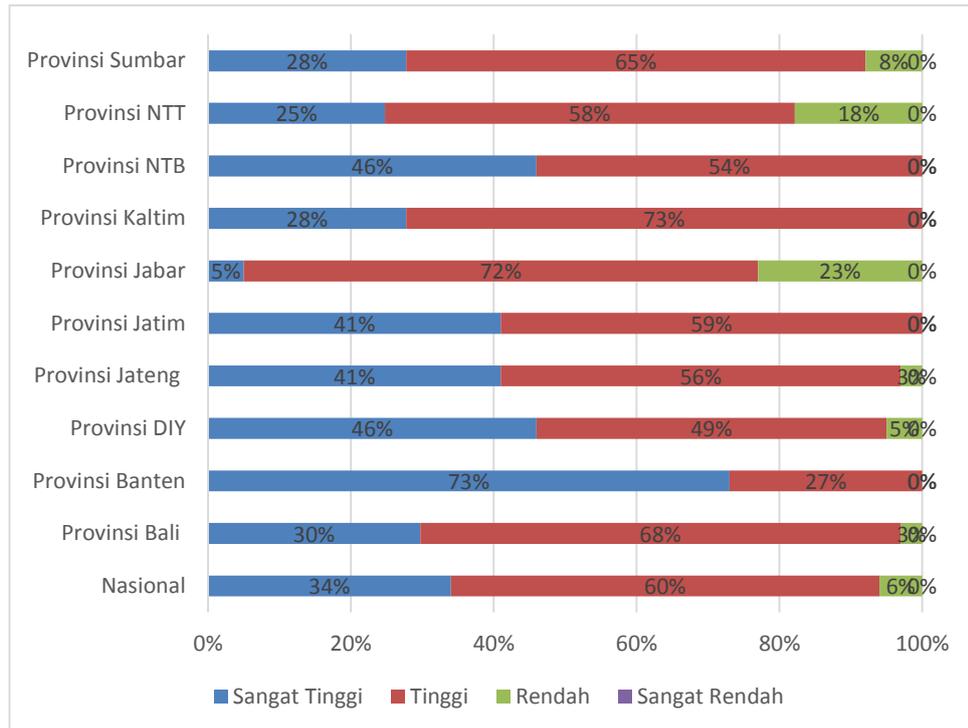
b. Keterjaminan Memperoleh Pelayanan Pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD)

Data penelitian yang diperoleh untuk keterjaminan memperoleh pelayanan pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD) menurut responden secara Nasional rata-rata responden menjawab sangat tinggi (34%) dan tinggi (60%).

Sedangkan jika dilihat dari tiap provinsi dijabarkan sebagai berikut: Provinsi Bali responden yang menjawab Sangat Tinggi (30%) dan Tinggi (68%), Provinsi Banten responden yang menjawab Sangat Tinggi (73%) dan Tinggi (27%), Provinsi DIY responden yang menjawab Sangat Tinggi (46%) dan Tinggi (49%), Provinsi Jateng responden yang menjawab Sangat Tinggi (41%) dan Tinggi (56%), Provinsi Jatim responden yang menjawab Sangat Tinggi (41%) dan Tinggi (59%), Provinsi Jabar responden yang menjawab Sangat Tinggi (5%) dan Tinggi (72%), Provinsi Kaltim responden yang menjawab Sangat Tinggi (28%) dan Tinggi (73%), Provinsi NTB responden yang menjawab Sangat Tinggi (46%) dan Tinggi (54%), Provinsi NTT responden yang menjawab Sangat Tinggi (25%) dan Tinggi (58%), Provinsi Sumbar responden yang menjawab Sangat Tinggi (28%) dan Tinggi (65%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 136. KETERJAMINAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SD

Wilayah	% Responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah
Nasional	34%	60%	6%	0%
Provinsi Bali	30%	68%	3%	0%
Provinsi Banten	73%	27%	0%	0%
Provinsi DIY	46%	49%	5%	0%
Provinsi Jateng	41%	56%	3%	0%
Provinsi Jatim	41%	59%	0%	0%
Provinsi Jabar	5%	72%	23%	0%
Provinsi Kaltim	28%	73%	0%	0%
Provinsi NTB	46%	54%	0%	0%
Provinsi NTT	25%	58%	18%	0%
Provinsi Sumbar	28%	65%	8%	0%



GAMBAR 4. 136. KETERJAMINAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SD

c. Keterjaminan Memperoleh Pelayanan Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)

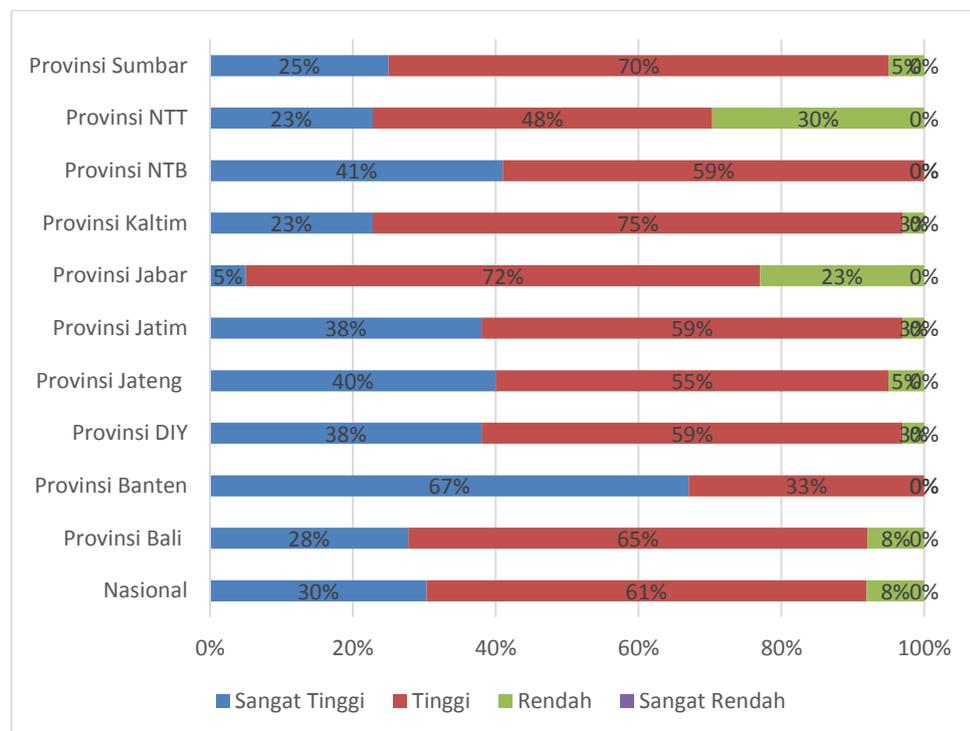
Data penelitian yang diperoleh untuk keterjaminan memperoleh pelayanan pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut responden secara Nasional rata-rata responden menjawab sangat tinggi (30%) dan tinggi (61%).

Sedangkan jika dilihat dari tiap provinsi dijabarkan sebagai berikut: Provinsi Bali responden yang menjawab Sangat Tinggi (28%) dan Tinggi (65%), Provinsi Banten responden yang menjawab Sangat Tinggi (67%) dan Tinggi (33%), Provinsi DIY responden yang menjawab Sangat Tinggi (38%) dan Tinggi (59%), Provinsi Jateng responden yang menjawab Sangat Tinggi (40%) dan Tinggi (55%), Provinsi Jatim responden yang menjawab Sangat Tinggi (38%) dan Tinggi (59%), Provinsi Jabar responden yang menjawab Sangat Tinggi (5%) dan Tinggi (72%), Provinsi Kaltim responden yang menjawab Sangat Tinggi (23%) dan Tinggi (75%), Provinsi NTB responden yang menjawab Sangat Tinggi (41%) dan Tinggi (59%), Provinsi NTT responden yang menjawab Sangat Tinggi (23%) dan Tinggi (48%),

Provinsi Sumbar responden yang menjawab Sangat Tinggi (25%) dan Tinggi (70%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 137. KETERJAMINAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SMP

Wilayah	% Responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah
Nasional	30%	61%	8%	0%
Provinsi Bali	28%	65%	8%	0%
Provinsi Banten	67%	33%	0%	0%
Provinsi DIY	38%	59%	3%	0%
Provinsi Jateng	40%	55%	5%	0%
Provinsi Jatim	38%	59%	3%	0%
Provinsi Jabar	5%	72%	23%	0%
Provinsi Kaltim	23%	75%	3%	0%
Provinsi NTB	41%	59%	0%	0%
Provinsi NTT	23%	48%	30%	0%
Provinsi Sumbar	25%	70%	5%	0%



GAMBAR 4. 137. KETERJAMINAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SMP

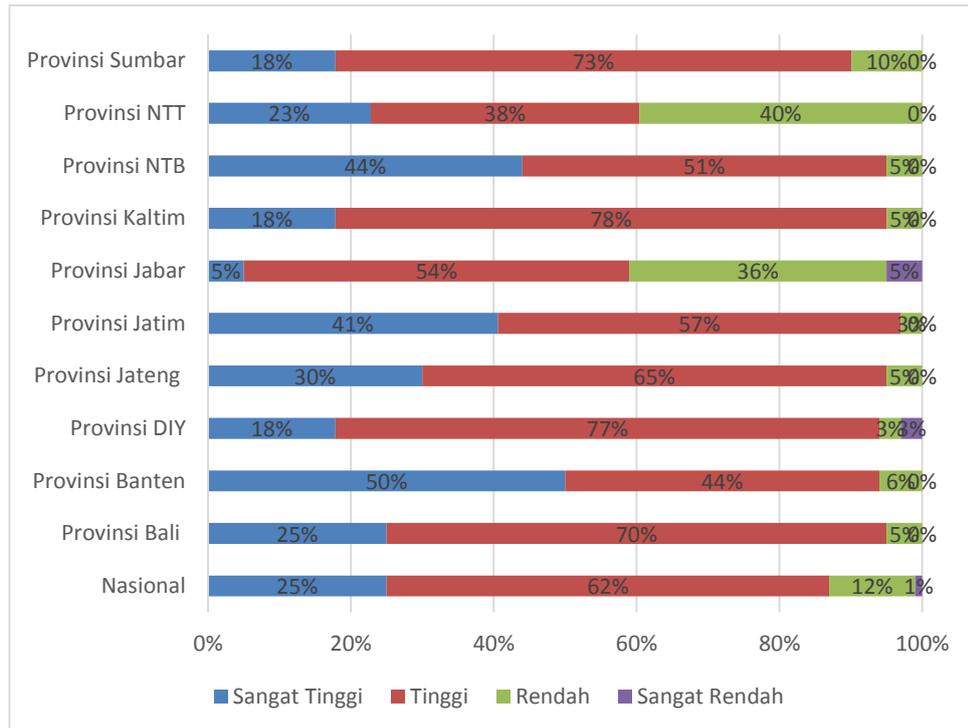
d. Keterjaminan Memperoleh Pelayanan Pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)

Data penelitian yang diperoleh untuk keterjaminan memperoleh pelayanan pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut responden secara Nasional rata-rata responden menjawab sangat tinggi (25%) dan tinggi (62%).

Sedangkan jika dilihat dari tiap provinsi dijabarkan sebagai berikut: Provinsi Bali responden yang menjawab Sangat Tinggi (25%) dan Tinggi (70%), Provinsi Banten responden yang menjawab Sangat Tinggi (50%) dan Tinggi (44%), Provinsi DIY responden yang menjawab Sangat Tinggi (18%) dan Tinggi (77%), Provinsi Jateng responden yang menjawab Sangat Tinggi (30%) dan Tinggi (65%), Provinsi Jatim responden yang menjawab Sangat Tinggi (41%) dan Tinggi (57%), Provinsi Jabar responden yang menjawab Sangat Tinggi (5%) dan Tinggi (54%), Provinsi Kaltim responden yang menjawab Sangat Tinggi (18%) dan Tinggi (78%), Provinsi NTB responden yang menjawab Sangat Tinggi (44%) dan Tinggi (51%), Provinsi NTT responden yang menjawab Sangat Tinggi (23%) dan Tinggi (38%), Provinsi Sumbar responden yang menjawab Sangat Tinggi (18%) dan Tinggi (73%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 138. KETERJAMINAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SMA

Wilayah	% Responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah
Nasional	25%	62%	12%	1%
Provinsi Bali	25%	70%	5%	0%
Provinsi Banten	50%	44%	6%	0%
Provinsi DIY	18%	77%	3%	3%
Provinsi Jateng	30%	65%	5%	0%
Provinsi Jatim	41%	57%	3%	0%
Provinsi Jabar	5%	54%	36%	5%
Provinsi Kaltim	18%	78%	5%	0%
Provinsi NTB	44%	51%	5%	0%
Provinsi NTT	23%	38%	40%	0%
Provinsi Sumbar	18%	73%	10%	0%



GAMBAR 4. 138. KETERJAMINAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SMA

e. Keterjaminan Memperoleh Pelayanan Pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

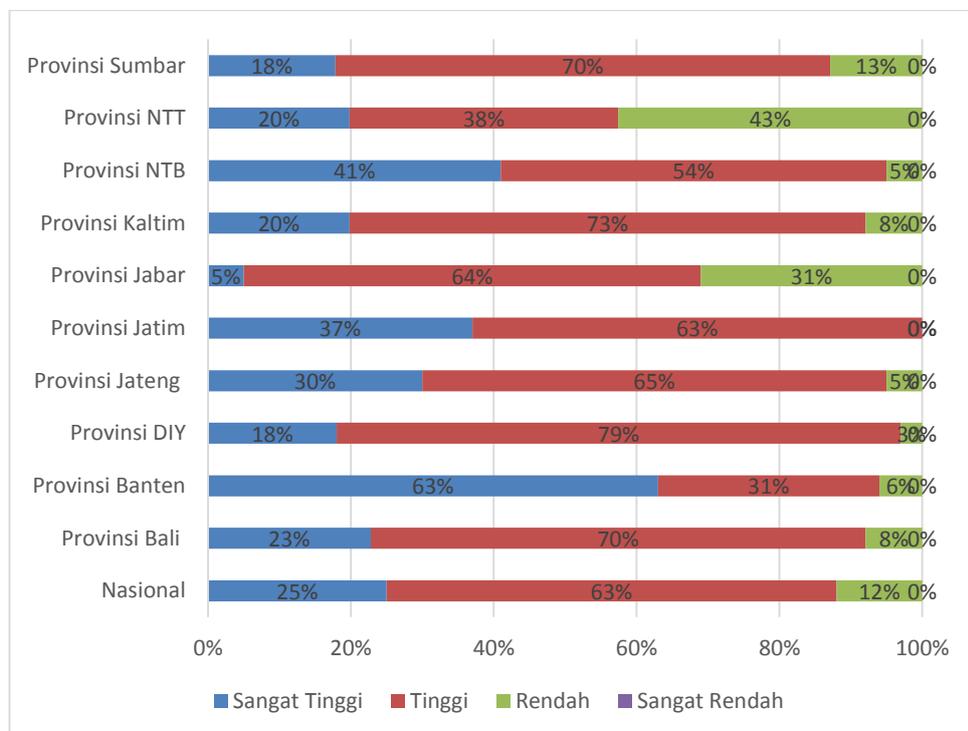
Data penelitian yang diperoleh untuk keterjaminan memperoleh pelayanan pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut responden secara Nasional rata-rata responden menjawab sangat tinggi (25%) dan tinggi (63%).

Sedangkan jika dilihat dari tiap provinsi dijabarkan sebagai berikut: Provinsi Bali responden yang menjawab Sangat Tinggi (23%) dan Tinggi (70%), Provinsi Banten responden yang menjawab Sangat Tinggi (63%) dan Tinggi (31%), Provinsi DIY responden yang menjawab Sangat Tinggi (18%) dan Tinggi (79%), Provinsi Jateng responden yang menjawab Sangat Tinggi (30%) dan Tinggi (65%), Provinsi Jatim responden yang menjawab Sangat Tinggi (37%) dan Tinggi (63%), Provinsi Jabar responden yang menjawab Sangat Tinggi (5%) dan Tinggi (64%), Provinsi Kaltim responden yang menjawab Sangat Tinggi (20%) dan Tinggi (73%), Provinsi NTB responden yang menjawab Sangat Tinggi (41%) dan Tinggi (54%), Provinsi NTT responden yang menjawab Sangat Tinggi (20%) dan Tinggi (38%), Provinsi

Sumbarresponden yang menjawab Sangat Tinggi (18%) dan Tinggi (70%). Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

TABEL 4. 139. KETERJAMINAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SMK

Wilayah	% Responden menjawab			
	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah
Nasional	25%	63%	12%	0%
Provinsi Bali	23%	70%	8%	0%
Provinsi Banten	63%	31%	6%	0%
Provinsi DIY	18%	79%	3%	0%
Provinsi Jateng	30%	65%	5%	0%
Provinsi Jatim	37%	63%	0%	0%
Provinsi Jabar	5%	64%	31%	0%
Provinsi Kaltim	20%	73%	8%	0%
Provinsi NTB	41%	54%	5%	0%
Provinsi NTT	20%	38%	43%	0%
Provinsi Sumbar	18%	70%	13%	0%



GAMBAR 4. 139. KETERJAMINAN MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN UNTUK SMK

A. KESIMPULAN

1. Secara umum citra pendidikan bila dilihat dari ketersediaan pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dinilai tinggi, kecuali untuk pendidikan keluarga dan pendidikan anak cerdas. Citra pendidikan yang dinilai dari ketersediaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan menunjukkan bahwa Sekolah Dasar (SD) memiliki ketersediaan paling tinggi sebesar 93%, kemudian disusul Pendidikan Anak Usia Dini (90%), Sekolah Menengah Pertama (87%), Sekolah Menengah Atas (82%), Sekolah Menengah Kejuruan (75%), Pendidikan Tinggi Agama Islam (74%), Pendidikan Tinggi Teknik (62%), Pendidikan Tinggi IPA (61%), Pendidikan Nonformal (60%), Pendidikan Tinggi Non Islam (59%), Pendidikan Tinggi Sosial (59%), Pendidikan Khusus Anak Cacat (43%), Pendidikan untuk keluarga (29%), dan terakhir ketersediaan Pendidikan Khusus Anak Cerdas (23%). Hal ini menunjukkan terdapat sejumlah layanan pendidikan tertentu yang ketersediaannya masih membutuhkan peningkatan, terutama pendidikan tinggi teknik, pendidikan tinggi IPA, pendidikan non formal, pendidikan tinggi non Islam, pendidikan tinggi sosial, pendidikan khusus anak cacat, pendidikan untuk keluarga dan pendidikan khusus anak cerdas.
2. Citra pendidikan bila dilihat dari keterjangkauan masyarakat dalam memperoleh pendidikan juga dinilai tinggi. Sebanyak 75% responden menyatakan bahwa masyarakat dapat menjangkau untuk memperoleh pendidikan di PAUD, sebanyak 90 % terjangkau untuk sekolah di SD, sebanyak 84 % terjangkau untuk sekolah di SMP, sebanyak 76 % terjangkau untuk sekolah di SMA, sebanyak 68 % terjangkau untuk sekolah di SMK. Bila di lihat dari lokasi sekolah, 84% responden menyatakan terjangkau untuk mencapai lokasi SD. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat tidak mengalami kesusahan dalam menjangkau lokasi sekolah baik pada tingkat pendidikan dasar sampai tinggi. Walaupun begitu masih ada beberapa lokasi yang masih terkendala oleh kondisi alam, lingkungan dan sarana prasarana penunjang lainnya.
3. Citra pendidikan bila dilihat dari kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat juga mendapat penilaian tinggi. Sebanyak 85% responden menyatakan pelayanan pendidikan di PUAD tinggi, 85%

responden menyatakan pelayanan di SD tinggi, 87% responden menyatakan pelayanan di SMP tinggi, 86% responden menyatakan pelayanan di SMS tinggi, dan 82% responden menyatakan pelayanan di SMK tinggi. Hal ini menunjukkan citra pendidikan sudah relatif positif dari aspek kurikulum, kompetensi guru, manajerial kepala sekolah, sarana prasarana, pembiayaan, evaluasi, dan kompetensi lulusan baik dari aspek pengetahuan maupun sikap dan karakter.

4. Citra pendidikan secara umum jika dilihat dari kesetaraan pelayanan pendidikan oleh masyarakat sudah menunjukkan nilai yang sangat tinggi. Rata-rata kesetaraan pelayanan PAUD sudah mencapai 98%, jenjang SD rata-rata kesetaraan pelayanan mencapai 99%, jenjang SMP rata-rata mencapai 99%, jenjang SMA rata-rata mencapai 99%, dan SMK rata-rata mencapai 99%. Hal ini menunjukkan kesetaraan pelayanan pendidikan yang tidak membedakan jenis kelamin, tidak membedakan kaya dan miskin, tidak membedakan Suku, tidak membedakan agama yang dianut, dan tidak membedakan warna kulit benar-benar dicitrakan positif oleh masyarakat.
5. Citra pendidikan jika dilihat dari keterjaminan memperoleh pelayanan pendidikan sudah menunjukkan nilai yang sangat tinggi. Pada jenjang PAUD rata-rata keterjaminan pelayanan mencapai 93%, jenjang SD mencapai 94%, jenjang SMP rata-rata mencapai 91%, jenjang SMA rata-rata mencapai 87%, dan SMK rata-rata mencapai 88%. Hal ini menunjukkan keterjaminan masyarakat memperoleh pelayanan pendidikan telah dicitrakan secara positif oleh masyarakat.

B. REKOMENDASI

1. Pemerintah melalui Kemendikbud perlu melakukan terobosan dalam memenuhi ketersediaan pelayanan pendidikan untuk Pendidikan Tinggi Teknik, Pendidikan Tinggi IPA, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Tinggi Non Islam, Pendidikan Tinggi Sosial, Pendidikan Khusus Anak Cacat, Pendidikan untuk keluarga, dan Pendidikan Khusus Anak Cerdas mengingat pendidikan tersebut dicitrakan relatif masih rendah oleh masyarakat. Penyediaan jalur, jenjang, jenis pendidikan yang cukup menjamin keadilan masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang layak.
2. Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan pembinaan secara terus-menerus terhadap sekolah-sekolah di provinsi dengan sistem pendidikan yang belum maju, terutama pada aspek kurikulum, kompetensi guru,

manajerial kepala sekolah, pengawas, sarana prasarana, pembiayaan, evaluasi, pengelolaan dan kompetensi lulusan.

3. Dinas pendidikan kabupaten/kota perlu melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang pendidikan mengingat keterjangkauan pelayanan pendidikan pada aspek pembiayaan pada jenjang SMA dan SMK masih dicitrakan rendah oleh masyarakat. Dukungan pemerintah daerah provinsi/kota/kabupaten dalam pembiayaan pendidikan sangat mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam mencapai prestasi optimal. Selain itu pada Dinas Pendidikan perlu adanya ***Bidang Pendidikan Masyarakat dan Keluarga*** karena pentingnya pendidikan keluarga atau masyarakat.
4. Sekolah-sekolah di provinsi dengan sistem pendidikan yang belum maju perlu melakukan pelatihan-pelatihan dengan didampingi oleh sekolah mitra yang lebih maju sehingga kualitas pelayanan pendidikan terutama yang menyangkut tentang kurikulum, kompetensi guru, pemilihan materi ajar, penilaian dan evaluasi pembelajaran sehingga sekolah tersebut dapat dicitrakan secara positif oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bowen, D.E. and Lawler, E.E., "The empowerment of service workers: what, why, how and when", *Sloan Management Review*, Vol. 33 No. 3, 1992
- Depdiknas, *Undang-undang no 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Depdiknas; *Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*
- Goetsch, Davis D L; Davis, Stanley B; *Quality Management; Introduction Total Quality Management for Production, Processing, and Service; Fift Edition; Pearson, Prentice Hall; 2006*
- Handy Irawan D. *Sepuluh Prinsip Kepuasan Pelanggan; Paradigma Baru Merebut Hati Pelanggan Untuk Memenangkan Persaingan; Elex Media Komputindo. 2000*
- Hoy, Wayne K., dkk., *Educational Administration*, McGraw Hill Companies, 2001.
- Kotler, Philip; Fox F.A; Karen; *Strategic Marketing for Educational Institutions; Prentice Hall, Inc New Jersey; 1995*
- Lashley, C. "Research issues for employee empowerment in hospitality operations", *International Journal of Hospitality Management*, Vol. 15 No. 3, 1996
- Lashley, C. and McGoldrick, "The limits of empowerment a critical assessment of human resource strategy for hospitality operations", *Empowerment in Organizations*, Vol. 2 No. 3, 1994
- Lembaga Administrasi Negara; *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) Penerbit Lembaga Administrasi Negara, 1991*
- Maurizia Tov; *Good Policy; World Bank , 2011*
- Parasuraman, Zeithaml Valarie; Berry Leonard; *Delivering Quality Service; Nalancing Customer Perceptions and Expectations; The Free Press; 1990*
- Pastor, J. (1996), "Empowerment: what it is and what it is not", *Empowerment in Organizations*, Vol. 4 No. 2, pp. 5-7.
- Rob Vos; *Education and Development; Prentice Hall, Inc New Jersey; 1995*

Unesco; Educational Quality; <http://www.timesofmalta.com/articles/view/20081128/education/what-is-quality-education>

Unicef (2000), *Defining Quality in Education*; A paper presented by UNICEF at the meeting of The International Working Group on Education Florence, Italy June 2000